



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1120, 2020

KEMEN-PUPR. Rencana Strategis. Tahun 2020-2024.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan peraturan mengenai Rencana Strategis Kementerian/Lembaga telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tahun 2020 – 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020 – 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
2. Menteri adalah menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi kinerja, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan sasaran pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu, efektif, efisien,

dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pasal 3

- (1) Renstra meliputi uraian tentang kondisi, potensi dan permasalahan, visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, program, sasaran program, kegiatan dan sasaran kegiatan, keluaran kegiatan, target capaian, serta pendanaan.
- (2) Sasaran strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam Renstra harus dijabarkan ke dalam sasaran kegiatan pada masing-masing unit kerja dan unit pelaksana teknis sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Pasal 4

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditetapkan oleh Menteri setiap tahun.

Pasal 5

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Data dan informasi kinerja Renstra yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan satu kesatuan dengan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Menteri melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setiap tahun.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pimpinan unit organisasi yang menyusun Renstra dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT TAHUN 2020-2024

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Visi pembangunan nasional di dalam RPJMN 2015 – 2019, yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong telah dijabarkan dalam tiga dimensi strategi pembangunan nasional, yaitu Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, serta Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang didukung oleh kondisi yang terkait dengan aspek politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Di dalam pencapaian visi tersebut, selama periode 2015-2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) telah memberikan kontribusi yang signifikan pada upaya pencapaian kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas, penyediaan perumahan dan permukiman yang layak dan produktif, dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional serta peningkatan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan merupakan upaya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan sinergis dalam memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan

generasi masa depan, dengan mempertimbangkan pada arah pembangunan yang pencegahan dan adaptif perubahan iklim, serta pengurangan resiko bencana. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan diperlukan keterpaduan antara 3 (tiga) pilar yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kemudian diperkuat dengan dimensi kelembagaan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan secara umum tercermin dalam indikator-indikator antara lain: (1) indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan dampak ekonomi; (2) tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi masyarakat marginal/minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang berkembang di masyarakat; dan (3) dampak terhadap kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem (keanekaragaman hayati).

Selanjutnya, Pengarusutamaan Gender (PUG) diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (orang lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya) yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan.

Upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan infrastruktur beserta dukungan bagi penyelenggaraan pembangunan yang terdiri dari pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), penyelenggaraan jalan, pembangunan permukiman, pembangunan perumahan, fasilitasi pembiayaan perumahan, pembinaan jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan, pembinaan SDM, pengendalian dan pengawasan serta tata kelola penyelenggaraan pembangunan.

Secara makro pembangunan infrastruktur secara keseluruhan telah memberikan dampak ekonomi, baik pada tahap konstruksi pembangunan infrastruktur maupun pada operasi infrastruktur. Dampak ekonomi pada tahap konstruksi terlihat misalnya dari peningkatan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan. Investasi infrastruktur pada tahun 2017 sebesar Rp 126,8 Triliun telah memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,06% dengan nilai tambah yang dihasilkan Rp 146,9 Triliun. Sedangkan pada tahun 2018 investasi infrastruktur sebesar Rp 157,8 Triliun telah memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,28% dengan nilai tambah yang dihasilkan Rp 184,4 Triliun. Adapun dampak ekonomi pada tahap operasi infrastruktur yaitu Investasi infrastruktur pada tahun 2017 sebesar Rp 49,3 Triliun telah memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,38% dengan nilai tambah yang dihasilkan Rp 52,2 Triliun. Sedangkan pada tahun 2018 investasi infrastruktur sebesar Rp 92,3 Triliun telah memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,65% dengan nilai tambah yang dihasilkan Rp 94,8 Triliun.

1.1.1 Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Selama periode 2015 – 2019, pengelolaan SDA secara umum ditujukan bagi tercapainya sasaran-sasaran untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi. Pengelolaan SDA dilaksanakan melalui konservasi SDA untuk menjaga fungsi dan kapasitas tampung sumber-sumber air serta peningkatan kapasitas sumber-sumber air, pendayagunaan SDA untuk memenuhi kebutuhan air bagi kehidupan sehari-hari masyarakat serta kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, dan pengendalian daya rusak air untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan regulasi dalam pengelolaan SDA.

Konservasi SDA yang dilaksanakan melalui pembangunan dan rehabilitas/peningkatan bendung/waduk/embung/bangunan penampung air lainnya serta restorasi sungai, revitalisasi danau dan konservasi rawa. Capaian hingga akhir tahun 2019 meliputi: Bendungan/waduk yang telah terbangun sebanyak 61 buah, terdiri dari 16 bendungan lanjutan periode sebelumnya dan 45 bendungan baru; Embung dan bangunan penampung air lainnya yang telah terbangun sebanyak 1.212 buah; Bendungan/ waduk yang telah direhabilitasi/ditingkatkan sebanyak 16 buah; Embung dan bangunan penampung air lainnya yang telah direhabilitasi/ditingkatkan sebanyak 240 buah; dan Danau yang direvitalisasi sebanyak 21 buah.

Pendayagunaan SDA yang dilaksanakan melalui pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana air baku, beserta peningkatan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Capaian hingga akhir tahun 2019 meliputi: Sarana prasarana pengelolaan air baku yang telah terbangun dan telah ditingkatkan fungsinya sebanyak 30,70 m³/detik; Sarana dan prasarana pengelolaan air baku yang telah direhabilitasi sebanyak 11,07 m³/detik; Jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pusat telah dibangun sepanjang 2163,87 Km; Jaringan irigasi rawa yang telah dibangun sepanjang 1.080,20 Km; Jaringan irigasi tambak yang telah dibangun sepanjang 119,90 Km; Jaringan irigasi air tanah yang telah dibangun sepanjang 295,80 Km; Jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pusat telah direhabilitasi sepanjang 6.329,95 Km; Jaringan irigasi rawa yang telah direhabilitasi sepanjang 5.139,62 Km; Jaringan irigasi tambak yang telah direhabilitasi sepanjang 764,83 Km; Jaringan irigasi air tanah yang telah direhabilitasi sepanjang 720,11 Km; Jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pusat yang dilakukan operasi dan pemeliharaan sepanjang 51.312 Km; Jaringan irigasi rawa yang dilakukan operasi dan pemeliharaan sepanjang 14.770 Km; Jaringan irigasi air tanah yang dilakukan operasi dan pemeliharaan sepanjang 478 Km.

Pengendalian daya rusak air telah dilaksanakan melalui penanganan pada kawasan yang terkena dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, dan abrasi pantai. Capaian hingga akhir tahun 2019 meliputi: *Breakwater / seawall* dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dipelihara sepanjang 174,30 Km; Jumlah sungai yang telah dinormalisasi dan tanggul yang telah

dibangun/ditingkatkan sepanjang 810,94 Km; dan kawasan yang terlindungi dari daya rusak air seluas 61.904,03 Ha.

Hasil pembangunan telah meningkatkan ketersediaan air, baik untuk kebutuhan irigasi maupun air baku, antara lain meliputi:

1. Kapasitas/daya tampung bangunan air sebanyak 13,80 miliar m³;
2. Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk mencapai 12,32%;
3. Kapasitas air baku nasional sebanyak 30,70 m³/detik.

Kontribusi hasil pembangunan SDA bagi pencapaian kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi tercermin dari pemanfaatan hasil pembangunan SDA, antara lain:

1. Peningkatan luas panen padi, menurut data BPS luas panen padi di Indonesia tahun 2018 diperkirakan mencapai sebesar 10,90 juta hektar.
2. Peningkatan kapasitas terpasang pada IPA SPAM yang disediakan melalui sarana dan prasarana air baku telah memberikan dampak bagi peningkatan cakupan pelayanan air minum bagi penduduk (Rumah Tangga/RT).
3. Pengembangan potensi PLTA pada waduk-waduk telah meningkatkan kapasitas PLTA pada waduk dan meningkatkan kontribusi pada kapasitas pembangkit terpasang. Secara keseluruhan kapasitas pembangkit terpasang pada tahun 2014 sebesar 53 GW meningkat menjadi 62,6 GW pada tahun 2018.
4. Sejumlah kawasan yang terlindungi dari bahaya dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, dan abrasi pantai telah memberikan kontribusi bagi terlindunginya sejumlah lahan produktif, kawasan wisata, industri, perumahan, permukiman dan bangunan serta properti lainnya, termasuk perlindungan terhadap penduduk dalam melaksanakan aktivitas sosial dan ekonominya.

1.1.2 Penyelenggaraan Jalan

Selama periode 2015 - 2019, penyelenggaraan jalan yang meliputi pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan secara umum ditujukan bagi peningkatan konektivitas dan memperkuat daya saing infrastruktur, dan lebih khusus ditujukan untuk mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional mendukung sislognas dan konektivitas nasional serta membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan industri prioritas, kawasan strategis pariwisata nasional, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.

Pencapaian pembangunan penyelenggaraan jalan hingga akhir tahun 2019 meliputi:

1. Jalan Nasional yang dipelihara sepanjang 47.017 km.

2. Jalan Nasional yang ditingkatkan kapasitasnya sepanjang 3.277,21 Km.
3. Jalan Nasional baru yang dibangun berupa jalan paralel perbatasan, jalan akses ke kawasan strategis, dan jalan akses membuka isolasi di beberapa wilayah sepanjang 3.843,38 km.
4. Jembatan yang dipelihara sepanjang 445.875,00 m.
5. Jembatan yang ditingkatkan sepanjang 15.068,23 m.
6. Jembatan baru yang dibangun mencapai sepanjang 58.002,55 m
7. Jalan Bebas Hambatan (Jalan Tol) yang telah dibangun sepanjang 1.298,49 Km, sepanjang 115,53 km dikerjakan oleh Pemerintah dan selebihnya dikerjakan oleh swasta.

Pembangunan dan pemeliharaan jalan hingga akhir tahun 2019 telah menghasilkan kondisi mantap jalan nasional mencapai 92,81% dan tingkat aksesibilitas jalan nasional mencapai 87%. Dengan kondisi tersebut maka arus transportasi, logistik, barang dan jasa antar wilayah semakin efisien. Di sisi lain dengan adanya pembangunan jalan baru, sejumlah wilayah telah memiliki akses transportasi yang dapat mempercepat arus dan menurunkan biaya logistic, di samping membuka isolasi beberapa wilayah. Gambaran singkat tentang hasil pembangunan jalan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sejumlah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang telah terkoneksi Jalan Nasional dan Jalan Bebas Hambatan
2. Sejumlah Kawasan Strategis untuk kepentingan ekonomi, seperti Kawasan Ekonomi Khusus, telah memiliki akses langsung dan/atau lebih cepat ke jalan nasional.
3. Hasil pembangunan jalan meningkatkan kontribusi terhadap daya saing global. Laporan yang dirilis oleh *World Economic Forum* (WEF) tahun 2019, Indonesia berada pada peringkat ke 50 dari 141 negara dalam indeks daya saing global. Pencapaian di dukung oleh salah satu pilar Infrastruktur yaitu *Quality of Roads* pada peringkat 60, meningkat dari tahun 2014 yang berada pada peringkat 72.

Hasil pembangunan jalan meningkatkan kontribusi terhadap *Logistic Performance Indeks* (LPI). Laporan yang dirilis oleh World Bank tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat 46 dari 161 negara dengan peringkat infrastruktur pada peringkat ke 54, meningkat dari tahun 2014 yang berada pada peringkat ke 53 dengan infrastruktur pada posisi ke 56.

1.1.3 Pembangunan Permukiman

Selama periode 2015 – 2019, pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman ditujukan untuk pemenuhan layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”. Untuk mencapai tujuan tersebut,

pengembangan infrastruktur permukiman difokuskan pada pemenuhan akses layanan air minum yang layak bagi masyarakat, pengembangan kawasan permukiman yang layak huni bagi masyarakat melalui penataan permukiman kumuh, dan pemenuhan akses layanan sanitasi yang layak bagi masyarakat. Usaha pencapaian tujuan melalui fokus pembangunan tersebut dilakukan oleh kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta. Pencapaian pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman hingga akhir tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Cakupan pelayanan air minum nasional meningkat sebesar 5,21% yaitu dari 84,06% pada akhir tahun 2014 menjadi 89,27% (BPS, 2019 diolah Bappenas) di akhir tahun 2019. Dari angka tersebut, akses air minum layak pada jaringan perpipaan (JP) sebesar 20,18% secara nasional di akhir tahun 2019. Selain melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemenuhan akses layanan air minum yang layak bagi masyarakat juga didukung dari peningkatan jumlah PDAM yang sehat. Sampai akhir tahun 2019, jumlah PDAM sehat meningkat dari 196 (53,3%) PDAM sehat di tahun 2015 menjadi 224 (58,9%) PDAM sehat pada tahun 2019.
2. Sampai akhir tahun 2019 kegiatan pengembangan kawasan permukiman telah mampu menurunkan luas kawasan permukiman kumuh perkotaan sebesar 32.222 hektar (83,84%) dari 38.431 hektar permukiman kumuh pada tahun 2014. Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman juga dilaksanakan di kawasan Perdesaan Prioritas Nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pada kawasan permukiman perdesaan. Selain itu telah dilaksanakan pula dukungan pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman di perbatasan negara, kawasan strategis pariwisata nasional, pulau-pulau kecil terluar, dan kawasan rawan bencana. Pembangunan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan juga dilakukan melalui pendampingan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.
3. Pemenuhan akses layanan sanitasi yang layak bagi masyarakat dilakukan melalui pengembangan penyehatan lingkungan permukiman yang berupa pengelolaan air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan. Pembangunan infrastruktur air limbah melalui kolaborasi multistakeholder telah berkontribusi bagi peningkatan cakupan pelayanan air limbah secara nasional sebesar 11,21% dari baseline 66,23% (BPS, 2014 diolah Bappenas) menjadi 77,44% (BPS, 2019 diolah Bappenas) di akhir tahun 2019. Selaras dengan pembangunan infrastruktur air limbah, akses persampahan perkotaan juga mengalami peningkatan dari baseline 46,40% (BPS, 2013 diolah Bappenas) menjadi 60,63% (BPS, 2016 diolah Bappenas). Selain itu, capaian penanganan drainase lingkungan juga telah mencapai 100% dari target luas genangan yang tertangani sebesar 4.655 hektar.
4. Kegiatan pembinaan dan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan bertujuan untuk mencapai terwujudnya bangunan gedung yang tertib dan andal meliputi pembinaan dan pengawasan penataan bangunan pada 507 Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Bangunan Gedung terdiri dari Bangunan Gedung Hijau, Bangunan Mitigasi Bencana serta Bangunan Pusaka, Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Fasilitasi

Ruang Terbuka Publik, serta Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan dalam rangka dukungan pengembangan infrastruktur strategis antara lain Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Pendukung Asian Games 2018, dan penugasan strategis lainnya.

5. Dalam pencapaian tujuan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman, pada tahun 2019 terdapat amanat pengembangan sarana prasarana pendidikan, olahraga dan pasar untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia selaras dengan tujuan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman. Dukungan tersebut terdiri atas jumlah atas sarana prasarana sekolah sebanyak 1.467 sekolah, sarana prasarana madrasah sebanyak 143 sekolah, 14 lembaga PTN, 1 lembaga PTKIN, 4 venue olahraga PON Papua, 8 gedung pasar, dan 7.175 m2 penanganan pasca bencana di Papua dan Maluku.

1.1.4 Pembangunan Perumahan

Selama periode 2015 – 2019, pembangunan perumahan ditujukan untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang. Pencapaian pembangunan perumahan hingga akhir tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyediaan rumah baru sejumlah 107.967 unit melalui kegiatan pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus, dan bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya;
2. Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejumlah 700.641 unit;
3. Bantuan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) yang melayani 119.612 unit rumah MBR; serta
4. Penurunan *backlog* rumah MBR dilakukan melalui fasilitasi pembiayaan hunian layak, melalui pemberian subsidi dan bantuan pembiayaan perumahan yang meliputi FLPP, SSB, BP2BT, dan SBUM. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Hunian Layak mencapai 1.014.825 unit (FLPP, SSB dan BP2BT) dan SBUM sejumlah 707,212 unit.

Kegiatan pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR merupakan bagian dari capaian Program Sejuta Rumah yang di-*launching* oleh Presiden pada tahun 2015. Secara kumulatif, dengan peran serta seluruh stakeholder, melalui pelaksanaan Program tersebut tercatat telah dilakukan penyediaan 4.800.170 unit rumah layak huni di Indonesia pada periode tahun 2015 – 2019, 71,37% diantaranya merupakan rumah yang diperuntukkan bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Di samping melaksanakan pembangunan fisik, Kementerian PUPR juga melakukan upaya pengoptimalan peran *stakeholder* non-Pemerintah dan Pemda

dalam melaksanakan penyediaan perumahan di Indonesia. Diantara upaya tersebut adalah pembentukan dan pembinaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembinaan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh pemda, pendampingan penerapan kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan, pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang melaksanakan pembangunan perumahan, pembinaan kepada pemda yang melaksanakan pembangunan perumahan dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), serta mendorong implementasi kebijakan hunian berimbang.

Pada periode tahun 2015-2019, antara lain terdapat 34 pemerintah provinsi dan 322 pemerintah kabupaten/kota yang telah membentuk/menerbitkan SK Pokja PKP, 19 pemerintah provinsi dan 136 pemerintah kabupaten/kota yang telah menyusun dokumen RP3KP yang merupakan acuan Daerah dalam melaksanakan pembangunan PKP, serta telah dilaksanakan pembangunan 229.156 unit oleh pemerintah daerah melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri atas pembangunan 654 unit Rumah Khusus dan dukungan penanganan 228.502 unit Rumah Swadaya.

1.1.5 Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Selama Periode 2015 – 2019 program pengembangan infrastruktur wilayah secara umum telah menjabarkan sasaran-sasaran kegiatan dalam mendukung pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu melalui pendekatan perencanaan Wilayah Pengembangan Strategis yang telah menghasilkan berbagai masterplan/development plan sebagai acuan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk kemudian dibahas secara detail melalui agenda Pra Konsultasi Regional. Adapun pencapaian Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah hingga akhir tahun 2019 meliputi:

1. BPIW sebagaimana tercantum dalam Revisi Renstra Kementerian PUPR 2015 -2019 memiliki kontribusi terhadap pencapaian Sasaran Program untuk tahun 2019 Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran dengan indikator tingkat keterpaduan kebijakan, perencanaan, pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang PUPR dengan capaian kinerja Sasaran Program tahun 2019 sebesar 96,77% dari target 100%.
2. Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 yang merupakan acuan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR pada tahun 2015 hingga 2019 dalam rangka menjalankan amanat RPJMN 2015 – 2019;
3. Rancangan Teknokratis Renstra PUPR Tahun 2020-2024 sebagai acuan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR pada

tahun 2020 hingga 2024 dalam rangka menjalankan amanat RPJMN 2020 – 2024;

4. Rencana induk pengembangan infrastruktur PUPR sebagai arahan dan acuan dalam keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR di Pulau Kepulauan dalam rangka mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional untuk jangka menengah dan panjang dengan memperhatikan potensi dan keunggulan Wilayah Pulau Kepulauan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Adapun Rencana induk pengembangan infrastruktur PUPR yang telah disusun yaitu: (a). Pulau Sumatera; (b). Pulau Jawa-Bali (c). Pulau Kalimantan; (d). Pulau Sulawesi; (e). Pulau Nusa Tenggara; (f). Pulau Maluku; (g). Pulau Papua.
5. 35 MP dan DP Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang digunakan sebagai *tools* dalam mengarahkan pengembangan infrastruktur wilayah, dimana pendekatan pembangunan yang memadukan antara pengembangan wilayah dengan *market driven* yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memfokuskan pengembangan infrastruktur pada suatu wilayah strategis dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan kawasan strategis dan mengurangi disparitas antar kawasan;
6. 22 MP dan DP Kawasan Strategis sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur PUPR secara efektif dalam rangka mendukung Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan lain-lain dengan menterpadukan pengembangan konektivitas, sumber daya air, keciptakaryaan, dan perumahan, berdasarkan pengembangan wilayah;
7. 69 MP dan DP Kawasan Perkotaan yang merupakan kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur PUPR dalam rangka menciptakan keseimbangan kota dan meningkatkan kualitas hidup di perkotaan pada Kota Besar, Kota Sedang, Kota Baru, Kota Metropolitan, dan Kawasan Perkotaan sesuai potensi dan karakteristik kawasan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
8. 20 MP dan DP Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) merupakan kebijakan dan strategi perwujudan KPPN berbasis pengembangan wilayah yang berkelanjutan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan kebutuhan pengembangan kawasan sebagai bagian dari pusat pertumbuhan baru yang terintegrasi dengan kota-kota *outlet* sekitarnya dan *hinterland*-nya dengan dukungan infrastruktur PUPR dan Non-PUPR;
9. 2 Anjungan Cerdas (Gilimanuk-Denpasar-Padang Bai (Bali) dan Jogja-Prigi-Blitar-Malang) sebagai inkubasi kawasan dimana selain sebagai tempat beristirahat bagi pengguna jalan nasional juga diperuntukkan untuk memacu percepatan pengembangan wilayah melalui pengembangan pariwisata, pertanian, perikanan tangkap, agroindustri berbasis pemberdayaan masyarakat, dan industri sedang-kecil.

10. *Integrated Tourism Master Plan* (Danau Toba, Lombok dan Borobudur) sebagai kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur wilayah untuk meningkatkan kualitas dan akses dari infrastruktur dasar dan layanan pariwisata, dalam rangka memperkuat ekonomi lokal yang terkait dengan pariwisata, dan menarik investasi swasta di destinasi wisata pada kawasan Danau Toba, Lombok, dan Borobudur.
11. Beberapa Sistem Informasi antara lain Sibas RIPI (Sistem Informasi Database *Online* Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR), SIPRO (Sistem Informasi Pemrograman), Simonah (Sistem Monitoring Pengadaan Tanah) serta Bank data BPIW yang dibangun untuk mengintegrasikan pemrograman yang tajam dan efektif.

Beberapa dokumen perencanaan BPIW tersebut di atas merupakan rumusan Kebijakan Teknis yang digunakan sebagai arahan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah yang setiap tahunnya dilakukan melalui agenda Pra Konreg yang telah diinisiasi BPIW sejak tahun 2016 hingga 2019 dengan turut melibatkan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, Ditjen Bina Marga, Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Penyediaan Perumahan serta perwakilan Pemerintah Daerah dari Bappeda dan Dinas PUPR untuk menghasilkan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program yang sinergis antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan.

1.1.6 Pembinaan Jasa Konstruksi

Selama periode 2015–2019, pembinaan konstruksi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi dan badan usaha jasa konstruksi (*man*), pendayagunaan *supply and demand material*, dan peralatan konstruksi (*machine and material*), tertib penyelenggaraan jasa konstruksi (*methodology*), serta peningkatan investasi infrastruktur dan pasar konstruksi melalui rasio kapitalisasi konstruksi (*money*).

Pada tahun 2019, terdapat perubahan struktur organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang berdampak pada penyesuaian atau perubahan sasaran kegiatan program pembinaan konstruksi, yaitu berpindahnya sasaran kegiatan peningkatan investasi infrastruktur dan pasar konstruksi kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, serta munculnya sasaran kegiatan baru yaitu peningkatan kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi (metodologi) pada program pembinaan konstruksi.

Pencapaian pembinaan konstruksi hingga akhir tahun 2019 meliputi:

1. Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi yang diukur dari tingkat rasio kapitalisasi konstruksi selama kurun waktu 2015 –2018 telah mencapai 2.953 triliun (tercapai 88,2% dari target 88%).
2. Kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa konstruksi PUPR di tahun 2019 mencapai 97,23% dari target 70%.

3. Peningkatan penerapan manajemen mutu, Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3), dan administrasi kontrak yang diukur melalui kenaikan tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi pada 339 satker (tercapai 43,57% dari target 40%).
4. Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang berkinerja baik sebanyak 1.749 BUJK (tercapai 256,83% dari target 184%).
5. Utilitas produk unggulan berupa produk industri beton pracetak yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur telah mencapai 41,28 juta m³ (baru tercapai 12,62% dari target 15%).
6. Kerjasama dan pemberdayaan dalam pelatihan tenaga kerja konstruksi terlaksana sebanyak 23.346 angkatan (tercapai 304,79% dari target 159%).
7. SDM penyedia jasa konstruksi yang kompeten mencapai 1.158.818 orang (tercapai 42,08% dari target 27%).

1.1.7 Pengawasan dan Akuntabilitas

Selama periode 2015 – 2019, pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah dilaksanakan secara maksimal untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan efek berganda (*multiplier effects*) untuk produktivitas sektor ekonomi dan kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu tercapainya tujuan tersebut melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Pencapaian peningkatan pengawasan dan akuntabilitas hingga akhir tahun 2019, antara lain:

1. Level *Internal Audit Capability Model* (IA-CM) telah mencapai Level 3 dengan catatan berdasarkan Quality Assurance oleh BPKP.
2. Kualitas pengawasan kinerja dan keuangan di Kementerian PUPR telah mencapai 88,43%.

Pencapaian tersebut diukur dari rata-rata hasil Skor Hasil Peer Review Internal proses AREPP terhadap Inspektorat, Skor Hasil Evaluasi PKPT, LHA (Audit Kinerja) yang ditindaklanjuti tepat waktu, LHA (Audit Kinerja) yang ditindaklanjuti tuntas, Persentase jumlah satker di wilayah Inspektorat dengan Nilai Temuan Kerugian Negara < 1% Nilai DIPA pada LHA (Audit Kinerja/Audit Ketaatan), Persentase jumlah satker dengan hasil Evaluasi Pelaksanaan SPIP "memadai" berdasarkan Form 10, KMA Audit Kinerja, Rata-Rata Skor Hasil Evaluasi SAKIP terhadap Unit Eselon I.

1.1.8 Penelitian dan Pengembangan

Selama periode 2015 – 2019, penelitian dan pengembangan difokuskan pada upaya untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR dalam menciptakan dan mengembangkan teknologi dan rekomendasi kebijakan untuk digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan infrastruktur PUPR

seiring dengan tuntutan pembangunan infrastruktur PUPR yang semakin meningkat. Kondisi capaian penelitian dan pengembangan hingga akhir tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi dan rekomendasi kebijakan mencapai 75%
2. Peningkatan pemanfaatan teknologi terapan sebanyak 147 unit
3. Peningkatan pemanfaatan rekomendasi kebijakan sebanyak 53 naskah
4. Peningkatan kualitas layanan teknis kepada stakeholders mencapai 80%.

1.1.9 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selama periode 2015 – 2019, pengembangan sumber daya manusia ditujukan bagi terwujudnya ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kompeten, profesional, qualified, dan berintegritas melalui pengembangan karir dan kompetensi. Pengembangan difokuskan pada upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Persyaratan Jabatan. Pencapaian pengembangan sumber daya manusia hingga akhir tahun 2019 meliputi:

1. Peningkatan ASN yang Terdidik telah mencapai 894 orang;
2. Peningkatan ASN yang Terlatih telah mencapai 29.619 orang;
3. Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja telah mencapai 15.874 orang.

1.1.10 Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Selama periode 2015 – 2019, peningkatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya difokuskan peningkatan kualitas administrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien untuk mendukung kinerja penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Pencapaian peningkatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya hingga akhir tahun 2019 meliputi:

1. Nilai Laporan Kinerja Pemerintah sebesar 72,90 yang merupakan hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB tahun 2019.
2. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian mendapatkan Opini WDP pada tahun 2015 dan 2018, serta Opini WTP pada tahun 2016, 2017, dan 2019.
3. Transparansi Pelaksanaan Program mencapai 100% dengan outcome yang diukur dari publikasi profil informasi anggaran Kementerian PUPR di website www.pu.go.id berupa *Midterm Review* Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, Rencana Kerja,

DIPA, Perjanjian Kinerja, RKA-KL dan Laporan Kinerja Kementerian PUPR yang dapat diakses oleh semua pihak.

4. Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai mencapai 96,54% dengan *outcome* yang diukur dari adanya sistem informasi pegawai yang bisa diakses oleh semua pegawai, keterbukaan dalam seleksi jabatan, tingkat ketepatan layanan mutasi pegawai, dan sistem rekrutmen pegawai secara terbuka.
5. Fasilitasi Produk Hukum dan Bantuan Hukum mencapai 95,47% dengan *outcome* yang diukur dari persentase peraturan yang berhasil diproses melalui mekanisme yang telah diatur dan persentase perkara yang menang di pengadilan
6. Tingkat layanan informasi publik mencapai 143,79% dengan *outcome* yang diukur dari Penilaian Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat, Survey persepsi publik, Survey Kepuasan Pengguna Layanan Informasi Publik Kementerian PUPR, Survey persepsi publik terhadap kinerja Kementerian PUPR, dan Media Monitoring".

1.1.11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada akhir tahun 2019, pencapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PUPR meliputi:

1. Tingkat kenyamanan bekerja mencapai 92,80% dengan *outcome* yang diukur dari survei yang telah dilakukan kepada para pegawai sebagai pengguna sarana dan prasarana mengenai 4 (empat) kriteria yaitu kepuasan kebersihan, kepuasan keamanan, ketertiban parkir, serta penggunaan energi dan air. Untuk tahun 2020 -2024, ditambahkan 1 (satu) kriteria yaitu Pemanfaatan Ruang Kerja Kantor untuk mengukur IKP/IKU (Outcome) Tingkat Kenyamanan Bekerja"
2. Tingkat Layanan Data dan Teknologi Informasi mencapai 131.84% yang diukur dari tingkat pemanfaatan data (spasial, statistik dan audio visual) dan tingkat layanan teknologi informasi (*Virtual Private Server*, email PU-Net, PU-Net Hotspot, pengunjung domain pu.go.id, aplikasi yang dilakukan asesmen). Pencapaian tersebut melebihi dari target 100% disebabkan adanya himbauan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi kepada setiap Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi di seluruh provinsi agar seluruh pelaku pengadaan wajib menggunakan email resmi @pu.go.id dan semakin banyak Unit Organisasi yang menggunakan PU-Net *Hotspot* sebagai media aplikasi yang dikembangkan.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1 Lingkungan Strategis dan Amanat Pembangunan

1. Pertambahan Jumlah Penduduk dan Urbanisasi

Berdasarkan proyeksi BPS, penduduk Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 284,829,000 jiwa dengan populasi terbanyak masih tetap berada di Pulau Jawa yang diperkirakan akan mencapai 158,738,000 jiwa, disusul oleh Pulau Sumatera (62,898,600 jiwa), Pulau Sulawesi (21,019,800 jiwa), Pulau Kalimantan (18,082,600 jiwa), Pulau Bali dan Nusa Tenggara (15,932,400 jiwa), Pulau Papua (4,793,900 jiwa), dan Kepulauan Maluku (3,363,700 jiwa).

Penduduk Indonesia diprediksi akan berkembang di wilayah perkotaan, artinya proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan akan tumbuh lebih banyak dibanding penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan. Penduduk perkotaan pada tahun 2025 akan mencapai 60% dari seluruh populasi. Hal ini juga sebagai dampak adanya pertumbuhan urbanisasi di Indonesia yang saat ini mencapai 4,1%.

Urbanisasi diklaim dapat mendorong konsumsi rumah tangga, investasi, hingga pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi. Namun demikian urbanisasi harus dikelola dengan baik, pertumbuhan urbanisasi yang relatif tinggi harus diiringi dengan kemampuan tata kelola dan infrastruktur yang memadai.

2. Indeks Daya Saing yang Masih Rendah

Indeks Daya Saing Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian indeks daya saing infrastruktur mengalami sedikit penurunan yaitu pada peringkat 50 di tahun 2019 bila dibandingkan pada tahun 2014 -2015 yang berada pada peringkat 34. Di Kawasan ASEAN saja, indeks daya saing infrastruktur masih tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Perkembangan Peringkat *Ease of Doing Business* Indonesia terus meningkat sejak tahun 2015 yang berada pada peringkat 114 menjadi peringkat 72 pada tahun 2018 dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2019 pada peringkat 73.

Berdasarkan *World Happiness Report* yang diterbitkan oleh UN SDSN (*United Nation Sustainable Development Solutions Network*) pada tahun 2015, Indeks Kebahagiaan Masyarakat Indonesia masuk dalam peringkat 74. Namun pada tahun 2016 peringkat Indonesia menurun menjadi peringkat 79. Hingga pada tahun 2018, peringkat Indonesia semakin menurun pada peringkat 96 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu peringkat 92.

3. Perubahan Iklim dan Kerentanan Bencana

Perubahan iklim yang terus terjadi telah menimbulkan berbagai bencana yang berdampak lebih luas dan trennya terus mengalami peningkatan, seperti banjir,

longsor, kekeringan, badai dan kebakaran lahan. Sebagai contoh, banjir di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan tahun 2019 dipicu oleh cuaca ekstrem, yaitu curah hujan yang sangat tinggi (di atas 300 milimeter per hari). Dampak perubahan iklim terhadap kejadian bencana juga ditambah dengan perubahan tutupan lahan di daerah hulu yang mengakibatkan banjir bandang dan perubahan pola debit aliran sungai.

Di sisi lain, posisi Indonesia yang berada pada *Ring of Fire* (Cincin Api Pasifik atau Lingkaran Api Pasifik) yang merupakan area tumbuhnya 75% seluruh gunung api di dunia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat rentan terhadap bencana dari aktivitas geologi yaitu gempa bumi, tsunami dan gunung meletus.

Gambar 1.1 Indonesia 'Center of Excellence' Geologi



Sumber: Pusat Vulkanologi Dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi, 2018

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 jumlah kejadian bencana sebanyak 7.996 kejadian, yaitu tahun 2015 (1.694 kejadian), 2016 (2.306 kejadian), 2017 (2.862 kejadian), 2018 (1.134 kejadian), terdiri dari bencana Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang/Abrasi, Puting Beliung, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Gempa Bumi, Tsunami, dan Letusan Gunung Api.

Laporan dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNISDR) berdasarkan data dari *Center for Research on The Epidemiology of Disasters* (CREED), *International Disaster Database* (EM-DAT) menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan jumlah korban jiwa akibat bencana alam tertinggi sepanjang tahun 2018. Dari total 10.373 korban jiwa di seluruh dunia, 4.535 orang diantaranya dari Indonesia. Data ini menunjukkan tingginya kerentanan bencana di Indonesia sekaligus masih lemahnya upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Kejadian bencana alam tidak hanya merenggut korban jiwa namun juga menimbulkan kerusakan infrastruktur yang telah terbangun yang berdampak

pada terganggunya kehidupan masyarakat baik secara sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan. Terlebih, bencana yang terjadi di Indonesia tidak hanya bencana alam, namun juga bencana non alam seperti wabah penyakit, kegagalan teknologi serta bencana sosial seperti kerusuhan, dan lainnya.

4. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (termasuk orang lanjut usia, pemuda, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya), yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan.

Tujuan umum dari pelaksanaan PUG-PUPR adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PU dan Perumahan Rakyat telah responsif gender, artinya tidak adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan infrastruktur PU dan Perumahan Rakyat serta dalam meningkatkan partisipasi dan ikut mengontrol proses pembangunan infrastruktur PU dan Perumahan Rakyat.

Kementerian PUPR telah melaksanakan pemenuhan 7 prasyarat pelaksanaan PUG, yang terdiri dari: (1) Komitmen; (2) Penyusunan Kebijakan; (3) Penyusunan Kelembagaan; (4) Peningkatan Sumber Daya (SDM dan PPRG); (5) Analisis Gender; (6) Data Terpilah; (7) Peran Masyarakat. Selain itu juga telah melaksanakan inovasi pelaksanaan PUG.

Permasalahan keadilan dan kesetaraan gender dapat diidentifikasi dari isu kesenjangan gender. Isu kesenjangan gender dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR dapat kita lihat di masing-masing unit organisasi dari aspek “Turbinbanglakwas” yaitu pada aspek pengaturan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria), aspek pembinaan/pemberdayaan (a.l. pelatihan, sosialisasi), pembangunan/pelaksanaan (a.l. perencanaan Teknik, rehabilitasi, peningkatan pembangunan), aspek pengawasan (a.l. monitoring-evaluasi, manajemen pengendalian).

5. Pembangunan Kewilayahan

Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah yang ditandai dengan: (a) tingkat kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 18,0 persen, hampir dua kali lipat dari Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang sebesar 10,3 persen; (b) adanya ketipangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan sebesar 0,317 dan perkotaan sebesar 0,392; (c) terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI

terutama Pulau Jawa; (d) terbatasnya sarana dan Prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa, dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan; dan (e) belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa, dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.

Tabel 1.1 Capaian Beberapa Indikator Makro Pembangunan

No	Wilayah Pembangunan	Kemiskinan*		Tingkat Pengangguran** (%)	Kesenjangan antarprovinsi Dalam Wilayah (Indeks Williamson)***
		Jumlah (ribu jiwa)	%		
1	Papua	1,137.3	26.34	4.2	0.15
2	Maluku	402.2	13.21	7.6	0.08
3	Nusa Tenggara	1,882.3	17.94	3	0.19
4	Sulawesi	2,009.9	10.23	4.9	0.17
5	Kalimantan	974.2	5.93	5	0.69
6	Sumatera	5,851.1	10.03	5.2	0.48
7	Jawa Bali	12,886.9	8.31	5.8	0.73

Sumber: RPJMN 2020-2024

Lebih lanjut, faktor penyebab ketimpangan antarwilayah antara lain belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang ditandai dengan (1) rendahnya kemajuan operasional Pusat Pertumbuhan Wilayah (KEK, KI, Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas, dan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas); (2) lemahnya konektivitas dari dan menuju Pusat Pertumbuhan; dan (3) belum berkembangnya kawasan strategis kabupaten.

Selain itu kesenjangan antarwilayah di daerah perkotaan disebabkan oleh pengelolaan urbanisasi yang belum optimal, ditandai dengan 1 persen pertambahan jumlah populasi penduduk perkotaan hanya dapat meningkatkan 1,4 persen PDB. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan ini memberikan tekanan pada kawasan perkotaan, menurunkan kesejahteraan, dan menyebabkan sebagian wilayah perkotaan tidak layak huni.

Penurunan kesenjangan antarwilayah dan kondisi perkotaan dapat diatasi melalui pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Namun, kondisi saat ini belum tercapai, karena: (1) baru sekitar 3 persen dari target 1.838 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah ditetapkan sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang; (2) belum tersedianya peta dasar skala 1 : 5.000 sebagai dasar penyusunan RDTR; (3) belum berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten; dan (4) masih adanya tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang yang akan diselesaikan melalui pelaksanaan kebijakan Satu Peta yang diintegrasikan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia.

6. Visi Indonesia 2045

Indonesia diproyeksikan menjadi negara berpendapatan tinggi dan menjadi peringkat kelima negara dengan PDB terbesar di dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 tersebut ditetapkan empat pilar pembangunan yang terdiri dari: (i) Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (ii) Pembangunan ekonomi berkelanjutan; (iii) Pemerataan pembangunan; serta (iv) Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Pilar ketiga “Pemerataan Pembangunan” tersebut diimplementasikan salah satunya melalui “Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi”, di mana pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mewujudkan konektivitas antarwilayah secara fisik dan virtual, menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, menciptakan pemerataan pembangunan dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi ditandai dengan kondisi sebagai berikut:

1. Konektivitas darat diwujudkan dengan penyelesaian ruas utama jalan di seluruh pulau, jalan tol Jawa dan Sumatera, jalan perbatasan, kereta api di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, serta transportasi perkotaan berbasis rel dan kereta cepat untukantisipasi mega urban dan urbanisasi di Jawa
2. Biaya logistik tahun 2045 turun menjadi 8% PDB
3. Stok Infrastruktur meningkat menjadi 70% PDB pada tahun 2045
4. Akses masyarakat terhadap prasarana dasar dipenuhi untuk kebutuhan perumahan, air minum, sanitasi, irigasi, dan perlindungan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim

7. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's)

Sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* yang selanjutnya dituangkan di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Terdapat 17 Tujuan Global dan Sasaran Global serta Sasaran Nasional yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan yang terdiri dari:

Tujuan 1 - Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.

Tujuan 2 - Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

Tujuan 3 - Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

- Tujuan 4 - Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
- Tujuan 5 - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
- Tujuan 6 - Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
- Tujuan 7 - Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
- Tujuan 8 - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- Tujuan 9 - Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
- Tujuan 10 - Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara.
- Tujuan 11 - Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
- Tujuan 12 - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- Tujuan 13 - Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
- Tujuan 14 - Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
- Tujuan 15 - Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghenti-kan kehilangan keanekaragaman hayati.
- Tujuan 16 - Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
- Tujuan 17 - Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

8. UN Habitat III

Agenda Baru Perkotaan diadopsi pada saat Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (Habitat III) di Quito, Ekuador pada tanggal 20 Oktober 2016. Agenda ini disahkan oleh Majelis Umum PBB pada saat rapat pleno yang ke-68 dari 71 sesi pada tanggal 23 Desember 2016.

Implementasi Agenda Baru Perkotaan mendukung pelaksanaan dan penerapan *The 2030 Agenda for Sustainable Development* di daerah secara terpadu, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*), termasuk Tujuan 11 menciptakan perkotaan dan permukiman inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan.

Komitmen-komitmen Transformatif untuk Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan meliputi:

- (1) Pembangunan perkotaan berkelanjutan untuk inklusi sosial dan mengakhiri kemiskinan.
- (2) Kemakmuran dan peluang perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif untuk semua.
- (3) Pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan kota yang berketahanan.

9. Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030:

- a. Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m³/kapita/tahun;
- b. Jalan 99% mantap yang terintegrasi antar moda dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal dan menggunakan teknologi *recycle*;
- c. 100% *Smart living* (Hunian Cerdas).

Untuk mewujudkan Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 tersebut, dicapai melalui tahapan:

Tahun 2017 – 2019

1. Bendungan multi fungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 57,75 m³/kapita/tahun. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 306 Triliun.
2. Kondisi Jaringan jalan: Kondisi Jalan Mantap 94%; Pembangunan Jalan Tol 824 Km; Pembangunan Jalan Baru 1.320 Km; Pembangunan Jembatan Baru/*Fly Over* 39.000 m. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 183 Triliun (ditambah Rp 202 Triliun dari investasi swasta).
3. 78% Pelayanan Air Minum, menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 1,5% (menjadi 27.000 ha), dan 75% Pelayanan Sanitasi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 45 Triliun.
4. *Backlog* rumah bagi MBR sebesar 6,46 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 814 ribu unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 165 Triliun melalui 17% APBN/APBD dan 83% swasta/masyarakat.

Tahun 2020 – 2024

- 1) Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 68,11 m3/kapita/tahun. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 577 Triliun.
- 2) Kondisi Jaringan jalan: Kondisi Jalan Mantap 97%; Pembangunan Jalan Tol 1.500 Km; Pembangunan Jalan Baru 2.500 Km; Pembangunan Jembatan Baru/Fly Over 60.000m. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 330 Triliun (ditambah Rp 243 Triliun dari investasi swasta).
- 3) 88% Pelayanan Air Minum, menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 2,6% (menjadi 17.000 ha), dan 85% Pelayanan Sanitasi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 128 Triliun
- 4) Backlog rumah bagi MBR sebesar 5 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 3,9 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 780 Triliun melalui 20%-30% APBN/APBD dan 70%-80% swasta/masyarakat.

Tahun 2025 – 2030

- 1) Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m3/kapita/tahun. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 1.423 Triliun.
- 2) Kondisi Jaringan Jalan: Kondisi Jalan Mantap 99%; Pembangunan Jalan Tol 2.000 Km; Pembangunan Jalan Baru 3.000 Km; Pembangunan Jembatan Baru/Fly Over 70.000 m. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 448 Triliun (ditambah Rp 390 Triliun dari investasi swasta).
- 3) 100% Pelayanan Air Minum, menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 4,4% (menjadi 0 ha), dan 100% Pelayanan Sanitasi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 170 Triliun.
- 4) Zero Backlog rumah bagi MBR 3 juta unit, dicapai melalui pembangunan sebesar 4,88 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 1.220 Triliun melalui 20%-30% APBN/APBD dan 70%-80% swasta/masyarakat.

Gambar 1.2 Target Visium Tahun 2020 – 2024 dan 2030



1.2.2 Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan

1. Pengelolaan Sumber Daya Air

Tiga kegiatan Pengelolaan SDA sesuai Undang-Undang no 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yaitu Konservasi, Pendayagunaan dan Pengendalian Daya Rusak dengan didukung oleh Sistem Informasi SDA serta Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dituangkan dalam tiga Kegiatan Prioritas yaitu Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan, Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur serta Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi. Ketiga Program prioritas tersebut mempunyai isu strategis dan tantangan berbeda yang memerlukan pendekatan khusus.

Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan

Pengelolaan air tanah dan air baku di Indonesia masih diliputi beberapa tantangan mendasar: tingkat layanan penyediaan air baku yang masih rendah, permasalahan kuantitas dan kualitas air (3T: *Too much, Too little, Too dirty*), dan permasalahan pemanfaatan teknologi untuk menjamin kuantitas dan kualitas air baku yang aman dan layak secara berkelanjutan.

Kapasitas layanan infrastruktur penyedia air baku yang aman dan layak di Indonesia hingga tahun 2019 hanya mencakup 30% dari total kebutuhan air baku nasional. Kondisi ini mendorong maraknya pemanfaatan sumber air baku lain yang belum tentu aman dan layak, baik secara kuantitas maupun kualitas. Permasalahan timbul ketika sering dijumpai kualitas air tanah maupun air sungai yang digunakan masyarakat kurang memenuhi syarat sebagai air bersih, bahkan di beberapa tempat tidak layak untuk diminum karena terkontaminasi oleh bakteri dan zat kimia tertentu. Sebagai contoh, 45% air tanah di Jakarta tercemar oleh bakteri *E.coli*. Selain itu, layanan infrastruktur air baku pada daerah 3T, pulau-pulau kecil terluar (PPKT), dan daerah-daerah rawan air juga masih memerlukan pengembangan yang lebih intensif.

Peningkatan tekanan populasi dan aktivitas ekonomi di daerah-daerah aglomerasi dan kutub pertumbuhan seperti perkotaan dan kawasan strategis (KEK, KI, KSPN) juga perlu diperhatikan pemenuhan kebutuhan air bakunya melalui infrastruktur penyedia air baku. Jika ketersediaan air baku pada kawasan-kawasan tersebut tidak mencukupi kebutuhan yang ada, akan terdapat potensi ekstraksi air tanah dalam skala besar. Hal ini juga menjadi perhatian besar karena selain terdapat potensi permasalahan kualitas air tanah, permasalahan lain akibat ekstraksi air tanah dalam skala besar adalah penurunan muka tanah yang cukup signifikan di beberapa wilayah, seperti di pesisir utara Jawa.

Pemanfaatan teknologi cerdas juga dinilai masih minim untuk menjamin kuantitas dan kualitas air secara berkelanjutan. Perlu adanya pengembangan teknologi cerdas yang tepat guna seperti pengembangan SIH3 (sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi), sistem informasi sumber daya air, dan teknologi integrasi pemanfaatan aneka sumber air. Penguatan kelembagaan dan regulasi pengelolaan sumber daya air secara terpadu antara lain dengan

pengembangan *Decision Support System and Forecasting* juga masih harus dikembangkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan penyediaan air baku yang terus berkembang, termasuk pengembangan skema kerjasama pembiayaan pemerintah dan swasta.

Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi

Kapasitas tampungan air masih rendah akibat terbatasnya jumlah bendungan, embung, dan penampung air lainnya. Kapasitas tampungan air baru mencapai 13,8 miliar m³ dari target 14,7 miliar m³ pada tahun 2019. Optimalisasi bendungan menghadapi tantangan tata kelola akibat ancaman sedimentasi dan penurunan tingkat keamanan. Hal ini terkait dengan usia bendungan yang semakin tua, operasi dan pemeliharaan yang belum memadai, serta instrumen keamanan bendungan yang masih belum lengkap dan sesuai dengan standar keamanan. Rata-rata penurunan volume tampungan waduk akibat sedimentasi hingga tahun 2019 mencapai 19%, bahkan di pulau Jawa mencapai 31%.

Dari sisi pemanfaatan, fungsi multiguna bendungan belum optimal. Sebagai contoh, pemanfaatan potensi energi listrik baru mencapai 28% dari total potensi yang dapat dihasilkan. Selain itu, pasokan air irigasi dari bendungan hingga tahun 2019 baru mencapai 12,3% dari keseluruhan luas daerah irigasi.

Pengelolaan sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan dan nutrisi dihadapkan pada rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan sistem irigasi. Hal ini disebabkan, antara lain belum optimalnya sistem pemantauan dan pencatatan kerusakan infrastruktur dan pemanfaatan air secara *online* dan *real time*. Kinerja sistem irigasi juga masih rendah, terutama pada daerah irigasi yang merupakan kewenangan daerah. Rendahnya kinerja tersebut berdampak pada rendahnya efisiensi air irigasi. Upaya penyediaan infrastruktur irigasi belum diselaraskan dengan lahan pertanian baru, yang difokuskan terutama pada lahan pertanian di luar Pulau Jawa. Hal ini mempertimbangkan tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke fungsi lain dan terbatasnya lahan baru di Pulau Jawa. Walaupun di luar Pulau Jawa juga terjadi alih fungsi lahan dari pertanian padi menjadi perkebunan. Permasalahan kurangnya keahlian dan kemauan masyarakat untuk bertani juga merupakan permasalahan umum pada beberapa daerah di luar Pulau Jawa.

Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur

Untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana seperti banjir; gempa bumi; tanah longsor; dan letusan gunung berapi, dibutuhkan infrastruktur ketahanan bencana yang memadai. Dengan dukungan sistem informasi yang handal, *decision support system*, *forecasting*, *early warning*, *mitigation* dan *risk management*. Kerugian finansial akibat bencana alam dalam kurun waktu 2002-2015 di Indonesia mencapai 1,26 miliar USD per tahun (*International Disaster Database*, 2018). Risiko bencana juga semakin meningkat seiring tren urbanisasi serta perubahan iklim. Kawasan perkotaan seperti Jakarta, kota-kota pesisir utara Jawa, serta beberapa wilayah sungai prioritas menghadapi kerawanan bencana yang semakin tinggi akibat perkembangan kota dan posisinya yang berada pada zona rawan bencana. Perkembangan kota memberikan dampak ekonomi yang positif secara nasional. Namun di sisi lain,

hal ini menyebabkan tingkat keterpaparan masyarakat dan aset ekonomi terhadap bencana semakin tinggi. Fenomena ini belum didukung oleh upaya penataan ruang yang memperhatikan risiko bencana. Selain itu, tingkat keamanan infrastruktur vital perkotaan seperti transportasi, energi, dan sumber daya air masih belum memadai dalam menghadapi risiko bencana, sehingga perlu untuk disusun peta risiko bencana yang terbaru.

Secara khusus, pengembangan kawasan pesisir utara (Pantura) Pulau Jawa sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang ditunjukkan oleh sumbangan lebih dari 20% GDP Indonesia di 3 kawasan aglomerasi perkotaan, masih menghadapi beberapa tantangan. Pengembangan kawasan ini menghadapi potensi kenaikan muka air laut, banjir rob dan penurunan tanah terutama di DKI Jakarta, Pekalongan, Semarang, dan kota-kota lain khususnya di Pantai Utara Jawa. Selain itu, kawasan Pantura Jawa juga mengalami abrasi yang mengakibatkan kehilangan lahan dan degradasi ekosistem.

Selain kerentanan terhadap bencana alam, Indonesia juga dihadapkan pada meningkatnya risiko bencana lingkungan. Proses pemulihan kondisi lingkungan memerlukan waktu yang cukup lama dan sangat bergantung pada pemulihan kondisi daerah tangkapan air (*catchment area*). Upaya rehabilitasi hutan dan lahan belum mampu mengatasi laju kerusakan lahan. Di samping itu, kinerja pemulihan 15 DAS kritis dan 15 danau prioritas, serta pengelolaan kawasan rawa dan gambut masih rendah.

Mitigasi risiko bencana melalui pengembangan industri konstruksi menghadapi kendala akibat keterbatasan SDM dan belum berkembangnya ekosistem industri konstruksi. Pada sisi SDM, kemampuan mengadopsi teknologi infrastruktur tahan bencana masih terbatas. Sedangkan untuk ekosistem industri konstruksi, infrastruktur terbangun belum memenuhi standar infrastruktur yang tahan bencana.

2. Penyelenggaraan Jalan

Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan penumpang dan logistik, dihadapkan pada tantangan belum memadainya kualitas prasarana jalan serta masih kurangnya ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah. Total Panjang jaringan jalan mencapai 582.546 km, yang terdiri dari yang berstatus jalan nasional sepanjang 47.017 km, dan yang berstatus jalan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sepanjang 481.529 km. Dari aspek kualitas, terdapat ketimpangan antara jalan nasional dengan jalan daerah. Jalan nasional yang memiliki proporsi 8% dari seluruh jaringan yang ada, dengan kondisi mantap mencapai 92,81%, sementara jalan daerah yang memiliki proporsi 92% dari seluruh jaringan jalan, baru mencapai kondisi mantap sebesar 68,49% untuk provinsi, dan 58,8% untuk kabupaten/kota. Kualitas jalan yang ada juga belum ditunjang sepenuhnya dengan penyediaan kelengkapan jalan yang memadai, terutama drainase yang merupakan kelengkapan penting dalam mencegah kerusakan jalan akibat genangan air.

Pada sisi lain, ketersediaan jaringan jalan yang ada belum memadai dalam mendukung pengembangan wilayah, baik untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi maupun pemerataan pembangunan. Kurangnya ketersediaan jalan pada jalur logistik terlihat dari kinerja waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau yang baru mencapai 2,3 jam per 100 km. Ketersediaan jalan tol pada jalur utama logistik masih terbatas di sepanjang jalur Pantura Jawa. Ketersediaan jaringan jalan untuk mendukung pengembangan kawasan industri maupun pariwisata juga masih terbatas. Masih terdapat sejumlah simpul transportasi (bandara, pelabuhan, dan terminal) yang belum memiliki akses jalan yang memadai. Ketersediaan jaringan jalan pada daerah 3T termasuk pada pulau tertinggal, terluar, dan terdepan, juga masih belum memadai untuk mendukung aksesibilitas masyarakat.

3. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Isu strategis utama yang akan dihadapi dalam pembangunan infrastruktur permukiman pada tahun 2020-2024, yakni kurang komprehensifnya pembangunan dalam meningkatkan kebutuhan layanan infrastruktur permukiman. Isu strategis ini muncul dan menjadi perhatian karena dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman
- b. Kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan berbasis entitas kawasan, dimana permasalahan utama dan kebutuhan kawasan belum menjadi landasan penyelesaian masalah kawasan;
- c. Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman;
- d. Kurang optimalnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur permukiman yang telah terbangun;
- e. Terbatasnya kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman, khususnya untuk kegiatan di hilir;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung keterbatasan pendanaan; dan
- g. Kerentanan permukiman terhadap bencana, baik alam maupun non-alam (termasuk pandemi wabah penyakit), serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

4. Penyediaan Perumahan

Isu strategis penyediaan perumahan:

- a. Terdapat 45,90% rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah tidak layak huni;
- b. Semakin meningkatnya jumlah kebutuhan rumah layak dan terjangkau di wilayah perkotaan sebagai implikasi dari semakin dominannya jumlah penduduk perkotaan/urbanisasi;

- c. Kebutuhan penyediaan perumahan untuk mendukung pengembangan ibu kota negara (IKN), pusat pengembangan ekonomi baru (Kawasan Industri/KI, Kawasan Ekonomi Khusus/KEK, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/KSPN, dan lain-lain), serta pemerataan pembangunan;
- d. Kebutuhan pengembangan penyediaan dan pengelolaan *public housing* yang merupakan salah satu *Major Project* dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang difokuskan di 6 (enam) kawasan metropolitan untuk memudahkan akses penduduk perkotaan (terutama kelompok MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau, termasuk penyediaan badan pengelola dan ekosistem pendukung lainnya;
- e. Belum tersedianya sistem *rental housing* yang terintegrasi dan mendukung pengembangan sistem *public housing*;
- f. Regulasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang belum sinergis dan cenderung sentralistik;
- g. Belum tersedianya basis data dan dokumen perencanaan bidang perumahan yang akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh para *stakeholder*;
- h. Belum terdapat data sebaran dan potensi pasar perumahan MBR;
- i. Pemda belum secara konsisten menerapkan kebijakan kemudahan penerbitan izin pembangunan perumahan untuk kelompok MBR;
- j. Keterbatasan lahan yang terjangkau dan berada di sekitar pusat aktivitas/hub transportasi masal, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan milik pemerintah/pemda/BUMN/BUMD untuk pembangunan perumahan bagi MBR;
- k. Infrastruktur perumahan dan permukiman yang belum memadai dan kurang terintegrasi dengan sistem infrastruktur perkotaan/wilayah;
- l. Masih kurang terintegrasinya upaya penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan;
- m. Belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi konstruksi, material lokal, dan terbatasnya kemitraan antara lembaga penelitian teknologi perumahan dengan pengembang perumahan;
- n. Keterbatasan kapasitas pembiayaan/pendanaan pemerintah dan belum optimalnya pemanfaatan *creative financing* (KPBU, SBSN/Sukuk) untuk mengurangi *financial gap* dalam penyediaan perumahan, terutama untuk kelompok MBR.
- o. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap desain dan kehandalan bangunan untuk mengurangi resiko kegagalan konstruksi, antisipasi kerawanan bencana, serta internalisasi konsep pengarusutamaan gender dalam pembangunan perumahan.

5. Pembiayaan Infrastruktur

Isu strategis dan tantangan pembiayaan infrastruktur meliputi isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) bidang pekerjaan umum dan perumahan, dan isu strategis yang terkait dengan bidang pembiayaan perumahan.

Isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan KPBU bidang pekerjaan umum dan perumahan meliputi:

- a. Perencanaan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan masih belum mengakomodasi pendanaan di luar skema Non APBN;
- b. Belum adanya kriteria proyek KPBU untuk semua sektor di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- c. Belum efektifnya kelembagaan simpul KPBU dalam mendukung pelaksanaan KPBU;
- d. Keterbatasan dokumen KPBU yang memadai sehingga mempengaruhi kualitas proyek KPBU;
- e. Proses pelaksanaan pengadaan proyek KPBU membutuhkan waktu yang cukup lama;
- f. Dukungan kelayakan proyek dan penjaminan Pemerintah untuk proyek KPBU terbatas untuk mendanai seluruh proyek KPBU;
- g. Proyek KPBU mayoritas diikuti dan dilaksanakan oleh BUMN;
- h. Masih rendahnya komitmen Pemerintah Daerah sebagai PJPK;
- i. Ketersediaan lahan yang *clear* dan *clean* untuk proyek KPBU.

Isu strategis bidang pembiayaan perumahan meliputi:

- a. Akses MBR terutama sektor informal masih terbatas terhadap pembiayaan perumahan;
- b. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan belum terintegrasi;
- c. Skema bantuan dan/kemudahan perolehan rumah yang ada belum sesuai dengan profil dan karakteristik MBR;
- d. Kenaikan harga lahan dan rumah tidak sesuai dengan daya beli MBR;
- e. Kualitas bangunan rumah bersubsidi masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Masih besarnya gap pembiayaan antara kebutuhan pembiayaan dan ketersediaan dana jangka panjang;
- g. *Supply stock* rumah bersubsidi belum sesuai dengan kebutuhan rumah MBR;
- h. Tingginya laju urbanisasi tidak diikuti dengan penyediaan rumah yang terjangkau dan layak huni, sehingga menimbulkan permukiman kumuh.

6. Perencanaan Pembangunan Kewilayahan

Beberapa hal yang menjadi catatan berdasarkan pengalaman periode lalu dalam hal efektivitas tugas dan fungsi BPIW, antara lain terdapat *overlapping* pekerjaan antar pusat-pusat yang ada di BPIW (Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, dan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan), dimana instrumen perencanaan terlalu banyak (nasional, pulau, WPS, kawasan strategis, metropolitan, perkotaan, perdesaan) Implikasinya antara lain:

- Keterkaitan perencanaan makro-meso-mikro seringkali tidak kuat karena dijalankan secara paralel dan oleh unit kerja yang berbeda.
- Keterkaitan program dan justifikasi pemrograman belum kuat dan sering terjadi duplikasi program.
- Penguasaan materi wilayah dalam konreg masih terbatas.

Penyelesaian isu klasik pembangunan di Indonesia yaitu dengan menyeimbangkan pembangunan di seluruh wilayah untuk meminimalisir terjadinya ketimpangan antar wilayah, baik antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan (mengembangkan *urban-rural linkage*) maupun fokus pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa, dll. Untuk itu perlu untuk dilakukan penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah dan pengembangan kawasan strategis-tematik (kawasan pariwisata, perbatasan, industri, kawasan ekonomi khusus untuk percepatan pertumbuhan).

Penanganan kawasan perkotaan untuk menyelesaikan pertumbuhan ekonomi dan masalah lingkungan termasuk gagasan pemindahan ibukota menuju Pulau Kalimantan, merupakan langkah yang sangat strategis dalam mengembangkan pusat pertumbuhan baru di Indonesia.

7. Pembinaan Jasa Konstruksi

Masih Rendahnya Kompetensi Tenaga Kerja Kontruksi (TKK)

Kondisi tenaga kerja konstruksi Indonesia saat ini masih didominasi oleh TKK berpendidikan SMA ke bawah yaitu sebanyak 70% berdasarkan data BPS dari tahun 2015-2019. Sedangkan bila dilihat dari jumlah tenaga kerja yang bersertifikat masih jauh dari kebutuhan, terutama untuk proyek-proyek PUPR. Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat sebanyak 712.262 orang, dengan rincian tenaga terampil (TT) sebanyak 520.844 orang dan tenaga ahli/insinyur (TA) adalah 191.418 orang. Sedangkan kebutuhan TKK pada proyek PUPR adalah 994.000 orang TKK bersertifikat, sehingga masih terdapat gap kebutuhan sebanyak 281.738 orang. Jumlah tenaga ahli tersebut juga relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan negara lain di ASEAN. Selanjutnya dilihat dari persebarannya, tenaga kerja konstruksi, baik ahli maupun terampil, masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan belum tersebar merata di seluruh Indonesia sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa.

Melihat kondisi tersebut maka tantangan terbesar pembinaan SDM adalah melatih tenaga tidak terampil yang merupakan porsi paling besar dari profil angkatan kerja di sektor konstruksi, di samping peningkatan kualitas materi dan penyelenggaraan pelatihan serta penyederhanaan dan kemudahan di dalam proses sertifikasi yang harus mengikuti dinamika perubahan lingkungan strategis. Di sisi lain masih banyak SDM konstruksi yang belum menyadari pentingnya *Continuing Professional Development* (CPD) atau pengembangan pengetahuan dan pengalaman selama masa bekerja dalam rangka meningkatkan keterampilan dan keahlian untuk efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang dilakukannya.

Kurangnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Kurangnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi ditunjukkan oleh beberapa hal antara lain: transparansi penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa belum maksimal, kurang maksimalnya pembinaan penerapan standar kontrak kerja konstruksi, belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan penerapan SMM dan SMK3 dan peningkatan kasus kecelakaan kerja konstruksi. Berdasarkan hasil evaluasi Komite Keselamatan Konstruksi (K2), kecelakaan tersebut disebabkan utamanya oleh 2 faktor yaitu permasalahan SDM dan permasalahan peralatan. Permasalahan SDM khususnya disebabkan karena kurangnya kedisiplinan dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tidak adanya konsultan pengawas di tempat kerja pada setiap kejadian kecelakaan konstruksi. Sedangkan permasalahan peralatan utamanya disebabkan karena masih rendahnya pelaksanaan *safety factor*.

Pada bidang pengadaan barang dan jasa, terdapat banyak perubahan pengaturan sebagaimana diamanatkan oleh Perpres Nomor 16 tahun 2018. DJBK sebagai induk pembinaan konstruksi di Indonesia juga didorong untuk melakukan perubahan pengaturan dalam hal pengadaan barang dan jasa. Pengadaan yang semula dilaksanakan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang bersifat fungsional, berubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang bersifat struktural dan DJBK juga telah membentuk Balai PBJ di setiap provinsi mulai tahun 2019 yang bertujuan agar pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian PUPR dapat berjalan dengan lebih transparan, bersaing, dan akuntabel. Tantangan lain terkait pengadaan barang/jasa adalah proses pengadaan dapat berlangsung dengan cepat, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Dalam hal pengadaan barang/jasa, terdapat beberapa permasalahan antara lain ditemukannya *fraud* dan penyimpangan pada pelaksanaan lelang atau seleksi paket sehingga kurang transparan dalam penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa.

Ketidakmapanan Kelembagaan Jasa Konstruksi

Ketidakmapanan kelembagaan jasa konstruksi dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu masih lemahnya sumber daya manusia aparatur lembaga masyarakat konstruksi, rendahnya jumlah asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi yang tersertifikasi, serta pengembangan kerja sama antar lembaga yang belum optimal.

Kapasitas dan Kemampuan Badan Usaha Belum Optimal

Kapasitas dan kemampuan badan usaha yang masih belum optimal yang disebabkan antara lain oleh menurunnya jumlah BUKK konstruksi besar, belum terciptanya kondisi persaingan BUKK yang sehat, BUKK pelaksanaan proyek infrastruktur di luar negeri mengalami penurunan, serta rendahnya rasio BUKK spesialis terhadap BUKK umum. Persaingan antar BUKK masih kurang sehat, terutama antara BUKK berkualifikasi besar, menengah, dan kecil. Komposisi jumlah BUKK saat ini berbentuk piramida, dengan BUKK besar di bagian atas (BUKK kecil lebih banyak), meskipun pada periode tahun 2015-2018, jumlah BUKK berkualifikasi besar menurun 15%. Piramida tersebut mengindikasikan belum terwujudnya secara optimal kemitraan yang sinergis antar kualifikasi BUKK. BUKK kecil cenderung memiliki daya saing yang rendah dan belum mandiri, sehingga mereka tidak memiliki daya tawar yang kuat.

Selanjutnya berdasarkan jenisnya, pada tahun 2019, jumlah BUKK generalis (129.113 BUKK) masih lebih banyak dibandingkan dengan BUKK spesialis (6.042 BUKK). Perbandingan BUKK generalis-spesialis yang masih timpang tersebut mengindikasikan masih perlunya didorongnya pembentukan BUKK spesialis yang dapat lebih fokus dan profesional dalam mengerjakan pekerjaan konstruksi.

BUKK Nasional juga harus di dorong untuk meningkatkan daya saing agar mampu menguasai pangsa pasar konstruksi di dalam negeri, antara lain dengan melakukan pengembangan BUKK agar memiliki kualifikasi yang setara dalam persaingan pasar. Di sisi lain dengan semakin terbukanya peluang pasar di luar negeri, maka industri konstruksi dan BUKK Nasional juga diharapkan mampu bersaing untuk meningkatkan ekspor jasa konstruksi.

Kapasitas Rantai Pasok, Material Peralatan dan Teknologi Konstruksi yang Belum Optimal

Terkait dengan kapasitas rantai pasok, material peralatan dan teknologi konstruksi yang belum optimal, masih memiliki kelemahan antara lain ketidakseimbangan antara *supply-demand* beberapa material seperti semen, baja, aspal, dan alat berat; persebaran material dan peralatan belum merata; kurang optimalnya pelaksanaan dan penerapan teknologi *green construction*; dan lemahnya penguasaan teknologi konstruksi.

Terkait *supply* dan *demand* material konstruksi, berdasarkan data, Ditjen Bina Konstruksi, jumlah MPK utama berupa aspal, baja, beton pracetak prategang, semen, dan alat berat cenderung mengalami penurunan sekitar 6% setiap tahunnya. Sebagai contoh, tingkat pemenuhan kebutuhan material semen pada tahun 2018 baru 68,13 juta ton dari kebutuhan 69,30 juta ton. Contoh lain adalah untuk material aspal tahun 2018 yang baru tersedia 344,15 ribu ton dari kebutuhan 1.872 ribu ton. Berbagai kebutuhan material tersebut akan semakin meningkat di tahun-tahun berikutnya.

Bila dilihat dari persebarannya, material dan peralatan konstruksi di Indonesia masih belum merata ke seluruh penjuru negeri. Produksi material dan peralatan terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera saja. Hal ini menyebabkan untuk melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia memerlukan biaya yang lebih besar untuk distribusi material dan peralatan.

Isu lain terkait pemanfaatan Material Konstruksi adalah terkait dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri Pasal 61 ayat 2, terkait penggunaan Produk Dalam Negeri bahwa produk dalam negeri yang wajib digunakan harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%. Berdasarkan pada PP tersebut, Kementerian PUPR akan mengeluarkan Permen yang mengatur TKDN tersebut dengan kemungkinan nilai TKDN minimal 80%. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri sehingga untuk ke depannya proyek-proyek di lingkungan Kementerian PUPR harus didorong untuk menggunakan produk dalam negeri.

Aspek lain yang harus diperhatikan terkait rantai pasok adalah pemetaannya. Pemetaan rantai pasok sektor konstruksi di setiap provinsi di Indonesia menjadi hal yang krusial karena sistem tersebut dapat memetakan hubungan antara pemasok bahan baku, proses produksi, transportasi, sistem distribusi, termasuk di dalamnya masalah keuangan dan arus informasi dari produk. Urgensi pemetaan rantai pasok industri konstruksi dalam rangka efisiensi *supply-demand* dan distribusi material serta peralatan konstruksi. Dalam hal ini hubungan antara produsen dan pemasok menjadi *highlight* dari proses ini.

Berbagai permasalahan manajemen rantai pasok tersebut setidaknya dapat ditangani oleh beberapa pendekatan seperti penyederhanaan alur rantai pasok material dan peralatan, mengurangi variabilitas yang terdapat pada sistem rantai pasok, perbaikan data dan informasi dalam sistem rantai pasok, dan pemanfaatan material dan peralatan produksi dalam negeri. Beberapa pendekatan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam manajemen rantai pasok.

Dari segi peralatan konstruksi, permasalahan yang ditemukan adalah masih rendahnya kesadaran untuk melakukan registrasi alat berat. Berdasarkan data, dari 70.000 unit alat berat utama yang beredar, baru 28.000 unit yang teregistrasi di Kementerian PUPR atau baru 40%. Rendahnya registrasi tersebut disebabkan karena proses tersebut dirasa belum memiliki dampak yang berarti bagi pemilik alat berat sehingga pemilik enggan untuk melakukan registrasi. Untuk ke depannya, diharapkan bisa disusun kebijakan yang mendorong pemilik untuk melakukan registrasi alat berat.

Sedangkan dari segi teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan salah satu sumber daya utama dalam industri dan bisnis konstruksi sehingga perlu adanya pengembangan pemanfaatan teknologi konstruksi seperti *green construction*. Pengembangan dan inovasi teknologi baik material, peralatan maupun perangkat lunak lainnya selama ini telah dilakukan dan ke depan perlu terus ditingkatkan dan juga harus dibarengi dengan upaya peningkatan dalam pemanfaatannya.

Berbagai permasalahan terkait rantai pasok material dan peralatan konstruksi tersebut akan berdampak pada memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia dan menyebabkan ketidakseimbangan permintaan dan penawaran dari material dan peralatan konstruksi.

Ketimpangan PDRB Sektor Jasa Konstruksi Antar Daerah

Secara nasional, PDB Sektor Konstruksi pada tahun 2018-2019 mengalami pertumbuhan dengan laju 5,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun bila dirinci ke dalam PDRB antar provinsi, masih terlihat adanya kesenjangan yang cukup tinggi antar provinsi. Ketimpangan PDRB sektor jasa konstruksi antar provinsi dapat mengindikasikan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Sebagai contoh pada tahun 2018, PDRB sektor konstruksi tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 314 Triliun, sedangkan yang terendah adalah Provinsi Maluku Utara yang hanya sebesar Rp 2,4 Triliun.

Ketimpangan tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu: tidak meratanya pembangunan infrastruktur antar daerah dan perbedaan kondisi masing-masing daerah. Tidak meratanya pembangunan infrastruktur antar daerah dipengaruhi oleh persebaran tenaga kerja, material, peralatan konstruksi yang tidak merata serta aksesibilitas yang sulit menuju daerah tertentu. Untuk perbedaan kondisi masing-masing daerah dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya alam di beberapa daerah sehingga mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah tersebut, terbatasnya kondisi demografis yang terkait dengan produktifitas kerja masyarakat, tidak lancarnya mobilitas barang dan jasa, serta terbatasnya alokasi dana pembangunan di daerah.

Stok Konstruksi yang Cenderung Stagnan

Stok infrastruktur adalah angka yang menunjukkan nilai total investasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan pihak swasta dalam membangun infrastruktur, dikurangi depresiasi. Pada periode tahun 2010-2014 nilai pembiayaan infrastruktur pemerintah adalah 679 Triliun dan meningkat 3 kali lipat pada periode tahun 2015-2019 menjadi 1.820 Triliun sedangkan stok infrastruktur Indonesia kurun 2015-2017 menunjukkan gambaran yang cenderung stagnan. Jika dibandingkan dengan nilai PDB senilai 43 %. Menurut *World Bank* (1994) peningkatan stok infrastruktur secara rata-rata sebesar 1% akan berdampak pada peningkatan PDB sebesar 1%. Hal ini berarti semakin besar pembangunan infrastruktur maka semakin besar pula potensi peningkatan PDB.

Stok infrastruktur Indonesia dengan nilai sebesar 43 % dari PDB ini masih di bawah rata-rata negara maju yaitu 70%. Sejumlah negara maju yang dimaksud seperti Amerika Serikat 64%, sedangkan Cina 76 % dan Jerman 71%. Untuk itu, peningkatan pembangunan infrastruktur harus dilakukan dalam jangka menengah dan panjang agar Indonesia benar-benar bisa menjadi negara maju pada tahun 2045.

8. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menghadapi sejumlah isu strategis dan tantangan, baik dari faktor internal maupun eksternal yang antara lain meliputi:

a. Tantangan SDM Global:

- 1) *Competitive global (comfort zone menjadi competitive zone)*;
- 2) Era Revolusi Industri 4.0 (digitalisasi, kebutuhan *big data, internet of things*;
- 3) Kebutuhan SDM terampil (*skilfull*).

b. Perwujudan *World Class Government* diperlukan *SMART* ASN yang berwawasan global, menguasai IT/digital dan berbahasa asing, serta daya *networking* tinggi.

c. Pemenuhan Visi Indonesia 2020-2024, meliputi:

- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan manajemen talenta (Sistem Merit);
- 2) Percepatan dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur melalui interkoneksi infrastruktur dengan kawasan/sebaran pembangunan infrastruktur membutuhkan lebih banyak SDM Aparatur terampil dan berkeahlian.

d. *Mismatch* kompetensi lulusan program pendidikan magister dengan kebutuhan Kementerian PUPR (program studi pendidikan magister tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi masih didominasi dengan program studi non teknik).

e. Transformasi Pendidikan dan Pelatihan ke Pengembangan Kompetensi.

9. Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan

Isu strategis dan tantangan dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan terdiri dua faktor utama yaitu internal dari pihak penyelenggaraan pengawasan dan faktor eksternal.

a. Isu Strategis Internal:

- (1) Masih banyaknya temuan hasil audit terlihat dari menurunnya opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR;
- (2) Pengawasan Internal PUPR belum optimal memberikan nilai tambah bagi organisasi;
- (3) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- (4) Keterbatasan jumlah SDM;
- (5) Pengembangan teknologi informasi CACM untuk mendukung pengawasan.

b. Isu Strategis Eksternal:

- (1) Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi di tingkat Unor di Kementerian PUPR untuk mencapai *Road Map* RB Tahun 2020-2024;
- (2) Banyaknya pengaduan proses pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur bidang PUPR mengindikasikan masih rendahnya persepsi masyarakat atas kepatuhan terhadap peraturan PBJ di Lingkungan Kementerian PUPR;
- (3) Kegiatan pengawasan belum memanfaatkan Teknologi Informasi sesuai revolusi industri jilid 4.0 (*Making Indonesia 4.0*);
- (4) Adanya penugasan baru, penugasan tambahan dan direktif Presiden;
- (5) Belum adanya dukungan dan sinergi yang optimal dengan APH sebagai upaya pengawasan dan investigasi.

10. Tata Kelola Penyelenggaraan Pembangunan

Isu strategis dan tantangan dalam tata kelola penyelenggaraan pembangunan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat utamanya terkait dengan pemenuhan nilai-nilai dalam penyelenggaraan pembangunan yang harus dipenuhi sesuai dengan amanat Reformasi Birokrasi yang antara lain meliputi:

- a. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2019 masih BB (72,90). Pada periode 2015 – 2019, nilai SAKIP terus meningkat tiap tahun, namun belum bisa mencapai target Renstra 2019 dengan nilai 78. Perlu upaya konkret untuk meningkatkan nilai SAKIP terutama penerapan SAKIP sampai entitas Unit Kerja, Balai, Satker sampai dengan individu pegawai.
- b. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2019 sebesar 74,06 (BB), mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 73,42, namun masih jauh dari target nilai A (>80). Perlu upaya peningkatan penerapan Reformasi Birokrasi (RB) pada 8 area perubahan birokrasi.
- c. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kementerian menjadi dasar pemberian Opini Laporan Keuangan. Bila merujuk pada tren hasil penilaian, sejak tahun 2012 Kementerian PUPR telah memperoleh predikat Opini WTP. Namun tren ini mengalami perubahan, turun menjadi WDP di tahun 2015 dan tahun 2018, meskipun Opini WTP berhasil diraih kembali pada tahun 2019. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta peningkatan kualitas penatausahaan asset, agar terwujud Laporan Keuangan yang andal, berkualitas, dan akuntabel, sehingga Opini WTP dapat tetap dipertahankan.
- d. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) rata-rata Kementerian Tahun 2018 baru mencapai 3,05 atau pada level “Terdefinisi”. Nilai SPIP merupakan tingkat kematangan (maturitas) implementasi SPIP pada skala 1 – 5 berdasarkan penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Level “terdefinisi” yaitu telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian

tujuan organisasi. Diperlukan upaya-upaya agar level SPIP pada tingkat 5 atau “Optimum” yaitu telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer. Akuntabilitas penuh diterapkan dalam pemantauan pengendalian, manajemen risiko, dan penegakan aturan. *Self assessment* atas pengendalian intern dilakukan secara terus menerus berdasarkan analisis gap dan penyebabnya. Para pegawai terlibat secara aktif dalam penyempurnaan sistem pengendalian intern.

BAB II**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS****2.1 VISI**

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

2.2 MISI

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.3 TUJUAN

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.

2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya *smart living*, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020 – 2024. Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang tercantum dalam Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian PUPR.

Hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, yang diindikasikan dengan:

- a. Peningkatan daya saing infrastruktur, dengan indikator: (1) Peringkat Daya Saing Infrastruktur Umum dan Jalan; (2) *Global Competitiveness Index* dan Pilar Infrastruktur; (3) *Logistic Performance Index*.
- b. Peningkatan daya saing konstruksi nasional, dengan indikator Indeks Bisnis Konstruksi.
- c. Peningkatan kemudahan berusaha, dengan indikator peringkat *Ease of Doing Bussiness*.
- d. Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan pada tahap konstruksi dan operasi.
- e. Penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah, dengan indikator Koefisien Rasio Gini.
- f. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan indikator Kesejahteraan Rakyat.

Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
 - (1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
 - (2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
 - (3) Kapasitas tampung per kapita;
 - (4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
 - (1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*;
 - (2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
 - (1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
 - (2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
 - (1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
 - (2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
 - (3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
 - (4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
 - (5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
 - (6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

2.5

Target Utama Kementerian PUPR 2020-2024 (Sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan)

Selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, berikut merupakan target pembangunan infrastruktur utama Kementerian PUPR di bidang sumber daya air, konektivitas, keciptakaryaan, dan perumahan.

Tabel 2.1 Target Utama Kementerian PUPR Sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan

SUMBER DAYA AIR	KONEKTIVITAS	PERMUKIMAN	PERUMAHAN
58,5 m ³ /kapita/tahun Peningkatan Kapasitas Daya Tampung	2.500 Km Pembangunan Jalan Tol	100% Akses Air Minum Layak 80% Jaringan Pengolahan	51.340 Unit Rumah Susun
61 Unit Bendungan	3.000 Km Pembangunan Jalan Baru	90% Akses Sanitasi Layak 85% Permukiman Aspal	10.000 Unit Rumah Khusus
500 Unit Pembangunan Embung	38.328 m Pembangunan Jembatan	10.000 Ha Penanganan Permukiman Kumuh	813.660 Unit Rumah Swadaya
500.000 Ha Pembangunan Daerah Irigasi	31.053 m Pembangunan Fly Over/Underpass	100% Hunan Dengan Akses Sampah Terkelola Baik di Perkotaan	262.345 Unit P5U Perumahan
2.000.000 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi		5.555 Unit Pembangunan & Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pesisir	
50 m ³ /detik Ketersediaan Air Baku			
2.100 Km Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai			
			

BAB III

**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KELEMBAGAAN**

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Visi Dan Misi Presiden 2020 - 2024

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Agenda Pembangunan

Di dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang merupakan Prioritas Pembangunan (PN) yang akan dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun kedepan:

PN_1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

PN_2.Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.

PN_3.Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.

PN_4.Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

PN_5.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.

PN_6.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan mitigasi perubahan iklim.

PN_7.Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakan kedaulatan negara.

Sasaran Makro Pembangunan 2020 – 2024

RPJMN ke IV tahun 2020 – 2024 diformulasikan dengan menjadikan faktor kesejahteraan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan lima tahun kedepan. Komitmen pemerintah untuk memberikan akses pelayanan dasar yang merata kepada seluruh masyarakat menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan yang tercermin dari peningkatan dan perbaikan beragam indikator sosial dan budaya masyarakat.

1. Tingkat Inflasi 2,7%;
2. Pertumbuhan Investasi 6,6 – 7,0%;
3. Pertumbuhan Ekspor Non Migas 7,4%;
4. *Share* Industri Pengolahan 21,0%;
5. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas 6,6 – 7,0%;
6. Defisit Transaksi Berjalan (persen PDB) 1,7%;
7. Rasio Pajak (persen PDB) 10,7 – 12,3%;
8. Tingkat Kemiskinan 6,0 - 7,0%;
9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,6 – 4,3%;
10. Rasio Gini 0,360-0,374;
11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54;.
12. Penurunan Emisi GRK 27,3%.

Prinsip Dasar Pembangunan Nasional

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tahun 2020-2024 terdapat beberapa prinsip dasar yaitu:

1. Membangun Kemandirian, yaitu dengan melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia.
2. Menjamin Keadilan, dimana pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warganegara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
3. Menjaga Keberlanjutan, yaitu dengan memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti.

Pengarusutamaan Dalam RPJMN 2020 – 2024

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 - 2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif.

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan).
2. Pengarusutamaan gender (PUG) yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.
3. Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan.
4. Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*)

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya

ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Berikut daftar *Major Project* yang dalam penyusunan dan pelaksanaannya, melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tabel 3.1 Kontribusi Kementerian PUPR dalam *Major Project* RPJMN 2020-2024

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Tribun)	Pelaksana
MENDORONG PERTUMBUHAN				
1	10 Destinasi Pariwisata Prioritas: Danau Toba, Borobudur Dakt, Lombok-Mendolika, Labuan Bajo, Manado- Likiepang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai	- Meningkatnya devisa sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024) - Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kedatangan (2024)	161 (APBN, KPBU, BUMN, Swasta)	a.l Kemenparekraf, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
2	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	- Meningkatnya produksi perikanan budidaya (ikan) menjadi 10,32 Juta ton) - Meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun	25 • APBN: 3,3 • Swasta: 21,7	a.l KemenKP, KemenPUPR, Kemendag, KemenKUKM, KemenESDM, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
3	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	- Meningkatkan produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton pada tahun 2024 - Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,2 miliar pada tahun 2024	30 • APBN: 7,2 • KPBU dan Swasta: 22,8	a.l Kemen KP, KemenPUPR, Kemenperin, Pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta)
4	Pembangunan Wilayah Batam- Bintan	Mendorong pertumbuhan industri dan pariwisata Batam- Bintan	69,9 • APBN: 6,4 • KPBU: 9,5 • Badan Usaha 54,0	a.l EP Batam, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
5	Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	- Meningkatnya share PDRB wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap Nasional - Meningkatkan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota didalam wilayah metropolitan	229,9 (APBN, KPBU & Swasta)	a.l KemenPUPR, Kemenhub, Kominfo, Kemen ESDM, Kemendagri, BPS, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
6	Ibu Kota Negara (IKN)	Meningkatnya pembangunan RTI untuk pemerataan wilayah	466,04 • APBN: 90,35 • KPBU: 252,46 • Badan Usaha: 123,33	a.l KemenPFN/ Bappenas, KemenATR/BPN, KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
7	Pengembangan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Soffi, dan Sorong	Meningkatnya Indeks Kota Berkelanjutan untuk Kab. Lebak (Maja), Kab. Balungan (Tanjung Selor), Kota Tidore Kepulauan (Soffi), Kota Sorong (Sorong)	134,6 (APBN, Badan Usaha & Swasta)	a.l KemenPUPR, Kemenhub, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
8	Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Loe Paga dan Wilayah Adat Domberay	- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat pada 10 Kabupaten di Wilayah Adat Loe Paga dan 11 Kabupaten di Wilayah Adat Domberay - Meningkatnya aksesibilitas transportasi dan distribusi komoditas unggulan	27,5 (APBN)	a.l KemenPUPR, Kemen ESDM, Kemendes, Kemensos, Kementerian Desa PDTT, Kemenhub, Pemda
9	Pemulihan Pascabencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)	- Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana - Percepatan pemulihan infrastruktur pendukung ekonomi, peningkatan kondisi	15,2 • APBN: 14,8 • APBD: 0,4	a.l BNPB, Kemensos, KemenPUPR, Masyarakat, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Tribun)	Pelaksana
		ekonomi, serta mendorong peningkatan ekonomi lokal masyarakat pada daerah terdampak bencana		
10	Pusat Kegiatan Strategis Nasional: PUSN Paloh Aruk, PUSN Nunukan, PUSN Atambua, PUSN Kefamenanu, PUSN Jayapura, & PUSN Merauke	- Sebagai Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga - Sebagai Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga - Sebagai Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya - Sebagai Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya	3,4 - APBN: 3,0 - KPBU: 0,4	a.l KemenPUPR, Kemenhub, Kemen KP
11	Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting	- Memurunkan angka kematian ibu hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup - Memurunkan prevalensi stunting hingga 14%	87,1 (APBN)	a.l Kemenkes, BKKBN, KemenPUPR, Kemendagri, Kemendikbud, Pemda
12	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	Berkurangnya waktu tempuh Lampung - Aceh dari 48 jam menjadi 30 jam	308,5 - APBN: 105,5 - KPBU: 203,0	a.l KemenPUPR, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
13	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta - Semarang dan Jakarta -Bandung)	Berkurangnya waktu tempuh: - Jakarta - Semarang dari 5 jam menjadi 3,5 jam. - Jakarta-Bandung dari 3 jam menjadi 40 menit	63,6 - APBN: Rp 58 - Badan Usaha: Rp42	a.l Kemenhub, KemenPUPR, BPPT, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
14	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	Berkurangnya potensi kerugian ekonomi akibat kemacetan di wilayah metropolitan	118,8 (APBN, APBD, Badan Usaha)	a.l Kemenhub, KemenPUPR, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
15	Pembangkit Listrik 27.000 MW dan Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA	- Berlanjutnya penyelesaian target program 33.000 MW - Mendukung target EBT pada bauran energi primer pada akhir tahun 2024 sebesar 19,9% - Tersedianya pasokan listrik untuk target penggunaan listrik 1.400 kWh per kapita di 2024 - Penurunan Emisi CO2 Pembangkit sebesar 3,3 juta ton CO2 pada 2024 - Menurunnya tingkat pemadaman listrik (SAIDI) menjadi 1 jam/pelanggan di 2024 - Terpenuhinya kebutuhan listrik di kawasan prioritas nasional	1.121,0 (Badan Usaha)	a.l KemenPUPR, Kementerian, Kemen ESDM, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
16	Penggunaan Pesisir 5 Perkotaan Pantai Jawa	- Mengatasi bencana banjir rob di DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon - Memurunkan waktu tempuh Semarang - Demak (1 jam menjadi 25 menit)	54,9 - APBN: 31,4 - KPBU: 18,7 - APBD: 4,8	a.l KemenPUPR, KemenESDM, KemenLHK, Pemda, Badan Usaha (BUMN/ Swasta)
17	18 Waduk Multiguna	- Tersedianya pasokan air baku dari waduk 23,8 m3/detik dan pasokan listrik 2.438 MW - Tersedianya pasokan air di 51 daerah irigasi premium sebesar 20% guna mendukung ketahanan pangan - Meningkatnya efisiensi dan kinerja irigasi di atas 70% yang didukung oleh pemanfaatan teknologi di 9 DI	92,9 - APBN: 12,9 - KPBU: 24,0 - Swasta: 60,0	a.l KemenPUPR, Swasta

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Tribun)	Pelaksana
18	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	Meningkatnya konektivitas dan mobilitas barang dan penumpang untuk menurunkan harga komoditas	12,4 (APBN)	a.l. KemenPUPR, Pemda
19	Jalan Trans Papua Merauke - Sorong	- Meningkatnya konektivitas dari aksesibilitas bagi wilayah pedalaman, terutama wilayah Pegunungan Tengah Papua - Berkurangnya biaya logistik angkutan bahan pokok mencapai 50%	15,4 (APBN)	a.l. KemenPUPR,
20	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)	Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90%	140 - APBN: 73,5 - APBD: 1,7 - Masyarakat/Swasta: 65,7	a.l. KemenPUPR, Kemkes, Kemendagri, Pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta), dan Masyarakat
21	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	Meningkatnya akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100%	123,5 - APBN: 77,9 - APBD: 15,6 - KPDU: 29,9	a.l. KemenPUPR, Pemda, dan Badan Usaha
22	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, aman dan terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan mencegah terbentuknya permukiman kumuh	397,9 - APBN: 18,0 - APBD: 109,2 - BUMN: 28,0 - Swasta: 237,5 - Masyarakat: 5,0	a.l. Kemen PUPR, Pemda, BUMN, Swasta dan Masyarakat
23	Pemulihan Empat Daerah Airan Sungai Kritis	- Penurunan erosi di wilayah DAS kritis dengan penghijauan lahan kritis 150.000 Ha - Reduksi dampak bencana banjir di Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Utara	30,9 (APBN)	a.l. KemenPUPR, Kemen LHK,

Sasaran Pembangunan Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar Pada Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Sesuai dengan arahan RPJMN 2020-2024, pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, dan perkotaan. Sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang oleh Kementerian PUPR dalam mendukung pencapaian pembangunan infrastuktur nasional adalah:

Tabel 3.2 Sasaran Pembangunan PN 1 & PN 5 (Kementerian PUPR) dalam RPJMN 2020-2024

PN	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Target 2024
1	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi		
	1. Peningkatan Persentase Irigasi Premium (%)	12,3	16,4
	2. Pembangunan Jaringan Irigasi Baru (Ha)	1.000.000	500.000
	3. Peningkatan Ketersediaan Air Baku Domestik dan Industri (m³/detik)	81,4	131,4
	4. Pembangunan Bendungan Multiguna (kumulatif) (unit)	45	61
5	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar		
	5. Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	54,1 (2018)	70

PN	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Target 2024
	6. Rasio KPR terhadap PDB (%)	2,9 (2017)	4%
	7. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman (%)	87,8 layak dan 6,7 aman (2018)	100 layak dan 15 aman
	8. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	20 (2018)	30
	9. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)	74,6 layak, termasuk 7,42 aman (2018)	90 layak termasuk 15 aman
	10. Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman/kota/regional (Rumah Tangga)	1,3 juta (2015-2019)	3 juta
	11. Jumlah rumah tangga yang terlayani instalasi pengolahan lumpur tinja (Rumah Tangga)	N/A	6,5 juta
	12. Rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%)	9,36 (2018)	0
	13. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan (%)	59,45 penanganan dan 1,19 pengurangan (2016)	80 penanganan dan 20 pengurangan
	14. Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar metode lahan urug saniter (Rumah Tangga)	N/A	19 juta
	15. Pembangunan jaringan irigasi baru (kumulatif) (Ha)	1 juta	500 ribu
	16. Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	53	65
	17. Peningkatan ketersediaan air baku domestic dan industri (m3/detik)	81,36	131,36
	18. Pembangunan bendungan multiguna (unit)	45	63
	19. Peningkatan produktivitas pemakaian air untuk produksi padi (m3/kg)	N/A	3
	20. Penurunan resiko bencana dengan risiko bencana tinggi (provinsi)	N/A	20
5	Meningkatnya konektivitas wilayah		
	1. Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 Km)	2,3	1,9
	2. Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi (Km)	1.461	2.500
	3. Panjang jalan baru yang terbangun (Km)	3.387	3.000
	4. Persentase kondisi mantap jalan nasional/ provinsi/kabupaten-kota (%)	92/68/57	97/75/65

Pemindahan Ibu Kota Negara

Dalam lima tahun ke depan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam rangka pemerataan pertumbuhan wilayah, maka direncanakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Pulau Kalimantan. Pembangunan Ibu kota Negara di luar pulau Jawa di posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pertumbuhan perekonomian melalui peningkatan permintaan agregat, mendorong diversifikasi ekonomi Pulau Kalimantan, sumber pertumbuhan ekonomi baru jangka panjang terutama untuk Wilayah Pulau Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia, dan mengurangi ketimpangan antar wilayah.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan diharapkan dapat membantu mendorong diversifikasi ekonomi dan peningkatan output sektor ekonomi non tradisional seperti jasa, pemerintahan, transportasi, perdagangan, pengolahan akan terpacu untuk menopang pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan. Selain itu juga diharapkan terjadi peningkatan perdagangan antarwilayah, meningkatkan kesempatan kerja dan menurunkan ketimpangan pendapatan, serta menciptakan peluang investasi baru dan peningkatan kontribusi investasi Pulau Kalimantan terhadap nasional.

Pembangunan ibu kota baru akan menempati lahan seluas 5.600 Ha dan diperkirakan akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 466 Triliun yang bersumber dari APBN, KPBU & Swasta serta pengembangan PNB*P*-*earmark* untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan ibu kota negara baru.

Sejumlah regulasi juga perlu disiapkan dalam pemindahan Ibu Kota Negara, antara lain:

1. RUU tentang Ibu Kota Negara;
2. RPP tentang Insentif untuk Swasta dalam Pembangunan Ibu Kota Negara;
3. RPP tentang Skema Pembiayaan Ibu Kota Negara;
4. RPerpres tentang Badan Otorita Ibu Kota Negara;
5. RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara (RTR KSN IKN);
6. RPerpres tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pusat Pemerintahan IKN;
7. RPerpres tentang RDTR Pusat Ekonomi IKN.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi Kementerian 2020 – 2024 dirumuskan dalam kerangka pembangunan yang tidak hanya yang dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian, akan tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta. Arah kebijakan dan strategi terdiri dari arah kebijakan dan strategi utama pada masing-masing sektor serta arah kebijakan dan strategi lintas sektor.

3.2.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Lintas Sektor

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah

Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020 – 2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antarwilayah dengan sasaran antara lain : (i) meningkatnya pemerataan antarwilayah (Kawasan Barat Indonesia (KBI), Kawasan Timur Indonesia (KTI), Jawa – Luar Jawa), (ii) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, (iii) meningkatnya kualitas, dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah, (iv) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Hal tersebut sejalan dengan Visi Misi

Presiden 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan dimana **wilayah menjadi basis pembangunan**.

Gambar 3.1 Keterkaitan Visi, Misi, Arahannya Presiden dan 7 Agenda Pembangunan



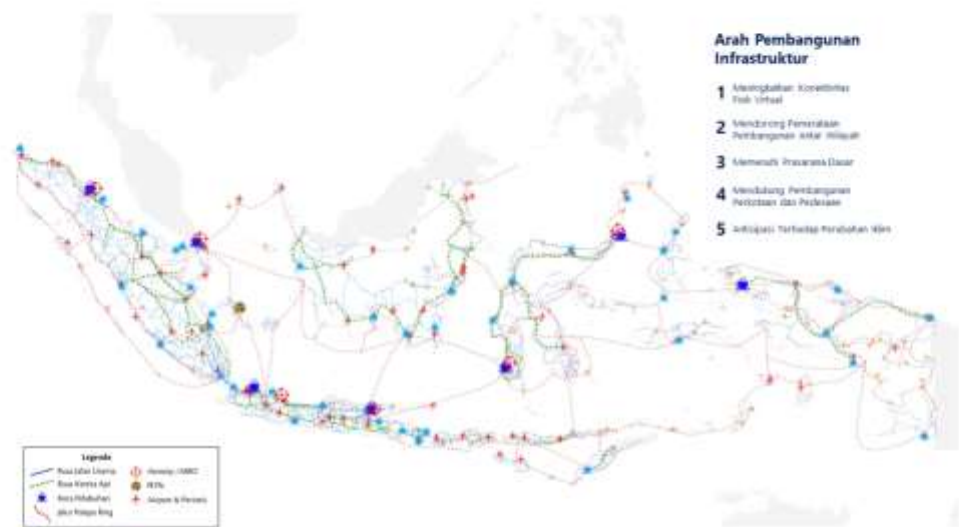
Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Pembangunan berbasis wilayah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti SDM yang berkualitas dan berdaya saing, transformasi ekonomi, dengan memperhatikan/mempertimbangkan lingkungan hidup dan kerentanan bencana serta kondisi Polhukhankam yang kondusif. Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dicapai melalui revolusi mental dan pembangunan kebudayaan serta pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai rata – rata pertumbuhan 5,7-6% per tahun dengan struktur yang lebih baik. Kondisi Polhukhankam yang kondusif dapat diwujudkan dengan penyederhanaan regulasi, birokrasi dan stabilitas politik dan pertahanan keamanan.

Pembangunan kewilayahan tahun 2020 – 2024 menekankan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan pada data, informasi yang baik, akurat, dan lengkap, skenario pembangunan nasional, serta lokasi rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan. Selain itu, pembangunan kewilayahan menekankan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang juga mengutamakan

pendekatan holistik dan tematik berdasarkan penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada prioritas pembangunan dan lokasi yang paling relevan. Pengembangan wilayah yang terintegrasi sebagai suatu skenario dalam pembangunan kewilayahan merupakan perpaduan dari konsep spasial yang mencakup kawasan strategis, infrastruktur wilayah, koridor pertumbuhan dan Koridor Pemerataan, kondisi Keterbatasan SDA dan Lingkungan (*Tutupan Lahan/ Development Constraint*).

Gambar 3.2 Arah Pembangunan Infrastruktur



Sumber: Visi Indonesia 2045

Dalam lima tahun mendatang (2020-2024), sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu “Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera”. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan dan strategis Pembangunan wilayah tahun 2020-2024 antara lain:

1. Meningkatkan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa, melalui strategi pembangunan;
2. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan (i) optimalisasi kawasan strategis prioritas seperti KEK, KI, DPP, dan kawasan lainnya; (ii) optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa; (iii) pembangunan kota baru dan pembangunan Ibu Kota Negara di luar pulau Jawa;

3. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah;
4. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

Pemanfaatan ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membutuhkan adanya kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah dan juga antardaerah sehingga dalam melaksanakan pengelolaan ruang NKRI dapat terselenggara secara transparan, efektif dan terpadu. Dalam pengelolaan ruang tersebut dibentuk suatu wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya yang disebut sebagai kawasan, antara lain: 1) kawasan perdesaan; 2) kawasan agropolitan; 3) kawasan perkotaan; 4) kawasan metropolitan; 5) kawasan megapolitan; 6) kawasan strategis nasional; 7) kawasan strategis provinsi dan 8) kawasan strategis kabupaten/kota. Selanjutnya, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 terkait dengan pembangunan infrastruktur, maka pembangunan infrastruktur dilanjutkan dengan menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat yang dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau.

Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi PKN, PKW, KEK, KI, dan KSPN, serta kota-desa serta kawasan aglomerasi perkotaan pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan. Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW dan PKL sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas pada kabupaten/kota pada koridor pemerataan.

Kementerian PUPR turut mengambil peran penting dalam mendukung terlaksananya pengelolaan ruang wilayah NKRI dimana salah satu fungsinya adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pengembangan wilayah. Untuk melaksanakan **keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR** berbasis pengembangan wilayah, Kementerian PUPR menggunakan **pendekatan wilayah pengembangan strategis** yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memudahkan pengelolaan pengembangan wilayah yang dibagi menurut wilayah pulau/kepulauan yang dikelompokkan ke dalam beberapa tipe wilayah pengembangan dimana didalamnya melingkupi kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan maritim berdasarkan pada tema atau potensi per pulau. Pendekatan pengembangan wilayah tersebut berazaskan pada efisiensi yang berbasis daya dukung, daya tampung dan fungsi lingkungan fisik terbangun, manfaat dalam skala ekonomi (*economic of scale*) serta sinergitas dalam menyediakan infrastruktur transportasi untuk konektivitas dalam lingkup nasional maupun internasional; mengurangi kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan energi terbarukan untuk tenaga listrik; pemenuhan kebutuhan

layanan dasar permukiman yang layak bagi masyarakat; dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh; serta meningkatkan keandalan dan keberlanjutan layanan sumber daya air baik untuk pemenuhan air minum, sanitasi, dan irigasi guna menunjang ketahanan air dan pangan dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang.

Gambar 3.3 Esensi Pembangunan Wilayah



Sumber: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2020.

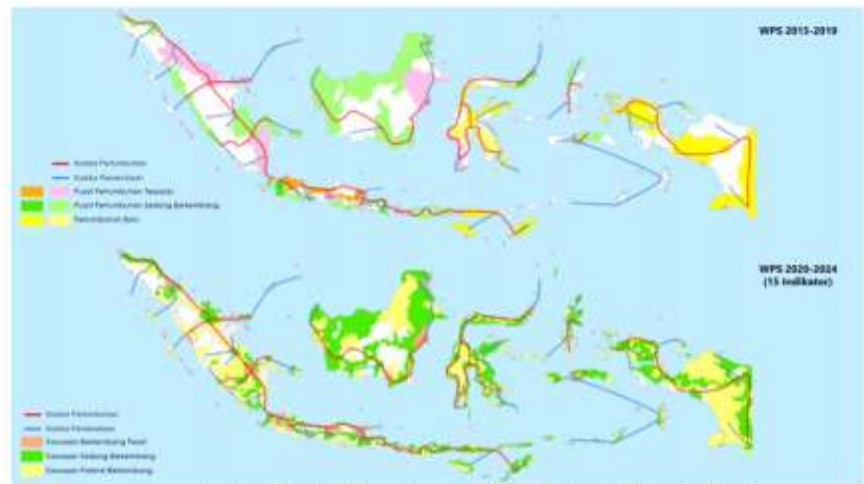
Konsepsi pengembangan wilayah diilustrasikan sebagai pembangunan infrastruktur wilayah PUPR yang terpadu dan diarahkan untuk mempercepat pembangunan fisik di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan sesuai dengan klusternya, terutama pengembangan wilayah di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur dalam penyediaan infrastruktur dalam kawasan, antar kawasan, maupun antar wilayah.

Manfaat yang diharapkan dari pendekatan pengembangan wilayah tersebut antara lain: (i) menghasilkan **Sinergitas** yang ditunjukkan dengan kolaborasi pengembangan infrastruktur untuk mendukung wilayah-wilayah pertumbuhan dari beberapa sektor seperti sektor pemerintahan, swasta, dan masyarakat serta dari berbagai tingkatan seperti pusat dan daerah; (ii) adanya **Spesialisasi** yaitu wilayah pertumbuhan memiliki kekhususan potensi yang berbeda dari wilayah lainnya. Misalnya, spesialisasi industri, pariwisata dan lain-lain; (iii) adanya **Komplementaritas** yaitu suatu keadaan dimana wilayah-wilayah pertumbuhan dapat saling melengkapi yang ditunjukkan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang memberikan *multiplier effect*; (iv) memunculkan **Agglomerasi** yaitu suatu pengembangan yang terfokus dan terpadu sehingga memungkinkan adanya perkembangan antara pusat kegiatan atau pusat kota dengan kawasan-kawasan *hinterland* di sekitarnya yang membentuk suatu kawasan metropolitan hingga megapolitan; (v) adanya peningkatan **Skala Ekonomi** karena perubahan fokus yang awalnya hanya satu wilayah pertumbuhan kemudian berkembang menjadi beberapa wilayah pertumbuhan lainnya dalam satu koridor wilayah

pengembangan yang mengakibatkan produktivitas yang efektif dan efisien mendorong daya saing yang lebih kompetitif; dan (vi) merupakan alat **Pendukung** pengembangan **Kawasan Strategis**.

Pendekatan pengembangan wilayah menjadi media untuk mengintegrasikan *Major Project* RPJMN 2020-2024 dalam rangka mendukung pembangunan Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan menjadi lebih efektif dengan mengakselerasi pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan meliputi PKN, PKW, KEK, KI, KSPN, PKL serta Kota-Desa sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan membentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang dapat menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas pada kabupaten/kota.

Gambar 3.4 Pengembangan Wilayah yang Terintegrasi



Sumber: Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2020.

Dalam mengakomodir dinamika ekonomi dan politik di Indonesia, pendekatan pengembangan wilayah kembali disempurnakan untuk periode 2020-2024 dengan mempertimbangkan beberapa isu-isu utama, yaitu: (a) *Major Project* RPJMN 2020-2024; (b) Renstra PUPR 2020-2024; (c) Tematik kawasan strategis; (d) Usulan Ibu Kota Negara; (e) Kawasan Metropolitan; (f) Koridor pengembangan jalan tol dan jalan utama nasional (Trans/lintas pulau, baik terbangun maupun belum); (g) Bendungan terbangun dan terencana; (h) Isu konektivitas multimoda; (i) Ibukota Provinsi; (j) Kawasan Perbatasan/PKSN Perbatasan; (k) Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT); (l) Daerah Tertinggal; (m) Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN); (n) Lokasi Prioritas Perbatasan; (o) Kota Baru dan Kota Kecil.

Pendekatan pengembangan wilayah difungsikan sebagai alat acuan dalam menentukan arah pembangunan wilayah per pulau sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau untuk menjamin kebijakan, program dan kegiatan **yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor** dengan memperhatikan karakter geografis, potensi wilayah, karakteristik nilai-nilai sosial, budaya dan adat daerah, daya dukung lingkungan, serta resiko bencana di setiap wilayah.

A. Wilayah Pulau Papua.

Kebijakan dan prioritas pembangunan diarahkan pada percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dibanding wilayah lainnya, dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat berlandaskan pendekatan budaya dan kontekstual Papua, dan berbasis ekologis dan wilayah adat. Strategi pembangunan Wilayah Papua mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi khusus Papua dan Papua Barat, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Lingkup kegiatan prioritas mendukung pembangunan tersebut antara lain:

- 1) Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Papua yaitu sagu, pala, lada, cengkeh, kakao, kopi, emas, tembaga, batubara, minyak, dan gas bumi, serta perikanan tangkap. Pengembangan sektor unggulan seperti perkebunan (sentra produksi jagung dan sagu), pertanian, pertambangan dan mineral, serta perikanan;
 - b. Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
 - c. Pengembangan sentra perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT).
- 2) Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:
 - a. Pengembangan industri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong dan Kawasan Industri (KI) Teluk Bintuni;
 - b. Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya, dan sejarah Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) antara lain DPP Raja Ampat, dan DPP Biak – Teluk Cenderawasih;
 - c. Preservasi, Penanganan Jalan Eksisting, Penyiapan *Readiness Criteria*, dan Pengembangan Jaringan Jalan Baru di jalan Trans Papua, jalan akses KEK Sorong, jalan akses DPP Raja Ampat, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Moor, Pelabuhan Merauke, Bandara Rendani Manokwari, Bandara Nabire Baru, Bandara Elelim, Bandara Sobaham, dan Bandara Oksibil.
- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan: Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Jayapura dan Kota Baru Sorong, serta Penguatan keterkaitan desa – kota dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis ekonomi digital.
- 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: KPPN Jayapura, KPPN Manokwari, KPPN Raja Ampat, dan KPPN Merauke. Pengembangan ekonomi Kawasan perbatasan di PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke.

B. Kepulauan Maluku.

Kebijakan pembangunan Wilayah Maluku dalam tahun 2020-2024 diarahkan pada optimalisasi keunggulan wilayah sebagai lumbung ikan nasional dan kawasan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau. Strategi pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku yaitu peningkatan pelayanan dasar (layanan kesehatan dan pendidikan), penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan

melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi, serta pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Prioritas pembangunan Wilayah Maluku dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan :

- 1) Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Maluku yaitu kelapa, lada, cengkeh, emas, batubara, minyak, dan gas bumi, nikel, dan perikanan tangkap dan budidaya yang berpotensi memiliki nilai tambah tinggi;
 - b. Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
 - c. Pengembangan sentra perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) di SKPT Morotai, SKPT Moa, dan SKPT Saumlaki.
- 2) Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:
 - a. Pengembangan kawasan strategis dan pengelolaan sumber daya alam, berupa pertambangan yang difokuskan pada KI Teluk Weda;
 - b. Pengembangan destinasi pariwisata alam, budaya, dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yaitu DPP/KEK Morotai;
 - c. Preservasi, Penanganan Jalan Eksisting, Penyiapan *Readiness Criteria*, dan Pengembangan Jaringan Konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan jalan lingkaran/Trans Pulau Morotai, jalan lingkaran/Trans Seram, jalan lingkaran/Trans Pulau Kei Besar, jalan lingkaran/Trans Pulau Buru, jalan lingkaran/Trans Moa, jalan lingkaran/Trans Pulau Wetar, Pelabuhan Ambon, Bandara Taliabu, dan Bandara Weda.
- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan: Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Ambon, Kota Tual, Kota Ternate, dan pembangunan Kota Baru Sofifi serta Penguatan keterkaitan desa – kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.
- 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Saumlaki, dan PKSN Daruba, KPPN Maluku Tengah, dan KPPN Morotai.

C. Pulau Nusa Tenggara.

Kebijakan dan prioritas pembangunan wilayah Nusa Tenggara dalam tahun 2020 – 2024 diarahkan pada optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau. Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong transformasi perekonomian dengan memperkuat peran sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE), industri kreatif berbasis budaya, percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, garam, dan rumput laut; pengembangan industri berbasis

peternakan sapi dan perkebunan jagung, serta pengembangan industri mangan dan tembaga.

Strategi pembangunan Wilayah Nusa Tenggara yaitu peningkatan pelayanan dasar (layanan Pendidikan dan Kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata), penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi, serta pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Prioritas pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan :

- 1) Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Nusa Tenggara yaitu kelapa, lada, pala, cengkeh, kopi, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap;
 - b. Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di KPPN, kawasan transmigrasi, dan PKSN;
 - c. Pengolahan sumber daya alam dihasilkan dari sentra produksi perikanan di SKPT Sumba Timur, SKPT Rote Ndao.
- 2) Pengembangan Kawasan Strategis
 - a. Pengembangan kawasan strategis dan pengolahan sumber daya alam berupa perkebunan dan pertambangan yang difokuskan pada KI Sumbawa Besar;
 - b. Destinasi pariwisata alam, budaya, dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yaitu DPP Lombok – Mandalika/KEK Mandalika dan DPP Labuan Bajo;
 - c. Pengembangan kawasan Bandar Kayangan sebagai pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta;
 - d. Preservasi, Penanganan Jalan Eksisting, Penyiapan *Readiness Criteria*, dan Pengembangan Jaringan Konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain Jalan Akses Samota, Jalan Akses KEK Mandalika, Jalan Akses DPP Labuan Bajo, Jalan Paralel Perbatasan Sektor Timur Pos Perbatasan Motaain dan Motamasin, pembangunan Jalan Perbatasan Sektor Barat NTT, pengembangan Pelabuhan Gili Trawangan, Pelabuhan Labuan Bajo, dan Bandara Labuan Bajo.
- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan di Kota Mataram dan Kota Kupang, penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.
- 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Atambua dan Kefamenanu, Pengembangan KPPN di Manggarai Barat, Sumba Timur, Sumbawa, Dompu, Lombok Timur, dan Lombok Tengah.

D. Pulau Sulawesi.

Kebijakan dan prioritas pembangunan wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 diarahkan menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia; lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi berbasis kakao, padi, jagung; pengembangan industri berbasis logistik; pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel dan bijih besi dan gas bumi; percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan wisata bahari.

Strategi pembangunan Wilayah Sulawesi yaitu peningkatan pelayanan dasar (layanan Pendidikan dan Kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata), penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi, peningkatan ketersediaan air melalui pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta pembangunan desa terpadu yang mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa.

Prioritas pembangunan Wilayah Sulawesi dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan :

1) Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:

- a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sulawesi antara lain kelapa, kelapa sawit, lada, cengkeh, pala, kakao, kopi, tebu, emas, nikel, bijih besi, batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan tangkap dan budidaya;
- b. Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di KPPN, kawasan transmigrasi, dan PKSN;
- c. Pengolahan sumber daya alam dihasilkan dari sentra produksi perikanan di SKPT Talaud.

2) Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:

- a. Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam (pertanian, perkebunan, logam dasar, dan kemaritiman) melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur yang difokuskan di KEK dan KI antara lain KEK/KI Palu, KEK Bitung, dan KI Takalar;
- b. Pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata, yaitu DPP dan/atau KEK antara lain : DPP Manado – Likupang/KEK Likupang, DPP Baru Toraja – Makassar – Selayar, dan DPP Wakatobi;
- c. Preservasi, Penanganan Jalan Eksisting, Penyiapan *Readiness Criteria*, dan Pengembangan Jaringan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Lintas Gorontalo, Jalan Trans Sulawesi, Tol Manado Bitung, Jalan Lintas Tengah dan Tenggara Sulawesi, Jalan Trans/Lingkar Pulau Buton, Jalan Trans/Lingkar Pulau Muna, Jalan Lingkar Pulau Wangi – Wangi (Wakatobi), Jalan Akses Wisata Likupang, Pengembangan Pelabuhan Bitung, Pengembangan Bandara Pohnuato, Bandara Bolaang Mongondow, Bandara Banggai Laut, Bandara Bumbu Kunik, dan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Metropolitan Makassar.

- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Metropolitan Makassar dan WM Manado sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sulawesi serta Kota Palu, Pare – Pare, Palopo, Kendari, Mamuju, dan Gorontalo.
- 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Tahuna dan PKSN Melonguane, Pengembangan KPPN Buol, Poso, Mamuju, Pinrang, Morowali, Mamuju Tengah, Konawe Selatan, Wakatobi, Muna, Barru, Luwu Timur, Bone, Minahasa Utara, Gorontalo, Boalemo, dan KPPN Gorontalo.

E. Pulau Kalimantan.

Kebijakan dan prioritas pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dalam 5 (lima) tahun mendatang antara lain mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia (*Heart of Borneo*) dengan menjaga Kawasan berfungsi pelestarian lingkungan dan ekologis; hilirisasi pertanian (sentra produksi padi), perkebunan (sentra produksi jagung), dan pertambangan untuk mempercepat transformasi ekonomi di wilayah Kalimantan dan sekaligus meningkatkan daya ekonomi wilayah terhadap fluktuasi harga komoditas; penguatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan adaptasi terhadap bencana kebakaran hutan dan banjir; pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan timur; percepatan pembangunan kawasan perbatasan. **Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)** dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan diharapkan dapat membantu mendorong diversifikasi ekonomi dan peningkatan output sektor ekonomi non tradisional seperti pemerintahan, transportasi, perdagangan, pengolahan akan terpacu untuk menopang pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan.

Strategi pembangunan Wilayah Kalimantan yaitu peningkatan pelayanan dasar (layanan Pendidikan dan Kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata), penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Prioritas pembangunan Wilayah Kalimantan dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan:

- 1) Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Kalimantan antara lain kelapa, kelapa sawit, lada, cengkeh, pala, kakao, kopi, tebu, emas, nikel, bijih besi, batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan tangkap;
 - b. Pengembangan sentra produksi perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN Kotawaringin Barat, Berau, Kutai Timur, Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, Barito Kuala, Banjar, Nunukan, dan KPPN Sambas;
 - c. Pengolahan sumber daya alam dihasilkan dari sentra produksi perikanan di SKPT Sebatik.
- 2) Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan (hilirisasi) sumber daya alam perkebunan dan hasil tambang serta pertambangan yang difokuskan pada KI Ketapang, KI Surya Borneo, KI Jorong, KI Batulicin, KI Tanah Kuning, dan KI Batanjung dan/atau KEK MBTK;

- b. Pengembangan kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata alam, budaya, dan sejarah antara lain DPP Baru Sambas – Singkawang dan DPP Baru Derawan – Berau;
- c. Preservasi, Penanganan Jalan Eksisting, Penyiapan *Readiness Criteria*, dan Pengembangan Jaringan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Akses KIP Tanah Kuning, Jalan Akses KI Ketapang, Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan (Kalbar, Kaltim, dan Kaltara), Jalan Akses Pelabuhan Pelaihari, Jalan Akses KI Batu Licin, Tol Balikpapan – Jembatan Penajam, Jalan Tol Samarinda – Bontang, Jalan Akses KEK Maloy, Pengembangan Pelabuhan Pelaihari, Pelabuhan Tanjung Selor, Bandara Baru Singkawang, Pengembangan Bandara Tanjung Harapan, dan KA IKN.
- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Metropolitan Banjarmasin, pembangunan Kota Baru Tanjung Selor, serta pengembangan Kota Pontianak, Singkawang, Palangka Raya, Balikpapan, Samarinda, Tarakan dan **Pembangunan IKN di Kalimantan Timur.**
- 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Long Nawang, Tou Lumbis, Paloh Aruk, Jagoi Babang, Nunukan, dan PKSN Long Midang.

F. Pulau Sumatera.

Kebijakan pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional; dan menjadi lumbung energi nasional dan salah satu lumbung pangan nasional seperti Segitiga Pertumbuhan Indonesia – Malaysia – Thailand (*Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle*) dan masyarakat ekonomi ASEAN akan memperluas investasi perdagangan, serta diversifikasi pasar regional dan global.

Strategi pembangunan Wilayah Sumatera yaitu peningkatan pelayanan dasar (layanan Pendidikan dan Kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata), penguatan pusat – pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan:

- 1) Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sumatera antara lain kakao, kelapa sawit, karet, kopi, lada, pala, tebu, emas, timah, batubara, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
 - b. Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di KPPN dan PKSN;
 - c. Pengembangan sentra produksi perikanan SKPT Sabang, Natuna, dan SKPT Mentawai.
- 2) Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan di beberapa KEK seperti KEK Arun Lhokseumawe, KEK Tanjung Api – Api, rencana

pengembangan KEK Pulau Baai, KEK/KI Sei Mangke, KEK/KI Galan Batang, KI Kuala Tanjung, KI Bintan *Aerospace*, KI Tanjung Enim, KI Kemuning, KI Sadai, KI Tenayan, KI Tanjung Buton, KI Tanggamus, KI Pesawaran, KI Way Pisang, KI Katibung, dan KI Ladang, serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) antara lain KPBPB Batam – Bintan – Karimun dan KPBPB Sabang;

- b. Pengembangan pariwisata daerah sebagai penggerak ekonomi lokal melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Danau Toba, DPP Baru Padang – Bukittinggi, DPP Baru Batam – Bintan, DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kalayang;
- c. Preservasi, Penanganan Jalan Eksisting, Penyiapan *Readiness Criteria*, dan Pengembangan Jaringan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, Penanganan Lalu Lintas Timur Riau, Penanganan Lintas Barat Sumatera, Jalan Lintas Tengah Lampung, Jalan Akses DPP Sabang, Jalan Trans Pulau Simeluh, Jalan Akses DPP Danau Toba.

3) Pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Metropolitan Palembang dan Medan seefisien pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera dan Peningkatan kualitas transportasi perkotaan multimoda di WM Medan (Mebidangro) serta penguatan keterkaitan desa – kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Sabang, Bengkalis, dan PKSN Ranai, KPPN Aceh Timur, Toba Samosir, Samosir, Agam, Banyuwangi, Muaro Jambi, Belitung, Bangka Selatan, Belitung Timur, Bintan Kepulauan, Karimun, Tulang Bawang, dan KPPN Mesuji.

G. Pulau Jawa dan Bali.

Arah Pembangunan wilayah Pulau Jawa dan Bali yang relatif maju dan berkembang diarahkan untuk memantapkan peran sebagai pusat ekonomi modern dan bersaing di tingkat global dengan bertumpu pada industri manufaktur, ekonomi kreatif dan jasa pariwisata, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0, serta pengembangan destinasi pariwisata berbasis alam, budaya. Pembangunan wilayah Jawa akan bertumpu pada peran swasta yang semakin besar dengan dukungan fasilitasi pemerintah secara terpilih untuk menjamin terciptanya iklim investasi yang terbuka dan efisien.

Strategi pembangunan Wilayah Jawa - Bali yaitu pemindahan pusat pemerintahan dan Ibu Kota Negara (IKN) ke luar Pulau Jawa, peningkatan pelayanan dasar (layanan Pendidikan dan Kesehatan, pendidikan vokasi, pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata), pertahanan pertumbuhan Jawa – Bali, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Prioritas pembangunan Wilayah Jawa - Bali dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan:

- 1) Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Jawa - Bali antara lain kakao, kelapa sawit, karet, kopi, lada, pala, tebu, emas, timah, batubara, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
 - b. Pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan, yang tersebar di KPPN dan PKSN;
 - c. Pengembangan agropolitan Kawasan Selingkar Wilis dan pertahanan peran sebagai lumbung pangan nasional.
- 2) Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:
 - a. Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan di beberapa KEK seperti KEK Kendal, Singhasari, dan KEK Tanjung Lesung dan di beberapa KI seperti KI Brebes, Madura, dan kawasan ekonomi kreatif dan digital;
 - b. Pengembangan pariwisata DPP Baru Bandung – Halimun – Ciletuh, DPP Borobudur, DPP Bromo – Tengger – Semeru, DPP Banyuwangi, dan DPP Revitalisasi Bali;
 - c. Preservasi, Penyiapan *Readiness Criteria*, dan Pengembangan Jaringan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang, Jalan Tol Yogya – Bawen, Solo – Yogyakarta, Cilacap – Yogyakarta, Tol Probolinggo – Banyuwangi, Jalan lintas Pansela, dan Jalan lintas Penghubung Utara.
- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Metropolitan Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya, serta WM Denpasar, pembangunan Kota Baru Maja.
- 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di KPPN Pandeglang, Sukabumi, Magelang, Kendal, Pamekasan, Banyuwangi, Klungkung, dan KPPN Buleleng.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan dan strategi per pulau, diperlukan keterpaduan infrastruktur PUPR antar sektor di Lingkungan Kementerian PUPR (keterpaduan perencanaan, keterpaduan program, dan keterpaduan pelaksanaan), keterpaduan spasial (antar daerah) dan Keterpaduan antar tingkat pemerintah. Keterpaduan kebijakan dan strategi per pulau diharapkan dapat mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi serta dapat memberikan manfaat untuk dapat meningkatkan kehandalan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender di bidang pekerjaan umum dan perumahan dilaksanakan sesuai arahan pengarusutamaan pembangunan di dalam RPJMN 2020 – 2024, di mana strategi pembangunan nasional harus memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.

Kebijakan pengarusutamaan gender akan meliputi: (1) Perkuatan komitmen Kementerian PUPR dalam pelaksanaan PUG; (2) Peningkatan integrasi gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Kementerian PUPR; (3) Peningkatan pelaksanaan “*infrastructure for all*” yang memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*), dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan, ramah lingkungan dan berkelanjutan” bagi semua kelompok baik perempuan dan laki-laki-laki, termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, generasi muda, suku-suku terasing dan kelompok rentan lainnya secara setara dan adil; (4) Peningkatan pemenuhan 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan PUG yang terdiri dari peningkatan di bidang: komitmen, kebijakan responsif gender, kelembagaan (POKJA dan *Focal Point*) di tingkat pusat dan daerah; kapasitas sumber daya, baik sumber daya manusia sumber dana; data terpilah; alat analisa gender (*Gender Analysisist Pathway/GAP*) untuk penyusunan PPRG; peran serta masyarakat dengan melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan multi pihak; (5) Peningkatan lingkungan dan fasilitas kerja yang responsif gender; dan (6) Peningkatan monitoring dan evaluasi kegiatan responsif gender terutama dalam aspek manfaat hasil-hasil pembangunan, termasuk melakukan audit gender untuk memperkuat akuntabilitas pelaksanaan PUG.

Kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui strategi: (1) Peningkatan penyusunan produk kebijakan/pengaturan yang responsif gender (NSPK); (2) Peningkatan dan pengembangan penyediaan dan pemanfaatan data terpilah sebagai alat pemetaan data, identifikasi isu dan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender dan membuat kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender; (3) Peningkatan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG); (4) Pengembangan kelembagaan dengan pembentukan Kelompok kerja (POKJA) dan *Focal Point*, serta peningkatan kapasitas SDM, melalui berbagai program pelatihan gender, PUG dan PPRG di tingkat pusat dan daerah; (5) Peningkatan penyebaran informasi dan kerjasama dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman lintas sektor dengan melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui media cetak, elektronik, pameran, pertemuan-pertemuan, dan lain-lain; (6) Pengembangan inovasi-inovasi kegiatan-kegiatan yang responsif gender berdasarkan penelitian, kajian-kajian dan fakta-fakta lapangan; (7) Peningkatan kerjasama dengan multi pihak (K/L), pemerintah provinsi, kabupeten/kota, lembaga-lembaga nasional dan internasional, donor, pihak swasta, masyarakat sipil dan pihak pemangku kepentingan lainnya) melalui perjanjian Kesepakatan Bersama/*Memorandum of Understanding* (MoU), dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS); dan (8) Peningkatan pemantauan dan evaluasi kegiatan responsif gender secara berkala sebagai masukan dan umpan balik untuk penyusunan kebijakan serta keberlangsungan program kegiatan yang responsif gender.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Infrastruktur PUPR Tangguh Bencana

Arah kebijakan dalam pengarusutamaan infrastruktur PUPR tangguh bencana ditempuh upaya untuk mengakomodasi kondisi kebencanaan di Indonesia yang ditujukan untuk menghasilkan infrastruktur PUPR yang tangguh dan bisa mengurangi risiko bencana serta dapat mengurangi jumlah kerusakan infrastruktur dan lingkungan, yang akan dilaksanakan melalui: (1) Penyediaan NSPK dan peningkatan implementasi standar keamanan bangunan infrastruktur termasuk didalamnya antisipasi terhadap bencana seperti pada gedung, jalan, jembatan bentang panjang, dan bendungan; (2) Menerapkan SNI/*uniform building code* keamanan struktural bangunan tahan gempa pada jalan dan jembatan, dengan kategori *safety critical objective* yang tetap harus dapat beroperasi meskipun terjadi bencana dengan kategori kuat, sebagai jalur evakuasi dan jalur logistik; (3) Pembangunan infrastruktur konektivitas dengan memperhatikan zona rawan bencana, sesuai kondisi *hazard* dan karakteristik wilayah rawan bencana; (4) Pembangunan infrastruktur transportasi yang sekaligus dapat difungsikan sebagai bangunan mitigasi bencana (misal: jalan yang dibangun sebagai tanggul di daerah pesisir untuk mengurangi dampak bencana banjir rob atau tsunami); (5) Penataan bangunan dan lingkungan permukiman yang berada di lokasi rawan bencana; (6) Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS); (7) Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (*shelter*/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana dengan pengelolaan dan pemeliharaan yang melibatkan peran serta aktif masyarakat; (8) Pelaksanaan simulasi tanggap darurat secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana; (9) Pengembangan teknologi ramah bencana pada setiap pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan; (10) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data ketahanan kebencanaan infrastruktur PUPR; (11) Monitoring dan pemantauan ancaman bencana banjir dan kekeringan serta meningkatkan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (12) Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami, longsor, banjir serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik; (13) Peningkatan kecepatan respon/tanggap bencana untuk pemulihan, dan penyelasan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur PUPR pasca bencana.

3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Utama

1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan

Arah kebijakan dalam pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan adalah percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku.

Strategi untuk percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi antara lain: (1) Penambahan kapasitas air baku dari bendungan dan sumber air lainnya didukung oleh pengamanan kualitas air; (2) Rehabilitasi dan peningkatan efisiensi infrastruktur penyedia air baku; (3) Pelaksanaan konservasi air tanah yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air baku serta didukung oleh penegakan peraturan pengambilan air tanah. Strategi tersebut perlu dikembangkan secara bersamaan dengan peningkatan kinerja Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan sistem distribusi air bersih. Percepatan sistem penyediaan air baku juga perlu melibatkan badan usaha. Ketersediaan air secara berkelanjutan juga perlu didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hemat air; dan (4) Penyusunan Indeks Ketahanan Air dimana Kementerian PUPR mendukung penyusunan Indeks Ketahanan Air Nasional bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Strategi untuk peningkatan kebijakan pengelolaan sumber daya air terpadu antara lain: (1) Peningkatan Penyelesaian peraturan pemerintah terkait UU Sumber Daya Air; (2) Peningkatan kinerja pengelolaan wilayah sungai melalui optimalisasi pola rencana SDA dalam jejaring air, pangan, dan energi; (3) Perkuatan pengelolaan sumber daya air dan peningkatan kapasitas BUMN/D/S dan KPBU air baku/air minum; (4) Penyusunan Indeks Ketahanan Air.

Strategi untuk pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya air antara lain: (1) Pengembangan sistem informasi sumber daya air; (2) Pengembangan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi yang terintegrasi dengan manajemen sumber daya air (*DSS, forecasting, early warning*) dengan memanfaatkan teknologi baru (*satelit, radar, real-time system, water accounting systems*)

Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi

Arah kebijakan dalam rangka optimalisasi waduk multiguna dan modernisasi irigasi adalah penambahan kapasitas tampungan air, peningkatan dan pemanfaatan fungsi tampungan air, peningkatan kinerja bendungan dan penurunan indeks risiko bendungan, peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi, dan penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi.

Strategi untuk penambahan kapasitas tampungan air antara lain: (1) Perencanaan bendungan multiguna dengan protokol berkelanjutan; (2) Perencanaan pemanfaatan tampungan alami; (3) Rehabilitasi bendungan kritis; (4) Pembangunan bendungan multiguna dengan melibatkan badan usaha. Strategi tersebut didukung oleh pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi berbasis bendungan multiguna serta penerapan skema investasi bendungan baru yang melibatkan badan usaha.

Strategi untuk peningkatan dan pemanfaatan fungsi tampungan air adalah: (1) Pemanfaatan bendungan untuk berbagai keperluan secara terpadu seperti air baku, irigasi, dan pengendali banjir; (2) Pengembangan potensi waduk untuk penyediaan energi terbarukan; (3) Revitalisasi danau kritis; (4) Pemanfaatan potensi danau untuk air baku, dan kebutuhan lainnya. Strategi tersebut didukung oleh peningkatan dan pemulihan kondisi waduk serta pengembangan

skema kerjasama dengan BUMN dan badan usaha dalam optimalisasi fungsi waduk.

Strategi untuk peningkatan kinerja bendungan dan penurunan risiko bendungan antara lain: (1) Peningkatan tingkat keamanan bendungan dengan risiko tinggi; (2) Konservasi daerah tangkapan air bendungan; (3) Peningkatan kapasitas SDM bidang pengelolaan bendungan; (4) Peningkatan kinerja operasi bendungan yang sesuai standar dan didukung oleh unit pengelola bendungan yang kompeten. Strategi tersebut didukung oleh penataan aset bendungan sebagai barang milik negara.

Strategi untuk peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi dengan penerapan konsep modernisasi irigasi antara lain: (1) Pembangunan jaringan irigasi baru dengan konsep modern; (2) Rehabilitasi jaringan irigasi untuk meningkatkan efisiensi air; (3) Peningkatan kapasitas kelembagaan irigasi; (4) Peningkatan efektivitas alokasi air irigasi; (5) Pemanfaatan lahan sub-optimal melalui revitalisasi.

Strategi untuk penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi antara lain: (1) Pembangunan tampungan air dan sistem irigasi untuk komoditas perkebunan, peternakan, hortikultura dan perikanan; (2) Pembangunan jaringan irigasi untuk tambak rakyat; (3) Pengembangan mikro irigasi terutama untuk lahan belum termanfaatkan dengan optimal.

Strategi tersebut didukung oleh peningkatan peran pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan kemitraan dengan badan usaha dalam pengelolaan irigasi.

Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur

Arah kebijakan dalam pembangunan infrastruktur ketahanan bencana mencakup pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta restorasi dan konservasi daerah aliran sungai.

Strategi untuk pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital terhadap risiko bencana banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, lumpur, dan sedimen antara lain: (1) Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur Tangguh bencana di kawasan prioritas rawan bencana; (2) Penilaian dan peningkatan keamanan infrastruktur vital terhadap bencana; (3) Penetapan standar bangunan tangguh bencana; (4) Pengembangan infrastruktur hijau. Strategi tersebut didukung oleh peningkatan kualitas industri konstruksi serta pengawasan mutu dan manajemen rantai pasok industri konstruksi. Kolaborasi antara lembaga penelitian dan pelaku industri dalam penguasaan teknologi juga perlu ditingkatkan serta didukung oleh peningkatan kualitas SDM di bidang konstruksi. Selain itu, perlu adanya inovasi pendanaan untuk meningkatkan efisiensi penganggaran dalam upaya peningkatan ketahanan bencana.

Strategi untuk mendukung pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana antara lain: (1) Peningkatan Program terintegrasi dalam pengelolaan risiko bencana, khususnya risiko banjir pada daerah perkotaan, dengan kombinasi pendekatan

struktural dan non-struktural termasuk infrastruktur hijau; (2) Penetapan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana; (3) Penyusunan peta risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah; (4) Pengembangan sistem pemantauan penurunan tanah; (5) Penyediaan sistem peringatan dini bencana banjir dan tanah longsor; (6) Koordinasi yang kuat dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Strategi untuk mendukung restorasi dan konservasi daerah aliran sungai antara lain: (1) Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai; (2) Konservasi kawasan rawa dan gambut; (3) Pengendalian pencemaran pada waduk dan danau dengan tingkat pencemaran tinggi; (4) Koordinasi dan kerjasama dengan KLHK dan Pemda setempat untuk konservasi dan restorasi daerah hulu.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Jalan

Arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan jalan dirumuskan sebagai upaya untuk dijadikan acuan dalam pencapaian agenda pembangunan infrastruktur konektivitas 2020-2024. Arah kebijakan penyelenggaraan jalan adalah Peningkatan Konektivitas Jalan Nasional, sementara strategi yang digunakan yakni Peningkatan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional yang dijabarkan dalam (i) Preservasi jalan; (ii) Pembangunan jalan dan jembatan; (iii) Penataan jalan nasional di kawasan perkotaan; (iv) dan Pemenuhan *Gap Funding* melalui Skema Pembiayaan Alternatif.

Preservasi Jalan

Peningkatan kualitas kemantapan jalan dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan. Pemeliharaan jalan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan nasional yang diukur dari rata-rata nilai kekasaran jalan (IRI), indeks perkerasan jalan (PCI), umur struktur jalan, dan drainase jalan. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan didorong melalui perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pembangunan Jalan dan Jembatan

Peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan wilayah dilaksanakan melalui pembangunan jalan pada jalan lintas utama pulau, jalan yang mendukung kawasan industri dan pariwisata prioritas, jalan akses ke simpul transportasi prioritas, jalan lingkaran/trans pulau terluar dan jalan akses mendukung wilayah 3T dan kawasan perbatasan. Sebagai contoh, penyelesaian jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Aceh – Lampung menjadi program prioritas untuk menurunkan waktu tempuh dan menyediakan akses ke pelabuhan utama Kuala Tanjung sehingga mendorong berkembangnya kawasan industri di sepanjang koridor tersebut. Pembangunan jalan akses ke simpul prioritas diarahkan untuk menjamin kemanfaatan infrastruktur secara optimal seperti pelabuhan dan bandara. Diperlukan penguatan koordinasi perencanaan pembangunan simpul transportasi dan akses jalan dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Penataan Jalan Nasional di Kawasan Perkotaan

Di perkotaan, daya dukung kawasan dan infrastruktur untuk menopang peri kehidupan sosial ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Tingkat urbanisasi dan perluasan wilayah perkotaan yang tinggi, tidak disertai dengan kemampuan kota untuk menyediakan infrastruktur yang optimal melayani warga perkotaan. Sejumlah kota besar tidak mampu menyediakan rasio luas jalan yang memadai sebagaimana tersedia di sejumlah kota-kota di negara maju hingga 20% dari luas area (DKI Jakarta sekitar 6,2%, Bandung 4,4%). Kondisi tersebut menyebabkan kemacetan lalu lintas sudah menjadi hal yang biasa di sejumlah kota besar di Indonesia, di mana kecepatan rata-rata kendaraan di jalan (terutama di jam sibuk) sudah kurang dari 20 km/jam (Jabodetabek 5 km/jam, Bandung 12 km/jam, Surabaya 11 km/jam).

Rencana peningkatan pelayanan jaringan jalan perkotaan melalui pemeliharaan jalan perkotaan yang efektif dan efisien serta peningkatan kapasitas jalan perkotaan berkeselamatan yang mendukung keterpaduan transportasi masal perkotaan, diantaranya: (i) Revitalisasi jaringan jalan perkotaan terutama penataan jalan nasional dengan konsep jalan lingkaran agar tidak mengganggu lalu lintas dalam kota; (ii) Penataan simpang sebidang untuk mengurangi kemacetan jalan di persimpangan; (iii) Dukungan jalan pada pengembangan moda transportasi angkutan masal; (iv) Pengembangan jaringan jalan baru di wilayah perkotaan dengan memanfaatkan ROW jalan eksisting berupa *elevated/submerged road* untuk meminimalisir pengalihan lahan yang biayanya sangat tinggi di perkotaan; (v) Perbaikan kondisi jalan perkotaan dengan menyediakan sistem drainase yang lebih untuk mencegah banjir dan trotoar yang ramah pejalan kaki; (vi) Optimalisasi metode pembangunan simpang tak sebidang (*fly over*) terutama lintasan kereta api dengan pemanfaatan lahan seminimal mungkin.

Pemenuhan Gap Funding melalui Skema Pembiayaan Alternatif

Dengan ruang fiskal APBN yang sempit, agenda pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan memaksa adanya percepatan kebijakan anggaran, di mana secara gradual APBN infrastruktur mengalami peningkatan: dari Rp 256,1 Triliun di Tahun 2015 menjadi Rp 415,0 Triliun di Tahun 2019. Selain itu, sumber pembiayaan swasta (PINA, KPBU, penunjukan BUMN) untuk infrastruktur juga mengalami peningkatan pesat. Khusus untuk jalan tol, diestimasi kebutuhan investasi sampai dengan tahun 2019 sekitar 224 Triliun (dan sebagian besar dari swasta). Optimalisasi sistem preservasi jalan nasional yang mengutamakan kegiatan pemeliharaan dan diupayakan menggunakan skema KPBU-AP. Hampir sekitar 50% sumber pendanaan untuk program penyelenggaraan jalan periode 2020-2024 berasal dari APBN Ditjen Bina Marga yang dialokasikan untuk pembangunan dan preservasi jalan nasional berikut kegiatan dukungan manajemen dan teknisnya. Sumber terbesar kedua adalah dari skema KPBU/PINA sekitar 30% yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan, preservasi, dan pengoperasian jalan bebas hambatan (tol) serta pembangunan jembatan bentang panjang dengan mekanisme pengembalian investasi melalui *user pay/tol*. Skema Kerjasama

Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) *Availability Payment* (AP) yang berbasis kinerja serta Program Hibah Jalan Daerah yang mendorong kinerja pemeliharaan jalan perlu diperluas. Skema KPBU-AP juga mendukung kualitas jalan melalui keterpaduan penyelenggaraan jalan dan pengoperasian jembatan timbang untuk mengendalikan perilaku pembebanan berlebih di jalan (*Over Dimension Over Loading*).

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Smart living yang tertuang dalam Visium Kementerian PUPR dimaknai sebagai permukiman cerdas. Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan *smart living* adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan. Kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman sebagai penjabaran dari arah kebijakan tersebut, meliputi:

- a. Membangun sistem penyediaan infrastruktur permukiman berbasis entitas, yang andal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inklusif (termasuk pengarusutamaan gender), berkelanjutan, serta bersifat *return of investment*, dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur permukiman.
- b. Mendukung kontribusi dan kemandirian Pemerintah Daerah serta partisipasi semua pihak dalam rangka keberhasilan pengelolaan infrastruktur permukiman.
- c. Menerapkan inovasi terbaru dan/atau tepat guna dalam implementasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman.

Kebijakan Peningkatan Akses Air Minum Layak dan Aman

Kebijakan peningkatan akses air minum layak dan aman meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum;
- b. Peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM;
- c. Peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait pendanaan;

Adapun strategi peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum, yaitu:

- a. Meningkatkan cakupan akses air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi 4K (Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas) dalam rangka pemenuhan SPM, termasuk pada kawasan rawan air dan pulau kecil terluar melalui penurunan kebocoran (*Non-Revenue Water/NRW*), pemanfaatan *idle capacity*, dan pembangunan kapasitas;
- b. Koordinasi intensif dalam rangka menjamin ketersediaan air baku;
- c. Menerapkan SPAM regional untuk mengatasi ketidakmerataan air baku;

- d. Menerapkan konsep bauran air baku domestik dalam mendukung ketahanan air baku;
- e. Menerapkan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)/ *Water Safety Plan* (WSP) dalam menjamin pemenuhan kualitas air minum;
- f. Pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendukung efisiensi proses, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kawasan air dan pulau kecil terluar;
- g. Mendorong percepatan serah terima dan pengelolaan aset SPAM terbangun kepada Pemerintah Daerah.

Selain itu, strategi peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM ialah:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM di tingkat pusat dan daerah;
- b. Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi daerah dalam penyelenggaraan SPAM;
- c. Memperkuat penyusunan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi NSPK terkait penyelenggaraan SPAM;
- d. Memperkuat peran *stakeholders* termasuk masyarakat dan Badan Usaha;
- e. Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan antar kementerian/lembaga;
- f. Menerapkan prinsip *Good Governance* untuk penyelenggaraan SPAM;
- g. Pemanfaatan data dan sistem informasi dalam penyelenggaraan SPAM.

Lalu, strategi peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen *stakeholder* terkait pendanaan ialah:

- a. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pendanaan penyelenggara SPAM;
- b. Mengembangkan alternatif sumber pembiayaan;
- c. Meningkatkan peran dan komitmen penyelenggara SPAM dalam alokasi pendanaan.

Kebijakan Peningkatan Akses Sanitasi Layak dan Aman

Kebijakan peningkatan akses sanitasi layak dan aman dilakukan dengan:

- a. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi;
- b. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi;
- c. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi;
- d. Penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi;
- e. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

Adapun strategi peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah domestik baik melalui penyediaan sarana prasarana SPALD setempat maupun terpusat dan persampahan khususnya pada Kabupaten/Kota Prioritas;
- b. Fasilitasi pemerintah daerah dalam peningkatan utilisasi sarana prasarana terbangun;

- c. Fasilitasi penyiapan *readiness criteria* pada Kabupaten/Kota Prioritas;
- d. Mengembangkan dan penerapan kajian inovasi teknologi;
- e. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan *platform database* sanitasi lainnya;
- f. Penguatan monitoring dan evaluasi implementasi program sanitasi (pengelolaan dan berkelanjutan).

Selain itu, strategi peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi ialah:

- a. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan, pengembangan sistem pengelolaan sanitasi;
- b. Mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sanitasi.

Adapun strategi pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi adalah:

- a. Penyusunan NSPK yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan sanitasi;
- b. Mendorong penguatan regulasi pengelolaan sanitasi di daerah.

Adapun strategi penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi adalah:

- a. Mendorong dan menjaga komitmen kepala daerah dan pemangku kepentingan lain dalam pengarusutamaan pembangunan sanitasi di daerah;
- b. Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola sanitasi di daerah;
- c. Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola sanitasi ditingkat masyarakat;
- d. Mengembangkan dan mengkoordinasikan mekanisme serah terima aset sarana prasarana terbangun kepada daerah yang lebih efektif.

Adapun strategi pengembangan alternatif sumber pembiayaan adalah:

- a. Mendorong peningkatan pemulihan biaya (*circular economy*) dalam pengelolaan sanitasi;
- b. Sinkronisasi pemrograman pada berbagai sumber pendanaan untuk penyelenggaraan sanitasi;
- c. Mendorong kerjasama pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bidang sanitasi.

Kebijakan Peningkatan Kualitas Permukiman:

Kebijakan peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan:

- a. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman;
- b. Pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu;
- c. Pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan.

Adapun strategi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman adalah:

- a. Pendampingan dan penguatan komitmen Pemda dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai acuan kabupaten/kota;
- b. Pengendalian kegiatan penyelenggaraan kawasan permukiman melalui penerapan standar teknis bidang permukiman;
- c. Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan dan komitmen seluruh *stakeholder* dalam penyelenggaraan kawasan permukiman.

Selain itu, strategi pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu adalah:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman berdasarkan isu strategis, kebutuhan kawasan, dan keterpaduan penanganan;
- b. Memperluas peluang sumber pembiayaan lainnya secara proporsional dalam penganggaran.

Strategi pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan dilakukan dengan:

- a. Menata kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui pengembangan permukiman yang telah ada;
- b. Mendukung pengembangan pusat kegiatan baru melalui pembangunan baru kawasan permukiman;
- c. Memulihkan daya dukung kawasan yang terdampak bencana melalui pembangunan kembali;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman.

4. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan

Arah kebijakan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif yang akan dilaksanakan dengan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan (termasuk TOD), industri (KI/KEK), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya; (2) Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/perbatasan/tertinggal/terluar, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya; (3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan, serta untuk mendukung pengembangan fungsi pariwisata; (4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk

perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas.

- b. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan *land banking* untuk mendukung pengembangan perumahan MBR dan *millennials*; (2) Kolaborasi dengan pemda, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan; (3) Pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan; (4) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan; (5) Penguatan implementasi standar keamanan bangunan dan kesehatan; (6) Pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi; (7) Perlindungan konsumen dan pengembang perumahan; (8) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR; (9) Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan melalui pembinaan dan dukungan kebijakan.
- c. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dengan strategi: (1) Dukungan pengoptimalan potensi pengembangan perumahan berbasis komunitas/keompok masyarakat yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha; (2) Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang; (3) Dukungan pengintegrasian hunian vertikal untuk MBR dengan simpul transportasi umum/TOD; (4) Dukungan pengembangan sistem rumah umum (*public housing*) melalui perumusan regulasi, pembentukan kelembagaan, serta pengintegrasian dengan rumah sewa (*rental housing*), terutama pada 6 kawasan metropolitan prioritas; (5) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema lainnya) untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan berbasis komunitas/keompok masyarakat dan perumahan swadaya bagi MBR; (6) Pengembangan klinik perumahan; (7) Dukungan Pengembangan *system housing career*; (8) Penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan.

5. Arah Kebijakan dan Strategi Perencanaan Pembangunan Kewilayahan

Fokus utama yang akan menjadi kebijakan BPIW dimasa mendatang dalam rangka menjawab tugas dan fungsi BPIW adalah berikut:

- a. Kebijakan Peningkatan kualitas penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu pengembangan infrastruktur wilayah yang didukung oleh perangkat yang memadai termasuk mencakup panduan penyusunan rencana induk dan legalitas produk. Adapun Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan peningkatan kualitas penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu dilakukan melalui pendekatan: (1) Penyusunan Kebijakan Strategi Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Perencanaan Pemrograman dan

Pembiayaan) antara lain Kerangka Spasial Renstra PUPR, Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Panjang (RPIJP); Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) yang menurunkan arahan pengembangan wilayah dari RPJMN 2020 – 2024; (2) Penyusunan Database untuk simulasi kebijakan, antara lain Sibas RIPI (Sistem Informasi Database *Online* Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR) dan SIPRO (Sistem Informasi Pemrograman); (3) Sinkronisasi Program Pengembangan Infrastruktur yang merupakan agenda rutin pemrograman PUPR yang akan diinisiasi oleh BPIW setiap tahunnya dalam bentuk: (i) Agenda Forum Rakorbangwil sebagai media komunikasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya guna menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Penanganan Kawasan Prioritas; serta (ii) Agenda Pra Konsultasi Regional dengan melibatkan Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian PUPR sebagai proses lanjutan Forum Rakorbangwil guna memastikan perwujudan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; (4) Analisa Manfaat perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang digunakan untuk mengukur kebermanfaatan pembangunan infrastruktur PUPR sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah di Indonesia sekaligus memproyeksikan kebermanfaatan ekonomi dan sosial dari pengembangan infrastruktur PUPR agar dapat menjawab Visi dan Misi Presiden untuk menjalankan RPJMN 2020-2024.

- b. Kebijakan Peningkatan kualitas pemrograman pembangunan infrastruktur wilayah. Adapun Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemrograman pembangunan infrastruktur wilayah dilakukan melalui pendekatan: (1) Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR berbasis Pengembangan Wilayah yang merupakan arahan program Program Jangka Menengah (PJM)/(MP/DP) baik pada level Kawasan maupun level Perkotaan yang dilakukan analisis prioritisasi kawasan dengan mengacu arahan RPJMN 2020-2024 (termasuk *Major Project* 2020-2024) serta dokumen perencanaan lainnya seperti RTRWN (PP Nomor 13 Tahun 2017), Peraturan Perundang-undangan Sektoral (PP Nomor 50 Tahun 2011 Tentang RIPARNAS 2010-2025; PP tentang KEK; PP 14 Tahun 2015 Tentang RIPIN 2015-2035, dll.) termasuk MP/DP yang telah disusun BPIW sejak 2015 – 2019; (2) Pelaksanaan Kerjasama (termasuk inkubasi kawasan); (3) Evaluasi Kinerja Kawasan sebagai alat ukur kebutuhan infrastruktur atau gap infrastruktur bidang PUPR; (4) Pengembangan *database* wilayah.
- c. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya: (1) Penyusunan NSPK dalam rangka Penyusunan Peraturan Perundangan Lingkup PIW; (2) Pengembangan SDM dan Ortala untuk penguatan sumber daya manusia perencanaan termasuk upaya peningkatan kualitas jabatan fungsional; (3) Pemrograman dan Monitoring dan Evaluasi yang merupakan agenda rutin tahunan untuk melakukan penyusunan program internal serta pemantuan dan evaluasi pemrograman internal BPIW; (4) Perencanaan umum sebagai acuan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur BPIW pada tahun 2020 hingga 2024 dalam rangka menjalankan amanat RPJMN 2020 – 2024

dan Fasilitasi Instrumen Simulasi Kebijakan dalam bentuk studio peta; (5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya termasuk, Layanan Umum, Keuangan, dan BMN termasuk Penyelesaian BMN Tata Ruang (Aset tanah, bangunan, dan gedung/anjungan cerdas) serta tindak lanjut audit; (6) Kehumasan, dan layanan informasi untuk memperkenalkan eksistensi organisasi perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR sekaligus menyajikan data dan informasi produk-produk perencanaan pengembangan infrastruktur wilayah.

6. Arah Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur

Kebijakan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan meliputi: (1) Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan; (2) Peningkatan keterpaduan Infrastruktur PU dan Perumahan terhadap pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS); (3) Penataan dan peningkatan peran simpul KPBU dalam percepatan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan; (4) Peningkatan kontribusi pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan dalam mendukung pencapaian Visium 2020–2024; (5) Peningkatan dan percepatan pelaksanaan proses pengadaan KPBU; (6) Pengembangan skema pembiayaan yang lebih terjangkau, efisien dan akuntabel; (7) Peningkatan penerbitan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan baik untuk pemilikan rumah tapak dan rumah susun serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya; (8) Peningkatan peran perbankan yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan; (9) Peningkatan peran lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi, dan pemberian pinjaman (*refinancing*); (10) Percepatan operasionalisasi BP Tapera; (11) Mendorong peran serta Pemda dalam pembiayaan perumahan, melalui sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi.

Adapun strategi yang akan ditempuh meliputi: (1) Revisi atas Peraturan Menteri PUPR terkait tata cara pelaksanaan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (2) Peningkatan koordinasi antara simpul KPBU, Unit Organisasi di Kementerian PUPR dengan Kantor Bersama KPBU; (3) Penyusunan Rencana Umum proyek KPBU Infrastruktur PU dan Perumahan selaras dengan Renstra Kementerian PUPR dan RPJMN 2020 – 2024; (4) Pengembangan skema pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan; (5) Peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur PU dan Perumahan melalui *bundling* infrastruktur; (6) Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berfungsi sebagai *bridging finance* KPBU bidang PUPR dan *vehicle* dalam menjalankan tugas dan fungsi DJPI; (7) Relaksasi ketentuan pembayaran ketersediaan layanan (AP) untuk proyek *unsolicited*; (8) Percepatan dan penyederhanaan proses pengajuan proyek *unsolicited* dari badan usaha pemrakarsa; (9) Percepatan tahap penyiapan KPBU melalui penggabungan Studi Pendahuluan (SP) dan *Outline Business Case* (OBC) menjadi dokumen permohonan PDF (DPP); (10) *Refocusing* kegiatan penyiapan proyek KPBU bidang

PU dan Perumahan; (11) Alokasi APBN untuk mendukung KPBU dalam meningkatkan daya ungkit dan *scale up* pembiayaan infrastruktur; (12) Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan penerbitan KPR Rumah Umum; (13) Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan skema pembiayaan perumahan untuk rumah umum dan rumah swadaya dari sisi *demand* dan *supply*; (14) Mengembangkan pemanfaatan dana Tapera untuk memfasilitasi MBR sektor informal, penyediaan uang muka, dan penyediaan lahan; (15) Peningkatan peran Badan Usaha dalam penyediaan perumahan; (16) Mempercepat penyiapan infrastruktur operasionalisasi BP TAPERA; (17) Mendorong peran serta Pemda dalam Pembiayaan Perumahan; (18) Mendorong kerjasama dan investasi Badan Usaha untuk mendukung *major project* perumahan publik.

7. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan Jasa Konstruksi

Arah kebijakan dan strategi pembinaan konstruksi ditujukan untuk mendukung percepatan pencapaian 3 sasaran program pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi (1) meningkatnya pengelolaan sumber daya air, (2) meningkatnya konektivitas jalan nasional, dan (3) meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak dan aman serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan pelaksanaan program peningkatan kualitas sumber daya konstruksi. Untuk mendukung percepatan pencapaian 3 sasaran program tersebut maka disusun 5 arah kebijakan dan strateginya, yaitu:

- a. Peningkatan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten, melalui:
 - (1) Peningkatan jumlah dan kualitas instruktur dan asesor bidang konstruksi; (2) Pengembangan SKKNI dan modul pelatihan konstruksi; dan (3) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi, termasuk SDM vokasional.
- b. Mendorong peningkatan kinerja penyedia jasa dan kemitraan usaha antar kualifikasi dan klasifikasi melalui penerapan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Jasa pada seluruh paket pekerjaan jasa konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR.
- c. Menyediakan informasi material, peralatan, dan teknologi konstruksi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur, mendorong efisiensi biaya logistik, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri.
- d. Peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, melalui: (1) Peningkatan penerapan manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), prinsip-prinsip konstruksi berkelanjutan dan pembinaan kontrak konstruksi; (2) Peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa.
- e. Peningkatan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sub bidang jasa konstruksi, melalui: (1) Mengoptimalkan potensi masyarakat jasa konstruksi untuk pembinaan konstruksi; (2) Peningkatan pengawasan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi; (3) Mendorong peningkatan kinerja OPD sub bidang jasa konstruksi; dan (4) Pengembangan kerja sama antar Lembaga.

8. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan SDM

Kebijakan dan strategi pengembangan SDM Aparatur meliputi:

- a. Akselerasi pengembangan *talent pool* untuk menyiapkan calon suksesor sebagai calon pemimpin yang i-ProVe yang akan dilaksanakan melalui: (1) Pengembangan pelaksanaan *talent mapping* (pemetaan pegawai); (2) Internalisasi manajemen talenta sebagai upaya penanaman *talent mindset*; (3) Peningkatan implementasi manajemen kinerja melalui pengembangan sistem pemantauan kinerja operasional SDM; (4) Integrasi talenta PUPR dengan talenta nasional.
- b. Pengembangan kompetensi ASN yang akan dilaksanakan melalui: (1) Peningkatan proporsi praktek pada pelatihan; (2) Pelaksanaan OJT/program magang pada proyek infrastruktur; (3) Peningkatan pelaksanaan sertifikasi profesi; (4) Mengembangkan jalur pengembangan kompetensi melalui jalur non klasikal/non pelatihan; (5) Penyesuaian proporsi penganggaran pengembangan kompetensi melalui jalur non klasikal/non pelatihan; dan (6) Peningkatan kolaborasi dengan unit organisasi untuk implementasi jalur non klasikal/non pelatihan.
- c. Akselerasi pengembangan kompetensi ASN yang akan dilaksanakan melalui: (1) Pengembangan berbagai metode dan media pembelajaran yang modern dan adaptif dengan kebutuhan di lapangan; (2) Transformasi pelatihan ke arah digital; (3) Pengembangan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan yang bersertifikasi level internasional; (4) Pengembangan *Human Resource Development System*; (5) Modernisasi sarana dan prasarana pengembangan kompetensi; (6) Pembangunan kompetensi kolektif SDM melalui pelaksanaan *coaching, mentoring, dan counseling* (CMC) oleh unit organisasi untuk mendorong produktifitas inovasi.
- d. Pengembangan *vocational school* yang akan dilaksanakan melalui: (1) Pengembangan Politeknik PU yang berkelas internasional; (2) Pengembangan Politeknik PU di beberapa wilayah; (3) Akselerasi proses akreditasi Politeknik PU terakreditasi A; (4) Membekali lulusan Politeknik PU yang bersertifikasi profesi di bidang strategis.
- e. Peningkatan kualitas program pendidikan lanjutan lebih aplikatif yang akan dilaksanakan melalui: (1) *Quality Assurance* proses rekomendasi peserta program magister dan doctoral; (2) Peningkatan kerja sama dengan institusi lembaga pendidikan terbaik; (3) Peningkatan kerja sama dengan lembaga donor dalam dan luar negeri; (4) Pembentukan Program Magister Super Spesialis.
- f. Akselerasi pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN bidang PUPR di Daerah yang akan dilaksanakan melalui: (1) Peningkatan proporsi jumlah peserta/kuota untuk ASN PUPR di Daerah; (2) Pengembangan pola dan meningkatkan kerjasama dengan Badan atau Lembaga Diklat/Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah; dan (3) Peningkatan pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan Pemerintah Daerah.
- g. Penguatan kelembagaan yang akan dilaksanakan melalui: (1) Akreditasi Balai Penilaian Kompetensi dan Balai-Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah sebagai referensi Balai di Pemerintah Daerah; (2) Penguatan sistem dan

tata kelola BPSDM berbasis teknologi; (3) Modernisasi prasarana sarana dan peningkatan kapabilitas SDM penyelenggaraan pelatihan untuk mendukung percepatan peningkatan kompetensi; (4) Peningkatan jejaring dan forum kerjasama dengan *stakeholder* nasional dan internasional; (5) *Branding* pengembangan SDM PUPR untuk komunikasi publik dan menarik talenta, dan (6) Pengembangan BPSDM sebagai LSP.

9. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan

Arah kebijakan pengawasan penyelenggaraan pembangunan yaitu peningkatan akuntabilitas kinerja dan Keuangan yang akan dilaksanakan melalui: (1) Peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Internal kinerja dan keuangan Pemerintah (SPIP); (2) Peningkatan Pengendalian penyelenggaraan infrastruktur melalui implementasi *Continuous Audit Continuous Monitoring* (CACM); (3) Mendorong efektivitas unit kepatuhan internal; (4) Pengembangan SDM yang profesional dan berintegritas; (5) Penguatan implementasi Reformasi Birokrasi melalui kebijakan *roadmap* RB tahun 2020-2024; (6) Penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); (7) Berperan aktif dalam Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) untuk meningkatkan kualitas pengawasan; (8) Pengembangan NSPK dalam kegiatan pengawasan.

10. Arah Kebijakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pembangunan

Kebijakan tata kelola penyelenggaraan pembangunan diarahkan pada upaya mendorong penerapan Inovasi Tata Kelola Administrasi Kementerian PUPR dengan strategi: (1) Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE); (2) Mewujudkan birokrasi yang profesional, tepat, cepat dan akuntabel; (3) Peningkatan kualitas tata kelola keuangan, administrasi penganggaran dan BMN Kementerian PUPR yang transparan dan akuntabel; (4) Peningkatan kualitas pelayanan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR kewenangan daerah yang transparan dan akuntabel; (5) Penataan layanan hukum (fasilitasi produk hukum dan advokasi yang adaptif); (6) Peningkatan penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik; (7) Peningkatan kenyamanan bekerja bagi pegawai Kementerian PUPR; (8) Peningkatan kualitas layanan kajian dan pemantauan kebijakan Menteri.

3.2.3 Program dan Kegiatan Pembangunan

Arah kebijakan dan strategi akan dilaksanakan melalui 5 program dan 50 kegiatan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Gambar 3.5 Redesain Program Kementerian PUPR

	PROGRAM EKISTING	REDESAIN PROGRAM
SETJEN	- Program Dukungan Manajemen - Program Peningkatan Sopas ASN Kementerian PUPR	Program Dukungan Manajemen
IEJEN	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR	Program Dukungan Manajemen
BPSDM	Program Pengembangan SDM Bidang PUPR	- Program Dukungan Manajemen - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
RPIW	Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Program Dukungan Manajemen
DJIK	Program Pembinaan Konsultasi	- Program Dukungan Manajemen - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
DJPI	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	- Program Dukungan Manajemen - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
DJCK	Program Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	- Program Dukungan Manajemen - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
DJP	Program Pengembangan Perumahan	- Program Dukungan Manajemen - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
DJSDA	- Program Pengelolaan Sumber Daya Air - Program Pengendalian Lumpur Sidoarjo	- Program Dukungan Manajemen - Program Ketahanan Sumber Daya Air
DJMA	Program Penyelenggaraan Jalan	- Program Dukungan Manajemen - Program Infrastruktur Konektivitas

- Program Ketahanan Sumber Daya Air**, terdiri dari kegiatan: (1) Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku; (2) Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai; (3) Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya; (4) Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi; (5) Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana; (6) Layanan Teknis SDA; (7) Pengendalian Lumpur Sidoarjo; (8) Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi; (9) Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; (10) Layanan Kesekretariatan Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN).
- Program Infrastruktur Konektivitas**, terdiri dari kegiatan: (1) Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional; (2) Pengaturan, Pengusahaan, dan Pengawasan Jalan Tol; (3) Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**, terdiri dari kegiatan: (1) Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung; (2) Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan; (3) Penyelenggaraan Air Minum yang Layak; (4) Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak; (5) Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Permukiman; (6) Penyediaan Akses Rumah Layak Huni; (7) Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan.

4. **Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi** terdiri dari kegiatan: (1) Penyelenggaraan Pelatihan Vokasional Bidang Konstruksi; (2) Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum.
5. **Program Dukungan Manajemen**, terdiri dari kegiatan: (1) Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum; (2) Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai, Organisasi dan Tatalaksana; (3) Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Advokasi Hukum; (4) Penyelenggaraan Fasilitas Infrastruktur Daerah; (5) Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik; (6) Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Bidang PUPR; (7) Pengkajian dan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan; (8) Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal; (9) Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air; (10) Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga; (11) Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman; (12) Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan; (13) Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Tugas Teknis Lainnya; (14) Pengembangan Infrastruktur Wilayah; (15) Penyelenggaraan Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1, Informasi Jasa Konstruksi, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; (16) Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; (17) Pembinaan Kinerja Kelembagaan dan Dukungan Material, Peralatan, dan Teknologi Konstruksi; (18) Pembinaan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi; (19) Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi; (20) Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi; (21) Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia; (22) Penyelenggaraan Pengembangan Talenta; (23) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Bidang PUPR; (24) Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan; (25) Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR; (26) Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; (27) Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan; (28) Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

3.3

KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi yang disusun menjelaskan mengenai gambaran umum kebutuhan regulasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangannya dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis.

Pada periode 2020 – 2024 terdapat 96 buah kerangka regulasi yang akan disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdiri dari: 1 Undang-Undang (UU); 13 Peraturan Pemerintah (PP); 4 Peraturan Presiden (Perpres); 59 Peraturan Menteri (Permen PUPR); dan 22 dokumen kerangka regulasi lainnya yang berbetuk (Keputusan Menteri, SK Dirjen/Kepala Badan, Manual/Pedoman/Standar, dan Regulasi lainnya. Adapun jumlah regulasi yang

akan disusun per bidang/sektor terdiri dari: Sumber Daya Air 3 peraturan; Jalan dan Jembatan 22 peraturan; Permukiman 12 peraturan; Perumahan 11 peraturan; Perencanaan Wilayah 7 peraturan; Pembiayaan Infrastruktur 17 peraturan; Pembinaan Konstruksi 9 peraturan; Pengawasan Pembangunan 6 peraturan; dan Tata Kelola Administrasi Pembangunan 11 peraturan.

Daftar regulasi yang akan disusun selengkapnya terdapat pada Lampiran 1.

3.4

KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan menjelaskan kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, dan tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kerangka kelembagaan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 yang merupakan arahan dalam penataan birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.

Tabel 3.3 Area Perubahan dan Hasil yang Diharapkan Grand Reformasi Birokrasi 2010 – 2024

AREA	HASIL YANG DIHARAPKAN
Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)
Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
Peraturan Perundangundangan	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif
Sumber daya manusia aparatur	SDM apatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera
Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Pola pikir (<i>mind set</i>) dan Budaya Kerja (<i>culture set</i>) Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan *Grand Skenario* Perubahan Birokrasi 2012 – 2025, di mana pada periode 2020 – 2024 birokrasi di Kementerian telah menjadi birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi sehingga mampu memberikan pelayanan prima pada seluruh kegiatan.

**Gambar 3.6 Grand Skenario Perubahan Birokrasi Kementerian PUPR
2012-2025**



3.4.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2020 - 2024 disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dalam mencapai Sasaran Strategis. Struktur organisasi disusun berdasarkan prinsip *right size* dan *right function* (organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi) sehingga terwujud organisasi kerja yang efektif dan efisien.

Penataan organisasi pada tingkat unit organisasi dilakukan dengan menggabungkan fungsi-fungsi yang menangani pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang selama ini tersebar di beberapa unit organisasi menjadi 1 (satu) unit organisasi yaitu pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Unit yang digabungkan meliputi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Direktorat Bina Investasi Infrastruktur yang semula berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Unit Organisasi Penelitian dan Pengembangan dilakukan restrukturisasi dengan meniadakan unit ini dan menggabungkan pelayanan ke-litbangan pada masing-masing Unit Organisasi teknis. Dengan demikian, maka organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi lebih ramping dengan 10 Unit Organisasi yang semula 11 Unit Organisasi.

Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas fasilitasi pembangunan infrastruktur di daerah ditambahkan unit kerja yaitu Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah yang berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal.

Gambar 3.7 Skema Perubahan Organisasi Kementerian PUPR



Penataan organisasi pada tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) disesuaikan dengan perannya sebagai satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Agar lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugas, penataan UPT distrukturkan kembali pembagian kerjanya berdasarkan pola kewilayahan.

Gambar 3.8 Skema Perubahan Organisasi UPT dan Satker SNVT



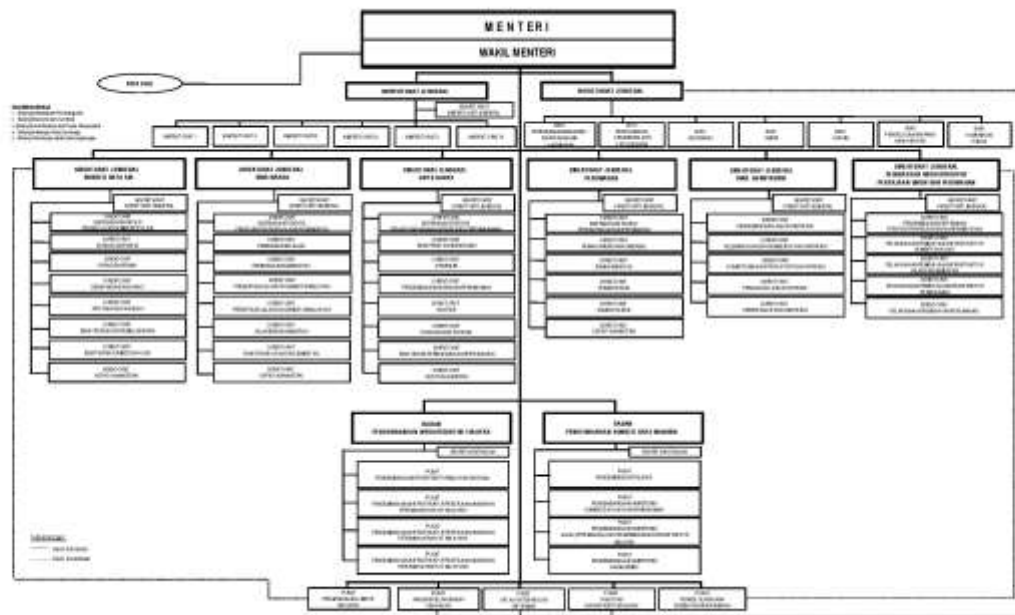
Untuk meningkatkan kinerja pelayanan jalan tol dan pelayanan akses air minum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki 2 (dua) lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yaitu Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2016. Akan tetapi, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menetapkan pembubaran 18 lembaga termasuk BPPSPAM, sehingga fungsi dan output BPPSPAM dialihkan untuk dilaksanakan oleh Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya dan

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga memiliki Politeknik yang merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang pekerjaan umum. Politeknik dibentuk melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pekerjaan Umum.

Politeknik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Politeknik mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pekerjaan umum.

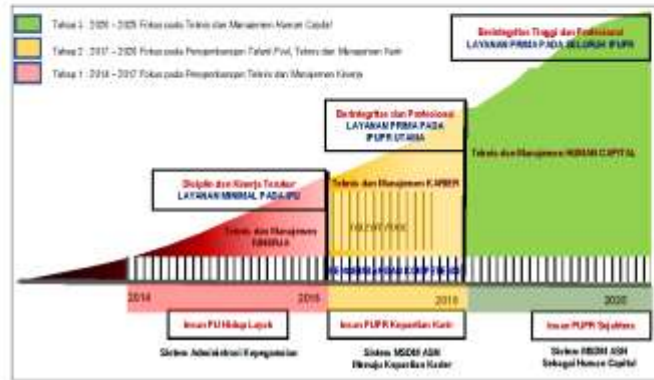
Gambar 3.9 Struktur Organisasi Kementerian PUPR



3.4.2 **Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pengelolaan SDM aparatur ditujukan bagi terwujudnya SDM aparatur yang memiliki integritas tinggi dan professional dalam pelaksanaan tugas yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam pencapaian Sasaran Strategis. Untuk mencapai kondisi tersebut telah ditetapkan strategi dan milestone manajemen SDM Kementerian PUPR menuju layanan prima 2025, di mana pada tahap ke 3 (2020 – 2025) difokuskan pada Teknis dan Manajemen *Human Capital*.

Gambar 3.10 Strategi dan Milestone Manajemen SDM PUPR Menuju Pelayanan Prima 2025



Arah kebijakan dalam pengelolaan SDM yaitu melanjutkan hasil pemetaan gap kompetensi (standar kompetensi vs hasil assesmen), penerapan kode etik dan perilaku, pengembangan budaya integritas, optimasi SDM IT secara massif, penguatan kompetensi SDM melalui sertifikasi profesi untuk jafung/kepakaran prioritas PUPR, penguatan budaya integritas, penguatan talent management, dan pengelolaan posisi kunci. Penguatan kompetensi SDM dilakukan sesuai dengan jenjang kompetensi dan peran masing-masing.

Gambar 3.11 Tahapan Penguatan Kompetensi SDM Penyelenggara Infrastruktur PUPR

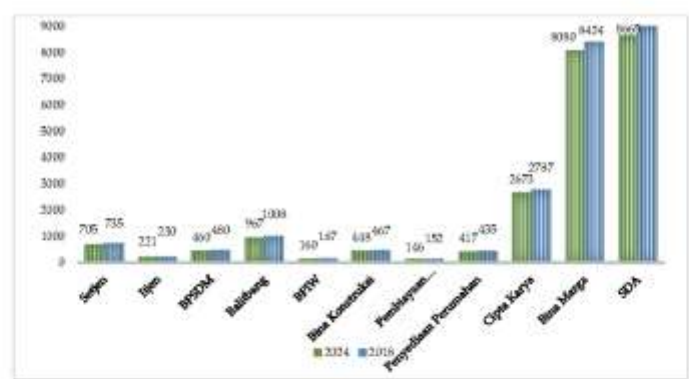


Pada Tahun 2018, jumlah pegawai Kementerian PUPR sebanyak 22.864 orang, terdiri dari Jabatan Struktural dan Fungsional. Seluruh pegawai terdistribusi ke dalam Unit Organisasi yang dikelompokkan menjadi (1) Unit Organisasi *Core Process*, yaitu unit organisasi yang memiliki tugas-fungsi yang secara langsung membangun infrastruktur; (2) Unit Organisasi *Techno-Structure* yang memiliki tugas-fungsi pendukung terhadap terhadap proses penyediaan infrastruktur; dan (3) Unit Organisasi *Supporting* yang memiliki tugas-fungsi manajemen umum.

Pada kategori *Core-Process*, jumlah pegawai terbanyak di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (8.665 orang) dan Direkorat Jenderal Bina Marga (8.080 orang). Selanjutnya Direktorat Jenderal Cipta Karya (2.673 orang), Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan (417 orang), dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan relatif sangat sedikit (146 orang). Dari kategori *Techno-Structure*, Balitbang memiliki pegawai 967 orang, BPSDM (460 orang), Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (448 orang), dan BPIW (160 orang). Dari kategori *Supporting*, pegawai Sekretariat Jenderal (705 orang) dan Inspektorat Jenderal (312 orang).

Untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian PUPR, pegawai Kementerian PUPR pada tahun 2024 diproyeksikan berjumlah 24.109 orang dengan komposisi yaitu: Unit Organisasi *Core Process* terdiri dari: Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (9.034 orang), Direktorat Jenderal Bina Marga (8.424 orang), Direktorat Jenderal Cipta Karya (2.787 orang), Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sebanyak 435 orang dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan sebanyak 152 orang. Unit Organisasi *Techno-Structure* terdiri dari: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebanyak 467 orang, BPIW sebanyak 167 orang, fungsi Balitbang yang tersebar saat ini di unit organisasi teknis sebanyak 1.008 orang dan BPSDM sebanyak 480 orang. Unit Organisasi *Supporting* yaitu Sekretariat Jenderal sebanyak 735 orang dan Inspektorat Jenderal sebanyak 379 orang.

Gambar 3.12 Komposisi SDM Kementerian PUPR Per Unit Organisasi Tahun 2018 - 2024



Komposisi SDM Kementerian PUPR dari tingkat Pendidikan pada tahun 2018, terdiri dari non sarjana 10.831 orang (45,2%), sarjana S1 9.235 orang, sarjana S2 3.552 orang (39,0%), dan sarjana S3 56 orang (15,5%). Secara bertahap komposisi SDM diupayakan peningkatan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga pada tahun 2024, komposisi pegawai untuk non sarjana menjadi 29,4%, untuk sarjana S1 dan S2 menjadi 46,8%, dan untuk sarjana S3 sebanyak 23,2%.

Gambar 3.13 Komposisi Tingkat Pendidikan SDM Kementerian PUPR Tahun 2018 - 2024

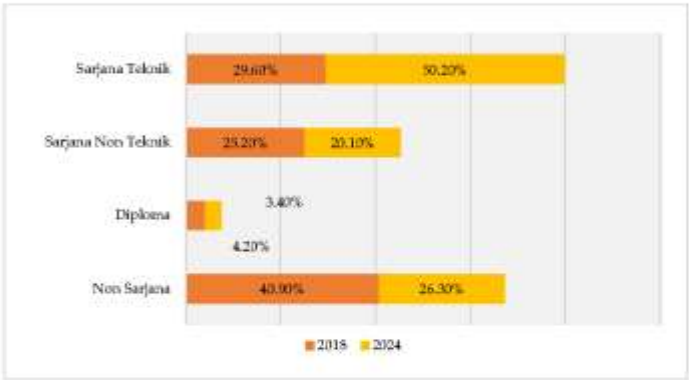


Seiring dengan beban tugas yang semakin meningkat, maka komposisi kompetensi SDM Aparatur perlu disesuaikan antara kompetensi Teknik dan Non Teknik. Pada tahun 2018 jumlah Sarjana Teknik 29,6%, Sarjana Non Teknik 25,2%, Diploma 4,2% dan Bukan Sarjana 40,9%. Berdasarkan hasil proyeksi hingga tahun 2024, maka jumlah SDM terbanyak ialah Sarjana Teknik 50,2%. Jumlah Sarjana non teknik akan relatif stabil dan jumlah SDM non-sarjana akan berkurang drastis menjadi hanya 26,3%. Dalam situasi tersebut,

pekerjaan yang bersifat klerikal atau administratif perlu dilakukan dengan proses otomatisasi, sehingga kapasitas dan produktivitas organisasi akan tetap meningkat.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ditempuh 2 (dua) strategi yaitu: (1) Komposisi penerimaan CPNS, pegawai mutasi dari luar Kementerian PUPR, dan perpanjangan BUP SDM untuk kualifikasi pendidikan Teknik; dan (2) Redistribusi SDM eksisting, permintaan formasi non teknis khusus dari Kementerian/Lembaga lain, dan tidak menggantikan SDM kualifikasi non teknik yang pensiun.

**Gambar 3.14 Jumlah dan Komposisi Kompetensi SDM Kementerian PUPR
Tahun 2018 – 2024**



BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, Kementerian PUPR menetapkan 5 Tujuan dan 5 Sasaran Strategis. Setiap Sasaran Strategis memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta target kinerja yang akan dicapai pada kurun waktu 2020 – 2024.

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Kementerian PUPR
Tahun 2020-2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					TOTAL	UIC
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisien pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.								
Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur SDA	(1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat (%)	67	70	73	76	79	79	DJSDA	
	(2) Presentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan Pusat (%)	54,4	64	77	89	100	100		
	(3) Kapasitas tampung per kapita (m ³ /kapita)	52,5	55,2	57,1	58,1	58,5	58,5		
	(4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi (m ³ /tahun/ha)	19.845	20.554	21.263	21.971	22.680	22.680		
2	Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.								
Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 km)	2.21	2.19	2.09	2.08	1.90	1.90	DJBM	
3	Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya <i>smart living</i> , dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat								

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					TOTAL	UIC
			2020	2021	2022	2023	2024		
	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	(1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i> (%)	60,29	70,08	80,07	89,93	98,57	98,57	DJCK
		(2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni (%)	56,86	57,46	58,02	58,71	59,48	59,48	DJP dan DJPI
4	Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional								
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional (%)	5,3	5,6	6,0	6,4	6,8	6,8	DJBK
		Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Yang Kompeten dan Siap Kerja (%)	25	27,5	80	85	90	90	BPSDM
5	Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.								
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya (%)	72,39	75,61	77,97	79,72	81,44	81,44	Setjen dan Dukman Seluruh Unor
		Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif (%)	100	100	100	100	100	100	DJPI
		Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur (%)	72	75	82	85	88	88	Itjen
		Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR	70	71	72	74	76	76	BPSDM
		Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis	60	65	70	75	80	80	BPIW

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					TOTAL	UIC
			2020	2021	2022	2023	2024		
		Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi	43	51	57	63	68	68	DJBK

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dibutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya, baik berupa prasarana, dukungan regulasi, maupun sumber pendanaan. Sumber pendanaan diperoleh dari APBN maupun Non APBN.

Indikasi kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PUPR sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp. 889.050.471.710.000.

Tabel 4.2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kementerian PUPR 2020 – 2024
Per Unit Organisasi
(Rp. juta)

NO	UNIT ORGANISASI	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL (Juta Rp)
1	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	43,975,216	87,878,956	91,858,651	89,470,243	84,018,457	397,201,523
2	Direktorat Jenderal Bina Marga	40,120,999	56,230,775	60,940,505	66,769,012	66,453,307	290,514,999
3	Direktorat Jenderal Cipta Karya	22,009,966	31,348,413	26,122,629	25,408,941	20,366,594	125,256,543
4	Direktorat Jenderal Perumahan	7,926,694	7,686,831	11,127,287	14,763,792	15,652,629	57,157,253
5	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	199,396	331,500	353,300	367,900	392,800	1,644,896
6	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1,544,237	2,001,581	383,920	382,472	394,183	4,706,394
7	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	725,510	900,000	906,541	913,345	920,354	4,365,749
8	Inspektorat Jenderal	111,744	120,081	123,729	129,915	136,411	621,880
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	525,188	563,788	933,412	1,028,710	1,128,313	4,179,424
10	Sekretariat Jenderal	520,056	665,203	695,853	738,274	782,813	3,402,198
TOTAL							889,050,471

Indikasi kebutuhan pendanaan pada masing-masing program pembangunan tertera dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 4.3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kementerian PUPR 2020 – 2024
Per Program (Rp. juta)

PROGRAM	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Program Ketahanan Sumber Daya Air	41,599,240	85,388,956	89,277,147	86,850,460	81,245,710	384,361,514
Program Infrastruktur Konektivitas	37,225,702	53,122,807	57,588,640	63,191,098	62,633,658	273,761,907
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	29,706,385	38,938,073	35,403,320	38,175,437	33,893,935	176,117,151
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	177,680	207,033	299,488	331,087	341,169	1,356,470
Program Dukungan Manajemen	8,949,998	10,070,379	10,877,230	11,424,530	12,131,389	53,453,430
Total						889,050,471

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang disusun untuk menjabarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis akan digunakan sebagai acuan di dalam perencanaan tahunan melalui penyusunan Rancangan Rencana Kerja yang selanjutnya setelah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menjadi Renja untuk kemudian digunakan sebagai pedoman di dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PUPR. Rencana Strategis juga akan dijadikan sebagai acuan di dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagai penilaian terhadap upaya-upaya yang dilakukan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Rencana Strategis ini selanjutnya digunakan oleh Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR untuk menyusun Renstra Unit Eselon I dan Renstra entitas di bawahnya. Selanjutnya, kebijakan beserta target kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra akan dievaluasi pada pertengahan (Tahun 2022) dan akhir periode 5 tahun (Tahun 2024) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rincian Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 tercantum sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

A. KERANGKA REGULASI

1. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	RPP Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air	Amanat UU No. 17 Tahun 2019 Tentang SDA	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2022
2	PKPP Tentang Irigasi	Amanat UU No. 17 Tahun 2019 Tentang SDA	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2023
3	RPP Tentang Sumber Air	Amanat UU No. 17 Tahun 2019 Tentang SDA	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	2023

2. Direktorat Jenderal Bina Marga

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1. Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Jalan Nasional					
1.1	Penyusunan SK Dirjen Bina Marga tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga	Merupakan pelaksanaan dari amanat Permen PAN RB No 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan			
2 Penguatan Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Jalan					
2.1	Peninjauan Kembali Permen PU 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan	Amanat PP 34 Tahun 2006 tentang Jalan pada pasal 61 dan pasal 62 Diperlukan penajaman dan penambahan dalam pengaturan tentang: 1. Kerangka waktu dalam penetapan fungsi dan status agar tidak terjadi jeda waktu terlalu panjang antara SK Menteri dengan SK Gubernur dan SK Bupati/Walikota 2. Konsekuensi logis terhadap administrasi dan hukum dari penetapan fungsi dan status jalan daerah 3. Pertimbangan teknis dan administratif pengusulan perubahan fungsi dan status jalan agar tidak terlahi politis	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
2.2	Revisi SK No. 77/KPTS/Db/1990 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten	SK No. 77/KPTS/DB/1990 masih menggunakan sejumlah asumsi perhitungan yang belum disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebijakan terkait penyelenggaraan jalan (idealnya disediakan pula petunjuk teknis untuk jalan provinsi dan jalan kota)	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2024
2.3	Penyusunan konsep Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tentang Penugasan Penanganan Rusak Jalan daerah dengan Pendanaan APBN	Amanat PP 34 Tahun 2006 Tentang Jalan pada pasal 85 1. Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penangan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program. 2. Dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		pemberian bantuan pembiayaan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri			
3 Penguatan Penyelenggaraan Jalan Bebas Hambatan (Jalan Tol)					
3.1	Revisi Permen PUPR 01/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol	Belum ada pengaturan atau dasar hukum terkait penunjukan BUMN untuk melakukan pembangunan dan pengoperasian jalan tol, serta mekanisme pengambilalihan pengusahaan jalan tol	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	2022
3.2	Penetapan Permen PUPR tentang Dukungan dan Jaminan Pemerintah dalam Pengusahaan Jalan Tol	Belum ada pedoman yang mengatur mengenai kebijakan terkait dengan besar/nilai serta bentuk dukungan dan jaminan dari Pemerintah dalam meningkatkan kepastian usaha jalan tol	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	2022
3.3	Revisi Permen PUPR 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol	Belum diatur tentang konsekuensi serta kewajiban para pihak mengenai upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol (jika harus penilaian terbukti SPM di suatu ruas jalan tol tidak terpenuhi)	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
3.4	Penetapan Permen PUPR tentang Perubahan Rencana Usaha dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol	Belum diatur tentang perubahan rencana usaha dalam perjanjian pengusahaan jalan tol	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	2020
3.5	Penetapan Permen PUPR tentang Tata Cara Penetapan Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha	Belum diatur tata cara penetapan pengusahaan jalan tol atas rencana badan usaha di dalam Peraturan Menteri PUPR	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	2020-2021
3.6	Revisi Permen PUPR 10/PRT/M/2018 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol	Perlu adanya penyesuaian peraturan tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol terkait dengan pengembangan Tempat Istirahat	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	2020-2021
3.7	Revisi Permen PUPR no 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol	Perlu adanya penyesuaian atas transaksi tol non tunai di jalan tol terkait dengan MLPP	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	2020
4 Standarisasi teknis dan pedoman penyelenggaraan jalan					
4.1	Peninjauan Kembali Permen PU Nomor 02/PRT/M/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan	Merupakan pelaksanaan amanat Pasal 72 dan Pasal 74 PP 34/2006 tentang Jalan. 1. Pedoman ini berkaitan dengan bagaimana teknis dan prosedural pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan jalan, serta kedudukannya di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		dokumen perencanaan lainnya, namun: 2. Diperlukan review terkait pemangku kepentingan dalam pelaksanaan konsultasi publik untuk menghindari usulan yang sifatnya politis. 3. Diperlukan review terkait acuan dalam penyusunan usulan rencana mengingat kondisi kebijakan saat ini yang cukup dinamis. 4. Diperlukan penjelasan terkait hubungan dan sinergitas antara rencana umum dan rencana strategis (K/L maupun unit organisasi).			
4.2	Penyiapan Rakepmen PUPR tentang Penetapan Rencana umum Jangka Panjang dan Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan	Merupakan pelaksanaan amanat Pasal 72 dan Pasal 74 PP 34/2006 tentang Jalan. Rakepmen ini berisi daftar rencana pembangunan ruas jalan pada periode jangka panjang (indikasi 5 tahunan) maupun jangka menengah (indikasi tahunan).	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
4.3	Penetapan Permen PUPR tentang Penetapan Rencana Umum Jalan Tol	Merupakan pelaksanaan amanat pasal 12 PP 15/2005 tentang Jalan Tol. Rakepmen ini berisi daftar rencana pembangunan ruas jalan tol pada periode waktu sesuai yang akan ditetapkan dalam Rakepmen.	Direktorat Jenderal Bina Marga	•Direktorat Jalan Bebas Hambatan •Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2021
4.4	Penyusunan Permen PU Standar Pelayanan Minimal Jalan Nasional	Belum ada SPM untuk bidang jalan sesuai ketentuan dalam PP 34/2006 tentang Jalan Pasal 113	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2024
4.5	Penyusunan Rakepmen PUPR tentang Penetapan Kelas Jalan Nasional	Amanat UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta PP 79/2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Direktorat Jenderal Bina Marga	•Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan •Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan •Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
				•Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	
4.6	Revisi Permen PU No. 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan	Merupakan pelaksanaan amanat pasal 102 PP 34/2006 tentang Jalan	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Bina Teknik	2022
4.7	Revisi Permen PU 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan	Merupakan pelaksanaan amanat Pasal 101, Pasal 104, dan Pasal 106 dalam PP 34/2006 tentang Jalan	Direktorat Jenderal Bina Marga	•Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan •Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I •Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
4.8	Revisi Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997	Manual ini perlu dilakukan pembaruan karena telah cukup lama diterbitkan (1997).	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	2023
5 Kebijakan pendukung pelaksanaan penyelenggaraan jalan					
5.1	Penyusunan PP tentang Dana Preservasi Jalan (Road fund)	Merupakan pelaksanaan amanat pasal 32 UU 22/2009 tentang LLAJ dan pasal 123 PP 79/2013 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perpres ini mengatur tentang mekanisme pengelolaan serta organisasi dan tata kerja unit pengelola Dana Preservasi Jalan. Dalam penyusunan PP ini, diperlukan Kerjasama dan koordinasi bersama Kementerian perhubungan dan Kementerian keuangan.	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan	2024
5.2	Penyusunan Perpres Tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan	Merupakan pelaksanaan amanat pasal 3 pada PP 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Instruksi Presiden No 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan.	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
5.3	Penyusunan Regulasi Tentang perencanaan <i>Green Road</i>	Merupakan pelaksanaan amanat pasal 93 pada PP 15 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan pasal 7 pada Permen PU 03 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman	Direktorat Jenderal Bina Marga	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	2021

3. Direktorat Jenderal Cipta Karya

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1 Air Minum Dan Sanitasi					
1.1	RPP tentang Sistem Penyediaan Air minum	UU Nomor 17/2019 tentang Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Air Minum, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	2021
1.2	RPP tentang Air Limbah Domestik	Kebutuhan payung hukum lebih tinggi bagi penyelenggaraan air limbah domestik dan bersifat komprehensif pengelolaannya, serta memberikan urgensi bagi Pemerintah dalam menyediakan kebutuhan peraturan setingkat Peraturan Pemerintah dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Sanitasi, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	2021
1.3	Rapermen PUPR tentang Kriteria Pemanfaatan Dalam Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah Tertentu Pada Sektor Sistem Penyediaan Air Minum	PP 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu telah diamankan bahwa dibutuhkan pengaturan terkait pemberian fasilitas pajak	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Air Minum, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.			
1.4	Rapermen PUPR tentang Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum	Perpres 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Air Minum, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	2020
1.5	Revisi Peraturan Menteri PU Nomor 03/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pembaharuan sebagian materi sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Sanitasi, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	2023
2 Permukiman Dan Penataan Bangunan					
2.1	Revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Pembaharuan sebagian materi sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini.	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Penataan Bangunan, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
2.2	RPP Tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas	UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	2020
2.3	Revisi PP Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Pembastutan sebagian materi sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini, serta mengangkat pengaturan Bangunan Gedung yang diatur dalam Permen ke Peraturan Pemerintah	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Penataan Bangunan, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	2021
2.4	RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek	UU Nomor 6/2017 tentang Arsitek	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Penataan Bangunan, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	2020
2.5	Raperpres tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Kawasan Permukiman	- UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman,	2022

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		- UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah		Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	
2.6	Rapermen PUPR tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	2020
2.7	Rapermen PUPR tentang Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	PP Nomor 14/2016 tentang Penyelenggaraan PKP	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, dan Setditjen Cipta Karya	2021

4. Direktorat Jenderal Perumahan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	RPP tentang Rumah Susun	Amanat UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Rumah Susun	2021
2	RPP tentang Badan Pelaksana rumah umum	Amanat UU No. 20 Tahun 2011 dan UU No. 1 tahun 2011	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	2024
3	Raperpres Kebijakan dan Strategi Nasional bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Amanat PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	2022
4	Rapermen Perubahan atas Permen PUPR No. 19/PRT/M/ 2019 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun juncto Permen PUPR No. 1/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun	Amanat UU No.20 Tahun 2011	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Rumah Susun	2021
5	Rapermen Perubahan atas Permen PUPR No. 3/PRT/M/2018 tentang	Amanat UU No.20 Tahun 2011	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Perubahan atas Permen PUPR No. 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan Rakyat			Direktorat Rumah Umum dan Komersial	
6	Rapermen Perubahan atas Permen PUPR No. 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus	Amanat UU No.20 Tahun 2011	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Rumah Khusus	2021
7	Rapermen Perubahan atas Permen PUPR No. 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Amanat UU No.20 Tahun 2011	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Rumah Swadaya	2021
8	Rapermen PUPR tentang Perumahan Skala Besar	Amanat UU No.1 Tahun 2011	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	2022
9	Rapermen PUPR tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Amanat PP 14 Tahun 2016	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	2020
10	Rapermen PUPR tentang Pembentukan Badan Pelaksana Rumah Umum	Amanat UU No.1 Tahun 2011, mendukung pelaksanaan <i>Major Project 1.000.000 Public Housing</i>	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Sistem	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
				dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	
11	Rapermen PUPR tentang Perencanaan dan Standar Pelayanan Minimal Rumah Susun	Amanat UU No.20 Tahun 2011, mendukung pelaksanaan <i>Major Project 1.000.000 Public Housing</i>	Direktorat Jenderal Perumahan	Setditjen Perumahan Direktorat Rumah Susun	2021

5. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan	Peraturan Menteri terkait Tugas dan Wewenang Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol dalam Penyelenggaraan Jalan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Unor di Kementerian PUPR	2020
2	Revisi Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur	Peraturan Presiden terkait Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Unor di Kementerian PUPR	2020-2021
3	Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Revisi Permen PUPR No. 21 Tahun 2018	Reorganisasi dan Perubahan Simpul KPNU	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020
4	Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan	Perubahan skema dan mekanisme pembiayaan perumahan	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Direktorat Jenderal Perumahan	2020-2024
5	Pedoman Penyusunan Dokumen Penyajian Proyek KPBU	Pedoman pelaksanaan kegiatan DJPI	Direktorat Pengembangan Sistem	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
			dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan		
6	Pedoman Penyusunan Dokumen Transaksi Proyek KPB	Pedoman pelaksanaan kegiatan DJPI	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020-2024
7	Pedoman Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Proyek KPB	Pedoman pelaksanaan kegiatan DJPI	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020
8	Standar dan Pedoman Dokumen Pengadaan KPB Bidang SDA	Pedoman Pelaksanaan Pengadaan KPB Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	PT PII, LKPP, Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020
9	Standar dan Pedoman Dokumen Perjanjian Kerja Sama KPB Sektor SDA	Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama KPB Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	PT PII, Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020
10	Pedoman Pengelolaan Aset Investasi Infrastruktur SDA	Tata Cara Pengelolaan Aset Investasi	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Bappenas, Kemenkeu, Ditjen SDA, PT PII, dan BUP	2020
11	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pembiayaan Infrastruktur SDA	Amanat Permen PUPR No. 03 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Ditjen SDA, Setjen PUPR, DJPI	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
12	Kriteria Usulan Proyek KPB Sektor SDA	Pedoman Penyusunan KPB Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Ditjen SDA, Setjen PUPR, DJPI, PT PII	2021
13	Pedoman Pelaksanaan Program Penggabungan Infrastruktur SDA	Pedoman Penyusunan KPB Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Bappenas, Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, Setjen PUPR, DJPI, PT PII	2021
14	Pedoman Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres KPB Sektor SDA	Pedoman Pelaksanaan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres KPB Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	PT PII, Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2021
15	Rancangan Peraturan Menteri PUPR Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPB dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPB dalam Penyediaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2021
16	Pedoman Pemantauan Investasi Infrastruktur SDA	Tata Cara Pemantauan Investasi Infrastruktur	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Bappenas, Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, Setjen PUPR, DJPI, PT PII	2021
17	Pedoman Bimbingan Teknis dan Supervisi Penyusunan Proyek KPB Sektor SDA	Pedoman Penyusunan KPB Sektor SDA	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur SDA	Ditjen SDA, Setjen PUPR, DJPI, PT PII	2022

6. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan Rencana, Program dan Pembiayaan Pengembangan Infrastruktur PUPR	Rencana Aksi PUPR sebagaimana Agenda PUPR dengan Komisi Penyidikan Korupsi (KPK) untuk mengintegrasikan suatu proses perencanaan dan pemrograman yang terkendali	Sekretariat BPTW	Unit Organisasi di lingkungan PUPR	2020
2	Rancangan Teknokratis Renstra PUPR 2025 – 2029	acuan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR pada tahun 2025 – 2029 dalam rangka menjalankan amanat RPJMN 2025 – 2029	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	Unit Organisasi di lingkungan PUPR	2024
3	Rancangan Teknokratis Renstra BPTW 2025 – 2029	acuan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan program infrastruktur wilayah pada tahun 2025 – 2029 dalam rangka menjalankan amanat RPJMN 2025 – 2029	Sekretariat BPTW	Internal BPTW	2024
4	Pedoman Pelaksanaan Rakorbangwil	Acuan pelaksanaan Rakorbangwil (termasuk peran tugas dan fungsi anggota Forum Rakorbangwil)	Sekretariat BPTW	Internal BPTW	2021
5	Rancangan Peraturan Menteri tentang Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Panjang	Acuan penyusunan Program Jangka Panjang (RPLJP)	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	Internal BPTW dengan melibatkan Unor	2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
6	Rancangan Peraturan Menteri tentang Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah	Acuan penyusunan Program Jangka Menengah (RPLJM)	Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional	Internal BPTW dengan melibatkan Unor	2021
7	Rapemren tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional	Acuan pelaksanaan tugas, fungsi, pengukuran kinerja Jabatan Fungsional termasuk tata cara pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional	Sekretariat BPTW	Internal BPTW	2021

7. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi, Kemendagri, Kemenlu, Kemenkeu, OJK, BKPM, LKPP, kemenaker, Kemenkumham, Setneg, Setkab, Kemen ESDM, Kemen Perhubungan	2020
2	Rapemren tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia	Tindak lanjut Perpres no 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Putusan Judicial Review Mahkamah Agung	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi, LKPP, Kemenkumham	2020
3	Rapemren tentang Subklasifikasi, Kualifikasi, Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi, HPS, Kemenkumham	2020
4	Rapemren tentang Registrasi Pengalaman, Pengembangan Usaha Berkelanjutan, Kinerja dan Laporan	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi, Kemenkumham	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
5	Kegiatan Usaha Tahunan Badan Usaha Jasa Konstruksi Rapemren tentang Penilai Ahli, Tata Cara Pelaporan Kegagalan Bangunan	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan Kemenkumham	2021-2022
6	Rapemren tentang Tata Cara Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja, Tata Cara Pemohonan Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi dan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi, BNSP, Kemenaker, Kemenkumham	2020
7	Rapemren tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi, Badan Akreditasi Nasional, Kemenkumham	2020-2021
8	Rapemren Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi, Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi, Registrasi Tanda Daftar	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi, Kemenaker, BNSP, Kemenkumham	2020-2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
9	Pengalaman Profesional, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Rapermen tentang Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi	Amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi, Pusdatin, Kominfo, Kemendagri, Kemenkumham	2020-2021

8. Inspektorat Jenderal

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi Permen PUPR No25/PRT/M/2017	Reorganisasi Inspektorat Jenderal dan Klasifikasi jenis penugasan sesuai dengan standar AAIP	Inspektorat Jenderal	Unor di Kemen PUPR	2020-2024
2	Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2017	Perubahan Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui Whistleblowing System	Inspektorat Jenderal	Unor di Kemen PUPR	2020
3	Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 323/PRT/M/2005 tentang Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum	Perubahan Tata Cara Penanganan Masukan dari Masyarakat	Inspektorat Jenderal	Unor di Kemen PUPR	2020
4	Rapermen Audit Khusus dan Audit Investigatif	Pedoman pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	Unor di Kemen PUPR	2020-2024
5	Rapermen Pedoman Evaluasi SPPI	Pedoman pelaksanaan Evaluasi SPPI di Kementerian PUPR	Inspektorat Jenderal	Unor di Kemen PUPR	2020-2024
6	Rapermen Temuan Audit Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Pedoman pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	Unor di Kemen PUPR	2020-2024

9. Sekretariat Jenderal

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Rapermen PUPR tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peraturan Menteri ini merupakan turunan dari: - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional. - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan SPBE untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi di Kementerian.	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Seluruh Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR	2020
2	Rapermen tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR	Amanat Rancangan Rencana Induk Penanggulangan Bencana, RUU Penanggulangan Bencana pengganti UU No. 24 Tahun 2007	Pusat Data dan Teknologi Informasi	Seluruh Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
3	Rapemren tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di Kementerian PUPR	Amanat PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah	Biro PAKLN	Kementerian Keuangan, Bappenas, Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR	2024
4	Rapemren PUPR tentang Perubahan Permen Nomor 9/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR	- Perubahan struktur organisasi di Lingkungan Kementerian PUPR - Menambahkan tata cara evaluasi penyelenggaraan SAKIP di dalam lampiran	Biro PAKLN	Kementerian PAN dan RB, Bappenas, Unit Organisasi/Unit Kerja/Satker/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR	2024
5	Rapemren PUPR tentang Perubahan Permen Nomor 16/PRT/M/2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.	- Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yg efektif & efisien, pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan & akses arsip". - Peraturan Kepala ANRI Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas	Biro Umum	Unit Organisasi/Unit Kerja di lingkungan Kementerian PUPR	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		Peraturan Menteri PUPR tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR (saat ini sedang direvisi)			
6	Rapemren PUPR tentang Jadwal Retensi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip; yang mengatur tentang jadwal retensi/masa simpan arsip dan klasifikasi keamanan akses arsip dinamis	Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; kewajiban bagi Unit Kearsipan Kementerian/Lembaga/BUMN/Perguruan Tinggi Negeri untuk menyusun 4 (empat) pilar Kearsipan, yaitu Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip (JRA), Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD). - JRA sebagai prasarana penyusunan arsip, yang menentukan masa simpan arsip dan nasib akhir arsip (Permanen atau Musnah) - SKKAAD sebagai prasarana pemberian hak akses arsip oleh pejabat yang berwenang, sekaligus untuk publik mana yang dapat melihat arsip.	Biro Umum	Arsip Nasional RI dan Unit-Unit Organisasi di Kementerian PUPR	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
7	Rapemren PUPR tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	- Peraturan Menteri ini merupakan turunan dari: - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. - Peraturan Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik dibuat untuk melengkapi dan mengganti Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/SE/M/2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum. - Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Daerah dalam	Biro Komunikasi Publik	Seluruh Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		memberikan layanan informasi publik.			
8.	Rapermen PUPR tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	- Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. - Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku pengguna barang perlu meningkatkan tertib pemanfaatan barang milik negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara	Unit Organisasi/Unit Kerja/Satker/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR	2020
9.	Rapermen PUPR tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara	Unit Organisasi/Unit Kerja/Satker/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR	2021
10	Rapermen PUPR tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian PUPR yang Merupakan Kewenangan Sendiri yang	Rapermen ini merupakan Perubahan Permen PU Nomor 14 Tahun 2011 dan Permen PU Nomor 15 Tahun 2011 dalam	Biro Keuangan	Kementerian Keuangan, Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Dilaksanakan Sendiri dan/atau Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	rangka penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 (dan perubahannya) Perubahan struktur organisasi di Lingkungan Kementerian PUPR		Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR	
11	Rapermen PUPR tentang Perubahan Permen Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perubahan struktur organisasi di Lingkungan Kementerian PUPR dengan pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI)	Biro Keuangan	BPKP, Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR	2023

B. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

Matriks Kinerja Dan Pendanaan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 2020 - 2024

1. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya ketahanan air melalui infrastruktur sumber daya air									41,975,216	87,876,356	81,858,651	89,470,243	84,818,457	397,202,523	
1	Pemertan penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kawasan Pusat	%	67%	70%	73%	76%	79%	79%							
2	Pemertan peningkatan perlindungan hargi di WS kawasan pusat	%	54,4%	64%	73%	89%	100%	100%							
3	Kapasitas tangkap per kapita	m ³ /kapita	52,5	55,2	57,1	58,1	58,5	58,5							
4	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	m ³ /tahun/ hektar	18,845	20,554	21,363	21,671	22,680	22,680							
PROGRAM: KETAHANAN SUMBER DAYA AIR									41,999,240	85,388,356	80,277,147	86,850,460	81,245,710	384,381,314	
SASARAN PROGRAM : MENINGKATKAN KETERSEDIAAN AIR MELALUI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SECARA TERINTEGRASI															
2	Jumlah pemertan kapasitas layanan sarana pemertan air baku yang terlayani	m ³ /detik	4,10	8,00	12,00	14,90	10,00	50,00							
2	Pertanian dan kawasan pedesaan dengan biaya	hektar	10,260	13,500	24,050	25,540	21,210	101,500							
3	Tingkat pengendalian lereng kritis	%	52%	52%	67%	67%	67%	67%							
4	Jumlah kawasan pemertan kapasitas tangkap sumber-sumber air yang dilayani	juta m ³	14,351	15,011	15,731	16,121	16,500	16,500							

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	5	Jumlah lokasi tenaga kerja dari infrastruktur SDA	MW	24,43	36,53	13,54	60,97	8,97	140,44						
	6	Jumlah DAS yang direhabilitasi	DAS	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00						
	7	Jumlah pemeliharaan dan layanan regasi padi yang dibangun melalui APBD, APBD, atau DAK	hektar	45,000	80,000	135,000	120,000	120,000	500,000						
	8	Jumlah dan sumber regasi yang direhabilitasi melalui APBD, APBD dan DAK	hektar	80,000	402,500	582,500	512,500	502,500	2,000,000						
	9	Jumlah DAS yang memperoleh modernisasi hidrologi	DAS	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00						
	10	Tingkat layanan pemertan SDA	%	30%	35%	40%	45%	50%	50%						
KEGIATAN 1: LAYANAN KESIKRETASISAN DIWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL (DSOAN)										17,357	15,938	17,532	19,285	21,214	91,326
PELAKSANA : SEKRETARIAT DIWAN SDA NASIONAL															
Sasaran Kegiatan : Meningkatkan layanan kesekretariatan Diwan SDA Nasional (DSOAN)															
1	Tingkat layanan kesekretariatan manajemen Diwan Sumber Daya Air Nasional (DSOAN)		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
OUTPUT KEGIATAN:															
1	Kegiatan kesekretariatan Diwan SDA Nasional yang dilaksanakan														
	Jumlah kegiatan kesekretariatan Diwan SDA Nasional yang dilaksanakan		Kegiatan	5	2	2	2	2	13	17,357	15,938	17,532	19,285	21,214	91,326
KEGIATAN 2: PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI										84,218	91,194	97,743	104,598	112,838	489,981
KORDINATOR : DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
PELAKSANA : 1. DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR															
2. BOWS/BWS DAN BALAI TEKNIK															
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan evaluasi															
1	Pemertan deviasi perencanaan program dengan penganggaran tahunan UPT	%	25%	24%	23%	22%	20%	20%							
2	Pemertan pemertan jumlah modal anggaran UPT	%	5%	5%	5%	5%	5%	25%							
3	Pemertan keterpaduan perencanaan pengelolaan SDA WS Wilayah Kerja UPT	%	72%	80%	88%	95%	100%	100%							
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan pemertan perencanaan, pemrograman, penganggaran, evaluasi, dan pengadaan tanah															
1	Pemertan deviasi perencanaan program dengan penganggaran tahunan Ditjen SDA	%	25%	24%	23%	22%	20%	20%							
2	Pemertan pemertan jumlah modal anggaran di lingkungan Ditjen SDA	%	5%	5%	5%	5%	5%	25%							
3	Pemertan keterpaduan perencanaan pengelolaan SDA WS Kementerian Pusat di lingkungan Ditjen SDA	%	72%	80%	88%	95%	100%	100%							
4	Tingkat implementasi penganggaran SAUP Ditjen SDA	tda	77,8	77,7	77,8	77,8	78,0	78,8							
5	Pemertan progra pengadaan tanah untuk infrastruktur SDA	%	0%	10%	10%	10%	10%	10%							
Sasaran Kegiatan 3: Testakeranya pengadaan tanah untuk infrastruktur															
1	Jumlah luas tanah yang dilekaskan	Hektar	-	200	200	200	200	800							
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan pemertan perencanaan, pemrograman, penganggaran,														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2	kegiatan, evaluasi program, dan fasilitasi pengadaan tanah SDA yang dilaksanakan														
	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	1	25,799	25,800	27,090	28,380	29,670	136,839	
	Perencanaan, anggaran, evaluasi keja UPT Ditjen SDA yang dibuat														
	Jumlah dokumen rencana, anggaran, evaluasi keja UPT Ditjen SDA yang dibuat	Dokumen	183	200	200	200	200	983	43,934	50,594	55,653	61,218	67,340	280,799	
3	Pola dan rencana pengelolaan SDA WS Kementerian Pusat yang dibuat/tersewa														
	Jumlah dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA WS Kementerian Pusat yang dibuat/tersewa	Dokumen	25	30	30	30	30	105	12,463	15,000	15,000	15,000	15,000	72,463	
KEGIATAN 3 : PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN, RAWA, DAN NON-PADI									8,496,348	25,816,890	32,234,105	34,343,010	32,571,955	133,462,176	
KORDINATOR: DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA															
PELAKSANA : 1. BOWS/BWS, BALAI TEKNIK IRIGASI, BALAI TEKNIK RAWA															
2. DIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA															
Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan layanan jaringan irigasi															
1	Jumlah tambahan panjang jaringan irigasi yang dibangun	Km	407,85	600	800	1.000	750	3.577,85							
2	Jumlah panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	Km	1.205,28	798,00	445,00	445,00	448,28	1845,88							
3	Jumlah lokasi pemertaan irigasi ranggail yang dibangun	Lokasi	0,00	5,00	6,00	7,00	7,00	25,00							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Jumlah daerah irigasi yang diredamasi	Dwara Irigasi	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	9,00						
Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatkan layanan pemeliharaan bidang irigasi permukaan, rawa, dan perairan nonpadi														
1	Persentase pencapaian target kumulatif luas pembangunan irigasi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK	%	0%	20%	52%	76%	100%	100%						
2	Persentase pencapaian target kumulatif luas rehabilitasi irigasi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK	%	4%	24%	40%	70%	100%	100%						
3	Jumlah luas layanan irigasi yang terjerang secara dari pembangunan	hektar	117,000	45,000	73,000	80,128	90,110	342,540						
Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatkan layanan teknis bidang irigasi dan rawa														
1	Jumlah layanan teknis bidang irigasi	Layanan	1,00	1,00	1,00	1,88	1,00	1,00						
2	Jumlah layanan teknis bidang rawa	Layanan	1,00	1,00	1,00	1,88	1,00	1,00						
	OUTPUT KEGIATAN :													
1	Pencara teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang disusun													
	Jumlah dokumen rencana teknik dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang disusun	Dokumen	129	140	145	150	158	694	291,657	316,600	327,980	399,200	294,000	1,566,357
2	Layanan pengadaan tanah irigasi yang dilaksanakan													
	Jumlah dokumen layanan pengadaan tanah irigasi yang disusun	Dokumen		100	100	100	188	400		10,000	10,000	10,000	10,000	40,000
3	Pengadaan tanah irigasi yang dilaksanakan													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Jumlah luas pengaliran tanah untuk infrastruktur irigasi yang dilaksanakan	Hektar		60	60	60	60	240		390,000	390,000	390,000	390,000	1,560,000
	Jaringan irigasi permukaan dan irigasi rawa yang dibangun	Km	407,85	600	800	1000	750	3558	4,832,929	8,469,600	11,527,180	12,815,200	11,250,900	50,109,729
5	Jaringan irigasi nonpadi yang dibangun/mtingkatkan	Km	267,80	315	205	205	285	1268	130,231	164,200	138,200	189,200	166,200	832,031
	Jaringan irigasi permukaan dan irigasi rawa yang direhabilitasi	Km	1,286	3,500	4,450	4,450	4,400	18486	3,789,428	16,168,700	17,497,100	20,261,300	20,117,600	77,833,028
7	Kawasan rawa yang dikonservasi													
	Jumlah lahan kawasan rawa yang dikonservasi	Lokasi	6,00	10	15	15	10	56	32,847	54,800	82,280	82,200	54,800	306,847
8	Powernya Irigasi nonpadi yang dibangun													
	Jumlah powernya irigasi nonpadi yang dibangun	unit	0	5	8	7	7	25		94,000	94,000	94,000	94,000	376,000
9	Layanan pemeliharaan irigasi, rawa, dan tambak yang dilaksanakan													
	Jumlah BRWS/IRWS yang dibuat	BRWS/IRWS	37	37	37	37	37	37	146,090	146,100	151,485	160,710	166,015	774,290
10	Layanan teknis bidang irigasi dan rawa yang dilaksanakan													
	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	1	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	16,000
KEGIATAN 4 : PENGONDISIAN DANIR, LAHAR, PENGELOLAAN DRAINASE UTAMA PERKOTAAN, DAN PENGAMAN PANTAI									8,755,258	13,465,390	15,275,790	16,125,960	14,867,970	66,437,238

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KORDINATOR : DIREKTORAT SUNGAI DAN PANTAI														
PELAKSANA-1. DBWS/IBWS, BALAI SUNGAI, BALAI PANTAI														
2. DIREKTORAT SUNGAI DAN PANTAI														
Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan layanan infrastruktur SDA untuk ketahanan bencana														
1	Jumlah panjang bangunan pengendali daya rusak air yang dibangun	Km	205,21	780,00	499,00	103,79	495,00	2100,00						
2	Jumlah bangunan pendukung pengendali daya rusak air yang dibangun	Unit	15,00	10,00	15,00	12,00	10,00	62,00						
3	Jumlah bangunan pengendali lahar dan sedimen yang dibangun	Unit	20,00	32,00	42,00	45,00	35,00	184,00						
4	Jumlah kumulatif kawasan strategis di garis utara Jawa yang infrastruktur ketahanan bencana dibangun	Kawasan	2,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00						
5	Jumlah sungai pada empat DAS yang direvitalisasi	Sungai	3,00	3,00	3,00	4,88	4,00	4,00						
Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatkan layanan pemeliharaan infrastruktur SDA untuk ketahanan bencana														
1	Tingkat pencapaian target pemenuhan luas kawasan banjir	%	10%	29%	54%	79%	100%	100%						
2	Tingkat pencapaian target perlindungan pantai rawan abrasi	%	29%	40%	60%	80%	100%	100%						
3	Tingkat pencapaian target pembangunan pengendali sedimen dan lahar gunung berapi	%	20%	40%	60%	80%	100%	100%						
Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatkan layanan teknis bidang sungai dan pantai														
1	Jumlah layanan teknis bidang sungai	Layanan	1,00	1,00	1,00	1,88	1,00	1,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2	Jumlah layanan teknis bidang pantai	Layanan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							
	OUTPUT KEGIATAN :														
1	Rencana teknik dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali lahar, leleh, erosi-utara perkotaan, dan pengaman pantai yang diurus														
	Jumlah dokumen rencana teknik dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, leleh, erosi-utara perkotaan, dan pengaman pantai yang diurus	Dokumen	87	115	125	130	130	577	196,476	265,800	268,490	299,700	277,100	1,327,476	
2	Layanan pengadaan tanah sungai dan pantai yang dilaksanakan														
	Jumlah dokumen layanan pengadaan tanah sungai dan pantai yang diurus	Dokumen		100	100	100	100	400		10,000	10,000	10,000	10,000	40,000	
3	Pengadaan tanah infrastruktur sungai dan pantai yang dilaksanakan														
	Jumlah luas pengadaan tanah sungai dan pantai yang dilaksanakan	Hektar		40	40	40	40	160		290,000	290,000	290,000	290,000	1,160,000	
4	Bagunan pengendali lahar yang dibangun/direhabilitasi														
	Panjang bangunan pengendali lahar yang dibangun/direhabilitasi	Km	156,87	245,00	445,00	455,79	450,00	1,853	3,511,394	10,992,900	11,118,188	11,316,100	11,706,800	47,341,384	
5	Bagunan pencahayaan pengendali lahar yang dibangun/direhabilitasi														
	Jumlah bangunan pencahayaan pengendali lahar yang dibangun/direhabilitasi	Unit	15	10	15	12	10	62	595,772	250,000	400,000	300,000	250,000	1,695,772	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
6	Satuan drainase utama perkotaan yang dibangun/direhabilitasi														
	Panjang satuan drainase utama perkotaan yang dibangun/direhabilitasi	Km	26,81	20	25	25	20	119	648,454	252,600	342,000	352,000	298,600	1,689,654	
7	Bagunan pengendali lahar yang dibangun														
	Jumlah bangunan pengendali lahar yang dibangun	Unit	12	12	12	12	10	58	243,699	243,700	243,798	243,700	243,700	1,218,499	
8	Bagunan pengendali sedimen yang dibangun														
	Jumlah bangunan pengendali sedimen yang dibangun	Unit	14	20	30	37	25	128	174,893	240,900	374,600	499,700	312,400	1,632,693	
9	Bagunan pengaman pantai yang dibangun														
	Panjang bangunan pengaman pantai yang dibangun	Km	19,52	25	29	30	25	129	1,277,856	1,518,500	1,632,389	2,429,600	1,518,500	8,565,856	
10	Bagunan pengendali lahar yang direhabilitasi														
	Panjang bangunan pengendali lahar yang direhabilitasi	Km	12,3	15	20	20	15	82	30,000	52,400	68,800	69,800	52,400	274,400	
11	Bagunan pencahayaan pengendali lahar yang direhabilitasi														
	Jumlah bangunan pengendali lahar yang direhabilitasi	Unit	2	8	2	2	9			5,000	8,000	6,000	6,500	25,500	
12	Satuan drainase utama perkotaan yang direhabilitasi														
	Panjang satuan drainase utama perkotaan yang direhabilitasi	Km	2	4	10	10	4	30	5,000	50,000	150,000	150,000	60,000	415,000	
13	Bagunan pengendali lahar yang direhabilitasi														
	Jumlah bangunan pengendali lahar yang direhabilitasi	Unit	0	2	2	2	2	8		10,000	11,888	15,000	15,000	49,000	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
14	Bagunan pengendali sedimen yang direhabilitasi														
	Jumlah bangunan pengendali sedimen yang direhabilitasi	Unit	1	5	10	10	8	34	6.000	30.000	60.000	60.000	48.000	204.000	
15	Bagunan pengaman pantai yang direhabilitasi														
	Panjang bangunan pengaman pantai yang direhabilitasi	Km	3,16	7	9	7	5	31	9.600	26.500	34.180	27.000	18.900	116.180	
16	Layanan pendataan pengendali lahar, leleh, pengalihan aliran dalam perkotaan, dan pengaman pantai yang dilaksanakan														
	Jumlah BWS/BWS yang diura	BWS/BWS	37	37	37	37	37	37	53.770	53.800	56.490	59.180	61.870	285.110	
17	Layanan teknis bidang sungai dan pantai yang dilaksanakan														
	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	1	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	16.000	
KEGIATAN 1 : PENGEMBANGAN BENDUNGAN, DANAU, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA									9.797.104	36.791.641	51.711.511	25.717.621	22.621.196	126.641.282	
KORDINATOR : DIREKTORAT BENDUNGAN DAN DANAU															
PELAKSANA : 1. BWS/BWS, BALAI TEKNIK BENDUNGAN															
2. DIREKTORAT BENDUNGAN DAN DANAU															
Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan layanan tanggapan air															
1	Jumlah tanggapan air yang dibangun	Unit	115,00	150,00	150,00	127,00	120,00	572,00							
2	Jumlah tanggapan alami yang direhabilitasi dan dimanfaatkan	Unit	5,00	13,00	13,00	13,00	11,00	55,00							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
3	Jumlah tangkapan air berpotensi lebih yang dibangun	Unit	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00	22.00							
Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatkan layanan pembiayaan bidang bendungan, dam, bangunan tangkapan lainnya															
1	Tingkat pencapaian target kumulatif kapasitas tangkapan bangunan penampung air	%	87%	91%	95%	92%	100%	100%							
2	Tingkat pencapaian target tangkapan air alami yang direvitalisasi dan dimanfaatkan	%	9%	83%	56%	80%	100%	100%							
Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatkan layanan teknis bidang bendungan															
1	Jumlah layanan teknis bidang bendungan	Layanan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan dan bangunan penampung air lainnya yang disusun														
	Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan dan bangunan penampung air lainnya yang disusun	Dokumen	124	130	140	125	121	644	489,515	511,500	552,700	493,500	465,500	2,542,525	
2	Layanan pengabdian tanah infrastruktur penampung air yang dilaksanakan														
	Jumlah dokumen layanan pengabdian tanah infrastruktur penampung air yang disusun	Dokumen		100	100	100	100	400		50,000	50,000	50,000	50,000	396,000	
3	Pengabdian tanah infrastruktur penampung air yang dilaksanakan														
	Jumlah lahan pengabdian tanah infrastruktur penampung air yang dilaksanakan	Hektar		100	100	100	100	400		850,066	841,871	852,864	822,956	3,547,758	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	4. Bendungan yang dibangun														
	Jumlah bendungan yang dibangun	Bendungan	45	50	39	27	20	61	7.888,185	31,694,206	26,521,211	20,403,882	17,675,267	104,183,747	
	5. Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun														
	Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun	Unit	70	100	100	100	100	470	918,259	1,275,400	1,275,400	1,275,400	1,275,400	6,035,859	
	6. Bendungan yang direhabilitasi														
	Jumlah bendungan yang direhabilitasi	Bendungan	2	1	1	1		5	74,253	308,582	308,582	308,582		1,000,000	
	7. Embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi														
	Jumlah embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi	Unit	28	50	50	50	50	229	589,094	291,600	291,600	291,600	291,600	1,335,494	
	8. Tangkapan air alami yang direvitalisasi														
	Jumlah tangkapan air alami yang direvitalisasi	Unit	5	12	12	12	10	51	243,899	1,084,083	1,084,083	1,084,083	1,084,083	4,580,000	
	9. Tangkapan air alami yang dimanfaatkan														
	Jumlah tangkapan air alami yang dimanfaatkan	Unit		1	1	1	1	4	-	500,000	500,000	500,000	500,000	2,000,000	
	10. Kawasan konservasi daerah tangkapan air bendungan yang dikembangkan														
	Jumlah kawasan konservasi daerah tangkapan air yang dikembangkan	Kawasan		12	15	15	13	55	-	210,000	330,000	480,000	410,000	1,350,000	
	11. Layanan pembiayaan bendungan, dam, dan bangunan penampung air lainnya yang dilaksanakan														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah BWS/BWS yang dibuat	BWS/BWS	37	37	37	37	37	37	13,150	13,200	13,660	14,520	15,180	69,510	
12	Layanan teknis bidang bendungan yang dilaksanakan														
	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	1	3,000	3,200	3,300	3,200	3,200	16,900	
KEGIATAN 4 : PENGIMBANGAN JALINAN AIR TANAH DAN AIR BAKU									2,548,586	3,609,800	4,401,640	4,965,260	5,405,720	21,531,026	
KORDONATOR : DIREKTORAT AIR TANAH DAN AIR BAKU															
PELAKSANA : 1. BWS/BWS, BALAI AIR TANAH															
2. DIREKTORAT AIR TANAH DAN AIR BAKU															
Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan layanan sarana pemurnian penyediaan air tanah dan air baku															
1	Jumlah panjang pemurnian air baku yang dibangun	Km	168.34	500.00	500.00	500.00	400.00	2,468.34							
2	Jumlah panjang jaringan Irigasi air tanah (SIAT) yang dibangun	Km	85.00	100.00	100.00	100.00	100.00	485.00							
Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatkan layanan pembiayaan bidang air tanah dan air baku															
1	Tingkat pencapaian target tambahan kapasitas layanan sarana pemurnian air baku	%	8%	18%	24%	30%	20%	100%							
2	Jumlah penambahan kapasitas air baku yang bersumber dari bendungan	m ³ /detik	2.50	6.81	6.26	5.64	1.99	23.90							
3	Persentase BWS/BWS yang melaksanakan konservasi air tanah dan air baku	%	0%	24%	47%	76%	100%	100%							
4	Jumlah pemangkas sistem integrasi air permukaan dan air tanah untuk air baku yang dilaksanakan oleh BWS/BWS	WS	6	10	15	22	34	34							
Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatkan layanan teknis bidang air tanah															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Jumlah layanan teknis bidang air tanah	Layanan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00							
	OUTPUT KEGIATAN :														
1	Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku yang disusun	Dokumen	82	100	110	125	315	532	112,461	137,200	158,960	171,500	157,666	729,661	
2	Layanan pengabdian tanah infrastruktur air tanah dan air baku yang dilaksanakan	Dokumen		100	100	100	388	400		10,000	18,000	10,000	10,000	48,000	
3	Pengadaan tanah infrastruktur air tanah dan air baku yang dilaksanakan	Hektar		40	40	40	40	160		200,000	200,000	200,000	200,000	1,160,000	
4	Perawatan air tanah dan air baku komunal yang dibangun	Tak	358	400	450	550	550	2308	484,504	541,400	676,700	670,700	600,100	2,982,404	
5	Perawatan air baku yang dibangun	Km	296	500	500	500	600	2456	1,427,511	2,154,700	1,593,880	3,053,000	2,662,100	11,091,111	
6	Belangan Irigasi Air Tanah (IAT) yang dibangun/direhabilitasi	Km	85	100	100	100	100	485	145,715	173,900	173,900	173,900	173,900	841,515	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7	Perawatan air tanah dan air baku komunal yang direhabilitasi	Tak	25	50	50	50	50	225	43,408	43,500	43,500	43,500	43,500	217,408	
8	Perawatan air baku yang direhabilitasi	Km	34,45	40	45	50	40	210	272,656	313,500	352,400	391,600	313,300	1,643,256	
9	Belangan Irigasi Air Tanah (IAT) yang direhabilitasi	Km	85	100	100	100	100	485	96,333	70,800	80,800	84,800	84,800	392,133	
10	Konsumsi air tanah dan air baku yang dikawatirkan	Liter		8	8	10	8	34	-	3,000	3,000	3,000	3,300	12,300	
11	Defekasi air tanah yang dipantau	Tak		8	8	10	8	34	-	10,000	10,000	10,000	10,000	40,000	
12	Layanan pendataan air tanah dan air baku yang dilaksanakan	BWS/SWS	37	37	37	37	37	150	12,800	12,800	13,440	14,080	14,720	67,840	
13	Layanan teknis bidang air tanah yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	5	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	16,000	
KEGIATAN 7 : OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA SDA SERTA PENANGGULANGAN DARURAT AKIBAT BENCANA									4,339,830	5,023,319	5,083,824	5,141,929	5,206,433	25,395,337	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KORDONATOR : DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN														
PELAKSANA : 1. BWS/SWS														
2. DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN														
Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan kinerja layanan OP sarana prasarana SDA														
1	Persentase jumlah prasarana SDA yang di OP sesuai AKNOP	%	50%	60%	70%	80%	90%	80%						
2	Indeks RBO Benchmarking BWS/SWS	Indeks	1.15	1.30	1.20	1.30	1.30	1.35						
Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatkan layanan perbidanan bidang operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA														
1	Persentase pencapaian target layanan prasarana SDA	%	54%	47%	78%	89%	100%	100%						
2	Persentase Daerah Irigasi dengan indeks kinerja di atas 70 persen	%		9%	13%	19%	25%	25%						
3	Persentase perbidanan bidang sumber daya air yang diperoleh	%	90%	92%	94%	96%	100%	100%						
4	Persentase pencapaian target indeks RBO Benchmarking yang dicapai	%	94%	90%	97%	99%	100%	100%						
5	Persentase pencapaian target selisih angka yang dinilai indeks penilaian kinerja	%	0%	0%	1%	3%	5%	5%						
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Jumlah irigasi yang dipertahankan dan direhabilitasi													
	Panjang jaringan irigasi yang dipertahankan dan direhabilitasi	km	25.182	25,864	26,547	27,230	27,913	27,913	2.884,667	1.336,667	1.336,667	1.336,667	1.336,667	8.091,335
2	Unit pengelola irigasi yang dirangsang													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Jumlah unit pengelola lahan yang dijangkau	Unit	1	5	11	21	36	34	5,537	5,537	5,537	5,537	5,537	27,684
	Bagunan pengendali banjir yang dipanen dan dipekerja													
4	Pangkas bangunan pengendali banjir yang dipanen dan dipekerja	km	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143	255,461	255,461	255,461	255,461	255,461	1,277,306
	Bagunan pendukung pengendali banjir yang dipanen dan dipekerja													
5	Jumlah bangunan pendukung pengendali banjir yang dipanen dan dipekerja	Unit	50	50	50	50	50	50	22,944	22,944	22,944	22,944	22,944	114,719
	Bagunan pengendali banjir dan pengendali sedimen yang dipelihara													
6	Jumlah bangunan pengendali banjir dan pengendali sedimen yang dipelihara	Unit	544	544	544	544	544	544	51,376	51,376	51,376	51,376	51,376	256,882
	Bagunan pemangku pantai yang dipelihara													
7	Pangkas bangunan pemangku pantai yang dipelihara	km	150	150	150	150	150	150	82,941	82,941	82,941	82,941	82,941	414,705
	Sumber air alami yang dipelihara													
8	Jumlah sumber air alami yang dipelihara	Lokasi	200	200	200	200	200	200	480,845	480,845	480,845	480,845	480,845	2,404,225
	Tampung air yang dipanen dan dipekerja													
9	Jumlah tampungan air yang dipanen dan dipekerja	Unit	1290	1290	1290	1290	1290	1290	445,066	445,066	445,066	445,066	445,066	2,225,332
	Unit pengelola bendungan yang dijangkau													
9	Jumlah unit pengelola bendungan yang dijangkau	Unit	18	18	23	30	34	34	8,362	35,255	35,255	35,255	35,255	150,890

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
10	Jaringan Irigasi Air Tanah yang dipanen dan dipekerja													
	Pangkas jaringan Irigasi Air Tanah yang dipanen dan dipekerja	km	2,595	2,595	2,595	2,595	2,595	2,595	72,907	72,907	72,907	72,907	72,907	364,537
11	Unit air baku yang dipanen dan dipekerja													
	Jumlah unit air baku yang dipanen dan dipekerja	Unit	440	440	440	440	440	440	112,657	112,657	112,657	112,657	112,657	563,287
12	Akumulasi air yang dituang													
	Jumlah akumulasi air yang dituang	Dokumen	5	10	18	30	34	34	18,321	18,321	18,321	18,321	18,321	91,607
13	Kegiatan tanggap darurat akibat bencana yang dilaksanakan													
	Jumlah kegiatan tanggap darurat akibat bencana	Kegiatan	68	68	68	68	68	68	33,641	33,641	33,641	33,641	33,641	168,207
14	Pemeliharaan fasilitas pendukung OP yang dipanen dan dipekerja													
	Jumlah pemeliharaan fasilitas pendukung OP yang dipanen dan dipekerja	Unit	340	340	340	340	340	340	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	245,000
15	Kegiatan infrastruktur partisipatif yang dilaksanakan													
	Jumlah kegiatan infrastruktur partisipatif yang dilaksanakan	Kegiatan	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,900	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	5,406,000
16	Kalenderan pengelolaan SDA yang dijangkau													
	Jumlah lembaga pengelolaan SDA yang dijangkau	Lembaga	3	6	9	12	15	15	59,246	80,000	85,000	110,000	128,234	472,480
17	Pemantauan pemeliharaan SDA yang dilaksanakan													
	Jumlah dokumen pemantauan pemeliharaan SDA	Dokumen	34	34	34	34	34	34		10,000	10,000	10,000	10,000	40,000

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
18	Dukungan modernisasi daerah irigasi yang dilaksanakan													
	Jumlah Daerah Irigasi yang melaksanakan dukungan modernisasi irigasi	DI	0	2	4	7	9	9		23,500	23,500	23,500	23,500	94,000
19	Layanan pemeliharaan operasi dan pemeliharaan, sistem layanan, dan pemanfaatan SDA yang dilaksanakan													
	Jumlah BWS/BWS yang dilayani	BWS/BWS	37	37	37	37	37	37	47,330	47,400	48,750	52,140	54,510	250,130
20	Penyediaan peralatan pendukung OP yang dilaksanakan													
	Jumlah alat pendukung OP yang dilaksanakan	Alat	87	70	75	80	85	377	200,000	200,000	235,095	262,790	291,870	1,169,755
21	Layanan tanggap darurat akibat bencana yang dilaksanakan													
	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	1	300,707	300,800	315,840	330,880	345,500	1,594,147
KEGIATAN 8 : PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO									256,131	262,477	267,580	292,676	296,392	1,415,458
KORDINATOR : PUSAT PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO														
PELAKSANA : PUSAT PENGENDALIAN LUMPUR SIDOARJO														
Sesuai Kegiatan 1: Menanggulangi layanan secara prosedur pengendalian lumpur Sidoarjo														
1	Jumlah volume lumpur lumpur (slurry) yang dialirkan ke Kali Porong	km	2	2	2	2	2	10						
2	Jumlah volume lumpur lumpur yang dialirkan ke Kali Porong	t/m3	31	31	40	40	40	40						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan pelayanan pengelolaan lumpur Sidoarjo														
1	Persentase pencapaian target pengelolaan lumpur Sidoarjo	%	78%	70%	100%	100%	100%	100%						
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk pengelolaan lumpur Sidoarjo yang disusun													
	Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk pengelolaan lumpur Sidoarjo yang disusun	Dokumen		1	1	1	1	4		10,000	10,000	10,000	10,000	40,000
2	Sarana prasarana pengelolaan lumpur yang dibangun/ditingkatkan													
	Panjang sarana prasarana pengelolaan lumpur yang dibangun/ditingkatkan	Km	2	2	2	2	2	10	42,832	62,900	44,045	69,190	72,225	333,302
3	Sarana prasarana pengelolaan lumpur yang diperbaiki dan dipelihara													
	Jumlah biaya sarana prasarana pengelolaan lumpur yang diperbaiki dan dipelihara	Layanan	1	1	1	1	1	1	175,744	159,000	188,080	199,000	159,000	991,744
4	Dampak lingkungan lumpur yang ditangani													
	Jumlah kegiatan penanganan dampak lingkungan lumpur yang ditangani	Kegiatan		5	5	5	5	20	14,880	16,974	15,571	20,329	22,280	99,815
5	Layanan pemantauan pengelolaan lumpur Sidoarjo													
	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	1	2,475	3,603	3,063	4,362	4,704	28,787
KEGIATAN 9 : LAYANAN TEKNIS SDA									63,200	96,950	98,950	98,950	96,950	459,000

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PELAKSANA : 1. DIREKTORAT BINA TEKNIK SUMBER DAYA AIR														
2. BOWS/BWS, BALAI TEKNIK SABO, BALAI HIDROLOGI DAN GEOTEKNIK KEAIRAN, BALAI HIDROLOGI DAN LINGKUNGAN KEAIRAN														
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan kesiapan teknis infrastruktur SDA														
1	Jumlah layanan hidrologi yang diintegrasikan pada S2i3	Layanan	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	170,00						
2	Tingkat nilai layanan S2i3A Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)	Poin	4,00	4,30	4,50	4,90	5,00	5,20						
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan pembinaan layanan teknis bidang SDA														
1	Persentase pencapaian target layanan S2i3A Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	%	80%	80%	92%	98%	100%	100%						
2	Persentase layanan teknis bidang SDA	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
Sasaran Kegiatan 3: Meningkatkan layanan teknis bidang sabo, hidrolika, geoteknik, hidrologi dan lingkungan keairan														
1	Jumlah layanan teknis bidang sabo	Layanan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
2	Jumlah layanan teknis bidang hidrolika dan geoteknik	Layanan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
3	Jumlah layanan teknis bidang hidrologi dan lingkungan keairan	Layanan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan data dan sistem informasi yang dikelola													
	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	1	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	200,000
2	Layanan hidrologi, kualitas air dan lingkungan SDA yang dikelola													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	1	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000
3	Road Forecasting & Warning System (RFWS) yang dibangun/ditingkatkan													
	Jumlah Road Forecasting & Warning System (RFWS) yang dibangun/ditingkatkan	Unit	0	5	10	10	10	35		35,750	35,750	35,750	35,750	143,000
4	NSPE bidang sumber daya air yang disusun													
	Jumlah NS/P/R yang disusun	NS/P/R	10	10	10	10	10	50	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000
5	Pembinaan layanan teknis bidang Sumber Daya Air													
	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	1	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	20,000
6	Pembinaan pengelolaan S2i3A, hidrologi, kualitas air dan lingkungan SDA yang dilaksanakan													
	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	1	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000
7	Pembinaan pengelolaan jabatan fungsional dan fasilitas pengembangan profesi bidang SDA													
	Jumlah layanan pembinaan pengelolaan jabatan fungsional dan fasilitas pengembangan profesi bidang SDA	Layanan	1	1	1	1	1	1	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000
8	Layanan teknis bidang sabo, hidrolika, geoteknik, hidrologi dan lingkungan keairan yang dilaksanakan													
	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	1	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	16,000
KEGIATAN 10: KSPATUNJIAN INTERNAL DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR									8,081,213	31,337	34,472	37,916	41,710	8,826,558

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
PELAKSANA : DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL															
Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kepatuhan internal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air															
1	Nilai mutakhir SPDP Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Nilai	8,10	8,10	7,20	5,20	3,80	3,90							
OUTPUT KEGIATAN :															
1	SPK pembinaan dan pengendalian internal yang disusun														
	Jumlah SPK yang disusun	S/PK	5	5	5	5	5	25	2.664.800	10.741	11.378	12.513	13.764	2.912.794	
2	Pembinaan layanan pengembangan dan pengendalian manajemen risiko yang dilaksanakan														
	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	1	5.836.431	20.996	25.096	25.405	27.946	5.911.858	
SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya															
Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR															
		%	72,39	75,62	77,87	79,72	82,44	81,44							
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN															
SASARAN PROGRAM : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya															
Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya															
		%	55,92	63,25	71,54	79,26	84,32	84,12	2.375,975	2.466,980	2.581,504	2.619,783	2.772,747	12.848,010	
KEGIATAN 1 : DUKUNGAN MANAJEMEN TIJEN SUMBER DAYA AIR															
									2.375,975	2.466,980	2.581,504	2.619,783	2.772,747	12.848,010	
KORDONATOR : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SDA															
PELAKSANA : 1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SDA dan Seluruh UKE 2															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2. BOWS/SWS															
3. BALAI TEKNIK SDA															
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatkan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Sumber Daya Air															
1	Tingkat kualitas pembinaan dan pengelolaan tata usaha dinas, kooperasi, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan ketatausahaan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
2	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	Peraturan	-	1	1	1	0	3						-	
3	Tingkat layanan pengelolaan kelengkapan dan jabatan fungsional serta pengadministrasian pegawai	Nilai	100	100	100	100	100	100						-	
4	Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran	Nilai ICPA	92	92	88	94	95	95							
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatkan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Pelaksana Teknis															
1	Tingkat kualitas pengelolaan tata usaha dinas, kooperasi, dan pengelolaan ketatausahaan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
2	Tingkat penatausahaan Barang Milik Negara	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
3	Tingkat kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan														
	Jumlah layanan yang dilaksanakan	Layanan	1	1	1	1	1	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	950 Layanan dukungan manajemen Eselon I														
	Jumlah layanan dukungan manajemen Eselon I	Layanan	4	4	4	4	4	4	57,339	54,400	56,120	57,940	59,580	285,399	
	951 Layanan sarana dan prasarana internal														
	Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	139,728	150,999	151,149	151,998	151,664	744,834	
	955 Layanan dukungan manajemen Sarban														
	Jumlah layanan dukungan manajemen Sarban	Layanan	1	1	1	1	1	1	736,947	752,877	768,588	729,710	804,288	3,783,824	
	954 Layanan perbaikan														
	Jumlah layanan perbaikan	Layanan	1	1	1	1	1	1	1,471,513	1,570,824	1,604,671	1,679,792	1,756,255	8,043,056	

2. Direktorat Jenderal Bina Marga

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA														
PROGRAM : INFRASTRUKTUR KONNECTIVITAS														
SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan Konektivitas Jaringan Jalan Nasional														
1	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS : Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pedas (jalan jam per 100 km)	Jam/100 Km	2.21	2.19	2.09	2.08	1.90	1.90	37,225,740	53,122,897	57,588,640	63,191,896	62,493,658	273,761,907
SASARAN PROGRAM : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional														
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :														
1	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional (persentase proyek kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional)	%	81.8	82.8	84.8	85.8	87.9	87.9						
2	Rating Kredit Jalan Nasional (Nilai gabungan: antara nilai IR, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada rekam jejak jalan nasional)	Nilai	2.70	2.69	2.61	2.57	2.50	2.50						
3	Rating keselamatan jalan nasional (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan dari jumlah titik blackspot per populasi)	Nilai	3.51	3.16	2.95	2.89	2.82	2.82						
KEGIATAN 3: Pelaksanaan Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional														
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan pelaksanaan pemeliharaan dan tingkat kapasitas jalan														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan nasional														
		%	100	100	100	100	100	100	75,595,711	50,314,317	55,497,073	58,665,591	57,726,814	257,708,730
KOORDINATOR: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PELAKSANA: Balai Pelaksanaan Jalan														
1	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	%	81.8	82.8	84.8	85.8	87.9	87.9						
2	Rating kinerja jalan nasional	Nilai	2.7	2.69	2.61	2.57	2.5	2.5						
3	Rating keselamatan jalan nasional	Nilai	3.51	3.16	2.95	2.89	2.82	2.82						
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan nasional								2,010,679	2,151,420	2,302,020	2,463,161	2,615,582	11,542,858
	1.1 Jumlah dokumen pemeliharaan penyelenggaraan jaringan jalan dan jembatan	Dok	33	33	33	33	33	165						
	1.2 Jumlah dokumen pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan	Dok	33	33	33	33	33	165						
	1.3 Jumlah dokumen pengendalian secara pelaksanaan pengujian dan peralatan	Dok	26	26	26	26	26	130						
Pemeliharaan, Peningkatan dan Pengembangan jalan nasional														
2	2.1 Panjang jalan yang diperbaiki	km	47,017	47,017	47,017	47,017	47,017	47,017	5,897,945	5,389,958	5,821,281	5,943,596	5,562,262	27,754,385
2	2.2 Panjang jalan yang ditingkatkan	km	6,121.0	5,606.7	5,520.4	6,068.6	6,267.4	27,584.1	14,916,260	18,757,710	19,762,880	19,063,110	20,041,270	91,743,230
2	2.3 Panjang jembatan yang diperbaiki	meter	513,547	511,241.4	511,241.4	511,241.4	511,241.4	511,241.4	492,923	519,458	504,587	505,838	482,482	2,505,279
2	2.4 Panjang jembatan yang ditingkatkan	meter	85,581.0	54,630.2	47,129.9	47,675.1	65,290.0	283,286.1	2,818,904	4,250,245	4,449,593	4,487,056	4,644,454	20,771,158

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.1	Panjang Jalan Strategis Lintas Utama Pulsa yang dibangun	km	296.0	895.8	620.6	603.4	526.7	2,642.4	4,254,310	5,736,329	5,749,634	9,090,099	8,690,748	36,281,722
2.2	Panjang jalan yang mendukung Kemudahan Pergerakan yang dibangun	km	48.1	88.8	52.8	50.2	35.1	275.1	705,082	1,221,018	189,677	799,870	693,850	4,067,477
2.3	Panjang Jalan Akses simpul transportasi yang (Pelabuhan, Bandara) yang dibangun	km	16.1	26.8	23.6	18.4	21.5	106.4	224,287	416,606	352,120	308,120	316,340	1,620,487
2.4	Panjang jalan bebas hambatan yang akan dibangun dengan dukungan pemerintah	km	11.8	18.0	30.4	27.0	25.0	112.2	598,952	4,422,398	4,422,398	4,422,398	4,422,398	18,285,940
2.5	Panjang jembatan yang dibangun	meter	18,624.1	3,174.9	5,090.2	5,038.5	6,300.7	38,228.4	3,976,705	1,859,982	3,049,280	4,267,121	4,016,330	17,569,307
2.10	Panjang Flyover dan Underpass yang dibangun	meter	2,615.0	8,948.9	8,705.9	7,870.2	5,515.3	31,655.3	610,867	2,693,240	2,698,526	4,087,780	2,983,268	12,991,683
2.11	Dukungan Jalan Daerah	km		290.0	290.0	290.0	290.0	1,060.0		3,256,000	3,256,000	3,256,000	3,256,000	13,024,000
KEGIATAN 2: Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan Jalan Tol														
SASARAN KEGIATAN: Pencapaian pengaturan, pengendalian dan pengawasan jalan tol														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat pencapaian pembangunan jalan bebas hambatan														
1	Panjang Jalan Tol yang Beroperasi	km	338.41	846.15	263.8	646.82	919.37	2513.45						
KOORDINATOR: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
PELAKSANA: Badan Pengatur Jalan Tol														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Pengaturan, Pengendalian, Pengawasan Jalan Tol								9,079	5,798	10,387	11,134	11,892	52,176

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1	Jumlah Dokumen Kajian dan Analisis Penyelenggaraan Pengusahaan Jalan Tol	Dok	1	1	1	1	1	5					
	2	Jumlah Dokumen Pengaturan Penyelenggaraan, Relayanan dan Penyelenggaraan Pengusahaan Jalan Tol	Dok	1	1	1	1	1	5	780,000	840,000			
	3	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemantauan Penyelenggaraan Pengusahaan Jalan Tol	Dok	1	1	1	1	1	5					
	4	Jumlah Laporan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Hukum dan Human	Laporan	12	12	12	12	12	60					
KEGIATAN 3: Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan Penyelenggaraan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:														
1	Tingkat layanan penyelenggaraan darurat akibat bencana	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	200,000	204,000	208,000	212,344	216,486	1,040,727
	1.1 Tingkat Penyaluran Bantuan Tanggap Bencana	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0						
2	Tingkat kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	82,677	88,464	94,657	2,516,224	2,860,532	5,642,555
	2.1 Tingkat implementasi perencanaan penyelenggaraan jalan	%	85.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0						
	2.2 Tingkat implementasi penyelenggaraan SAGP	Nilai	80.0	81.0	82.0	83.0	84.0	85.0						
3	Tingkat pencapaian pembangunan jalan	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	20,121	10,099	12,196	36,449	16,861	161,718
	3.1 Panjang jalan yang dibangun	km	456.8	580.9	895.1	872.0	581.1	1,000.1						
	3.2 Panjang jalan yang dilekwati (14 m)	km	38.8	49.4	53.3	39.1	66.9	246.7						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Tingkat pencapaian kualitas kondisi jalan dan jembatan wilayah 1	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	29,978	12,076	14,321	36,724	19,295	172,306
	4.1 Rating kondisi jalan		2.71	2.64	2.81	2.57	2.49	2.49						
	4.2 Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	99.0	94.0	96.0	97.0	99.0	99.0						
5	Tingkat pencapaian pembangunan jembatan	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	27,466	17,406	19,500	41,527	41,896	189,916
	5.1 Panjang jembatan yang dibangun	m	18,624.1	1,174.9	1,090.2	5,018.5	8,200.7	38,128.6						
	5.2 Panjang Fly Over/Underpass Terbangun	M	2,815.0	8,948.9	8,705.9	7,070.2	1,511.5	31,051.5						
6	Tingkat pencapaian pembangunan jalan bebas hambatan	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	181,704	1,457,335	1,535,612	1,547,451	1,561,609	6,506,103
	6.1 Panjang Jalan Tol yang beroperasi	km	338.41	146.15	262.8	646.82	919.27	2,513.45						
7	Tingkat pencapaian kualitas kondisi jalan dan jembatan wilayah 2	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	32,041	14,986	18,136	41,505	45,110	191,789
	7.1 Rating kondisi jalan		2.45	2.61	2.62	2.56	2.51	2.51						
	7.2 Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	81.0	90.0	92.0	95.0	98.0	98.0						
8	Tingkat kualitas layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	35,222	17,898	46,326	43,149	46,169	202,555
	8.1 Persentase NSRP bidang jalan dan jembatan yang diterbitkan	Jumlah	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	50.0						
	8.2 Persentase rating keteknikan jalan	Nilai	3.5	3.1	3.0	2.8	2.8	2.8						
9	Tingkat kualitas data dan sistem informasi jalan dan jembatan	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0						
	Tingkat fasilitas layanan peningkatan kompetensi fungsional	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
9	Tingkat pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	18,565	18,864	21,255	22,743	24,335	106,762
	9.1 Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan	Jumlah	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	20.0						
	9.2 Tingkat fasilitas pengujian laboratorium dan jalan tol	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0						
10	Tingkat kapabilitas internal dalam penyelenggaraan jalan	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	15,000	16,050	17,179	18,175	19,661	86,265
	Persentase NSRP pembinaan dan pengendalian kapabilitas interne yang diterbitkan	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0						
	Tingkat fasilitas penyusunan dokumen SRP	Jumlah	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0						
	Tingkat pelayanan peningkatan pengujian masyarakat	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0						
KOORDINATOR: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Pengaturan dan pembinaan sistem dan strategi penyelenggaraan jalan dan jembatan													
	1. Jumlah Dokumen Keterpaduan Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan	Dok	1	1	1	1	1	5						
	2. Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Strategi, Program, dan Anggaran	Dok	1	1	1	1	1	5						
	3. Jumlah Dokumen Pembinaan Jalan Daerah	Dok	1	1	1	1	1	5						
	4. Jumlah Dokumen Pengelolaan Program dan Hibah (Luar Negeri)	Dok	1	1	1	1	1	5						
	5. Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	Dok	1	1	1	1	1	5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDEKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Pengelolaan Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian dan Hibah Luar Negeri													
	1 Layanan pengendalian pelaksanaan perjanjian dan hibah luar negeri	Layanan	1	1	1	1	1	5						
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jendral														
OUTPUT KEGIATAN :														
Pengembangan Pusat Akademi Binaan														
1	1 Jumlah bantuan tanggap darurat kebutuhan minimal yang muluskan	Dok	12	12	12	12	12	60						
PELAKSANA: Direktorat Pembangunan Jalan														
OUTPUT KEGIATAN :														
Pengaturan dan pembinaan pembangunan jalan														
1	1 Jumlah Dokumen Pembinaan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	Dok	1	1	1	1	1	5						
	2 Jumlah Dokumen Pembinaan Pembangunan Jalan Wilayah I	Dok	1	1	1	1	1	5						
	3 Jumlah Dokumen Pembinaan Pembangunan Jalan Wilayah II	Dok	1	1	1	1	1	5						
	4 Jumlah Dokumen Pembinaan Pembangunan Jalan Wilayah III	Dok	1	1	1	1	1	5						
PELAKSANA: Direktorat Pemroses Jalan dan Jembatan Wilayah I														
OUTPUT KEGIATAN :														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDEKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Pengaturan dan pembinaan preservasi jalan dan jembatan wilayah I													
	1 Jumlah Dokumen Pembinaan Perencanaan Teknis Pemroses Jalan dan Jembatan Wilayah I	Dok	1	1	1	1	1	5						
	2 Jumlah Dokumen Pembinaan Pemroses Jalan dan Jembatan Wilayah I.A	Dok	1	1	1	1	1	5						
	3 Jumlah Dokumen Pembinaan Pemroses Jalan dan Jembatan Wilayah I.B	Dok	1	1	1	1	1	5						
1	4 Jumlah Dokumen Pembinaan Pemroses Jalan dan Jembatan Wilayah I.C	Dok	1	1	1	1	1	5						
PELAKSANA: Direktorat Pembangunan Jembatan														
OUTPUT KEGIATAN :														
Pengaturan dan pembinaan pembangunan jembatan														
1	1 Jumlah Dokumen Pembinaan Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan	Dok	1	1	1	1	1	5						
	2 Jumlah Dokumen Pembinaan Pengembangan Jembatan Wilayah I	Dok	1	1	1	1	1	5						
	3 Pembangunan Jembatan Wilayah II	Dok	1	1	1	1	1	5						
	4 Jumlah Dokumen Pembinaan Pembangunan Jembatan Wilayah III	Dok	1	1	1	1	1	5						
PELAKSANA: Direktorat Jalan Bebas Hambatan														
OUTPUT KEGIATAN :														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDEKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Pembinaan Teknik Penyelenggaraan jalan bebas hambatan								46,154	53,525	55,132	58,993	63,123	276,927
	1 Jumlah Dokumen Pembinaan Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan	Dok	1	1	1	1	1	5						
	2 Jumlah Dokumen Pembinaan Pembangunan Jalan Bebas Hambatan	Dok	1	1	1	1	1	5						
1	3 Jumlah Dokumen Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Jalan Bebas Hambatan	Dok	1	1	1	1	1	5						
	Layanan Pengadaan Tanah								333,350	1,406,410	1,590,480	1,488,460	1,500,483	6,229,383
2	1 Jumlah Hektar Pembelian Tanah	Ha	13	43	43	43	43	185						
2	2 Jumlah Dokumen Pengadaan Tanah	Dok	1	1	1	1	1	5						
PELAKSANA: Direktorat Pemroses Jalan dan jembatan Wilayah II														
OUTPUT KEGIATAN :														
Pengaturan dan pembinaan preservasi jalan dan jembatan wilayah II														
1	1 Jumlah Dokumen Pembinaan Perencanaan Teknis Pemroses Jalan dan jembatan Wilayah II	Dok	1	1	1	1	1	5						
	2 Jumlah Dokumen Pembinaan Pemroses Jalan dan jembatan Wilayah II.A	Dok	1	1	1	1	1	5						
	3 Jumlah Dokumen Pembinaan Pemroses Jalan dan jembatan Wilayah II.B	Dok	1	1	1	1	1	5						
	4 Jumlah Dokumen Pembinaan Pemroses Jalan dan jembatan	Dok	1	1	1	1	1	5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDEKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Wakil B.C.														
PELAKSANA: Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan														
OUTPUT KEGIATAN :														
Pembinaan Teknik Bidang Jalan dan Jembatan														
1	1	Jumlah Dokumen pelaksanaan pengelolaan aset dan laboratorium jalan dan jembatan	Dok	1	1	1	1	1	5					
	2	Jumlah Dokumen penyusunan dan domonasi norma, standar, prosedur dan kriteria	Dok	1	1	1	1	1	5					
	3	Jumlah dokumen pelaksanaan keselamatan dan keamanan jalan dan jembatan	Dok	1	1	1	1	1	5					
	4	Jumlah dokumen pengaturan data dan pengimbangan sistem informasi jalan dan jembatan	Dok	1	1	1	1	1	5					
	5	Jumlah dokumen pengembangan keahlian dan profesi dan pengelolaan jabatan fungsional	Dok	1	1	1	1	1	5					
PELAKSANA: Balai Bina Teknik jalan dan Jembatan														
OUTPUT KEGIATAN :														
Layanan Sertifikasi Sistem jalan dan jembatan														
1	1	Jumlah dokumen pengembangan teknologi bidang jalan dan jembatan	Dok	4	4	4	4	4	20					
	2	Jumlah dokumen layanan pengaplikasian laboratorium dan aset teknik	Dok	4	4	4	4	4	20					

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDEKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bidang jalan dan jembatan														
PELAKSANA: Direktorat Kepatuhan Internal														
OUTPUT KEGIATAN :														
Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, perencanaan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengendalian kepatuhan internal														
1	1	Jumlah dokumen penyusunan dan pembinaan teknis pelaksanaan NSPE pembinaan dan pengendalian kepatuhan internal	Dok	1	1	1	1	1	5					
	2	Jumlah dokumen pembinaan dan pengendalian kepatuhan internal	Dok	1	1	1	1	1	5					
	3	Jumlah dokumen pemantauan dan pengendalian kepatuhan internal	Dok	1	1	1	1	1	5					
	4	Jumlah dokumen pelaporan pembinaan dan pengendalian kepatuhan internal	Laporan	12	12	12	12	12	60					
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN														
SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya														
INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR														
SASARAN PROGRAM : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya														
1			%	72,39	75,61	77,97	79,72	83,44	83,44					
KEGIATAN 2: Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDEKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:														
1	1	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	Nilai	93,7	94,3	94,6	94,8	95	95					
	2	Tingkat fasilitas produk tolrum dan aksesori tolrum	jumlah	2	8	7	2	3	22					
	3	Persentase Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara	%	100	100	100	100	100	100					
	4	Persentase Tingkat Pelayanan Reprogramming D/BM	%	100	100	100	100	100	100					
KORDINATOR : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga														
PELAKSANA: Balai Pelaksanaan Jalan														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Sosasi dan Prosedur Internal								2,377,989	2,544,469	2,722,560	2,913,139	3,117,359	13,675,198
	1	Jumlah Layanan Sosasi dan Prosedur Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5					
	2	Layanan Dukungan Manajemen Satker												
1	1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	5					
	3	Layanan Perkantoran												
1	1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5					
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDEKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Ruta Rapih)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
OUTPUT KEGIATAN:										45,330	46,513	51,909	55,543	59,431	268,737
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5							
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker														
1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	5							
3	Layanan Perkantoran														
1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5							
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal															
OUTPUT KEGIATAN:										206,750	231,229	273,747	284,126	295,512	1,291,560
1	Layanan dukungan manajemen Satker 3														
	1 Jumlah laporan kegiatan dan program	Layanan	1	1	1	1	1	5							
	2 Jumlah laporan keuangan														
	3 Jumlah dokumen penyusunan anggaran, peraturan, pendukung, undangan, pembinaan, forum dan pertemuan lainnya tahun	Layanan	1	1	1	1	1	5							
	4 Jumlah laporan layanan komunikasi publik														
	5 Jumlah dokumen pengabdian Riset M & Masyarakat														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDEKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Ruta Rapih)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5							
3	Layanan Perkantoran														
1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5							
PELAKSANA: Direktorat Pembinaan Jalan															
OUTPUT KEGIATAN:										24,028	25,701	27,500	29,425	31,485	138,133
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5							
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker														
1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	5							
3	Layanan Perkantoran														
1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5							
PELAKSANA: Direktorat Perencanaan Jalan dan Jembatan Wilayah 1															
OUTPUT KEGIATAN:										10,429	11,359	11,940	12,776	13,679	59,976
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDEKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Ruta Rapih)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker														
1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	5							
3	Layanan Perkantoran														
1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5							
PELAKSANA: Direktorat Pembinaan Jembatan															
OUTPUT KEGIATAN:										21,230	22,754	24,306	26,008	27,828	122,090
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5							
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker														
1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	5							
3	Layanan Perkantoran														
1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5							
PELAKSANA: Direktorat Jalan Belaya Hambatan															
OUTPUT KEGIATAN:										41,360	44,441	78,022	74,924	80,969	355,718
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDEKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker														
1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	5							
3	Layanan Perkantoran														
1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5							
PELAKSANA: Direktorat Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II															
OUTPUT KEGIATAN:										14,601	15,623	16,716	17,887	19,139	83,967
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5							
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker														
1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	5							
3	Layanan Perkantoran														
1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5							
PELAKSANA: Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan															
OUTPUT KEGIATAN:										42,022	44,963	48,111	51,479	55,382	241,659
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDEKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker														
1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	5							
3	Layanan Perkantoran														
1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5							
PELAKSANA: Balai Bina Teknik Jalan dan Jembatan															
OUTPUT KEGIATAN:										27,874	29,826	31,913	34,147	36,538	160,300
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5							
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker														
1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	5							
3	Layanan Perkantoran														
1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5							
PELAKSANA: Direktorat Kepatuhan Internal															
OUTPUT KEGIATAN:										5,000	5,250	5,724	6,125	6,554	28,753
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDEKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker														
1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	5							
3	Layanan Perkantoran														
1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5							
PELAKSANA: Badan Pengatur Jalan Tol															
OUTPUT KEGIATAN:										58,879	63,903	67,410	72,129	77,178	338,597
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5							
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker														
1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	5							
3	Layanan Perkantoran														
1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5							

¹ Note: Anggaran aktualisasi tarif tol

3. Direktorat Jenderal Cipta Karya

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Urut Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA															
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Penyediaan Akses Pemukiman dan Infrastruktur Pemukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau															
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS: Peningkatan pelayanan penyediaan akses pemukiman dan infrastruktur pemukiman yang layak, aman, dan terjangkau															
1	Peningkatan pelayanan infrastruktur pemukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living	%	47,00	62,29	70,88	80,97	89,93	98,57	98,57	22.009.946	31.348.413	26.122.629	25.406.942	20.366.594	125.256.543
SASARAN PROGRAM: Meningkatkan pelayanan infrastruktur pemukiman dan pemukiman yang layak dan aman										20.734.734	29.986.812	24.652.265	23.820.490	18.648.878	117.823.285
INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Peningkatan pelayanan infrastruktur pemukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living — dihitung dari rasio pelayanan realisasi															
1	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	%	89,27 (JP: 28,18)	91,80 (JP: 23,60)	93,80 (JP: 25,40)	95,90 (JP: 27,50)	97,90 (JP: 28,90)	100 (JP: 30,40)	100 (JP: 30,40)						
2	Persentase rumah tangga dengan akses air limbah domestik layak dan aman	%	77,44 Akses Layak (Termasuk 7,5% Akses Aman)	78,1 Akses Layak (Termasuk 8,60% Akses Aman)	79,43 Akses Layak (Termasuk 11% Akses Aman)	82,07 Akses Layak (Termasuk 13% Akses Aman)	86,03 Akses Layak (Termasuk 14% Akses Aman)	90 Akses Layak (Termasuk 15% Akses Aman)	90 Akses Layak (Termasuk 15% Akses Aman)						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Urut Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi yang terakumulasi di perkotaan	%	60,44 (BPS, 2016, data Bepropas)	74,62	79,21	84,41	92,21	100,00	100,00						
4	Persentase kawasan kawasan pemukiman yang dilingkarkan kaulibanya	%	1,62	17,35	41,15	64,41	83,29	100,00	100,00						
5	Persentase kaulibanya yang terakumulasi implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang terakumulasi dan aman	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
6	Persentase tingkat pemenuhan bangunan gedung hijau	%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00						
7	Persentase sarana prasarana strategis yang dilingkarkan kaulibanya	%	0,00	38,18	56,94	73,68	90,07	100,00	100,00						
KEGIATAN 1: PENYELANGGARAAN PERUMAHAN DAN BANGUNAN GEDUNG										7.729.318	8.995.855	7.046.095	6.503.112	5.571.709	34.947.220
SASARAN KEGIATAN 1.1: Meningkatkan keterpaduan perencanaan dan kualitas kawasan pemukiman										3.353.895	4.803.629	4.134.775	3.706.889	3.267.219	18.466.206
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Peningkatan keterpaduan perencanaan dan kualitas kawasan pemukiman — dihitung dari rasio pelayanan realisasi															
1	Persentase kawasan kawasan pemukiman yang terakumulasi	%	0	15	42	62	81	100	100						
2	Persentase peningkatan kualitas kawasan pemukiman	%	1,62	17,35	41,15	64,41	83,29	100,00	100,00						
SASARAN KEGIATAN 1.2: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan pemukiman										2.527.526	3.302.022	2.149.316	2.033.575	1.996.543	12.906.882
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan pemukiman															
		%		60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Urut Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
— dihitung dari rasio pelayanan realisasi															
1	Persentase kaulibanya yang terakumulasi implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang terakumulasi dan aman	%	100	100	100	100	100	100	100						
2	Persentase bangunan penyelenggaraan penyelenggaraan bangunan gedung	%	0	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00						
3	Persentase bangunan penyelenggaraan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan	%	0	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00						
SASARAN KEGIATAN 1.3: Meningkatkan kualitas sarana prasarana olahraga dan pasar										1.847.617	790.405	762.814	762.649	309.947	4.472.631
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Peningkatan kualitas sarana prasarana olahraga dan pasar yang terakumulasi dan aman — dihitung dari rasio pelayanan realisasi															
1	Persentase sarana prasarana olahraga yang terakumulasi	%	0	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
2	Persentase sarana prasarana pasar yang terakumulasi	%	0	42,22	60,00	77,78	95,56	100,00	100,00						
3	Persentase sarana prasarana strategis kaulibanya yang terakumulasi	%	0	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00						
KOORDINATOR: DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN															
PELAKSANA: DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN															
OUTPUT KEGIATAN:															
1	Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Kali/Kota		500	500	500	500	500	500	103.837	106.920	112.270	117.865	123.781	562.712

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Pemertuaan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman														
	Jumlah dokumen pemertuaan pembangunan infrastruktur pemukiman	Dok		8	14	10	10	10	52	22.000	56.000	40.000	40.000	40.000	208.000
3	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman														
	Luas pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman	Hektar		900	2.471	2.380	1.894	1.953	8.522	2.079.888	3.096.500	3.252.500	2.799.000	2.553.488	13.551.324
4	Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Berkelas Masyarakat														
	Luas pembangunan infrastruktur pemukiman berkelas masyarakat	Hektar		1.813	1.280	1.280	1.280	1.280	6.933	1.160.170	750.000	750.000	750.000	750.000	4.160.170
PELAKSANA: DIREKTORAT BINA PENATAAN SANGUNAN															
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan														
	Jumlah balok/bata yang menyebabkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan lingkungan	Kub/Bata		509	509	509	509	509	509	216.046	236.848	236.848	252.807	266.888	1.207.640
2	Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Negeri														
	Jumlah unit rumah negeri yang menyebabkan pembinaan dan pengelolaan	Unit Rumah Negeri		1.800	1.800	1.800	1.851	1.800	9.051	15.575	15.231	15.679	17.127	18.498	80.108
3	Pengembangan Penyelenggaraan Bangunan Gedung														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Luas pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung	M2		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	1.039.606	1.806.175	972.675	927.336	968.313	5.737.268
4	Pengembangan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan														
	Jumlah kawasan pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	Kawasan		20	20	20	20	20	100	1.256.096	1.241.567	924.815	856.302	722.848	4.985.628
PELAKSANA: DIREKTORAT PRASARANA STRATEGIS															
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga, dan Pesisir														
	Jumlah balok/bata yang menyebabkan pembinaan dan pengawasan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana olahraga dan pesisir	Kub/Bata		0	25	25	25	25	100	-	5.770	6.347	6.962	7.640	26.780
2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga														
	Jumlah gedung yang menyebabkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana olahraga	Gedung		9	1	0	0	0	10	260.717	38.949	-	-	-	299.666
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pesisir														
	Jumlah pesisir yang menyebabkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasara pesisir	Pesisir		19	8	8	8	7	45	1.581.908	750.444	750.444	750.444	297.267	4.131.144
4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Strategis														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Lakeba														
	Jumlah gedung yang menyebabkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana strategis lakeba	Gedung		2	2	2	2	2	10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	21.000
KEGIATAN 2: PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PRASARANA PENDIDIKAN										4.418.000	3.596.105	2.895.917	2.561.818	1.357.688	14.731.548
SASARAN KEGIATAN 2.1: Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan										4.418.000	3.596.105	2.895.917	2.561.818	1.357.688	14.731.548
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Peningkatan perolehan kualitas sarana prasarana pendidikan yang terdistribusi dan akutansi dan indikator															
1. Peningkatan sarana prasarana pendidikan yang terdistribusi dan akutansi										%	25,63	47,21	68,11	88,29	100,00
2. Peningkatan sarana prasarana pendidikan yang terdistribusi dan akutansi										%	25,63	47,21	68,11	88,20	100,00
KOORDINATOR: DIREKTORAT PRASARANA STRATEGIS															
PELAKSANA: DIREKTORAT PRASARANA STRATEGIS															
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan														
	Jumlah balok/bata yang menyebabkan pembinaan dan pengawasan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan	Kub/Bata		0	148	148	148	148	148	-	7.684	8.463	9.506	10.240	35.787
2	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah sekolah yang mendapatkan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah	Sekolah		1.165	1.800	996	996	607	4.794	2.467.440	2.088.132	2.084.532	2.064.532	1.267.906	10.032.953
3	Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Baru														
	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah baru	Sekolah		0	0	2	2	2	6	-	-	4.000	4.000	4.800	12.800
4	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan														
	Jumlah sekolah yang mendapatkan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana madrasah dan sekolah keagamaan	Sekolah		171	150	128	66	22	579	370.680	533.228	284.708	218.152	71.562	1.287.591
5	Pembangunan Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan Baru														
	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan sarana prasarana madrasah dan sekolah keagamaan baru	Sekolah		0	0	2	2	2	6	-	-	4.000	4.000	4.800	12.800
6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Negeri														
	Jumlah gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana perguruan tinggi negeri	Gedung		33	38	35	7	0	85	874.317	794.834	397.817	185.460	-	2.252.028
7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana perguruan tinggi keagamaan Islam negeri	Gedung		12	5	2	1	0	20	676.361	286.817	112.727	56.368	-	1.127.289
KEGIATAN 3: PENYELANGGARAAN AIR MINUM YANG LAYAK										5.476.842	12.153.782	6.793.353	6.806.324	3.715.648	34.937.947
SASARAN KEGIATAN 3.1: Meningkatkan kontribusi pemenuhan akses air minum terjangkau perkapita										5.476.842	12.153.782	6.793.353	6.806.324	3.715.648	34.937.947
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum terjangkau perkapita — dihitung dari indikator:	%		22.97	22.82	22.92	23.83	24.44	24.46						
	1. Persentase rumah dengan akses ke air minum terjangkau perkapita (M)	%	20.16	20.57	22.82	22.92	23.83	24.44	24.46						
KORDINATOR: DIREKTORAT AIR MINUM															
PELAKSANA: DIREKTORAT AIR MINUM															
OUTPUT KEGIATAN:															
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM														
	Jumlah kota/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengembangan sistem persediaan air minum	Kota/Kota		509	509	509	509	509	509	242.507	280.300	294.204	307.101	343.495	1.468.621
2	Pembangunan SPAM														
	Jumlah kapasitas SPAM yang dibangun	Liter/hari		1.539	4.800	1.530	1.530	0	9.399	2.677.500	8.056.000	2.677.500	2.677.500	0	16.082.500
3	Peningkatan SPAM														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah peningkatan kapasitas SPAM eksisting	Liter/hari		75	375	375	375	0	1.200	90.000	449.800	449.600	449.600	0	1.439.000
4	Perluasan SPAM														
	Jumlah sambungan rumah (SR) yang ditetapkan perluasan SPAM	SR		110.000	182.000	182.000	182.000	182.000	678.000	1.262.705	2.162.348	2.162.348	2.162.348	2.162.348	9.913.241
5	SPAM Berbasis Masyarakat														
	Jumlah sambungan rumah (SR) yang ditetapkan layanan SPAM berbasis masyarakat	SR		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	6.000.000
6	Pembinaan Teknis Bidang Air Minum*														
	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan teknis bidang air minum	Orang		0	800	800	800	800	3.200	0	8.513	8.538	8.564	8.590	34.204
7	Fasilitasi Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Perawatan Bidang Air Minum*														
	Jumlah lokasi fasilitas pengembangan teknologi dan pengelolaan perawatan bidang air minum	Lokasi		0	1	1	1	1	4	0	1.800	1.050	1.100	1.250	4.400
*) Target kerja dan pencapaian pada TA 2020 sesuai di Sekretariat Direktorat Jenderal dan di dalam pada Direktorat Air Minum sejak TA 2021. Selain dilaksanakan dalam Tugas dan Fungsi Direktorat Air Minum sesuai Permen PUPR No. 13 Tahun 2020															
KEGIATAN 4: PENYELANGGARAAN SANITASI YANG LAYAK										2.946.892	6.995.185	7.688.319	7.716.936	7.742.971	32.129.395
SASARAN KEGIATAN 4.1: Meningkatkan kontribusi pemenuhan akses sanitasi										2.946.892	6.995.185	7.688.319	7.716.936	7.742.971	32.129.395
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi — dihitung pada masing-masing indikator:														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Ruta Rupiiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Penyusunan rencana dengan yang terdapat program dan secara terdapat terdapat layak dan layak	%	77,44% Akron Layak (Terminak 7,7% Akron Arus)	77,50 Akron Layak (Terminak 7,80% Akron Arus)	77,57 Akron Layak (Terminak 8,21% Akron Arus)	77,64 Akron Layak (Terminak 8,77% Akron Arus)	77,71 Akron Layak (Terminak 9,29% Akron Arus)	77,78 Akron Layak (Terminak 10,10% Akron Arus)	77,71 Akron Layak						
2	Penyusunan rencana dengan yang terdapat terdapat dan terdapat terdapat maksud terdapat terdapat terdapat	%	66,64% (RPS 2016, tidak terdapat)	61,20%	64,40%	65,96%	67,77%	70,00%	70,00%						
3	Penyusunan rencana dengan yang terdapat terdapat terdapat terdapat	%	0	15%	35%	55%	75%	100%	100%						
KOORDINATOR: DIREKTORAT SANITASI															
PELAKSANA: DIREKTORAT SANITASI															
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Pembinaan dan Pengembangan Pengembangan Sanitasi														
	Jumlah balok/bata yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi	Kali/Bata		509	509	509	509	509	509	464.704	487.940	512.337	537.664	564.851	2.567.385
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik														
	Jumlah kepala keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah	KK		104.000	331.000	407.000	497.000	577.000	1.626.000	973.000	3.125.000	3.895.119	3.835.119	1.885.119	15.584.357
3	Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Ruta Rupiiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah kepala keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan	KK		2.625	3.500	3.500	3.500	4.375	17.500	48.563	64.750	64.750	64.750	88.938	328.750
4	Sistem Pengelolaan Perumahan														
	Jumlah kepala keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan perumahan	KK		411.000	894.000	1.000.000	1.000.000	994.000	4.099.000	1.199.000	2.080.000	2.934.099	2.934.899	2.934.899	12.083.897
5	Sanitasi Berbasis Masyarakat														
	Jumlah kepala keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sanitasi berbasis masyarakat	KK		50.800	62.800	62.800	62.800	62.800	382.000	261.625	327.415	327.415	327.415	328.415	1.572.784
6	Pembinaan Teknis Bidang Sanitasi*														
	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan teknis bidang sanitasi	Orang		0	240	300	350	400	1.290	0	4.581	6.000	7.000	8.000	25.581
7	Fasilitas Pengembangan Teknologi dan Pengelolaan Peralatan Bidang Sanitasi*														
	Jumlah laporan fasilitas pengembangan teknologi dan pengelolaan peralatan bidang sanitasi	Laporan		0	18	27	29	37	111	0	4.500	8.000	10.000	10.450	32.950

* Target kerja dan pencapaian pada TA 2020 secara di Sekretariat Direktorat Jenderal dan ditabikan pada Direktorat Sanitasi sejak TA 2021. Selain dilaksanakan dalam Target dan Fungsi Direktorat Sanitasi sesuai Permen PUPR No. 17 Tahun 2020

KEGIATAN 5: PENYELENGGARAAN PEMBINAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN										148.922	227.885	228.858	252.410	236.858	1.977.726
SASARAN KEGIATAN 5.1: Meningkatkan kinerja perencanaan, penganggaran, dan evaluasi infrastruktur permukiman										35.894	36.837	35.105	35.000	40.000	182.838
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase penyediaan kinerja perencanaan, penganggaran, dan evaluasi infrastruktur permukiman ---- dihitung dari angka:				%	71,33	80,00	86,47	83,33	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Ruta Rupiiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
pengawasan indikator:															
1	Tingkat implementasi perencanaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman	%		100	100	100	100	100	100						
2	Nilai kinerja anggaran	%		100	100	100	100	100	100						
3	Nilai realisasi pengisian kegiatan kegiatan dan bantuan lain negeri	%		20	40	60	80	100	100						
SASARAN KEGIATAN 5.2: Terlaksananya dukungan Layanan Kebencanaan Bidang Permukiman										57.380	122.500	122.500	122.500	122.500	547.380
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase dukungan layanan kebencanaan bidang permukiman ---- dihitung dari angka:				%	4,76	28,57	52,38	76,19	100,00						
1	Persentase dukungan layanan terpadu bidang bidang permukiman	%		4,76	28,57	52,38	76,19	100,00	100,00						
SASARAN KEGIATAN 5.3: Meningkatkan kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan infrastruktur permukiman										41.844	51.548	56.048	59.930	81.358	272.508
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase penyediaan kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan infrastruktur permukiman ---- dihitung dari angka dukungan indikator:				%	39,85	54,72	70,28	85,37	100,00						
1	Persentase NPM bidang permukiman dan perumahan	%		19	38	61	81	100	100						
2	Persentase rekomendasi teknis di bidang kegiatan gedung dan kawasan permukiman	%		20	40	60	80	100	100						
3	Persentase pengisian data dan sistem informasi yang terdapat	%		100	100	100	100	100	100						
4	Persentase dukungan pengembangan kapasitas dan fungsi jabatan jangan terdapat bidang permukiman	%		20	40	60	80	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Unit: Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SASARAN KEGIATAN 5.4: Meningkatkan kapabilitas sistem dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman										15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	75,000
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Peningkatan kapabilitas sistem dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman -- (Kebijakan dan rencana jangka panjang indikator: --															
Peningkatan pendanaan dan pengembangan kapabilitas sistem dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman --															
1		%		20.00	40.00	60.00	80.00	100	100						
Peningkatan pengembangan kapabilitas sistem dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman --															
2		%		20.00	40.00	60.00	80.00	100	100						
KOORDINATOR: DIREKTORAT BINA TEKNIK PERUMUKAN DAN PERUMAHAN PELAKSANA: DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PERUMUKAN															
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Pemecanan Pembangunan Infrastruktur Permukiman														
	Jumlah laporan pemecanan pembangunan infrastruktur permukiman	Laporan		1	1	1	1	1	5	6,250	6,250	7,500	8,750	10,000	38,750
2	Program dan Anggaran Pembangunan Infrastruktur Permukiman														
	Jumlah laporan program dan anggaran pembangunan infrastruktur permukiman	Laporan		1	1	1	1	1	5	6,250	6,250	7,500	8,750	10,000	38,750
3	Pengelolaan Pemaman dan Hibah Luar Negeri Pembangunan Infrastruktur														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Unit: Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Permukiman															
	Jumlah laporan pemukiman pengaman dan pengkajian P&A, Safety dan kelayakan infrastruktur permukiman	Laporan		1	1	1	1	1	5	17,146	16,087	12,895	8,750	10,000	66,588
4	Pengendalian Pelaksanaan, Kinerja Program, dan Koordinasi Pengadaan Tanah Pembangunan Infrastruktur Permukiman														
	Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan, kinerja program dan koordinasi pengendalian tanah untuk pembangunan infrastruktur permukiman	Laporan		2	2	2	2	2	10	6,250	6,250	7,500	8,750	10,000	38,750
PELAKSANA: SEKRETARAT DIREKTORAT JENDERAL CPTA KARYA															
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak														
	Jumlah laporan/tanggap darurat/kebutuhan mendesak	Paket/ Laporan		7	35	35	35	35	147	57,380	122,500	122,500	122,500	122,500	547,380
PELAKSANA: DIREKTORAT BINA TEKNIK PERUMUKAN DAN PERUMAHAN															
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Penataan Penyelenggaraan Pemukiman dan Kawasan Permukiman*														
	Jumlah NSPE penyelenggaraan pemukiman dan kawasan permukiman	NSPE	15	10	33	32	33	30	54	9,913	11,048	11,048	11,810	10,948	53,865
2	Peningkatan Kompetensi Teknis dan Profesi Bidang Permukiman dan														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Unit: Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemukiman															
	Jumlah laporan pengembangan pemukiman dan perumahan	Laporan	0	2	2	2	2	2	10	4,500	5,000	5,000	6,000	6,655	27,795
3	Fasilitas Kependudukan dan Gedung dan Kawasan Permukiman														
	Jumlah rekomendasi teknis kependudukan gedung dan kawasan permukiman	Rekomendasi Teknis	0	40	40	40	40	40	200	6,255	9,000	9,500	10,000	11,000	45,755
4	Fasilitas Pengembangan Teknologi Dan Pengelolaan Perakitan Infrastruktur Permukiman Dan Pemukiman														
	Jumlah laporan fasilitas pengembangan teknologi dan pengelolaan perakitan infrastruktur permukiman dan pemukiman	Laporan	0	5	5	5	5	5	25	4,000	4,800	4,500	5,000	5,500	23,800
5	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Infrastruktur Permukiman **														
	Jumlah laporan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi	Laporan	0	3	4	4	4	4	19	2,000	5,000	5,500	6,000	8,855	25,255
6	Bimbingan Teknis Bidang Permukiman dan Pemukiman														
	Jumlah bimbingan teknis bidang permukiman dan perumahan	Angkatan	0	9	9	9	9	9	45	6,000	9,500	10,000	11,000	11,500	48,000
7	Penyelenggaraan Habitat**														
	Jumlah laporan penyelenggaraan habitat	Laporan	0	1	1	1	1	1	5	9,000	10,000	10,000	10,000	10,000	49,000
*) Pemukiman pada TA 2020 berada di Direktorat sektor dan diartikan pada Dit. Bina Teknik Permukiman dan Pemukiman sejak TA 2021 sesuai dengan tugas, fungsi, dan penggunaan unit kerja terkait.															
**) Pemukiman pada TA 2020 berada di Dit. SSPP dan diartikan pada Dit. Bina Teknik Permukiman dan Pemukiman sejak TA 2021 sesuai dengan tugas, fungsi, dan penggunaan unit kerja terkait.															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PELAKSANA: DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN															
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Pembinaan Teknik Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Penyelenggaraan Infrastruktur Perumahan														
	Jumlah laporan pembinaan teknik kepatuhan intern dan manajemen risiko penyelenggaraan infrastruktur perumahan	Laporan		1	1	1	1	1	5	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	37.500
2	Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Penyelenggaraan Infrastruktur Perumahan														
	Jumlah laporan (pengendalian) kepatuhan intern dan manajemen risiko penyelenggaraan infrastruktur perumahan	Laporan		1	1	1	1	1	5	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	37.500
PROGRAM 5: DUKUNGAN MANAJEMEN															
SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknik Lainnya															
1	INDIKATOR KINERJA SASARAN : Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	%		72,39	75,41	77,97	79,72	81,44	81,44						
SASARAN PROGRAM : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknik Lainnya										1.295.252	1.361.801	1.470.364	1.586.341	1.737.720	7.433.278
1	INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat Kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknik lainnya	%		55,92	63,35	71,54	79,26	84,12	84,12						
KEGIATAN 1: DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SASARAN KEGIATAN : Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan infrastruktur perumahan										1.295.252	1.361.801	1.470.364	1.586.341	1.737.720	7.433.278
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :															
2	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naloh Dinas, Kemitraan, Perencanaan Sarang MBB, Nelayan, dan Pengelolaan Kemitraan	%		90	90	90	90	90	90						
	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Muluam	%		100	100	100	100	100	100						
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kemitraan dan Pengadministrasian Pegawai	%		87,50	87,80	87,78	87,80	87,90	87,90						
	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%		100	100	100	100	100	100						
KORDINATOR: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CPTA KARYA PELAKSANA: SEKRETARAT DIREKTORAT JENDERAL CPTA KARYA										1.000.998	1.044.806	1.122.852	1.267.286	1.299.071	5.674.814
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Pembinaan Teknik Bidang Cipta Karya														
	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan teknik bidang cipta karya	Orang		5.261	4.380	4.480	4.580	4.680	23.381	60.749	46.204	50.327	51.450	52.574	264.388
2	Layanan Dukungan Manajemen Ekstern I														
	Jumlah layanan dukungan manajemen ekstern I	Layanan		1	1	1	1	1	5	11.697	12.135	12.777	12.625	12.877	60.911
3 Layanan Sarana dan Prasarana Internal															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Layanan Dukungan Manajemen Setkor														
	Jumlah laporan sarana dan prasarana internal	Layanan		1	1	1	1	1	5	37.807	37.333	39.200	41.159	43.217	196.718
5	Layanan Dukungan Manajemen Setkor														
	Jumlah layanan dukungan manajemen setkor	Layanan		1	1	1	1	1	5	877.175	886.888	415.840	406.622	458.464	2.084.155
6	Layanan Perkantoran														
	Jumlah layanan perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	513.366	545.917	604.908	605.506	731.891	3.005.126
PELAKSANA: DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN										28.452	31.358	34.327	37.588	41.160	173.882
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
	Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	Layanan		1	1	1	1	1	5	1.529	1.595	1.679	1.761	1.852	8.417
2	Layanan Dukungan Manajemen Setkor														
	Jumlah layanan dukungan manajemen setkor	Layanan		1	1	1	1	1	5	1.650	1.733	1.818	1.910	2.006	9.117
3	Layanan Perkantoran														
	Jumlah layanan perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	25.476	26.826	30.829	39.912	47.388	151.547
PELAKSANA: DIREKTORAT BINA PENAYATAAN SANGUNAN										53.873	24.579	25.861	27.892	28.666	158.985
OUTPUT KEGIATAN :															
1 Layanan Sarana dan Prasarana Internal															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	Layanan		1	1	1	1	1	5	1,544	1,544	1,542	1,724	1,800	6,300
2	Layanan Dukungan Manajemen Setkor														
	Jumlah layanan dukungan manajemen setkor	Layanan		1	1	1	1	1	5	32,340	3,740	3,927	4,123	4,325	46,355
3	Layanan Perkantoran														
	Jumlah layanan perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	18,269	18,269	20,233	21,244	22,387	100,323
PELAKSANA: DIREKTORAT PRASARANA STRATEGIS										43,597	12,317	62,780	75,136	96,403	324,433
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
	Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	Layanan		1	1	1	1	1	5	375	450	540	648	778	2,791
2	Layanan Dukungan Manajemen Setkor														
	Jumlah layanan dukungan manajemen setkor	Layanan		1	1	1	1	1	5	33,350	48,000	48,024	57,629	88,155	248,178
3	Layanan Perkantoran														
	Jumlah layanan perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	9,872	11,847	14,216	17,059	28,471	73,465
PELAKSANA: DIREKTORAT AIR MINUM										42,283	14,608	58,956	63,792	46,887	286,435
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	Layanan		1	1	1	1	1	5	3,171	3,288	3,380	3,517	3,648	16,957
2	Layanan Dukungan Manajemen Setkor														
	Jumlah layanan dukungan manajemen setkor	Layanan		1	1	1	1	1	5	2,023	2,110	2,202	2,297	2,397	11,028
3	Layanan Perkantoran														
	Jumlah layanan perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	37,126	46,224	53,894	57,888	62,841	268,450
PELAKSANA: DIREKTORAT SANITASI										23,390	32,536	34,445	16,477	35,643	165,489
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
	Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	Layanan		1	1	1	1	1	5	1,200	3,694	3,784	3,973	4,172	16,732
2	Layanan Dukungan Manajemen Setkor														
	Jumlah layanan dukungan manajemen setkor	Layanan		1	1	1	1	1	5	3,737	3,824	4,120	4,326	4,542	20,649
3	Layanan Perkantoran														
	Jumlah layanan perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	18,453	25,809	26,541	28,178	29,927	128,388
PELAKSANA: DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PERUMHOAN										32,583	37,581	40,608	42,496	44,600	197,964
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	Layanan		1	1	1	1	1	5	2,162	3,800	3,600	3,600	3,800	16,562
2	Layanan Dukungan Manajemen Setkor														
	Jumlah layanan dukungan manajemen setkor	Layanan		1	1	1	1	1	5	10,734	12,000	12,000	12,000	12,000	58,734
3	Layanan Perkantoran														
	Jumlah layanan perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	19,698	25,941	25,000	27,000	29,000	122,679
PELAKSANA: DIREKTORAT BINA TEKNIK PERUMHOAN DAN PERUMAHAN										60,637	74,003	80,803	88,283	96,512	400,278
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														
	Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	Layanan		1	1	1	1	1	5	1,216	6,000	6,000	6,000	6,000	25,216
2	Layanan Dukungan Manajemen Setkor														
	Jumlah layanan dukungan manajemen setkor	Layanan		1	1	1	1	1	5	8,052	12,113	13,324	14,656	16,122	64,888
3	Layanan Perkantoran														
	Jumlah layanan perkantoran	Layanan		1	1	1	1	1	5	50,809	55,890	61,479	67,627	74,389	310,194
PELAKSANA: DIREKTORAT KEPATUHAN INTERN										10,900	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2019	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	Layanan		1	1	1	1	1	5	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	7,500
2	Layanan Dukungan Manajemen Satker														
	Jumlah layanan dukungan manajemen satker	Layanan		1	1	1	1	1	5	500	500	500	500	500	2,500
3	Layanan Perbaikan														
	Jumlah layanan perbaikan	Layanan		1	1	1	1	1	5	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	40,000

4. Direktorat Jenderal Perumahan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI														
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN														
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan penyediaan akses perumahan dan infrastruktur pemukiman yang layak, aman, dan terjangkau														
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS :														
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	%	56,86	57,46	58,02	58,71	59,48	59,48	7,926,696,18	7,686,851	11,127,287	14,763,792	15,652,629,26	57,157,253,44
SASARAN PROGRAM : Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman yang Layak dan Aman														
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :														
1	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	56,39	56,51	56,88	56,93	57,21	57,21	7,544,479,00	6,883,109,00	9,877,812,00	13,281,132,00	13,905,993,00	51,514,323,00
2	Persentase rumah MBR yang mendapat bantuan PSU	%	3,34	18,48	29,45	64,33	100,00	100,00	91,620,00	400,000,00	884,320,00	1,015,498,00	1,280,320,00	1,591,950,00
KEGIATAN 1: Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan Ketahanan Rumah Layak Huni														
	Unit		232,543	93,422	134,847	195,963	221,025	875,000	7,656,069,00	7,243,109,00	10,681,932,00	14,298,822,00	15,186,313,00	55,106,273,00

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :														
1	Jumlah rumah Uraian yang mendapat bantuan PSU	Unit	8,500	40,000	15,000	70,000	88,845	262,345	91,620,00	400,000,00	884,320,00	1,015,498,00	1,280,320,00	1,591,950,00
2	Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Fasilitas Rumah Swadaya bagi MBR	Unit	230,550	81,000	118,960	177,925	205,225	813,660	5,270,000,00	2,590,000,00	4,767,710,00	7,035,800,00	8,175,790,00	27,749,300,00
3	Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Pembianguan Rumah Khusus	Unit	822	2,440	2,300	2,338	2,300	10,800	654,329,00	597,362,00	542,790,00	625,104,00	544,780,00	2,903,995,00
4	Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Pembangunan Rumah Suku	Unit	1,171	7,982	12,787	15,390	13,580	51,340	1,568,250,00	1,604,500,00	4,357,790,00	5,524,240,00	4,967,680,00	20,022,460,00
5	Jumlah Laporan Pembiangan dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan	119	122	122	122	122	607	66,780,00	146,247,00	173,812,00	183,788,00	180,921,00	769,448,00
6	Jumlah Laporan Kepuasan Pelaksanaan Penyelenggaraan Perumahan	Laporan	9	9	9	9	9	45	5,400,00	15,000,00	15,600,00	16,220,00	16,900,00	69,120,00
KOORDINATOR :														
Direktorat Sistem dan Strategi Penyediaan Perumahan														
PELAKSANA:														
Direktorat Sistem dan Strategi Penyediaan Perumahan														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan	119	122	122	122	122	607	66,780,00	146,247,00	173,812,00	183,788,00	180,921,00	769,448,00
	Jumlah laporan keberhasilan penyelenggaraan perumahan	Laporan	5	4	4	4	4	21	13,770,00	15,147,00	16,902,00	18,328,00	10,343,00	74,068,00
	Jumlah laporan strategi program dan penganggaran	Laporan	9	9	9	9	9	45	11,400,00	32,520,00	33,820,00	35,170,00	36,750,00	149,660,00

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	3. Jumlah laporan pembinaan dan bimbingan penyenggaraan pertanian	Laporan	9	9	9	9	9	41	8,298.00	17,210.00	17,900.00	18,620.00	19,450.00	78,418.00
	4. Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Perencanaan Perikanan Pemukiman	Laporan	100	100	100	100	100	500	95,300.00	101,570.00	105,430.00	109,650.00	114,580.00	466,530.00
PELAKSANA: Direktorat Rumah Urusan dan Komersial														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Pengembangan Kebijakan dan Evaluasi Rumah Urusan dan Komersial	Laporan	26	25	25	25	25	126	25,580.00	31,000.00	34,320.00	35,490.00	37,120.00	165,710.00
1	Jumlah laporan perencanaan teknik dan evaluasi rumah urusan dan komersial	Laporan	10	7	7	7	7	38	12,620.00	8,500.00	8,840.00	9,190.00	9,580.00	48,730.00
2	Jumlah laporan persiapan, pemantauan, dan pelaksanaan rumah urusan dan komersial Wilayah I	Laporan	5	6	6	6	6	29	4,320.00	8,000.00	8,320.00	8,650.00	9,000.00	38,290.00
3	Jumlah laporan persiapan, pemantauan, dan pelaksanaan rumah urusan dan komersial Wilayah II	Laporan	7	8	8	8	8	31	4,520.00	8,200.00	8,550.00	8,870.00	9,220.00	39,340.00
4	Jumlah laporan persiapan, pemantauan, dan pelaksanaan rumah urusan dan komersial Wilayah III	Laporan	4	6	6	6	6	28	4,520.00	8,300.00	8,650.00	8,980.00	9,340.00	36,570.00
2	Pembangunan PSU Rumah Urusan	Unit	8,500	48,000	55,000	70,000	88,845	262,345	66,040.00	367,000.00	778,000.00	986,000.00	1,243,200.00	3,426,240.00

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1. Jumlah rumah urusan yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	Unit	8,500	40,000	55,000	70,000	88,845	262,345	66,040.00	367,000.00	770,000.00	980,000.00	1,241,200.00	3,426,240.00
PELAKSANA: Direktorat Rumah Swadaya														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Rumah Swadaya	Laporan	16	10	10	10	10	56	27,090.00	37,100.00	28,210.00	27,450.00	28,740.00	146,590.00
1	Jumlah laporan perencanaan teknik dan evaluasi rumah swadaya	Laporan	5	4	4	4	4	21	16,590.00	19,100.00	10,480.00	10,980.00	11,710.00	68,860.00
2	Jumlah laporan persiapan dan pelaksanaan bantuan dan kemitraan perumahan swadaya Wilayah I	Laporan	4	2	2	2	2	12	2,120.00	5,700.00	4,920.00	5,170.00	5,340.00	24,660.00
3	Jumlah laporan persiapan dan pelaksanaan bantuan dan kemitraan perumahan swadaya Wilayah II	Laporan	3	2	2	2	2	11	1,410.00	5,400.00	4,620.00	4,840.00	5,020.00	23,100.00
4	Jumlah laporan persiapan dan pelaksanaan bantuan dan kemitraan perumahan swadaya Wilayah III	Laporan	4	2	2	2	2	12	1,460.00	6,000.00	6,180.00	6,400.00	6,680.00	26,680.00
2	Bantuan dan Kemudahan Perumahan Swadaya		230,550	81,000	118,960	177,925	295,225	813,660	5,245,800	2,462,990	4,741,560	7,008,350	8,947,050	27,462,690
1	Jumlah bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya sehabisa	Unit	-	1,000	45,700	48,500	68,500	163,700	-	54,000.00	2,422,100.00	3,630,500.00	3,630,500.00	9,737,100.00
2	Jumlah bantuan stimulus pembangunan baru rumah swadaya	Unit	800	-	-	-	-	800	30,860.00	-	-	-	-	30,860.00

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	3. Jumlah bantuan stimulus peningkatan kualitas rumah swadaya	Unit	227,000	79,100	72,310	106,000	135,250	621,660	4,702,910.00	2,381,350.00	2,023,500.00	1,024,000.00	4,206,600.00	16,368,360.00
	4. Jumlah bantuan pengembangan sarana kumuh penunjang ESPN	Unit	2,750	800	950	1,425	1,475	7,500	429,250.00	67,550.00	115,900.00	173,850.00	178,950.00	966,480.00
	5. Jumlah fasilitas penyediaan air rumah swadaya	Unit	-	10,000	180,000	180,000	130,000	500,000	-	10,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	500,000.00
PELAKSANA: Direktorat Rumah Khusus														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Pengembangan kebijakan, dan evaluasi penyenggaraan rumah khusus	Laporan	20	16	16	16	16	84	16,850.00	24,000.00	25,000.00	25,150.00	27,990.00	118,000.00
1	Jumlah laporan perencanaan teknik rumah khusus	Laporan	10	6	6	6	6	34	7,837.00	7,500.00	10,000.00	10,000.00	11,000.00	46,337.00
2	Jumlah laporan persiapan, pemantauan, dan fasilitas bantuan rumah khusus Wilayah I	Laporan	3	3	3	3	3	15	1,562.00	4,350.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,942.00
3	Jumlah laporan persiapan, pemantauan, dan fasilitas bantuan rumah khusus Wilayah II	Laporan	3	3	3	3	3	15	1,675.00	4,050.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	18,725.00
4	Jumlah laporan persiapan, pemantauan, dan fasilitas bantuan rumah khusus Wilayah III	Laporan	4	4	4	4	4	20	5,766.00	6,100.00	6,000.00	6,150.00	6,000.00	32,016.00
2	Pembangunan rumah khusus	Unit	822	2,440	2,360	2,138	2,300	10,060	631,634.00	568,142.00	535,900.00	496,154.00	535,900.00	2,769,730.00

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Jumlah rumah khusus yang dibangun	Unit	822	2.440	2.198	2.138	2.200	10.000	632.634,00	568.142,00	335.300,00	498.134,00	523.988,00	2.766.718,00
3	Pemeliharaan dan perawatan rumah khusus	Unit	320	299	388	388	388	910	5.645,00	5.220,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	16.365,00
1	Jumlah rumah khusus yang dipelihara	Unit	320	299	388	388	388	910	5.645,00	5.220,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	16.265,00
PELAKSANA: Direktorat Rumah Suci														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Pengembangan kebijakan, dan evaluasi penyelenggaraan rumah suci	Laporan	18	27	27	27	27	126	20.180,00	31.500,00	34.040,00	36.240,00	37.680,00	162.440,00
1	Jumlah laporan perencanaan rumah suci	Laporan	7	9	9	9	9	45	8.038,00	11.650,00	12.190,00	12.680,00	13.130,00	57.740,00
2	Jumlah laporan persiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah suci Wilayah I	Laporan	3	4	8	8	8	27	4.850,00	8.000,00	8.380,00	8.700,00	9.040,00	38.950,00
3	Jumlah laporan persiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah suci Wilayah II	Laporan	5	5	8	8	8	29	5.980,00	6.800,00	6.970,00	7.250,00	7.540,00	32.480,00
4	Jumlah laporan persiapan, pemantauan, dan fasilitasi bantuan rumah suci Wilayah III	Laporan	5	5	8	8	8	27	5.408,00	7.050,00	7.320,00	7.610,00	7.950,00	31.280,00
2	Pembangunan rumah suci	Unit	1.171	7.982	12.787	15.900	13.500	51.340	1.407.380,00	3.466.500,00	3.963.700,00	5.088.000,00	4.590.000,00	18.535.580,00
1	Jumlah rumah suci yang dibangun	Unit	1.171	7.982	12.787	15.900	13.500	51.340	1.407.380,00	3.466.500,00	3.963.700,00	5.088.000,00	4.590.000,00	18.535.580,00

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Pemeliharaan dan perawatan rumah suci	Tower	154	116	358	388	388	1.300	140.690,00	104.500,00	359.250,00	400.000,00	340.000,00	1.344.440,00
1	Jumlah rumah suci yang dipelihara	Tower	154	116	358	388	388	1.300	140.690,00	104.500,00	359.250,00	400.000,00	340.000,00	1.344.440,00
PELAKSANA: Direktorat Kepatuhan Intern														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Pembinaan dan pengendalian kepatuhan internal		9	9	9	9	9	45	5.400,00	15.000,00	15.800,00	16.228,00	16.996,00	69.328,00
1	Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	Laporan	5	5	5	5	5	25	3.008,00	8.000,00	8.320,00	8.450,00	8.688,00	36.470,00
2	Jumlah laporan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko	Laporan	4	4	4	4	4	20	2.400,00	7.000,00	7.280,00	7.570,00	7.980,00	32.150,00
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN														
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya														
INDIKATOR KINERJA SASARAN: 1. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR														
		%	72,39	75,81	77,97	79,32	81,44	81,44						
SASARAN PROGRAM : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
INDIKATOR KINERJA PROGRAM : 1. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan														
		%	95,92	61,35	73,54	78,26	84,12	84,12						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
tugas teknis lainnya														
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola sekretariat dan Direktorat Jenderal Perumahan														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan														
a. Tingkat pencahayaan Barang Milik Negara														
b. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran														
c. Tingkat pencahayaan Barang Persewaan Beras														
d. Tingkat laporan pembentukan Produk Muka														
e. Tingkat laporan aktivitas hukum														
f. Tingkat laporan komunikasi publik														
g. Tingkat laporan pengabdian masyarakat, jabatan fungsional, dan pengadministrasian pegawai														
h. Tingkat kualitas pembinaan dan pengkaderan tata rias dan kecantikan, dan pengabdian kefarmasian														
i. Jumlah laporan internal														
j. Jumlah laporan urusan rumah tangga dan penyelenggaraan														
k. Jumlah laporan gadai dan tanggungan														
1		Laporan	20,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	270.595,18	403.742,90	445.355,00	464.978,00	466.318,26	2.050.980,44

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kor														
1	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran													
KOORDINATOR : Sekretaris Direktorat Jenderal Penunahan														
PELAKSANA: Sekretaris Direktorat Jenderal Penunahan									148.904,18	170.065,90	179.585,00	187.390,00	195.388,26	891.242,44
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan dukungan manajemen								45.782,18	57.000,00	59.300,00	40.488,75	41.476,95	204.227,88
1	Jumlah layanan dukungan manajemen Boleo E	Layanan	1	1	1	1	1	1	45.782,18	57.000,00	59.300,00	40.488,75	41.476,95	204.227,88
2	Layanan sarana dan prasarana internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	3.911,00	3.500,00	3.760,00	3.870,00	4.090,00	19.041,00
1	Jumlah layanan internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	3.911,00	3.500,00	3.760,00	3.870,00	4.090,00	19.041,00
3	Layanan dukungan manajemen satker	Layanan	1	1	1	1	1	1	8.682,00	8.385,00	7.390,00	7.610,00	7.840,00	37.887,00
1	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan	Layanan	1	1	1	1	1	1	8.682,00	8.385,00	7.390,00	7.610,00	7.840,00	37.887,00
4	Layanan Perkantoran	Layanan	2	2	2	2	2	2	90.529,00	125.200,00	129.135,00	155.551,25	141.871,31	620.886,56
1	Jumlah layanan gaji dan tunjangan	Layanan	1	1	1	1	1	1	66.788,00	100.500,00	105.525,00	110.801,25	116.341,31	501.956,56
2	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1	23.740,00	22.700,00	23.610,00	24.550,00	25.530,00	118.130,00
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Penunahan									75.760,00	291.577,00	227.120,00	216.200,00	226.748,00	967.397,00

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan sarana dan prasarana internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	1.850,00	1.867,00	18.420,00	20.200,00	2.100,00	45.417,00
1	Jumlah layanan internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	1.850,00	1.867,00	18.420,00	20.200,00	2.100,00	45.417,00
2	Layanan dukungan manajemen satker	Layanan	1	1	1	1	1	1	16.100,00	107.550,00	111.850,00	116.120,00	120.970,00	472.790,00
1	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan	Layanan	1	1	1	1	1	1	16.100,00	107.550,00	111.850,00	116.120,00	120.970,00	472.790,00
3	Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	1	1	1	1	1	1	57.810,00	92.160,00	95.850,00	99.680,00	103.670,00	449.170,00
1	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1	57.810,00	92.160,00	95.850,00	99.680,00	103.670,00	449.170,00
PELAKSANA: Direktorat Rumah Urusan dan Kontrol									10.540,00	4.500,00	6.900,00	7.100,00	7.410,00	36.350,00
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan sarana dan prasarana internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	370,00	300,00	350,00	400,00	450,00	1.870,00
1	Jumlah layanan internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	370,00	300,00	350,00	400,00	450,00	1.870,00
2	Layanan dukungan manajemen satker	Layanan	1	1	1	1	1	1	4.570,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	16.770,00
1	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan	Layanan	1	1	1	1	1	1	4.570,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	16.770,00
3	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1	5.600,00	3.800,00	3.950,00	4.100,00	4.260,00	21.710,00

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1	5.600,00	3.800,00	3.950,00	4.100,00	4.260,00	21.710,00
PELAKSANA: Direktorat Rumah Swadaya									13.240,00	6.900,00	7.230,00	7.570,00	7.910,00	42.870,00
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan sarana dan prasarana internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	430,00	400,00	450,00	500,00	550,00	2.330,00
1	Jumlah layanan internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	430,00	400,00	450,00	500,00	550,00	2.330,00
2	Layanan dukungan manajemen satker	Layanan	1	1	1	1	1	1	4.380,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	12.980,00
1	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan	Layanan	1	1	1	1	1	1	4.380,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	12.980,00
3	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1	8.450,00	4.500,00	4.680,00	4.870,00	5.060,00	27.560,00
1	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1	8.450,00	4.500,00	4.680,00	4.870,00	5.060,00	27.560,00
PELAKSANA: Direktorat Rumah Rhaus									12.341,00	6.400,00	7.150,00	7.400,00	7.650,00	40.941,00
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan sarana dan prasarana internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	664,00	200,00	750,00	800,00	850,00	3.264,00
1	Jumlah layanan internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	12	200,00	750,00	800,00	850,00	3.264,00
2	Layanan dukungan manajemen satker	Layanan	1	1	1	1	1	1	2.477,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	11.077,00

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan pedengkupae	Layanan	1	1	1	1	1	1	2.477,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	11.077,00
2	Layanan Perawatan	Layanan	1	1	1	1	1	1	9.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	26.600,00
1	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1	9.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	26.600,00
PELAKSANA: Direktorat Rumah Seroa									9.650,00	7.300,00	12.240,00	11.990,00	15.500,00	57.680,00
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan serana dan prosana internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00	1.500,00
1	Jumlah layanan internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00	1.500,00
2	Layanan dukungan manajemen setkor	Layanan	1	1	1	1	1	1	3.990,00	2.000,00	1.690,00	6.590,00	7.090,00	25.760,00
1	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan pedengkupae	Layanan	1	1	1	1	1	1	1.990,00	2.600,00	5.690,00	6.500,00	7.090,00	25.760,00
3	Layanan Perawatan	Layanan	1	1	1	1	1	1	4.600,00	4.500,00	6.250,00	7.090,00	8.000,00	30.150,00
1	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1	4.600,00	4.500,00	6.250,00	7.090,00	8.000,00	30.150,00
PELAKSANA: Direktorat Kegiatan Intern									1.100,00	5.000,00	5.290,00	5.590,00	5.720,00	22.550,00
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan serana dan prosana internal	Layanan	-	1	1	1	1	1	-	500,00	590,00	600,00	600,00	2.250,00

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Jumlah layanan internal	Layanan	1	1	1	1	1	1	-	500,00	990,00	600,00	600,00	2.250,00
2	Layanan dukungan manajemen setkor	Layanan	-	1	1	1	1	1	-	1.500,00	1.540,00	1.450,00	1.720,00	6.410,00
1	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan pedengkupae	Layanan	1	1	1	1	1	1	-	1.500,00	1.590,00	1.450,00	1.720,00	6.410,00
3	Layanan Perawatan	Layanan	1	1	1	1	1	1	1.100,00	3.000,00	1.120,00	3.250,00	3.400,00	13.870,00
1	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1	1.100,00	3.000,00	1.120,00	3.250,00	3.400,00	13.870,00

5. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORANSAS: DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN									1.544.297	2.601.581	383.920	382.472	194.183	4.796.394
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN														
SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya														
INDOKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:														
1	Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	%	100	100	100	100	100	100	90.484	221.221	194.472	202.658	205.872	816.707
SASARAN PROGRAM : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
INDOKATOR KINERJA PROGRAM :														
1	Tingkat Keterlaksanaan KPRU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	%	100	100	100	100	100	100	90.484	221.221	194.472	202.658	205.872	816.707
KEGIATAN 1: Pengembangan Sistem Dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan														
INDOKATOR KINERJA KEGIATAN :														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan														
1		%	100	100	100	100	100	100	40.240	51.221	21.602	22.500	22.500	160.063
KOORDINATOR: Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan														
PELAKSANA: Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan									40.240	51.221	21.602	22.500	22.500	160.063
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Kebijakan, Strategi dan Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	3	2	0	0	0	3	18.316	10.877	-	-	-	27.193
1	Jumlah Dokumen Pengaturan Kebijakan dan Strategi Bidang Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0	0	0	1	4.500	2.625	-	-	-	7.125
2	Jumlah Dokumen Pengaturan Standar dan Kriteria Bidang Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0	0	0	1	5.004	2.700	-	-	-	7.704
3	Jumlah Dokumen Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	0	0	0	1	6.812	5.552	-	-	-	12.365
2	Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	4	5	6	6	6	29	4.317	21.734	6.000	4.000	6.000	44.051
1	Jumlah Draft Peraturan Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	4	2	2	2	2	12	1.201	1.600	2.500	1.500	2.500	12.301
2	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistemisasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2	10	1.116	19.357	1.500	1.500	1.500	24.971

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Jumlah Dokumen Pengembangan Standar Duta dan Pola Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	0	0	1	1	1	3	-	-	1.000	1.000	1.000	3.000
4	Jumlah Dokumen Pengembangan Kelembagaan dan Koordinasi Penyusunan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	0	1	1	1	1	4	-	777	1.000	1.000	1.000	3.777
3	Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	5	6	6	6	6	29	3.871	5.000	6.000	4.000	6.000	26.871
1	Jumlah Profil Risiko Penyusunan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	4	4	4	4	4	20	2.531	3.400	4.000	4.000	4.000	17.431
2	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	0	1	1	1	1	4	-	750	1.000	1.000	1.000	3.750
3	Jumlah Dokumen Fasilitas dan Kebijakan Teknis Manajemen Risiko Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	1.340	850	1.000	1.000	1.000	5.190
4	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	NSPK	2	0	1	1	1	5	1.575	-	2.000	2.000	2.000	7.575
1	Jumlah NSPK Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	NSPK	2	0	1	1	1	5	1.575	-	2.000	2.000	2.000	7.575
5	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Pembiayaan Perumahan	Kegiatan	1	1	1	0	0	1	7.144	6.632	1.502	-	-	14.856
1	Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pembiayaan Perumahan	Kegiatan	1	1	1	0	0	1	7.144	6.632	1.502	-	-	14.856

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6	Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	0	3	3	3	3	12	-	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	0	1	1	1	1	4	-	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
2	Jumlah Laporan Layanan dan Konsultasi Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	0	1	1	1	1	4	-	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
3	Jumlah Laporan Pengelolaan dan pemantauan Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	0	1	1	1	1	4	-	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
7	Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	4	4	4	4	4	20	3.127	2.000	3.000	3.000	3.000	14.127
1	Jumlah Dokumen pengelolaan Data Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	1	2	2	2	2	9	940	1.000	1.000	1.000	1.000	4.940
2	Jumlah Dokumen pengembalian Sistem Informasi Perumahan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	2	1	1	1	1	6	1.622	500	1.000	1.000	1.000	5.122
3	Jumlah Dokumen pengelolaan Konsultasi dan Informasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Layanan	1	1	1	1	1	5	566	500	1.000	1.000	1.000	4.066

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8	Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	2	3	3	3	3	19	3.890	2.800	2.500	2.500	2.500	13.390
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pelaksanaan Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	1	1	1	1	1	7	1.890	900	1.000	1.000	1.000	5.790
2	Jumlah Laporan dan Informasi penerapan di Bidang Pelaksanaan Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	2	1	1	1	1	6	1.274	700	1.000	1.000	1.000	4.974
3	Jumlah Laporan Kinerja Pengembangan Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Laporan	2	1	1	1	1	6	750	400	500	500	500	2.450
KEGIATAN 2: Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur PU dan Perumahan														
	%	%	100	100	100	100	100	100	59.244	170.000	172.870	180.150	183.172	756.444
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :														
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyelenggaraan Infrastruktur Sumber Daya Air	%	25	25	25	25	25	25	11.842	22.900	47.290	43.125	44.050	167.507
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	%	25	25	25	25	25	25	17.779	113.150	11.921	32.870	35.847	229.567
3	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyelenggaraan Infrastruktur Perumahan	%	25	25	25	25	25	25	12.273	20.400	11.500	11.500	10.500	130.173
4	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembinaan Perumahan	%	25	25	25	25	25	25	9.150	14.250	86.159	70.663	74.375	229.197

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KORDINATOR: Direktorat Pelaksanaan Pembinaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan														
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembinaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembinaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	1.790	1.000	1.050	1.070	1.100	6.010
1	Jumlah Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembinaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5	1.790	1.000	1.050	1.070	1.100	6.010
2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPB Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Studi Pendahuluan Pembinaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	9	1	1	1	1	10	1.789	2.000	2.050	2.100	2.150	10.089
1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPB Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	9	1	1	1	1	10	1.789	2.000	2.050	2.100	2.150	10.089
3	Pro Studi Kelayakan Pembinaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	4	4	1	1	1	17	4.500	92.250	9.471	9.600	9.647	125.668
1	Jumlah Penyusunan Gagan Awal Pro Studi Kelayakan Pembinaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	1	1	6	2.250	46.125	3.050	3.100	3.120	57.645
2	Jumlah Penyusunan Gagan Akhir Pro Studi Kelayakan Pembinaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	3	2	2	2	11	2.250	46.125	6.421	6.500	6.527	68.823
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembinaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2	10	1.800	4.000	1.600	3.700	3.800	16.900
1	Jumlah Menyajikan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2	10	1.800	4.000	1.600	3.700	3.800	16.900

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	Proyek KPB Jalan dan Jembatan yang siap dikerjakan	Kesepakatan	4	13	10	12	12	51	3.800	6.600	7.700	7.900	8.600	34.600
1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Pengiapan Transaksi Pembinaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Dokumen	2	2	2	2	2	10	1.800	3.000	4.100	4.200	4.500	17.400
2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembinaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Kesepakatan	4	13	10	12	12	51	2.000	3.600	3.600	3.700	4.100	17.200
6	NSPK Pembinaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	NSPK	0	1	1	1	1	4	0	800	1.050	1.100	1.150	4.100
1	Jumlah Penyusunan NSPK Pembinaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	NSPK	0	1	1	1	1	4	0	800	1.050	1.100	1.150	4.100
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	4	4	4	4	4	20	3.800	6.200	6.700	6.900	7.300	30.700
1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	4	4	4	4	4	20	3.800	6.200	6.700	6.900	7.100	30.700
8	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembinaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	1	1	1	1	1	5	300	300	300	300	300	1.500
1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembinaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Laporan	1	1	1	1	1	5	300	300	300	300	300	1.500
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembinaan Infrastruktur Sumber Daya Air														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembinaan Infrastruktur Sumber Daya	Rekomendasi Kebijakan	4	2	1	4	4	17	1.894	1.200	3.399	4.725	5.150	16.069

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Air															
1	Jumlah Penyusunan Pemecatan dan Pengangkatan Pembinaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Pekomendasi Kebijakan	2	1	1	1	1	7		1,368	600	600	700	800	4,068
	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPSU Infrastruktur Sumber Daya Air	Pekomendasi Kebijakan	2	1	2	1	3	10		525	600	2,500	4,025	4,950	12,000
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	2	1	2	2	8		846	2,100	400	2,400	2,400	8,446
3	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPSU Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	2	1	2	2	8		946	2,100	600	2,400	2,400	8,446
	Pro Studi Kelengkapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	3	5	4	3	4	18		3,603	11,550	11,900	23,600	25,800	54,253
4	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pro Studi Kelengkapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	2	1	2	2	2	9		2,003	1,500	14,400	20,000	14,000	52,703
	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pro Studi Kelengkapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	4	2	1	2	9		800	10,050	17,500	3,900	9,600	42,550
5	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5		457	700	1,000	1,000	1,200	4,357
	Jumlah Menyajikan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Sumber Daya Air	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5		457	700	1,000	1,000	1,200	4,357
6	Proyek KPSU Sumber Daya Air yang siap dilaksanakan	Kesepakatan	1	2	2	2	2	9		1,469	4,800	6,000	5,500	5,800	23,569
7	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Pengiapan Tawarbi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Dokumen	2	1	2	2	2	9		900	1,000	2,440	2,600	2,750	8,770

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Kesepakatan	1	2	2	2	2	9		409	3,000	2,650	2,900	3,050	12,009
	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	NSPK	4	2	2	2	2	12		1,539	1,200	1,800	1,800	1,800	8,139
3	Jumlah Penemuan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	NSPK	4	2	2	2	2	12		1,539	1,200	1,800	1,800	1,800	8,139
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Laporan	3	2	4	4	4	17		960	950	3,500	3,800	5,800	13,010
4	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Laporan	3	2	4	4	4	17		960	950	3,500	3,800	5,800	13,010
	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Laporan	1	1	1	1	1	5		176	300	300	300	300	1,376
5	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Laporan	1	1	1	1	1	5		176	300	300	300	300	1,376
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan										12,273	20,600	33,500	33,500	30,500	130,373
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	3	2	2	2	2	11		1,807	1,800	1,800	1,800	1,800	9,007
	Jumlah Penyusunan Pemecatan dan Pengangkatan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Pekomendasi Kebijakan	2	1	1	1	1	6		1,207	800	800	800	800	4,407
2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPSU Infrastruktur Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5		600	1,000	1,000	1,000	1,000	4,600

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Studi Pendahuluan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5		762	2,800	1,000	1,000	1,000	5,762
	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan KPSU Infrastruktur Perumahan	Pekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5		762	2,000	1,000	1,000	1,000	5,762
3	Pro Studi Kelengkapan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	2	10		1,675	5,500	19,000	19,000	16,000	41,175
4	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pro Studi Kelengkapan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Pekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5		700	4,000	10,000	10,000	10,000	34,700
	Jumlah Penyusunan Kajian Akhir Pro Studi Kelengkapan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Pekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5		975	1,500	6,000	6,000	6,000	26,475
5	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5		800	1,500	1,000	1,000	1,000	5,400
	Jumlah Menyajikan Dukungan Kerja Sama Investasi Infrastruktur Perumahan	Pekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5		800	1,500	1,000	1,000	1,000	5,400
6	Proyek KPSU Perumahan yang siap dilaksanakan	Kesepakatan	3	4	4	4	3	18		3,781	6,800	5,100	5,100	5,100	25,881
7	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Pengiapan Tawarbi Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Dokumen	1	1	1	1	1	5		1,454	2,800	2,500	2,500	2,500	11,754
	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Transaksi Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Kesepakatan	3	4	4	4	3	18		2,328	4,000	2,600	2,600	2,600	14,128
8	NSPK Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	NSPK	0	1	1	1	1	4		0	500	500	500	500	2,000
	Jumlah Penemuan NSPK Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	NSPK	0	1	1	1	1	4		0	500	500	500	500	2,000

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Laporan	4	3	3	3	3	16		3,113	2,250	4,800	4,800	4,800	19,713
1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Laporan	4	3	3	3	3	16		3,113	2,200	4,800	4,800	4,800	18,713
8	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Laporan	5	5	5	5	5	5		237	300	300	300	300	1,437
1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Laporan	1	1	1	1	1	5		237	300	300	300	300	1,437
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan										9,150	14,250	40,100	70,663	74,975	229,197
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Pemantauan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	1	1	1	1	6		600	500	750	1,000	1,000	3,850
1	Jumlah Penyusunan Pemantauan dan Penganggaran Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5		300	500	750	1,000	1,000	3,550
2	Jumlah Penyusunan Identifikasi Proyek KPSU Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0	0	0	1		300	0	0	0	0	300
2	Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5		400	1,000	2,750	3,000	3,000	10,150
1	Jumlah Penyusunan Studi Pendahuluan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	5		400	1,000	2,750	3,000	3,000	10,150
3	Pro Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	3	2	2	2	2	11		1,750	5,750	10,000	25,000	26,500	49,000
1	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pro Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	2	1	2	1	7		875	5,750	15,000	17,500	18,250	37,375

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Jumlah Penyusunan Kajian Awal Pro Studi Kelayakan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	1	0	1	1	1	4		875	0	15,000	17,500	18,250	33,625
4	Dukungan Kerja Sama Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	1	2	2	2	9		1,250	750	2,500	3,000	4,000	11,500
1	Jumlah Penyusunan Dukungan Kerja Sama Investasi Pembiayaan Perumahan	Rekomendasi Kebijakan	2	1	2	2	2	9		1,250	750	2,500	3,000	4,000	11,500
5	Proyek KPSU Perumahan yang siap dikembangkan	Kesepakatan	1	2	2	2	2	9		4,000	4,000	21,000	25,000	26,107	60,107
1	Jumlah Pelaksanaan Dukungan dan Pengapian Terasa Pembiayaan Perumahan	Dokumen	1	2	2	2	2	11		3,500	2,000	17,000	20,000	20,307	42,807
2	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan dan Terasa Pembiayaan Perumahan	Kesepakatan	1	2	2	2	2	9		500	2,000	4,000	5,000	6,000	17,500
6	NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan	NSPK	0	1	1	1	1	4		0	1,000	500	500	500	2,500
1	Jumlah Pemenuhan NSPK Investasi Pembiayaan Perumahan	NSPK	0	1	1	1	1	4		0	1,000	500	500	500	2,500
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	Laporan	1	1	1	1	1	5		1,000	854	2,359	2,863	3,500	10,576
1	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Pembiayaan Perumahan	Laporan	1	1	1	1	1	5		1,000	854	2,359	2,863	3,500	10,576
8	Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	Laporan	5	5	5	5	5	5		150	300	300	300	300	1,218
1	Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan	Laporan	1	1	1	1	1	5		150	300	300	300	300	1,218
SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	%	72,39	75,81	77,87	79,72	81,44	81,44							
SASARAN PROGRAM: Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya															
1	INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	%	55,92	63,35	71,54	79,26	84,12	84,12							
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan															
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :															
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Negara, Dinas, Korps, Pemukiman, Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	15	15	15	15	15	15							
2	Tingkat Layanan Pembiayaan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	15	15	15	15	15	15							
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kebijakan dan Laporan Tindakan serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	10	10	10	10	10	10							
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	%	10	10	10	10	10	10							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	Tingkat Kualitas Pemecanan Anggaran Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Urusan dan Pemukiman	%	15	15	15	15	15	15						
6	Tingkat penyediaan sarana komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	%	10	10	10	10	10	10						
7	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP	%	10	10	10	10	10	10						
8	Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung pelaksanaan tugas teknis PPDP	%	15	15	15	15	15	15						
KORDINATOR: Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Urusan dan Pemukiman														
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Infrastruktur Pekerjaan Urusan dan Pemukiman									74,868	67,934	71,859	75,918	80,288	367,852
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Kefasihan Birokrasi Unit Eselon I	Layanan	1	1	1	1	1	5	403	300	318	338	358	1,718
1	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	1	1	1	1	5	403	300	318	338	358	1,718
2	Manajemen Transformatif Organisasi	Layanan	2	2	2	2	2	10	1,372	1,200	1,273	1,351	1,433	6,629
1	Jumlah Laporan Pelaporan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi	Laporan	2	2	2	2	2	10	1,372	1,200	1,273	1,351	1,433	6,629
3	Pengelolaan Pegawai	Orang	260	260	260	260	260	260	1,671	1,500	1,592	1,689	1,792	8,243
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai	Laporan	3	3	3	3	3	15	1,671	1,500	1,592	1,689	1,792	8,243
4	Tata Kelola TNDI dan Anap	Layanan	1	1	1	1	1	5	406	500	531	563	597	2,697

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDI dan Anap	Laporan	1	1	1	1	1	5	498	500	531	563	597	2,689
5	Kemudahan Akses	Layanan	3	2	2	2	2	11	2,810	1,900	1,961	1,126	1,194	7,191
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Berkas Kemudahan Akses	Laporan	3	2	2	2	2	11	2,810	1,900	1,961	1,126	1,194	7,191
6	Adaptasi Hukum	Layanan	2	2	2	2	2	10	1,109	800	849	901	956	4,614
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Adaptasi dan Pendampingan Hukum	Laporan	2	2	2	2	2	10	1,109	800	849	901	956	4,614
7	MDU dengan APH dan Instansi Lain Terkait	Layanan	1	1	1	1	1	5	461	400	424	450	478	2,214
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan Kejujuran	Laporan	1	1	1	1	1	5	461	400	424	450	478	2,214
8	Pembinaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Layanan	3	3	3	3	3	15	1,724	1,500	1,592	1,689	1,792	8,296
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	3	3	3	3	3	15	1,724	1,500	1,592	1,689	1,792	8,296
9	Rencana Kerja dan Anggaran Unit Eselon I	Layanan	1	1	1	1	1	5	774	800	944	1,002	1,063	4,672
1	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Laporan	1	1	1	1	1	5	774	800	944	1,002	1,063	4,672
10	Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I	Layanan	4	2	2	2	2	12	2,395	1,300	1,448	1,536	1,630	8,309
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Revisi/Amalgamasi	Laporan	4	2	2	2	2	12	2,395	1,300	1,448	1,536	1,630	8,309
11	Perencanaan dan Pengelolaan BMN DJPP	Layanan	1	1	1	1	1	5	287	500	590	627	666	2,671
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaporan	Laporan	1	1	1	1	1	5	287	500	590	627	666	2,671

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	BUP													
12	Strategi Komunikasi	Layanan	2	2	2	2	2	10	1,516	1,100	1,379	1,463	1,553	7,011
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Berkas Reformasi dan Pengadilan Masyarakat	Laporan	2	2	2	2	2	10	1,516	1,100	1,379	1,463	1,553	7,011
13	Publikasi	Layanan	3	2	2	2	2	11	1,406	800	1,061	1,126	1,194	5,587
1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Media Sosial dan Penyebaran Informasi	Laporan	3	2	2	2	2	11	1,406	800	1,061	1,126	1,194	5,587
14	Laporan Keuangan Unit Eselon I	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,651	500	955	1,013	1,075	5,194
1	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	1	1	1	1	1	5	1,651	500	955	1,013	1,075	5,194
15	Laporan Kinerja Unit Eselon II	Layanan	1	1	1	1	1	5	158	300	318	338	358	1,472
1	Jumlah Laporan Kinerja	Laporan	1	1	1	1	1	5	158	300	318	338	358	1,472
16	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (DJPP)	Layanan	2	1	1	1	1	6	1,074	1,000	1,061	1,126	1,194	5,455
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi	Laporan	2	1	1	1	1	6	1,074	1,000	1,061	1,126	1,194	5,455
17	Pengadaan Fasilitas Fasilitas Perkantoran DJPP	Unit	1	1	1	1	1	5	2,366	500	531	563	597	4,557
1	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran	Unit	1	1	1	1	1	5	2,366	500	531	563	597	4,557
18	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi DJPP	Unit	1	1	1	1	1	5	1,728	500	531	563	597	3,919
1	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi	Unit	1	1	1	1	1	5	1,728	500	531	563	597	3,919

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
20	Keberhasilan dan Rencanat Gedung dan Bangunan	Unit	1	1	1	1	1	5		410	410	415	462	490	2,286
1	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	Unit	1	1	1	1	1	5		410	410	415	462	490	2,286
20	Gaji dan Tunjangan DJP	Layanan	1	1	1	1	1	5		29,714	26,292	27,896	29,597	31,403	144,902
1	Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	1	1	1	5		29,714	26,292	27,896	29,597	31,403	144,902
22	Operasionalisasi Kantor DJP	Layanan	1	1	1	1	1	5		15,540	20,802	22,073	23,417	24,846	106,676
1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	1	1	1	5		15,540	20,802	22,073	23,417	24,846	106,676
PELAKSANA: Direktorat Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Pengembangan Pendidikan										1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Operasionalisasi Kantor Direktorat	Layanan	1	1	1	1	1	5		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Kantor Direktorat P5SP	Layanan	1	1	1	1	1	5		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pendidikan Infrastruktur Jalan dan Jembatan										1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Operasionalisasi Kantor Direktorat	Layanan	1	1	1	1	1	5		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Kantor Direktorat PPU	Layanan	1	1	1	1	1	5		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pendidikan Infrastruktur Sumber Daya Air										1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Operasionalisasi Kantor Direktorat	Layanan	1	1	1	1	1	5		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Kantor Direktorat PPI SDA	Layanan	1	1	1	1	1	5		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pendidikan Infrastruktur Perumahan										1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Operasionalisasi Kantor Direktorat	Layanan	1	1	1	1	1	5		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Kantor Direktorat PFP	Layanan	1	1	1	1	1	5		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pendidikan Perumahan										1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Operasionalisasi Kantor Direktorat	Layanan	1	1	1	1	1	5		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Kantor Direktorat PFP	Layanan	1	1	1	1	1	5		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000
PELAKSANA: Pusat Pengelolaan Dana Pendidikan Perumahan (BLU)										44,113	45,113	46,467	47,660	49,296	232,651
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran BLU PPDPP	Unit	1	1	1	1	1	5		100	100	103	106	109	518

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Jumlah Pelaksanaan Pemetaan Fasilitas Fasilitas Perkantoran	Unit	1	1	1	1	1	5		100	100	103	106	109	518
2	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BLU PPDPP	Unit	1	1	1	1	1	5		400	400	412	424	437	2,073
1	Jumlah Pelaksanaan Pemetaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	1	1	1	1	1	5		400	400	412	424	437	2,073
3	Gaji dan Tunjangan BLU PPDPP	Layanan	1	1	1	1	1	5		23,290	29,290	30,149	31,074	32,006	145,828
1	Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	1	1	1	5		23,290	29,290	30,149	31,074	32,006	145,828
4	Operasionalisasi Kantor BLU PPDPP	Layanan	1	1	1	1	1	5		14,869	13,844	14,103	14,377	14,664	73,857
1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Penyelenggaraan Operasional Kantor	Layanan	1	1	1	1	1	5		14,869	13,844	14,103	14,377	14,664	73,857
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin BLU PPDPP	Layanan	1	1	1	1	1	5		3,455	1,480	1,680	1,880	2,080	10,574
1	Jumlah Layanan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Layanan	1	1	1	1	1	5		3,455	1,480	1,680	1,880	2,080	10,574
PROGRAM : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau															
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS:															
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	%	56,86	57,46	58,02	58,71	59,48	59,48		1,335,572	1,468,352	46,123	54,015	58,750	2,187,612
SASARAN PROGRAM : Meningkatkan Pelayan Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman yang Layak dan Aman															

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
INDUKTOR KINERJA PROGRAM :															
1	Persentase Pemenuhan Akreditasi Rumah Tangga Penggandaan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Pemenuhan	%	100	100	100	100	100	100	1.335,572	1.668,352	49,123	56,015	58,750	3.187,812	
KEGIATAN 1: Peningkatan Akses Pembiayaan Pemenuhan															
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Pemenuhan															
		%	100	100	100	100	100	100	1.335,572	1.668,352	49,123	56,015	58,750	3.187,812	
INDUKTOR KINERJA KEGIATAN :															
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Pemenuhan	%	50	50	50	50	50	50	1.307,732	1.640,312	40,448	24,460	26,318	3.043,299	
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyediaan Bantuan Pembiayaan Pemenuhan	%	50	50	50	50	50	50	27,840	27,840	26,675	29,515	30,422	144,312	
KORDINATOR : Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Pemenuhan															
PELAKSANA: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Pemenuhan															
									1.307,732	1.640,312	40,448	24,460	26,318	3.043,299	
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Pemenuhan	Rekomendasi Kebijakan	4	4	5	5	5	23	3.250	3.250	7.100	7.760	6.486	29.846	
1	Jumlah Penusunan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Pemenuhan	Rekomendasi Kebijakan	3	2	2	2	2	11	2.500	1.500	4.400	4.840	5.324	18.564	
2	Jumlah Penyusunan dan Pengipapan Penatalaksanaan Kerja Sama Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Pemenuhan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	2	2	2	8	750	1.000	2.200	2.420	2.962	8.082	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
2	3. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sekunderisasi Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Pemenuhan	Rekomendasi Kebijakan	0	1	1	1	1	4	0	750	500	500	500	2.250	
	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Pemenuhan	NSPK	1	1	2	2	2	8	750	750	2.200	2.420	2.662	8.782	
	Lemah Pemenuhan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Pemenuhan	NSPK	1	1	2	2	2	8	750	750	2.200	2.420	2.662	8.782	
3	Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Pemenuhan	Laporan	4	2	2	2	2	12	3.850	1.750	6.648	8.800	9.880	32.728	
	1. Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Pemenuhan	Laporan	4	2	2	2	2	12	3.850	1.750	6.648	8.800	9.880	32.728	
4	Bantuan Pembiayaan Pemenuhan Berbasis Tabungan	Ruang Tangga	31.829	39.684	512	0	0	71.819	1.289.762	1.624.562	10.000	0	0	2.924.343	
5	1. Lemah Penyediaan Bantuan Pembiayaan Pemenuhan Berbasis Tabungan	Ruang Tangga	31.829	39.684	512	-	-	71.819	1.289.762	1.624.562	10.000	0	0	2.924.343	
	Fasilitas Subsidi Sertifikat Bunga dan Bantuan Uang Muka	Layanan	1	1	1	1	1	5	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	23.000	
	3. Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Subsidi Sertifikat Bunga dan Bantuan Uang Muka	Layanan	1	1	1	1	1	5	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	23.000	
6	SSB (BA-999.07)	Ruang Tangga	175.000	100.000	0	0	0	275.000	4.857.982	5.969.488	4.930.576	4.865.899	4.804.866	25.228.809	
	SRUK (BA-999.07)	Ruang Tangga	240.000	157.500	200.000	220.000	220.000	1.040.500	1.044.000	945.000	1.200.000	1.320.000	1.320.000	5.849.000	
	Fasilitas Bantuan Pembiayaan Pemenuhan Berbasis Tabungan	Layanan	1	1	1	0	0	3	4.500	5.000	5.000	0	0	14.500	
7	3. Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pembiayaan Pemenuhan Berbasis Tabungan	Layanan	1	1	1	0	0	3	4.500	5.000	5.000			14.500	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
7	Fasilitas Pembiayaan Pemenuhan	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	600	500	1.000	1.000	3.000	10.100	
1	Jumlah Pelaksanaan Fasilitas Pembiayaan Pemenuhan	Kegiatan	1	1	1	1	1	5	600	500	1.000	1.000	3.000	10.100	
	SMP (Dana Masyarakat)	Ruang Tanggap	8.480	10.000	10.000	10.000	11.540	50.000							
	Rumah Tangga														
	Tapera (Dana Masyarakat)	Ruang Tanggap	50.000	75.000	100.000	125.000	150.000	500.000							
PELAKSANA: Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Pemenuhan (BLU)									27.840	27.840	26.675	29.515	30.422	144.312	
OUTPUT KEGIATAN :															
1	Fasilitas Pelayanan RUPP	Layanan	3	3	3	3	3	15	8.550	5.800	5.768	5.941	6.319	31.978	
3	Jumlah Pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi	Layanan	2	2	2	2	2	10	5.500	3.550	3.657	3.796	3.876	20.352	
2	Jumlah Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan	Lembaga	30	30	30	30	30	30	1.500	1.500	1.545	1.591	1.636	7.775	
3	Jumlah Pelaksanaan Verifikasi Pemeriksaan Bantuan Pembiayaan RUPP (BA-999.03)	Ruang Tanggap	102.500	157.500	200.000	220.000	220.000	900.000	1.550	950	547	583	660	8.851	
		Ruang Tanggap	102.500	157.500	200.000	220.000	220.000	900.000	9.000.000	12.000.000	14.500.000	17.000.000	17.000.000	69.500.000	
2	Rencana Kerja Anggaran Bantuan Pembiayaan Pemenuhan	Layanan	3	2	3	2	2	12	2.354	1.436	1.479	1.529	1.569	8.362	
3	Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Bantuan Pembiayaan	Layanan	3	2	3	2	2	12	2.354	1.436	1.479	1.529	1.568	8.362	
3	Rekomendasi Lembaga Jasa Keuangan	Layanan	40	45	45	45	45	220	2.788	2.788	2.872	2.957	3.046	14.450	
3	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi Lembaga Jasa Keuangan	Layanan	40	45	45	45	45	220	2.788	2.788	2.871	2.957	3.046	14.410	
4	Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja	Layanan	45	45	45	45	45	225	1.355	1.315	1.148	1.183	1.218	6.019	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1. Jumlah Penyempurnaan Layanan Keuangan dan Layanan Energi Teknologi dan Informasi Berbasis Pembelajaran Perusahaan	Layanan	45	45	45	45	45	225		1,355	1,115	1,148	1,183	1,218	6,019
5	Jumlah Pelayanan Sistem, Teknologi, dan Informasi Berbasis Pembelajaran Perusahaan	Layanan	1	1	1	1	1	5		1,800	1,800	1,854	1,910	1,967	9,331
	1. Jumlah Pelayanan Sistem, Teknologi, dan Informasi Berbasis Pembelajaran Perusahaan	Layanan	1	1	1	1	1	5		1,800	1,800	1,854	1,910	1,967	9,331
6	Pendayagunaan Database Berbasis Pembelajaran Perusahaan	Layanan	2	2	2	2	2	10		1,000	1,000	1,035	1,061	1,099	5,184
	1. Jumlah Pelaksanaan Penetration dan Pendayagunaan Database	Layanan	2	2	2	2	2	10		1,000	1,000	1,035	1,061	1,099	5,184
7	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Berbasis Pembelajaran Perusahaan	Layanan	1	1	1	1	1	5		2,900	2,900	2,987	3,077	3,169	15,033
	1. Jumlah Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Berbasis Pembelajaran Perusahaan	Layanan	1	1	1	1	1	5		2,900	2,900	2,987	3,077	3,169	15,033
8	Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)	Layanan	3	3	3	3	3	15		1,500	2,400	2,678	2,758	2,841	12,377
	1. Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)	Layanan	3	3	3	3	3	15		1,500	2,400	2,678	2,758	2,841	12,377
9	Publikasi dan Komunitas	Layanan	2	2	2	2	2	10		1,135	6,144	6,328	6,518	6,714	28,840
	1. Jumlah Pelaksanaan Publikasi dan Komunitas	Layanan	2	2	2	2	2	10		1,135	6,144	6,328	6,518	6,714	28,840
10	Pengelolaan Asst. RUJ	Layanan	3	3	3	3	3	15		200	200	206	212	219	1,037
	1. Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Asst. RUJ	Layanan	3	3	3	3	3	15		200	200	206	212	219	1,037
11	Hukum dan Kepatuhan	Layanan	1	1	1	1	1	5		260	260	268	276	285	1,350
	1. Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Bidang Hukum dan Kepatuhan	Layanan	1	1	1	1	1	5		260	260	268	276	285	1,350
12	Pengawasan Internal	Layanan	24	24	24	24	24	120		800	800	824	849	874	4,147

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1. Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Layanan	24	24	24	24	24	120		800	800	824	849	874	4,147
13	Pembinaan Manajemen	Layanan	2	2	2	2	2	10		1,197	1,197	1,233	1,270	1,308	6,205
	1. Pembinaan Manajemen	Layanan	2	2	2	2	2	10		1,197	1,197	1,233	1,270	1,308	6,205

6. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET							ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH										199,394	331,500	353,100	367,500	392,800	1,444,894
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN															
SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan PUPR dan Tugas Teknis Lainnya															
1	INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Keseluruhan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis	%	60	65	70	75	80	80							
SASARAN PROGRAM : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya															
1	INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Pencanaan dan Perencanaan	%	60	65	70	75	80	80							
KEGIATAN 1: Pengembangan Infrastruktur Wilayah										105,274	228,300	246,800	258,700	290,200	1,139,274
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan Pelaksanaan Pemanfaatan dan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur PUPR															
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:															
1	Tingkat kesesuaian kebijakan dan strategi perencanaan dan pengembangan infrastruktur PUPR	%	60	65	70	75	80	80							
2	Tingkat kesesuaian perencanaan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pengembangan infrastruktur PUPR di Pulau Sumatra dan Kalimantan	%	60	65	70	75	80	80							
3	Tingkat kesesuaian perencanaan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pengembangan infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara	%	60	65	70	75	80	80							
4	Tingkat kesesuaian perencanaan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pengembangan infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kepulauan Maluku	%	60	65	70	75	80	80							
KOORDINATOR : Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional															
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional										22,961	48,000	48,800	52,100	58,900	230,761

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Liris Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(3)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Kebijakan Teknis dan Rencana Tepas/ Pembangunan Infrastruktur PUPR	Dokumen	8	7	8	8	10		14.000	16.700	16.900	15.100		66.700
2	Keterkaitan Rencana Dan Sinkronisasi Program	Dokumen	2	6	6	6	7		15.900	20.000	22.500	14.500		66.500
3	Kerjasama Dengan Masyarakat	Dokumen	5	5	4	4	5		10.500	9.100	9.700	12.300		41.600
4	Kepuasan Internal	Dokumen	1	4	3	2	3		4.000	3.000	3.000	3.000		13.000
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah I									19.300	53.000	50.000	41.400	66.700	262.200
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Rencana dan Program pengembangan infrastruktur wilayah di Wilayah I	Dokumen	15	15	17	18	20		48.000	54.000	55.400	62.500		220.100
2	Kerjasama program di Wilayah I	Dokumen	2	3	3	3	3		5.000	5.800	5.800	6.200		22.800
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah II									42.776	52.000	57.500	61.500	65.700	279.476
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Rencana dan Program pengembangan infrastruktur wilayah di Wilayah II	Dokumen	16	16	18	18	19		45.700	51.000	55.000	58.900		210.700
2	Kerjasama program di Wilayah II	Dokumen	2	3	3	3	3		6.300	6.500	6.500	6.700		26.000
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah III									18.217	75.160	80.700	83.700	86.900	344.827
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Rencana dan Program pengembangan infrastruktur wilayah di Wilayah III	Dokumen	17	15	17	17	18		69.000	74.000	77.000	81.000		301.000

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Liris Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(3)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2	Kerjasama program di Wilayah II	Dokumen	3	3	3	3	3		6.300	6.700	6.700	6.900	26.600
SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan PUPR dan Tugas Teknis Lainnya														
1	INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Kualitas Tata Kelola Pemerintahan PUPR	%	72,39	75,61	77,97	79,72	81,44	81,44						
SASARAN PROGRAM : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
1	INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Pemerintahan PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	%	55,92	63,35	71,54	79,26	86,12	86,12						
KEGIATAN 1: Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah									90.122	100.200	106.500	109.200	112.600	527.622
SASARAN KEGIATAN : Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pengembangan infrastruktur Wilayah														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN														
1	Tingkat Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Tata Kelola Dinas, Kecamatan, Pemukiman dan Bawang Madya, Negara dan Pengelolaan Ketatutan	%	80	80	81	82	82	82						
2	Tingkat Layanan Perencanaan Produk Hukum	%	100	100	100	100	100	100						
3	Tingkat Layanan Pengabdian Kelembagaan dan Mutasi Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	%	80	80	81	82	82	82						
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	91	91	92	92	92	92						
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	%	90,5	90,5	91	91	91	91						
6	Nilai SAKIP Unit Organisasi	%	76,5	76,4	76,8	76,9	77	77						
KORDINATOR : Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah														
PELAKSANA: Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah									75.195	89.200	91.900	94.600	97.700	448.595

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Liris Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(3)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Dukungan Manajemen Badan I	Layanan	1	1	1	1	1		26.888	34.000	33.500	33.000	33.000	131.500
2	Layanan Sosialisasi dan Pemasangan Internal	Layanan	1	1	1	1	1		1.100	1.200	1.400	1.400	1.700	5.800
3	Layanan Perencanaan	Layanan	1	1	1	1	1		45.227	54.000	57.000	60.000	63.800	234.000
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional									3.957	3.500	3.500	3.500	3.500	17.957
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Dukungan Manajemen Sektor	Layanan	1	1	1	1	1		2.628	2.000	2.000	2.000	2.000	8.600
2	Layanan Perencanaan	Layanan	1	1	1	1	1		1.329	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah I									5.709	3.500	3.700	3.700	3.800	20.609
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Dukungan Manajemen Sektor	Layanan	1	1	1	1	1		4.734	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
2	Layanan Perencanaan	Layanan	1	1	1	1	1		975	1.500	1.700	1.700	1.800	6.700
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah II									5.719	3.500	3.700	3.700	3.800	20.419
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Dukungan Manajemen Sektor	Layanan	1	1	1	1	1		4.571	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
2	Layanan Perencanaan	Layanan	1	1	1	1	1		1.344	1.500	1.700	1.700	1.800	6.700

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah II									5,544	3,500	3,700	3,700	3,800	20,244
OUTPUT KEGIATAN :														
	1. Layanan Dukungan Manajemen Seder	Layanan	1	1	1	1	1		4,230	2,000	2,000	2,000	2,800	8,000
	2. Layanan Perbaikan	Layanan	1	1	1	1	1		1,314	1,500	1,700	1,700	1,800	6,700

7. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: Direktorat Jenderal Bina Konstruksi									725,510	800,000	904,541	913,345	920,354	4,363,749
PROGRAM : PENDEKATAN DAN PELATIHAN VOKASI														
SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional														
INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional			%	5,3	5,8	6,9	6,4	6,8	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	480,000
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional			%	70	75	80	85	90	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	480,000
INDIKATOR KINERJA PROGRAM A.a: Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional			%	70	75	80	85	90	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	480,000
KEGIATAN 1: PENYELenggaraAN PELATIHAN VOKASIONAL BIDANG KONSTRUKSI														
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbiasa														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbiasa			%	81	81	81	81	81	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	480,000
KORDINATOR: DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI														
PELAKSANA: BAGAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH														
OUTPUT KEGIATAN :														
	1. SDM vokasional bidang konstruksi yang terbiasa	Orang	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	150,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	480,000
SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan Tugan Lainnya														
INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat kuantitas sumber daya konstruksi			%	43	52	57	67	68	620,510	804,000	908,541	917,345	924,354	4,363,749

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1. Tingkat kuantitas sumber daya konstruksi	%	43	52	57	67	68	68	620,510	804,000	908,541	917,345	924,354	4,363,749
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN														
SASARAN PROGRAM : Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya			%											
INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat kualitas sumber daya konstruksi			%	45	52	57	68	68	620,510	804,000	908,541	917,345	924,354	4,363,749
	1. Tingkat kerja penyelenggaraan jasa konstruksi	%	76	80	84	89	92	92						
	2. Tingkat dukungan teknis/pekerja konstruksi	%	14	21	28	35	42	42						
	3. Tingkat kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	%	40	51	58	66	71	71						
KEGIATAN 2: PEMBIKIHAN PENYELenggaraAN JASA KONSTRUKSI														
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi			%	60	65	70	75	80	17,818	22,894	22,254	22,421	22,593	107,172
KORDINATOR: DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI														
PELAKSANA: DIREKTORAT PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI														
OUTPUT KEGIATAN :														
	1. Profil pengkajian NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	NSPK	1	1	1	1	1	5	5,937	7,305	7,418	7,474	7,531	35,724
	2. Profil perencanaan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	Laporan	1	1	1	1	1	5	5,937	7,305	7,418	7,474	7,531	35,724
	3. Profil kerja sama bidang jasa konstruksi	Kerjasama tan	1	1	1	1	1	5	5,937	7,305	7,418	7,474	7,531	35,724

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEGIATAN 3 : PEMBIAYAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI														
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa														
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa	%	68	75	83	91	97	97	89,598	111,157	111,844	112,784	113,458	598,109
1	Persentase inspeksi/serah terima waktu	%	80	85	90	95	98	98						
2	Persentase tanggapan dan tanggah kesaling sihak dan ter	%	90	91	92	93	95	95						
3	Persentase pengadaan tidak benar	%	90	91	92	93	95	95						
4	Persentase pemantauan pemenuhan yang dilakukan PPK dan terdapat tidak benar	%	90	91	92	93	95	95						
5	Tingkat kemitraan kolaborasi UPPK	%	60	71	82	91	100	100						
6	Persentase kemitraan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berdasarkan di UPPK	%	0	20	50	80	100	100						
KOORDINATOR: DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI														
PELAKSANA: DIREKTORAT PENGADAAN JASA KONSTRUKSI														
	OUTPUT KEGIATAN :													
1	Profil pengelolaan NSPK pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi	NSPK	1	1	1	1	1	5	3,116	3,895	3,893	3,922	3,952	18,748
2	Profil kinerja UPPK dan UPPKJ (berdasarkan kinerja layanan, pemenuhan NSPK, pemenuhan SPK)	Layanan	1	1	1	1	1	5	3,116	3,895	3,893	3,922	3,952	18,748
3	Profil kinerja penyedia jasa konstruksi	Layanan	1	1	1	1	1	5	3,116	3,895	3,893	3,922	3,952	18,748
4	Profil Kapasitas Inten Dipan Bina Konstruksi	Layanan	1	1	1	1	1	5	3,116	3,895	3,893	3,922	3,952	18,748

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PELAKSANA: BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI														
	OUTPUT KEGIATAN :													
1	Layanan pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi	Layanan	1	1	1	1	1	5	77,127	95,677	96,372	97,096	97,843	464,114
KEGIATAN 4 : PEMBIAYAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI														
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)														
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase proyek konstruksi target keselamatan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	8,598	10,967	10,744	10,825	10,908	51,742
KOORDINATOR: DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI														
PELAKSANA: DIREKTORAT KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI														
	OUTPUT KEGIATAN :													
1	Profil pengelolaan NSPK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	NSPK	1	1	1	1	1	5	4,296	5,333	5,372	5,412	5,454	25,871
2	Profil penerapan NSPK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	Layanan	1	1	1	1	1	5	4,296	5,333	5,372	5,412	5,454	25,871
KEGIATAN 5 : PEMBIAYAAN KOMPETENSI TENAGA KERJA KONSTRUKSI														
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi														
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	%	14	21	28	35	42	42	138,738	195,194	197,310	199,512	201,788	932,534
		%	9	10	12	13	14	14	102,956	150,806	152,599	154,465	156,287	737,214
KOORDINATOR: DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI														
PELAKSANA: BALAI JASA KONSTRUKSI WILAYAH														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	OUTPUT KEGIATAN :													
1	Tenaga kerja konstruksi terbiasa	Orang	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	475,000	82,364	120,645	122,090	123,172	125,110	573,371
2	Layanan fasilitas pembinaan jasa konstruksi	Layanan	7	7	7	7	7	35	20,593	30,161	30,520	30,893	31,277	143,444
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase tingkat dukungan pelatihan/ uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	%	20	32	44	57	69	69	35,782	44,388	44,711	45,047	45,392	215,321
2	Persentase kecapaian dan desesasi SKKM tingkat konstruksi	%	21	27	33	39	45	45						
2	Persentase kecapaian dan desesasi modernisasi bidang konstruksi	%	18	22	25	28	32	32						
3	Persentase kecapaian standar kompetensi konstruksi	%	20	40	60	80	100	100						
4	Persentase kecapaian insiatif bidang konstruksi	%	20	40	60	80	100	100						
PELAKSANA: DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI														
	OUTPUT KEGIATAN :													
1	Profil pengelolaan NSPK kompetensi tenaga kerja konstruksi	NSPK	1	1	1	1	1	5	5,964	7,398	7,452	7,508	7,565	35,887
2	Dokumen SKKM dan modul/ materi kompetensi tenaga kerja konstruksi	NSPK	25	30	35	30	30	145	5,964	7,398	7,452	7,508	7,565	35,887
3	Profil tenaga kerja konstruksi, insiatif, dan asesor	Layanan	1	1	1	1	1	5	5,964	7,398	7,452	7,508	7,565	35,887
4	Profil nilai pelaksanaan pelatihan/ uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	Layanan	1	1	1	1	1	5	5,964	7,398	7,452	7,508	7,565	35,887
5	Profil pengembangan profesi jasa konstruksi	Layanan	1	1	1	1	1	5	5,964	7,398	7,452	7,508	7,565	35,887
6	Layanan penyusunan kompetensi (Mutual Recognition Arrangement)	Layanan	1	1	1	1	1	5	5,964	7,398	7,452	7,508	7,565	35,887

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEGIATAN 6 : PEMBINAAN KINERJA KELEMBAGAAN DAN DUKUNGAN MATERIAL, PERALATAN, DAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI														
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi			%	40	51	59	66	71	71	36,934	45,792	46,324	46,471	222,127
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi			%	16	23	26	31	33	33	16,457	22,896	21,662	31,235	111,044
1. Persentase OPD terakreditasi dan apertifikasi			%	55	65	75	80	85	85					
2. Persentase Akreditasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Akreditasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Akreditasi Inspeksi Badan Pihak Konstruksi yang terakreditasi			%	21	26	35	36	41	41					
3. Persentase pelaksanaan program BUK lembaga KBL			%	50	55	66	65	70	70					
4. Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (PJAK)			%	0	41	57	67	71	71					
KOORDINATOR: DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI														
PELAKSANA: DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI														
OUTPUT KEGIATAN :														
1. Profil pengelolaan NSPK kelembagaan masyarakat dan pemerintah urusan jasa konstruksi			NSPK	1	1	1	1	1	5	6,152	7,632	7,687	7,745	37,021
2. Profil kinerja OPD sub-urusan jasa konstruksi			Laporan	1	1	1	1	1	5	6,152	7,632	7,687	7,745	37,021
3. Profil kinerja kelembagaan masyarakat jasa konstruksi			lembaga	2	2	2	2	2	10	6,152	7,632	7,687	7,745	37,021
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase peran jabatan fungsional Perencana Jasa Konstruksi			%	10	20	30	40	50	50	6,152	7,632	7,687	7,745	37,021
PELAKSANA: DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
OUTPUT KEGIATAN :														
1. SDM Pejabat Fungsional yang terakreditasi			Orang	100	100	100	100	100	6,152	7,632	7,687	7,745	7,805	37,021
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, Badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN			%	85	90	95	96	100	12,395	15,264	15,375	15,490	15,609	74,042
PELAKSANA: DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA KONSTRUKSI														
OUTPUT KEGIATAN :														
1. Profil pengelolaan NSPK terkait permasalahan MPK, teknologi dan TKDN			NSPK	1	1	1	1	1	6,152	7,632	7,687	7,745	7,805	37,021
2. Profil rantai pasok MPK, teknologi, dan TKDN			Laporan	1	1	1	1	1	6,152	7,632	7,687	7,745	7,805	37,021
SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya														
INDIKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR			%	72,39	75,61	77,97	79,72	82,44	82,44					
SASARAN PROGRAM : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya			%	55,92	68,35	71,54	79,26	84,22	84,22					
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SESUAI L1, INFORMASI JASA KONSTRUKSI DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA														
SASARAN KEGIATAN: Peningkatan layanan dukungan manajemen melalui L1, informasi jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya			%	100	100	100	100	100	337,860	419,116	422,163	425,332	428,596	2,032,069
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan dukungan manajemen sesuai L1 dan pelaksanaan tugas teknis lainnya			%	100	100	100	100	100	330,960	412,116	415,165	418,192	421,596	1,998,069
KOORDINATOR: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KONSTRUKSI														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PELAKSANA: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KONSTRUKSI														
OUTPUT KEGIATAN :														
1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I			Layanan	1	1	1	1	1	14,815	18,458	18,590	18,732	18,878	89,468
2. Layanan Sistem Perencanaan Internal			Layanan	1	1	1	1	1	55,612	74,253	74,801	75,372	75,960	356,994
3. Layanan Dukungan Manajemen Sabuk			Layanan	1	1	1	1	1	26,077	36,972	35,231	35,499	35,776	168,555
4. Layanan Perbarisan			Layanan	1	1	1	1	1	228,356	284,430	295,542	288,725	290,062	1,378,047
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi			%	65	75	84	91,8	97	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	35,000
1. Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi			%	0	20	50	80	100						
2. Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK, teknologi dan TKDN) jasa konstruksi			%	05	90	95	06	100						
3. Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi			%	100	100	100	100	100						
4. Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi			%	55	65	75	80	85	35					
5. Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi			%	100	100	100	100	100						
PELAKSANA: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KONSTRUKSI														
OUTPUT KEGIATAN :														
1. Layanan Data dan Informasi			Layanan	1	1	1	1	1	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	35,000

8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PROGRAM/ KEGATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGATAN/OUTPUT/INDEKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									525,188,892	563,788,892	933,432,565	1,028,720,865	1,328,313,723	4.379.424.936
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN														
SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya														
INDOKATOR KINERJA PROGRAM: Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR														
SASARAN PROGRAM: Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
INDOKATOR KINERJA PROGRAM: Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR														
1. Peningkatan ASN Kompetensi Melalui Pendidikan & Pelatihan (Subbot: 45)														
2. Peningkatan Pejabat yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (Subbot: 15)														
3. Peningkatan Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai (Subbot: 25)														
4. Tingkat Kepuasan Penerima Layanan (Penerima Pelayanan) (Subbot: 25)														
KEGIATAN 1: Penyelenggaraan Pengembangan Talenta														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja kompetensi, pemetaan karir, manajemen kinerja, dan kepuasan internal														
INDOKATOR KINERJA KEGIATAN: Jumlah ASN yang dikembangkan talentanya														
KORDONATOR: Pusat Pengembangan Talenta														
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Talenta														
OUTPUT KEGIATAN :														

PROGRAM/ KEGATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGATAN/OUTPUT/INDEKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1. Pengembangan Talenta ASN														
1.1. Jumlah ASN yang dinilai kompetensinya														
1.2. Jumlah ASN yang dipantau kinerjanya														
1.3. Jumlah ASN yang dipetakan kinerjanya														
2. Pelaksanaan Evaluasi Internal														
2.1. Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan keputusan internal dan manajemen risiko														
2.2. Jumlah laporan pengembangan dan pemantauan keputusan internal														
KEGIATAN 2: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bidang PUPR														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur Bidang PUPR														
INDOKATOR KINERJA KEGIATAN: Jumlah ASN Bidang PUPR yang dikembangkan kompetensinya														
KORDONATOR: Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman														
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Permukiman														
OUTPUT KEGIATAN :														
1. Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Sumber Daya Air dan Permukiman														
1.1. Jumlah ASN Bidang SDA dan Permukiman yang dikembangkan kompetensinya														

PROGRAM/ KEGATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGATAN/OUTPUT/INDEKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah														
OUTPUT KEGIATAN :														
1. Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah														
1.1. Jumlah ASN Bidang Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang dikembangkan kompetensinya														
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen														
OUTPUT KEGIATAN :														
1. Pengembangan Kompetensi ASN Bidang Manajemen														
1.1. Jumlah ASN Bidang Manajemen yang dikembangkan kompetensinya														
SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya														
INDOKATOR KINERJA SASARAN: Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR														
SASARAN PROGRAM: Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
INDOKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya														
KEGIATAN : Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pengembangan SDM Aparatur PUPR														

PROGRAM/ KEGATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGATAN/OUTPUT/INDEKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:									145,583,301	280,551,270	217,368,680	233,945,760	263,496,736	1,148,945,647
1.	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Keanggotaan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Kelembagaan	%	80	80	81	82	82	82						
2.	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	%	100	100	100	100	100	100						
3.	Tingkat Layanan Pengelolaan Kolaborasi dan Jejaring Regional serta Pengadministrasian Pegawai	%	80	80	81	82	82	82						
4.	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	85	90	90	91	91	91						
5.	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	%	85	90	90	91	91	91						
6.	Nilai SAKIP Unit Organisasi	%	76	76	77	77	77	77						
KOORDINATOR : Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia														
PELAKSANA: Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia														
OUTPUT KEGIATAN :														
1.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I													
1.1.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	1	1	1	1	1	5						
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
2.1.	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5						
3.	Layanan Dukungan Manajemen Sektor													

PROGRAM/ KEGATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGATAN/OUTPUT/INDEKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.1.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Sektor	Layanan	1	1	1	1	1	5						
4.	Layanan Perkantoran													
4.1.	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5						
PELAKSANA: Politeknik Pekerjaan Umum														
OUTPUT KEGIATAN :														
1.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
1.1.	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5						
2.	Layanan Dukungan Manajemen Sektor													
2.1.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Sektor	Layanan	1	1	1	1	1	5						
3.	Layanan Perkantoran													
3.1.	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5						
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Talenta														
OUTPUT KEGIATAN :														
1.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
1.1.	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5						
2.	Layanan Dukungan Manajemen Sektor													

PROGRAM/ KEGATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGATAN/OUTPUT/INDEKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.1.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Sektor	Layanan	1	1	1	1	1	5						
3.	Layanan Perkantoran													
3.1.	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5						
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air dan Perikanan														
OUTPUT KEGIATAN :														
1.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
1.1.	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5						
2.	Layanan Dukungan Manajemen Sektor													
2.1.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Sektor	Layanan	1	1	1	1	1	5						
3.	Layanan Perkantoran													
3.1.	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5						
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perairan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah														
OUTPUT KEGIATAN :														
1.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
1.1.	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5						
2.	Layanan Dukungan Manajemen Sektor													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2.1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Sektoral	Layanan	1	1	1	1	1	5						
3	Layanan Perkantoran													
3.1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5						
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Sektoral dan Prasarana Internal													
1.1	Jumlah Layanan Sektoral dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5						
2	Layanan Dukungan Manajemen Sektoral													
2.1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Sektoral	Layanan	1	1	1	1	1	5						
3	Layanan Perkantoran													
3.1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5						
PELAKSANA: UPT Balai														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Sektoral dan Prasarana Internal													
1.1	Jumlah Layanan Sektoral dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5						
2	Layanan Dukungan Manajemen Sektoral													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2.1. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Sektoral	Layanan	1	1	1	1	1	5						
3	Layanan Perkantoran													
3.1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5						
PROGRAM : PENDEKIDAN DAN PELATIHAN VOKASI														
SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang kontrol yang kompeten dan profesional														
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS: Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja (BPSDM)														
1	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja	%	25	27,5	80	85	90	90						
SASARAN PROGRAM: Meningkatkan SDM Vokasional Bidang PUPR Yang Bersertifikat														
INDIKATOR KINERJA PROGRAM: Tingkat Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan Vokasi Bidang PUPR														
		%	25	28	80	85	90	90	81,680,375	111,033,900	283,488,976	235,087,692	245,169,448	876,459,191
1	Persentase Nilai Mahasiswa (PNS > 3)	%	10	55	60	70	80	80						
2	Persentase Jumlah Lulusan Program Studi Vokasional	%	0	8	100	100	100	100						
KEGIATAN 4: Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan mutu kuantitas dan kualitas SDM pendidikan vokasi bidang PUPR yang kompeten														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Jumlah peserta didik dan kualitas SDM pendidikan vokasi bidang PUPR yang kompeten														
		Orang	300	525	800	1.125	1.575	4.325	81,680,375	111,033,900	283,488,976	235,087,692	245,169,448	876,459,191

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Jumlah mahasiswa program studi vokasional	Orang	300	525	800	825	1.050	3.500						
2	Jumlah mahasiswa bersertifikasi kompetensi	Orang	0	0	150	300	525	975						
KOORDINATOR : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia														
PELAKSANA: Politeknik Pekerjaan Umum														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum													
1.1	Jumlah mahasiswa program studi pendidikan vokasi bidang PUPR	Orang	300	525	800	825	1.050	3.500						

9. Inspektorat Jenderal

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Ribu Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: INSPEKTORAT JENDERAL														
PROGRAM: Dukungan Manajemen														
SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya														
1	INDIKATOR KINERJA SASARAN: Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	%	72	75	82	85	88	88						
SASARAN PROGRAM : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
1	INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR	%	72	75	82	85	88	88	111.744	120.261	121.729	129.915	136.611	621.880
2	Tingkat kapabilitas Ijen (Jen Internal Audit Capability Index / IACMI)	Tingkat	3	3	4	4	4	4						
2	Tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan	%	66	69	73	78	82	82						
3	Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR	%	62	81	87	89	90	90						
KEGIATAN : Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR														
									46.653	83.904	42.131	44.238	46.449	225.375
SASARAN KEGIATAN 1.1: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat 1														
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat 1	%	70	74	78	83	87	87						
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses APSP Inspektorat 1	Nilai	90	90	90	90	90	90						
2	Persentase pengawasan di Inspektorat 1	%	70	75	80	85	90	90						
3	Tingkat penanganan pengaduan masyarakat	%	75	80	85	90	95	95						
4	Persentase tidak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat 1	%	45	50	55	60	65	65						
5	Hasil Pembiayaan SPP terhadap Unit Eselon I													

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	a. Kesuksesan penilaian evaluasi Ijen (Internal assessment) dengan hasil penilaian SPKP (Quality Assurance)	%	85	87,5	90	92,5	95	95						
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Matutias SPK Unit Organisasi yang relevan	Nilai	3	3	3	4	4	4						
	c. Persentase penerapan Manajemen Risiko	%	5	25	45	65	85	85						
KOORDINATOR : Sekretaris Inspektorat Jenderal														
PELAKSANA: Inspektorat 1														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Audit Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	6.791	6.143	6.328	6.844	6.976	34.582
SASARAN KEGIATAN 1.2: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II														
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	%	70	74	78	83	87	87						
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses APSP Inspektorat II	Nilai	90	90	90	90	90	90						
2	Persentase pengawasan di Inspektorat II	%	70	75	80	85	90	90						
3	Tingkat penanganan pengaduan masyarakat	%	75	80	85	90	95	95						
4	Persentase tidak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II	%	45	50	55	60	65	65						
5	Hasil Pembiayaan SPP terhadap Unit Eselon I													
6	Kesuksesan penilaian evaluasi Ijen (Internal assessment) dengan hasil penilaian SPKP (Quality Assurance)	%	85	87,5	90	92,5	95	95						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTPUT)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	b. Hasil Penilaian Evaluasi/Matutias SPK Unit Organisasi yang relevan	Nilai	3	3	3	4	4	4						
	c. Persentase penerapan Manajemen Risiko	%	5	25	45	65	85	85						
PELAKSANA: Inspektorat II														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Audit Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	5.325	6.143	6.328	6.844	6.976	31.436
SASARAN KEGIATAN 1.3: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III														
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	%	70	74	78	83	87	87						
1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses APSP Inspektorat III	Nilai	90	90	90	90	90	90						
2	Persentase pengawasan di Inspektorat III	%	70	75	80	85	90	90						
3	Tingkat penanganan pengaduan masyarakat	%	75	80	85	90	95	95						
4	Persentase tidak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat III	%	45	50	55	60	65	65						
5	Hasil Pembiayaan SPP terhadap Unit Eselon I													
6	Kesuksesan penilaian evaluasi Ijen (Internal assessment) dengan hasil penilaian SPKP (Quality Assurance)	%	85	87,5	90	92,5	95	95						
7	Hasil Penilaian Evaluasi/Matutias SPK Unit Organisasi yang relevan	Nilai	3	3	3	4	4	4						
8	Persentase penerapan Manajemen Risiko	%	5	25	45	65	85	85						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PELAKSANA: Inspektoral III														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Audit Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	5.561	6.142	6.326	6.844	6.876	35.652
SASARAN KEGIATAN 1A: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektoral IV														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Peningkatan Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektoral IV		%	75	74	78	83	87	87						
1	Nilai Hasil Telah Sejalan Internal proses AKSPF Inspektoral IV	Nilai	90	90	90	90	90	90						
2	Peningkatan pengawasan di Inspektoral IV	%	70	75	80	85	90	90						
3	Tingkat pengawasan pengawasan masyarakat	%	75	80	85	90	95	95						
4	Peningkatan tingkat lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektoral IV	%	45	50	55	60	65	65						
5	Hasil Penilaian SPP terhadap Unit Eselon I													
a.	Kemampuan penilaian evaluasi Rjen (Internal assessment) dengan hasil penilaian SPIC (Quality Assurance)	%	85	87,5	90	92,5	95	95						
b.	Hasil Penilaian Mutu/akurasi SPP Unit Organisasi yang diberikan BPJP	Nilai	3	3	3	4	4	4						
c.	Peningkatan penerapan Manajemen Risiko	%	5	25	45	65	85	85						
PELAKSANA: Inspektoral IV														
OUTPUT KEGIATAN :														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Layanan Audit Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	6.053	6.142	6.326	6.844	6.976	34.744
SASARAN KEGIATAN 1A: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektoral V														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Peningkatan Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektoral V		%	70	74	78	83	87	87						
1	Nilai Hasil Telah Sejalan Internal proses AKSPF Inspektoral V	Nilai	90	90	90	90	90	90						
2	Peningkatan pengawasan di Inspektoral V	%	70	75	80	85	90	90						
3	Tingkat pengawasan pengawasan masyarakat	%	75	80	85	90	95	95						
4	Peningkatan tingkat lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektoral V	%	45	50	55	60	65	65						
5	Hasil Penilaian SPP terhadap Unit Eselon I													
a.	Kemampuan penilaian evaluasi Rjen (Internal assessment) dengan hasil penilaian SPIC (Quality Assurance)	%	85	87,5	90	92,5	95	95						
b.	Hasil Penilaian Evaluasi/Mutu/akurasi SPP Unit Organisasi yang diberikan BPJP	Nilai	3	3	3	4	4	4						
c.	Peningkatan penerapan Manajemen Risiko	%	5	25	45	65	85	85						
PELAKSANA: Inspektoral V														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Audit Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	7.254	6.876	7.062	7.415	7.781	36.372
SASARAN KEGIATAN 1A: Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja Inspektoral VI														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Peningkatan Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektoral VI		%	42	48	74	80	85	85						
1	Nilai Hasil Telah Sejalan Internal proses Audit Inspektoral VI	Nilai	90	90	90	90	90	90						
2	Tingkat pelaksanaan Audit Investigatif	%	70	75	80	85	90	90						
3	Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektoral VI yang ditindaklanjuti	%	45	50	55	60	65	65						
4	Pengendalian Uraian Kerja Menju WSK yang dilakukan penilaian mandiri untuk memperoleh peringkat menuju WSK	Unit Kerja	0	1	2	3	4	4						
5	Rekomendasi Pengendalian Pengawasan	Rekomendasi	2	2	2	2	2	2						
6	Survey Penilaian Integritas	Nilai	74	78	78	80	82	82						
PELAKSANA: Inspektoral VI														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Audit Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	5.926	7.581	8.117	8.523	8.946	39.796
SASARAN KEGIATAN 1.7: Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan		Dokumen	3	5	5	4	4	21						
1	Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan tahunan	Dokumen	1	1	1	1	1	5						
2	Audit pengawasan dan perubahan regulasi pengawasan	Dokumen	2	4	4	3	3	16						
PELAKSANA: Sekretariat Inspektoral Jenderal														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Dukungan Manajemen Balok I	Layanan	1	1	1	1	1	5	1.143	1.594	1.642	1.724	1.800	7.903
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN														
SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya														
1	INDIKATOR KINERJA SASARAN : Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	%	72,39	75,61	77,97	79,72	81,44	81,44						
SASARAN PROGRAM : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
1	INDIKATOR KINERJA PROGRAM : Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	%	55,92	63,35	71,54	79,26	84,12	84,12						
KEGIATAN 2: Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan														
SASARAN KEGIATAN : Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya														
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Penentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	%	82	85	87	89	90	90	65.893	79.377	81.588	85.678	89.962	401.595
1	Tingkat Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kepegangan, Penelusuran Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Akreditasi	%	85	87	89	92	93	93						
2	Tingkat Capaian Pengelolaan Kolaborasi dan Jejaring Pengantar serta Pengadministrasian Pegawai	%	67	72	77	82	90	90						
3	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	90	90	90	90	90	90						
4	Tingkat Kualitas Penempatan Anggaran	%	90	90	90	90	90	90						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	Kategori SAKIP Tipe Kementerian PUPR	Kategori	BB	BB	BB	A	A	A						
6	Nilai SPN Tipe Kementerian PUPR	Nilai	3	3	3	4	4	4						
PELAKSANA: Sekretariat Inspektoriat Jenderal														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Dukungan Manajemen Balok I	Layanan	1	1	1	1	1	5	13.643	17.177	17.692	18.177	19.594	86.785
2	Layanan Internal (Overhead)	Layanan	1	1	1	1	1	5	2.796	2.435	2.500	3.744	2.786	14.249
3	Layanan Pelaksanaan	Layanan	1	1	1	1	1	5	48.653	59.565	61.897	63.357	67.890	306.661

10. Sekretariat Jenderal

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Juta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT JENDERAL														
PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN														
SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya														
1	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	%	72,39	75,61	77,97	79,72	81,44	81,44	520,056	665,203	695,853	736,274	762,813	3,402,199
SASARAN PROGRAM : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
	Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	%	55,92	63,35	71,54	79,26	84,12	84,12	520,056	665,203	695,853	736,274	762,813	3,402,199
KEGIATAN 1: Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Urus														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan layanan pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN dan Urus														
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN dan Urus	%	77,76	80,73	83,71	86,68	88,40	88,40	93,104	90,903	96,597	101,662	105,062	489,238
KOORDINATOR : Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri														
PELAKSANA: Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri														
	OUTPUT KEGIATAN :													
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	15,000	23,606	25,700	25,900	24,000	110,109
2	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	17,969	15,268	16,500	17,000	17,500	84,177
PELAKSANA: Biro Keuangan														
	OUTPUT KEGIATAN :													
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	17,028	13,350	17,400	17,500	17,500	82,778
PELAKSANA: Biro Pengelolaan Barang Milik Negara														
		%	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00	85,00	17,643	16,362	16,362	16,362	16,362	83,091

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Luta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Pemenuhan dan Penggajian Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	17.643	16.762	16.902	16.902	16.902	81.991
PELAKSANA: Biro Umum		%	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00	25.524	22.314	24.545	27.000	29.700	129.083
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	25.524	22.314	24.545	27.000	29.700	129.083
KEGIATAN 2: Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai, Organisasi dan Tatakelola														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan pengelolaan dan pengadministrasian pegawai Kementerian PUPR														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai														
		%	50.00	60.00	75.00	80.00	85.00	85.00	22.164	15.550	15.861	16.176	14.503	86.255
KOORDINATOR: Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Kelola														
PELAKSANA: Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Kelola														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan SDM	Layanan	1	1	1	1	1	5	20.588	11.700	11.404	11.652	11.886	66.731
2	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	3.575	4.750	4.637	4.526	4.610	19.504
KEGIATAN 3: Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Advokasi Hukum														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan fasilitas produk hukum dan advokasi hukum yang progresif														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pembentukan produk hukum dan advokasi hukum														
		%	73.88	76.87	77.86	79.81	82.29	82.29	17.102	14.526	17.898	18.562	19.008	87.096

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Luta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KOORDINATOR: Biro Hukum														
PELAKSANA: Biro Hukum														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan HKU	Layanan	1	1	1	1	1	5	17.182	14.526	17.896	18.562	19.008	87.096
KEGIATAN 4: Penyelenggaraan Fasilitas Infrastruktur Daerah														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan kualitas fasilitas dalam pemenuhan, pembiayaan, pemertaan dan evaluasi serta pelayanan penyelenggaraan infrastruktur daerah														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat kualitas fasilitas dalam pemenuhan, pembiayaan, pemertaan dan evaluasi serta pelayanan penyelenggaraan infrastruktur daerah														
		%	25.00	35.00	55.00	75.00	85.00	85.00	15.854	24.562	30.000	32.000	34.000	136.418
KOORDINATOR: Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah														
PELAKSANA: Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Fasilitas dan Pembiayaan Pemertaan Daerah	Daerah Prov/ Kab/Kota	541	541	541	541	541	2705	15.854	24.562	30.000	32.000	34.000	136.418
KEGIATAN 5: Penyelenggaraan dan Pembiayaan Informasi Publik														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik														
		%	76.00	77.95	79.75	81.70	83.20	83.20	42.037	39.033	43.000	48.000	53.000	225.048

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Luta Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KOORDINATOR: Biro Komunikasi Publik														
PELAKSANA: Biro Komunikasi Publik														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Referensi dan Protokol	Layanan	1	1	1	1	1	5	42.017	36.011	40.000	48.000	55.000	225.048
KEGIATAN 6: Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Bidang PUPR														
SASARAN KEGIATAN: Digital Melayani														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan digital														
		%	24.43	37.81	52.28	67.99	81.92	81.92	34.948	151.926	199.294	146.419	153.889	626.456
KOORDINATOR: Pusat Data dan Teknologi Informasi														
PELAKSANA: Pusat Data dan Teknologi Informasi														
OUTPUT KEGIATAN :														
1	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	1	1	1	5	34.348	151.926	199.294	146.419	153.889	626.456
KEGIATAN 7: Pengujian dan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan layanan kajian dan pemantauan kebijakan														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan kajian dan pemantauan kebijakan														
		%	42.50	63.75	65.00	76.25	76.75	76.75		6.285	7.542	9.650	10.860	33.738
KOORDINATOR: Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan														
PELAKSANA: Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan														

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Layanan Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Layanan	1	1	1	1	1	5		6,285	7,542	9,050	10,860	33,738
KEGIATAN B: Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal														
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan dukungan manajemen Sekretariat Jenderal														
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Jenderal		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	294,845	32,440	348,751	366,462	390,511	1,717,949
KOORDINATOR: Biro Perencanaan Anggaran dan Kinerja Luar Negeri														
PELAKSANA: Biro Perencanaan Anggaran dan Kinerja Luar Negeri														
OUTPUT KEGIATAN :									22,691	22,458	28,539	28,720	29,080	131,488
1	Layanan Perencanaan	Layanan	1	1	1	1	1	5	16,884	18,950	23,900	24,000	24,200	107,934
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	2,268	958	909	920	950	5,945
3	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,488		1,406	1,450	1,486	5,730
4	Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	1	1	5	689	750	750	750	780	3,738
5	Layanan SDM	Orang	1	1	1	1	1	5	1,200	1,780	1,260	1,290	1,320	6,879
6	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	300		300	310	350	1,260
PELAKSANA: Biro Keuangan														
OUTPUT KEGIATAN :									12,772	12,325	13,150	13,970	14,500	66,927
1	Layanan Perencanaan	Layanan	1	1	1	1	1	5	10,467	10,671	11,600	11,770	12,200	56,908

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	290	288	500	500	500	2,079
3	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	859	900	750	800	850	4,159
4	Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	1	1	5	150	250	200	200	250	1,050
5	Layanan SDM	Orang	1	1	1	1	1	5	857	600	600	600	600	3,277
6	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	180	75	100	100	100	535
PELAKSANA: Biro Pengelolaan Barang Milik Negara														
OUTPUT KEGIATAN :									31,557	29,167	29,367	29,167	29,167	148,225
1	Layanan Perencanaan	Layanan	1	1	1	1	1	5	24,653	27,047	27,047	27,047	27,047	132,841
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,000	720	720	720	720	3,880
3	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,588	600	600	600	600	3,900
4	Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	1	1	5	1,750	700	700	700	700	5,550
5	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,604	100	100	100	100	2,014
PELAKSANA: Biro Umum														
OUTPUT KEGIATAN :									148,476	139,686	153,655	169,820	185,922	797,759
1	Layanan Perencanaan	Layanan	1	1	1	1	1	5	138,376	130,338	143,570	157,707	173,477	743,205
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,700	1,500	1,050	1,815	1,997	8,962

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	1	1	5	6,000	6,600	7,260	7,880	8,785	36,431
4	Layanan SDM	Orang	1	1	1	1	1	5	1,700	1,000	1,100	1,210	1,331	6,341
5	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,780	250	275	300	339	2,890
PELAKSANA: Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana														
OUTPUT KEGIATAN :									14,636	16,950	17,950	17,300	17,660	81,536
1	Layanan Perencanaan	Layanan	1	1	1	1	1	5	12,678	14,500	14,600	14,700	14,800	71,478
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	250	450	450	500	500	2,150
3	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	460	900	900	900	1,000	4,160
4	Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1	1	1	5	650	600	600	650	650	3,150
5	Layanan SDM	Orang	1	1	1	1	1	5	280	250	250	300	400	1,480
6	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	200	250	250	250	250	1,200
PELAKSANA: Biro Hukum														
OUTPUT KEGIATAN :									11,798	12,439	12,527	12,860	13,174	62,799
1	Layanan Perencanaan	Layanan	1	1	1	1	1	5	9,646	9,506	9,900	9,986	10,094	49,134
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	480	380	367	550	650	2,417
3	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	538	800	880	890	957	3,965

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Layanan Sosialisasi Internal	Unit	1	1	1	1	1	5	300	750	200	160	200	1.400
5	Layanan SDM	Orang	1	1	1	1	1	5	558	504	650	662	712	3.144
6	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan	1	1	1	1	1	5	678	400	488	512	569	2.645
PELAKSANA: Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah														
OUTPUT KEGIATAN :									11,052	10,808	11,780	11,900	12,360	58,360
1	Layanan Perencanaan	Layanan	1	1	1	1	1	5	7,808	8,623	9,500	9,600	9,800	45,531
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	500	555	450	500	600	2,405
3	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	979	280	300	300	350	2,209
4	Layanan Sosialisasi Internal	Unit	1	1	1	1	1	5	1,665	900	950	950	1,000	5,465
5	Layanan SDM	Orang	1	1	1	1	1	5	488	200	308	300	300	1,596
6	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan	1	1	1	1	1	5	300	250	200	250	250	1,250
PELAKSANA: Biro Komunikasi Publik														
OUTPUT KEGIATAN :									14,483	16,026	17,640	19,600	21,310	89,059
1	Layanan Perencanaan	Layanan	1	1	1	1	1	5	11,376	12,800	14,000	15,600	16,940	56,716
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	308	257	280	300	330	1,475
3	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	2,091	1,896	2,000	2,200	2,420	10,595

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Layanan Sosialisasi Internal	Unit	1	1	1	1	1	5	750	750	1,000	1,100	1,200	4,800
5	Layanan SDM	Orang	1	1	1	1	1	5	-	320	350	385	420	1,475
6	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan	1	1	1	1	1	5	-	-	10	15	20	45
PELAKSANA: Pusat Data dan Teknologi Informasi														
OUTPUT KEGIATAN :									26,800	26,962	26,597	28,097	30,597	139,083
1	Layanan Perencanaan	Layanan	1	1	1	1	1	5	18,717	17,344	20,000	22,500	25,000	104,562
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,159	1,047	1,180	1,160	1,160	5,706
3	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	1,684	7,587	1,050	1,050	1,050	12,821
4	Layanan Sosialisasi Internal	Unit	1	1	1	1	1	5	680	200	500	500	500	2,380
5	Layanan SDM	Orang	1	1	1	1	1	5	1,792	2,067	2,142	2,142	2,142	10,245
6	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan	1	1	1	1	1	5	842	347	725	725	725	3,964
PELAKSANA: Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan														
OUTPUT KEGIATAN :										33,715	34,726	35,768	36,841	141,051
1	Layanan Perencanaan	Layanan	1	1	1	1	1	5	-	26,233	29,060	29,952	30,851	116,116
2	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5	-	1,752	1,795	1,434	1,477	5,956
3	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	-	1,625	1,672	1,722	1,779	6,799

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rupiah)					
			2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4	Sosialisasi Internal	Unit	1	1	1	1	1	5	-	2,105	2,170	2,235	2,302	8,815
5	Layanan SDM	Orang	1	1	1	1	1	5	-	300	300	318	328	1,245
6	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Laporan	1	1	1	1	1	5	-	100	100	106	109	415

C. MANUAL INDIKATOR KINERJA

1. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
SS	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	1. Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat (%)	Non Komposit	Diukur dari kapasitas air baku yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan air baku (domestik, industri, dan pariwisata) pada wilayah tersebut	Tahunan	Internal
		2. Presentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan Pusat (%)	Non Komposit	Diukur dari perbandingan antara penambahan luas kawasan terlindungi dari bencana banjir dengan target Renstra 2015-2019 seluas 200.000 hektar	Kumulatif	Internal
		3. Kapasitas tampung per kapita (m3/kapita)	Non Komposit	Diukur dari kumulatif kapasitas tampung air yang sudah beroperasi (waduk, embung, dam upgrading, dan pemanfaatan tampungan alami) dibandingkan dengan jumlah penduduk. Data jumlah penduduk (jlwa) menggunakan data BPS per tahun 2019	Kumulatif	Internal/BPS
		4. Volume layanan air untuk meningkatkan	Non Komposit	Diukur dari jumlah air yang dialirkan untuk melayani daerah irigasi kewenangan Pusat	Tahunan	Internal

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
		produktivitas irigasi (m3/tahun/hektar)		dibandingkan dengan luas daerah irigasi yang dilayani dalam 1 (satu) tahun		
SP	Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi	1. Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun (m3/detik)	Non Komposit	Diukur dari tambahan debit layanan sarana prasarana air baku yang dibangun bersumber dari air tanah dan air permukaan	Tahunan	
		2. Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir (hektar)	Non Komposit	Diukur dari luas kawasan yang terlindungi dari banjir	Tahunan	
		3. Tingkat pengendalian lumpur Sidoarjo (%)	Non Komposit	Diukur dari persentase semburan lumpur yang ditangani	Tahunan	
		4. Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun (juta m3)	Non Komposit	Diukur kumulatif kapasitas tampung efektif bendungan pada tahun eksisting (mencakup bendungan, embung, pemanfaatan tampungan alami, dan dam upgrading)	Kumulatif	
		5. Jumlah potensi tenaga listrik dari	Non Komposit	Diukur dari kumulatif potensi tenaga listrik dari bendungan	Tahunan	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
		infrastruktur SDA (MW)		yang selesai pada tahun eksisting		
		6. Jumlah DAS yang direvitalisasi (DAS)	Komposit	Diukur dari jumlah DAS yang direvitalisasi (Asahan, Cisadane, Ciliwung, Citarum)	Tahunan	
		7. Jumlah penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK (hektar)	Non Komposit	Diukur dari luas Daerah Irigasi yang dibangun mencakup irigasi permukaan, rawa, tambak, non-padi, JIAT (baik melalui pendanaan APBN, APBD maupun DAK)	Tahunan	
		8. Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD, dan DAK (hektar)	Non Komposit	Diukur dari luas Daerah Irigasi yang direhabilitasi inc irigasi permukaan, rawa, tambak, non-padi, JIAT (baik melalui pendanaan APBN maupun DAK)	Tahunan	
		9. Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi (DAS)	Non Komposit	Diukur dari jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi	Tahunan	
		10. Tingkat layanan prasarana SDA (%)	Non Komposit	Menggunakan indikator layanan prasarana SDA menuju Layanan OP Bangkit (kelembagaan, aset, ketersediaan peralatan, SDM,	Kumulatif	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
			regulasi, aset, dan pemenuhan AKNOP)		
SK-1	Meningkatnya layanan kesekretariatan Dewan SDA nasional (DSDAN)	Tingkat layanan kesekretariatan manajemen Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) (%)	Diukur dari perbandingan jumlah sidang pleno yang difasilitasi dengan yang direncanakan	Tahunan	
SK-2.1	Meningkatnya perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan evaluasi	1. Persentase deviasi perencanaan program dengan penganggaran tahunan UPT (%)	Diukur dari deviasi antara jumlah program prioritas yang direncanakan dengan jumlah program prioritas yang dianggarkan	Tahunan	
		2. Persentase penurunan jumlah revisi anggaran UPT (%)	Diukur dari penurunan jumlah revisi anggaran UPT tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah revisi anggaran UPT tahun sebelumnya	Tahunan	
		3. Persentase keterpaduan perencanaan pengelolaan SDA WS Wilayah Kerja UPT (%)	Diukur dari jumlah dokumen pola dan rencana WS wilayah kerja UPT dibandingkan dengan jumlah WS yang menjadi wilayah kerja	Tahunan	
SK-2.2	Meningkatnya pembinaan perencanaan,	1. Persentase deviasi perencanaan program dengan	Diukur dari deviasi antara jumlah program prioritas yang direncanakan dengan jumlah	Tahunan	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
	penganggaran tahunan Ditjen SDA (%)		program prioritas yang dianggarkan di lingkungan Ditjen SDA		
	2. Persentase penurunan jumlah revisi anggaran di lingkungan Ditjen SDA (%)		Diukur berdasarkan pemantauan pada aplikasi SAKTI	Tahunan	
	3. Persentase keterpaduan perencanaan pengelolaan SDA WS Kewenangan Pusat di lingkungan Ditjen SDA (%)		Diukur dari persentase jumlah dokumen pola dan rencana WS Kewenangan Pusat yang sudah ditetapkan (kewenangan pusat = 64 WS)	Tahunan	
	4. Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Ditjen SDA (%)		Diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP Ditjen SDA oleh Itjen	Tahunan	
	5. Persentase progres pengadaan tanah untuk infrastruktur SDA (%)		Diukur dari luas tanah yang akan siap dibayar dibandingkan dengan luas tanah yang akan dibebaskan	Tahunan	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
SK-2.3	Terlaksananya pengadaan tanah untuk infrastruktur	Jumlah luas tanah yang dibebaskan (hektar)	Diukur dari jumlah luas tanah yang dibebaskan untuk infrastruktur SDA	Tahunan	
SK-3.1	Meningkatnya layanan jaringan irigasi	1. Jumlah tambahan panjang jaringan irigasi yang dibangun (km)	Diukur dari jumlah panjang irigasi permukaan dan rawa yang dibangun (dengan pendanaan APBN)	Tahunan	
		2. Jumlah panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi (km)	Diukur dari jumlah panjang irigasi permukaan dan rawa yang direhabilitasi (dengan pendanaan APBN)	Tahunan	
		3. Jumlah lokasi prasarana irigasi nonpadi yang dibangun (lokasi)	Diukur dari jumlah lokasi jaringan irigasi tambak dan nonpadi yang dibangun (dengan pendanaan APBN)	Tahunan	
		4. Jumlah daerah irigasi yang dimodernisasi (daerah irigasi)	Diukur dari jumlah daerah irigasi yang dimodernisasi	Tahunan	
SK-3.2	Meningkatnya layanan pembinaan bidang irigasi permukaan, rawa, dan pertanian nonpadi	1. Persentase pencapaian target kumulatif luas pembangunan irigasi yang dibangun melalui APBN,	Diukur dari capaian kumulatif luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK dibandingkan target total pembangunan irigasi pada Renstra	Kumulatif	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
		APBD, dan DAK (%)				
		2. Persentase pencapaian target kumulatif luas rehabilitasi irigasi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK		Persentase pencapaian target kumulatif luas rehabilitasi irigasi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK (%)	Kumulatif	
		3. Jumlah layanan irigasi yang terjamin airnya dari bendungan (hektar)		Diukur dari luas irigasi permukaan yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk atau tampungan bustan	Tahunan	
SK- 3.3	Meningkatnya layanan teknis bidang irigasi dan rawa	1. Jumlah layanan teknis bidang irigasi (layanan)		Diukur dari jumlah layanan teknis bidang irigasi yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Irigasi	Tahunan	
		2. Jumlah layanan teknis bidang rawa (layanan)		Diukur dari jumlah layanan teknis bidang rawa yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Rawa	Tahunan	
SK- 4.1	Meningkatnya layanan infrastruktur SDA untuk ketahanan bencana	1. Jumlah panjang bangunan pengendali daya rusak air yang dibangun (km)		Diukur dari jumlah panjang normalisasi, tanggul, perkakuan tebing, kanal, drainase, break water, seawall yang dibangun	Tahunan	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
		2. Jumlah bangunan pendukung pengendali daya rusak air yang dibangun (unit)		Diukur dari jumlah pintu air/bendung, pompa, polder yang dibangun	Tahunan	
		3. Jumlah bangunan pengendali lahar dan sedimen yang dibangun (unit)		Diukur dari jumlah sabo dam, check dam yang dibangun	Tahunan	
		4. Jumlah kumulatif kawasan strategis di pesisir utara Jawa yang infrastruktur ketahanan bencananya dibangun (kawasan)		Diukur dari jumlah kumulatif normalisasi, tanggul, perkakuan tebing, kanal, drainase, break water, seawall di wilayah utara Jawa yang dibangun	Kumulatif	
		5. Jumlah sungai pada empat DAS yang direvitalisasi (sungai)		Diukur dari kumulatif jumlah sungai yang ditangani pada empat DAS kritis (Asahan, Cisadane, Cilawung, Citarum)	Kumulatif	
SK- 4.2	Meningkatnya layanan pembinaan infrastruktur SDA untuk ketahanan bencana	1. Tingkat pencapaian target penurunan luas kawasan banjir (%)		Diukur capaian penurunan luas kawasan terkena dampak banjir dibandingkan dengan target total penurunan luas kawasan banjir pada Renstra	Kumulatif	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
		2. Tingkat pencapaian target perlindungan pantai rawan abrasi (%)		Diukur dari capaian target perlindungan pantai rawan abrasi dibandingkan dengan target total perlindungan pantai rawan abrasi pada Renstra	Kumulatif	
		3. Tingkat pencapaian target pembangunan pengendali sedimen dan lahar gunung berapi		Diukur dari pencapaian target pembangunan pengendali sedimen dan lahar gunung berapi dibandingkan dengan target total pembangunan pengendali sedimen dan gunung berapi pada Renstra	Kumulatif	
SK- 4.3	Meningkatnya layanan teknis bidang sungai dan pantai	1. Jumlah layanan teknis bidang sungai (layanan)		Diukur dari jumlah layanan teknis bidang sungai yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Sungai	Tahunan	
		2. Jumlah layanan teknis bidang pantai (layanan)		Diukur dari jumlah layanan teknis bidang pantai yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Pantai	Tahunan	
SK- 5.1	Meningkatnya layanan tampungan air	1. Jumlah tampungan air yang dibangun (unit)		Diukur dari jumlah bendungan, embung, situ, dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun	Tahunan	
		2. Jumlah tampungan alami yang		Diukur dari jumlah 15 danau prioritas pertama dan	Tahunan	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
		direvitalisasi dan dimanfaatkan (unit)		tampungan air alami lainnya yang direvitalisasi dan dimanfaatkan		
SK- 5.2	Meningkatnya layanan pembinaan bidang bendungan, danau, bangunan, bangunan tampungan lainnya	3. Jumlah tampungan air berpotensi listrik yang dibangun (unit)		Diukur dari jumlah tampungan air berpotensi listrik yang selesai dibangun pada tahun eksisting	Tahunan	
		1. Tingkat pencapaian target kumulatif kapasitas tampung bangunan penampung air (%)		Diukur dari capaian kumulatif jumlah tambahan kapasitas tampung bangunan penampung air dibandingkan dengan target kapasitas tampung yang dibangun pada Renstra	Kumulatif	
		2. Tingkat pencapaian target tampungan air alami yang direvitalisasi dan dimanfaatkan (%)		Diukur dari capaian tampungan air alami yang dikonservasi dibandingkan dengan target tampungan air alami yang direvitalisasi pada Renstra	Kumulatif	
SK- 5.3	Meningkatnya layanan teknis bidang bendungan	Jumlah layanan teknis bidang bendungan (layanan)		Diukur dari jumlah layanan teknis bidang bendungan yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Bendungan	Tahunan	
SK- 6.1	Meningkatnya layanan sarana prasarana penyediaan air tanah dan air baku	1. Jumlah panjang prasarana air baku yang dibangun (km)		Diukur dari panjang saluran pembawa, intake, air tanah untuk air baku yang dibangun	Tahunan	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
		2. Jumlah panjang jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang dibangun (km)		Diukur dari panjang JIAT yang dibangun	Tahunan	
SK- 6.2	Meningkatnya layanan pembinaan bidang air tanah dan air baku	1. Tingkat pencapaian target tambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku (%)		Diukur dari capaian tambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku dibandingkan dengan target tambahan kapasitas air baku pada Renstra	Kumulatif	
		2. Jumlah penambahan kapasitas air baku yang bersumber dari bendungan (m3/detik)		Diukur dari tambahan debit air baku yang bersumber dari waduk	Tahunan	
		3. Persentase BBWS/BWS yang melaksanakan konservasi air tanah dan air baku (%)		Diukur dari jumlah BBWS/BWS yang melaksanakan konservasi	Kumulatif	
		4. Jumlah penerapan sistem integrasi air permukaan dan air tanah untuk air baku yang		Diukur dari jumlah WS yang menerapkan sistem integrasi air permukaan dan air tanah (conjunctive use)	Kumulatif	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
		dilaksanakan oleh BBWS/BWS (WS)				
SK- 6.3	Meningkatnya layanan teknis bidang air tanah	Jumlah layanan teknis bidang air tanah (layanan)		Diukur dari jumlah layanan teknis bidang air tanah yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Air Tanah	Tahunan	
SK- 7.1	Meningkatnya kinerja layanan OP sarana prasarana SDA	1. Persentase jumlah prasarana SDA yang di OP sesuai AKNOP (%)		Diukur dari persentase jumlah sarana prasarana SDA yang di OP terhadap jumlah jumlah sarana prasarana SDA eksisting	Kumulatif	
		2. Indeks RBO Benchmarking BBWS/BWS (indeks)		Diukur dengan parameter RBO Benchmarking	Kumulatif	
SK- 7.2	Meningkatnya layanan pembinaan bidang operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA	1. Persentase pencapaian target layanan prasarana SDA (%)		Diukur dari capaian layanan prasarana SDA dibandingkan dengan target capaian layanan prasarana SDA pada Renstra	Kumulatif	
		2. Persentase Daerah Irigasi dengan indeks kinerja di atas 70 persen (%)		Diukur dari persentase jumlah Daerah Irigasi dengan indeks kinerja di atas 70 persen	Kumulatif	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
		3. Persentase perizinan bidang sumber daya air yang diproses (%)		Diukur dari jumlah izin yang diproses dibagi dengan jumlah izin yang diusulkan	Kumulatif	
		4. Persentase pencapaian target indeks RBO Benchmarking yang dicapai (%)		Diukur dari capaian target parameter RBO Benchmarking dibandingkan dengan target RBO Benchmarking pada Renstra	Kumulatif	
		5. Persentase pencapaian target wilayah sungai yang dinilai indeks penilaiannya (%)		Diukur dari capaian target parameter RBO Benchmarking dibandingkan dengan target RBO Benchmarking pada Renstra	Kumulatif	
SK-8.1	Meningkatnya layanan sarana prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo	1. Jumlah panjang tanggul penahan lumpur Sidoarjo yang direhabilitasi atau ditingkatkan (km)		Diukur dari panjang tanggul penahan lumpur Sidoarjo yang dibangun dan direhabilitasi	Tahunan	
		2. Jumlah volume luapan lumpur (slurry) yang dialirkan ke Kali Porong (juta m3)		Diukur dari volumen luapan lumpur yang dialirkan ke Kali Porong	Tahunan	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
SK-8.2	Meningkatnya pembinaan layanan pengendalian lumpur Sidoarjo	Persentase pencapaian target pengendalian lumpur sidoarjo (%)		Diukur dari capaian volume luapan lumpur yang dialirkan ke Kali Porong dibandingkan dengan target volume luapan lumpur yang dialirkan ke Kali Porong	Kumulatif	
SK-9.1	Meningkatnya kesiapan teknis infrastruktur SDA	1. Jumlah laporan hidrologi yang diintegrasikan pada SIH3 (laporan)		Diukur dari laporan hidrologi yang diintegrasikan pada SIH3	Tahunan	
		2. Tingkat nilai layanan SISDA Unit Pelaksana Teknis (UPT) (nilai)		Diukur dari layanan teknis bidang SDA yg dilaksanakan dibandingkan dengan permintaan layanan teknis yang diajukan	Tahunan	
SK-9.2	Meningkatnya pembinaan layanan teknis bidang SDA	1. Persentase pencapaian target layanan SISDA Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (%)		Diukur dari capaian layanan SISDA dibandingkan dengan target layanan SISDA pada Renstra	Kumulatif	
		2. Persentase layanan teknis bidang SDA (%)		Diukur dari layanan teknis bid SDA yg dilaksanakan dibandingkan dengan permintaan layanan teknis yg diajukan	Tahunan	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
SK-9.3	Meningkatnya layanan teknis bidang sabo, hidrolika, geoteknik, hidrologi dan lingkungan keairan	1. Jumlah layanan teknis bidang sabo (layanan)		Diukur dari jumlah layanan teknis bidang sabo yang dilaksanakan oleh Balai Teknik Sabo	Tahunan	
		2. Jumlah layanan teknis hidrolika dan geoteknik (layanan)		Diukur dari jumlah layanan teknis bidang hidrolik dan geoteknik dilaksanakan oleh Balai Hidrolik dan Geoteknik Keairan	Tahunan	
		3. Jumlah layanan teknis bidang hidrologi dan lingkungan keairan (layanan)		Diukur dari jumlah layanan teknis bidang hidrologi dan lingkungan keairan yang dilaksanakan oleh Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan	Tahunan	
SK-10	Meningkatnya kepatuhan internal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Nilai maturitas SPIP Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (nilai)		Diukur dari persentase pencapaian target nilai maturitas SPIP	Tahunan	
SS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Strategis kesekretariatan Kementerian PUPR)			

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
	PUPR dan Tugas Teknis Lainnya				
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Program kesekretariatan Kementerian PUPR)		
SK- 11.1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Sumber Daya Air	1. Tingkat kualitas pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, penatausahaan Barang Milik Negara, dan pengelolaan ketatausahaan (%)	Dihitung dari penjumlahan: a. Persentase pembinaan tata naskah dinas = jumlah unit kerja yang terbina tata naskah dinas/jumlah seluruh unit kerja b. Persentase pembinaan kearsipan = jumlah unit kerja yang terbina kearsipan/jumlah seluruh unit kerja c. Persentase penyelesaian penghapusan Barang Milik Negara (BMN) = jumlah usulan penghapusan BMN yang telah diselesaikan/total usulan penghapusan BMN. d. Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi – jumlah koresponden yang	Tahunan	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
			diselesaikan/jumlah seluruh koresponden		
		2.Tingkat layanan pembentukan produk hukum (peraturan)	Dihitung dari jumlah produk hukum yang diterbitkan dibagi dengan jumlah produk hukum yang seharusnya diterbitkan (dalam proleg Kemen PUPR) dikali 100%	Tahunan	
		3.Tingkat layanan pengelolaan kelembagaan dan jabatan fungsional serta pengadministrasian pegawai (nilai)	Survey Kepada Pegawai terkait ketepatan perencanaan pegawai, transparansi rekrutmen, ketepatan layanan administrasi Kepegawain	Tahunan	
		4.Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran (nilai IKPA)	Dihitung berdasarkan nilai 12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Kementerian Keuangan	Tahunan	
SK- 11.2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Pelaksana Teknis	1. Tingkat kualitas pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, dan pengelolaan ketatausahaan (%)	Dihitung dari frekuensi rata-rata penggunaan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) oleh pegawai di lingkungan Unit Pelaksana Teknis	Tahunan	

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja / Satuan	Jenis Indikator	Metode Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
		2. Tingkat penatausahaan Barang Milik Negara (%)	Dihitung dari persentase jumlah usulan penghapusan BMN yang telah diselesaikan dibandingkan total usulan penghapusan BMN	Tahunan	
		3. Tingkat kualitas pengelolaan administrasi kepegawain (%)	Dihitung dari persentase jumlah dokumen kepegawain yang diusulkan dibandingkan dengan dokumen kepegawain yang diproses lebih lanjut	Tahunan	

2. Direktorat Jenderal Bina Marga

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SS 2 Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional	Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau	Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km)	Waktu tempuh diperoleh dari hasil pengamatan kecepatan rata-rata perjalanan yang dilakukan pada koridor-koridor terpilih dan dikelompokkan untuk masing-masing rute berdasarkan kondisi topografi, lebar dan perkerasan (standar) jalan, volume lalu lintas dan lain-lain. Hasil perhitungan waktu tempuh secara agregat dapat ditampilkan menurut koridor dan pulau dengan menjumlahkan hasil perkalian waktu tempuh masing-masing rute/koridor dengan masing-masing jarak dan membaginya dengan total jarak koridor atau pulau (re-rata tertimbang).	Kumulatif, meningkat setiap tahun nya	Internal dan survey

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SP 2 Infrastruktur Konektivitas	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	1. Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional 2. Rating Kondisi Jalan Nasional 3. Rating keselamatan jalan nasional	Tingkat kinerja pelayanan jalan nasional dikatakan tercapai apabila pada akhir ahun 2024, Tingkat aksesibilitas jalan nasional adalah 87,9 persen, Rating kondisi jalan nasional 2,5 dan rating keselamatan jalan nasional adalah 2,82. 1. Indikator 1: Persentase realisasi pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional pertahun, dibagi target pertahun, dikali 100%. 2. Indikator 2: Nilai realisasi gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional, dibagi target pertahun, dikali 100%. 3. Indikator 3: Nilai realisasi gabungan	Kumulatif, meningkat setiap tahun nya	Internal dan survey

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			antara angka kecelakaan per populasi dan dan jumlah titik blackspot per populasi, dibagi target pertahun, dikali 100%.		
SK 01 Peningkatan Pelaksanaan Preservasi dan Tingkat Kapasitas Jalan	Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator-indikator sebagai berikut: 1. Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional 2. Rating Kondisi Jalan Nasional 3. Rating Keselamatan Jalan Nasional	Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari rata-rata seluruh indikator, dengan total target 100%. Indikator kinerja kegiatan ini akan tercapai apabila rata rata realisasi indikator penyusun di bawahnya tercapai sesuai target (dalam persen). [Nilai target pada masing masing indikator, mengikuti target SP]	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Data survey
SK 02 Pencapaian pengaturan, pengusahaan dan pengawasan jalan	Tingkat pencapaian pembangunan jalan bebas	Panjang Jalan Tol yang beroperasi	Indikator kinerja kegiatan dihitung dari persen realisasi jalan tol beroperasi baik pertahun	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Data survey dan Data internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	tol	hambatan		maupun di akhir tahun 2024 (100%).		
SK 03	Peningkatan pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan jalan dan jembatan	Tingkat kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan	Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator-indikator sebagai berikut: 1. Tingkat implementasi perencanaan penyelenggaraan jalan 2. Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP	Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari rata-rata seluruh indikator, dengan total target 100%. Indikator kinerja kegiatan ini akan tercapai apabila rata-rata realisasi indikator penyusun di bawahnya tercapai sesuai target (dalam persen). 1. Indikator 1: Terdiri dari kegiatan • Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan di bidang keterpaduan sistem jaringan jalan dan jembatan, yang diwujudkan dalam strategi program dan anggaran	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Data survey dan Data internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			penyelenggaraan jalan dan jembatan • Pelaksanaan pembinaan, dan penyusunan tatalaksana dan evaluasi terhadap penanganan jalan dan jembatan daerah yang didanai APBN. • Pembinaan dan penatalaksanaan kerja sama luar negeri Dihitung dari realisasi implementasi perencanaan penyelenggaraan jalan, dibagi target pertahun, dikali 100%. 2. Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP: Dilakukan dengan pelaksanaan pelaporan kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Interim		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			maupun Laporan Kinerja Tahunan. Dihitung dari realisasi Nilai penyelenggaraan SAKIP, dibagi target pertahun, dikali 100%.		
	Tingkat layanan penanggulangan darurat akibat bencana	Tingkat Penyaluran Bantuan Tanggap Bencana	Pengukuran indikator ini di dasarkan pada layanan yang diberikan terhadap penyaluran bantuan tanggapan bencana. Layanan yang dimaksud berupa: • Perumusan kebijakan penanganan bencana • Pelaksanaan koordinasi penanganan bencana; dan • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanganan bencana	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			Dihitung dari realisasi pelaksanaan dukungan penanggulangan darurat akibat rencana per tahun, dibagi target pertahun, dikali 100%.		
	Tingkat pencapaian pembangunan jalan	Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator-indikator sebagai berikut: 1. Panjang jalan yang dibangun 2. Panjang jalan yang dilebarkan (14 m)	Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari rata-rata seluruh indikator, dengan total target 100%. Indikator kinerja kegiatan ini akan tercapai apabila rata rata realisasi indikator penyusun di bawahnya tercapai sesuai target (dalam persen). 1. Indikator 1: Panjang jalan terbangun yang di atur dan dibina, dibagi target pertahun, dikali 100% 2. Indikator 2: Panjang jalan dilebarkan (14 m) yang di atur dan dibina,	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Data survey dan Data internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			dibagi target pertahun, dikali 100%.		
	Tingkat pencapaian kualitas kondisi jalan dan jembatan wilayah I	Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator-indikator sebagai berikut: 1. Rating kondisi jalan 2. Presentase jembatan dalam kondisi baik	Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari rata-rata seluruh indikator, dengan total target 100%. Indikator kinerja kegiatan ini akan tercapai apabila rata rata realisasi indikator penyusun di bawahnya tercapai sesuai target (dalam persen). 1. Indikator 1: memiliki target dan cara perhitungan yang sama dengan SP 2. Indikator 2: Target total di akhir tahun 2024 adalah 99%. Diperoleh dari persen kondisi jembatan dalam kondisi baik terhadap seluruh panjang jembatan pada ruas jalan nasional baik	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Data survey dan Data internal
	Tingkat pencapaian kualitas kondisi jalan dan jembatan wilayah II	Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator-indikator sebagai berikut: 1. Rating kondisi jalan 2. Presentase jembatan dalam kondisi baik	1. Indikator 1: memiliki target dan cara perhitungan yang sama dengan SP 2. Indikator 2: Target total di akhir tahun 2024 adalah 99%. Diperoleh dari persen kondisi jembatan dalam kondisi baik terhadap seluruh panjang jembatan pada ruas jalan nasional baik		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			di wilayah I maupun di wilayah II.		
	Tingkat pencapaian pembangunan jembatan	Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator-indikator sebagai berikut: 1. Panjang jembatan yang dibangun 2. Panjang Fly Over/Underpass Terbangun	Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari rata-rata seluruh indikator, dengan total target 100%. Kegiatan peningkatan pengaturan dan pembinaan pembangunan jembatan akan tercapai apabila rata rata realisasi indikator penyusun di bawahnya tercapai sesuai target (dalam persen). 1. Indikator 1: Capaian Panjang jembatan dibangun yang diatur dan dibina, dibagi target pertahun, dikali 100%. Indikator 2: Capaian panjang FO/UP terbangun yang di atur dan dibina,	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Data survey dan Data internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			dibagi target pertama, dikali 100%.		
	Tingkat pencapaian pembangunan jalan bebas hambatan	Panjang Jalan Tol yang beroperasi	Indikator kinerja kegiatan dihitung dari persen realisasi jalan tol beroperasi baik pertama maupun di akhir tahun 2024 (100%).	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Data survey dan Data internal
	Tingkat kualitas layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator-indikator sebagai berikut: 1. Persentase NSPK bidang Jalan dan Jembatan yang diterbitkan 2. Pencapaian rating keselamatan jalan 3. Tingkat kualitas data dan sistem informasi jalan dan jembatan	Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari rata-rata seluruh indikator, dengan total target 100%. Indikator kinerja kegiatan ini akan tercapai apabila rata-rata realisasi indikator penyusun di bawahnya tercapai sesuai target (dalam persen). Pada target indikator kinerja kegiatan 1, 3, dan 4 memiliki target pertama 100%.	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Data survey dan Data internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		4. Tingkat fasilitasi layanan peningkatan kompetensi fungsional	sedangkan ada kegiatan 2, memiliki target yang sama dengan SP (Sasaran Program).		
	Tingkat pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator-indikator sebagai berikut: 1. Teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan 2. Tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknik	Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari rata-rata seluruh indikator, dengan total target 100%. Indikator kinerja kegiatan ini akan tercapai apabila rata-rata realisasi indikator penyusun di bawahnya tercapai sesuai target (dalam persen). 1. Indikator 1: jumlah dokumen teknologi bidang jalan dan jembatan yang dikembangkan yang dihasilkan, dibagi 4 dokumen (target per tahun), dikali 100% 2. Indikator 2: jumlah dokumen fasilitasi	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Data survey dan Data internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			pengujian laboratorium dan advis Teknik yang dihasilkan, dibagi 4 dokumen (target pertama), dikali 100 %.		
	Tingkat kepatuhan internal dalam penyelenggaraan jalan	Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator-indikator sebagai berikut: 1. Presentase NSPK pembinaan dan pengendalian kepatuhan intern yang diterbitkan 2. Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan SIP 3. Tingkat pelayanan pengaduan masyarakat	Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari rata-rata seluruh indikator, dengan total target 100%. Indikator kinerja kegiatan ini akan tercapai apabila rata-rata realisasi indikator penyusun di bawahnya tercapai sesuai target (dalam persen). Indikator 1: Jumlah NSPK yang diterbitkan dibagi jumlah NSPK yang seharusnya diterbitkan (10 dokumen pertama) dikali 100%.	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Data survey dan Data internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				Indikator 2: Ketepatan waktu sesuai dengan Permen PUPR tentang SPIP (ketepatan waktu = 100% ; penilaian oleh Itjen) Indikator 3. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah pengaduan masyarakat seluruhnya dikali 100%.		
SS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Strategis kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Program kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SK	Peningkatan efektifitas dan	1. Indikator Kinerja	Merupakan indikator komposit/ gabungan	Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari	Rata-Rata pencapaian	Data survey dan Data internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	efisiensi tata kelola penyelenggaraan jalan (Seditjen Bina Marga)	Pelaksanaan Anggaran 2. Tingkat Fasilitas Produk Hukum dan Advokasi Hukum 3. Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara 4. Tingkat Pelayanan Kepegawaian DJBM	dari indikator-indikator sebagai berikut: 1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2. Tingkat Fasilitas Produk Hukum dan Advokasi Hukum 3. Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara 4. Tingkat Pelayanan Kepegawaian DJBM	rata-rata seluruh indikator, dengan total target 100%. Indikator kinerja kegiatan ini akan tercapai apabila rata rata realisasi indikator penyusun di bawahnya tercapai sesuai target (dalam persen). 1. Indikator 1: nilai IKPA yang diperoleh, dibagi target pertahun, dikali 100%. 2. Indikator 2: Jumlah dokumen regulasi yang diterbitkan, dibagi target pertahun, dikali 100%. Target di akhir tahun 2024 adalah 22 dokumen regulasi. 3. Indikator 3: jumlah provinsi yang diberikan layanan, dibagi 34 provinsi , dikali 100%. 4. Indikator 5: jumlah orang yang diberikan	persen setiap tahun	

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				pelayanan publik (PNS dan Non PNS) dibagi target orang terlayani pertahun, dikali 100%		

3. Direktorat Jenderal Cipta Karya

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SS 3 SASARAN STRATEGIS 3: Meningkatkan Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i> (DJCK)	Indikator Komposit/Gabungan	Indikator Kinerja SS Kontribusi kinerja indikator 1 (DJCK): indikator 2 (DJP & DJPI) = 50% : 50%	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Internal
SP 3.1 Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i> ---- dihitung dari rerata gabungan indikator:	Indikator Komposit/Gabungan	Indikator Kinerja SP Kontribusi kinerja indikator 8 (DJCK) : indikator 2 (DJP) : indikator 1 (DJPI) = 50% : 25% : 25% Indikator Kinerja SP Rata-rata penjumlahan dari Indikator 1, indikator 2, indikator 3, indikator 4, indikator 5, indikator 6, dan indikator 7 Sesuai angka BPS	Kumulatif, Peningkatan setiap tahun	Internal
	1. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak			Kumulatif, peningkatan setiap tahun	

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	2. Persentase rumah tangga dengan akses air limbah domestik layak dan aman		Sesuai angka BPS	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	
	3. Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang dikelola di perkotaan		Sesuai angka BPS	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	
	4. Persentase luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya		Indikator terpilih dari Persentase peningkatan kualitas kawasan permukiman	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	
	5. Persentase kab/kota yang terfasilitasi implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal		Indikator terpilih dari Persentase kab/kota yang terfasilitasi implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	
	6. Persentase inisiasi penerapan bangunan gedung hijau		Indikator terpilih dari Persentase dukungan pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	7. Persentase sarana prasarana strategis yang ditingkatkan kualitasnya		Komposit dari rata-rata jumlah nilai kinerja SK 1.3 dan SK 2.1	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	
KEGIATAN 1: PENYELENGGARAAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN GEDUNG					
SK 1.1 Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan kualitas kawasan permukiman	Persentase peningkatan keterpaduan perencanaan dan kualitas kawasan permukiman ---- dihitung dari rerata gabungan indikator:		Indikator Kinerja Kegiatan: Penjumlahan dari Indikator 1 dikalikan dengan 50% dan Indikator 2 dikalikan dengan 50%	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal
	1. Persentase dokumen perencanaan pembangunan kawasan permukiman	Tunggal dari 1 output	Indikator 1: Jumlah dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman pada tahun tersebut dibagi dengan total target pada 2024 dikalikan 100%	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal
	2. Persentase peningkatan kualitas kawasan permukiman	Komposit dari 2 output	Indikator 2: Jumlah Luas pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan Luas pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat pada tahun tersebut	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				dibagi dengan total target pada 2024 dikalikan 100%		
SK-1.2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan ---- dihitung dari rerata gabungan indikator:	Merupakan indikator komposit/gabungan dari indikator sbb: 1.Persentase kab/kota yang terfasilitasi implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal 2.Persentase dukungan pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung 3.Persentase dukungan pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	Indikator Kinerja Kegiatan: Penjumlahan dari Indikator 1 dikalikan dengan 50%, Indikator 2 dikalikan dengan 25%, dan indikator 3 dikalikan 25%	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	
SK 1.3	Meningkatnya kualitas sarana prasarana olahraga dan pasar	Persentase peningkatan kualitas sarana prasarana olahraga dan pasar yang tertib dan andal --- dihitung dari rerata gabungan indikator:	Merupakan indikator komposit/gabungan dari indikator sbb: 1. Persentase sarana prasarana olahraga yang tertib dan andal 2. Persentase sarana prasarana pasar yang tertib dan andal 3. Persentase sarana prasarana strategis lainnya yang tertib dan andal	Indikator Kinerja Kegiatan: Rata-rata jumlah Indikator 1, Indikator 2, dan Indikator 3 Catatan : Yang dihitung hanya Gedung yang menjadi tanggung jawab PUPR saja karena masing-masing sarana strategis memiliki Pembina.	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal
		Persentase sarana prasarana olahraga yang tertib dan andal	Tunggal dari 1 output	Indikator 1 : Jumlah gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana olahraga dibagi dengan total target pada 2024 dikalikan 100%	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		Persentase sarana prasarana pasar yang tertib dan andal	Tunggal dari 1 output	Indikator 2 : Jumlah pasar yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pasar dibagi dengan total target pada 2024 dikalikan 100%	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal
		Persentase sarana prasarana strategis lainnya yang tertib dan andal	Tunggal dari 1 output	Indikator 3 : Jumlah gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana strategis lainnya dibagi dengan total target pada 2020-2024 dikalikan 100%	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal
KEGIATAN 2: PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PRASARANA PENDIDIKAN						
SK 2.1	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan	Persentase peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan yang tertib dan andal -- - dihitung dari indikator:	Tunggal	Indikator Kinerja Kegiatan: Mengadopsi langsung nilai Persentase sarana prasarana pendidikan yang tertib dan andal Catatan : Yang dihitung hanya Gedung yang menjadi tanggung jawab PUPR saja karena masing-masing sarana strategis memiliki Pembina.	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		Persentase sarana prasarana pendidikan yang tertib dan andal	Komposit/ Gabungan dari 4 output	Jumlah gedung pendidikan dasar dan menengah, madrasah dan sekolah keagamaan, perguruan tinggi negeri, dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang mendapatkan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana ditambah jumlah gedung pembangunan baru pendidikan dasar dan menengah, Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan) dibagi dengan total target pada 2024 dikalikan 100%	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal
KEGIATAN 3: PENYELENGGARAAN AIR MINUM YANG LAYAK						
SK 3	Meningkatnya kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan	Persentase peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan --- dihitung dari indikator: Persentase rumah tangga dengan akses air minum Jaringan Perpipaan (JIP)	Indikator komposit/gabungan dari kegiatan SPAM	Indikator Kinerja Kegiatan: Dihitung berdasarkan jumlah Sambungan Rumah (SR) yang dibangun/dipasang (asumsi 1 SR = 1 Rumah Tangga/RT), diakumulasikan dengan jumlah RT yang telah terlayani air minum jaringan perpipaan sampai dengan tahun	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal dan BPS

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				sebelumnya, kemudian dibagi dengan jumlah RT nasional		
KEGIATAN 4: PENYELENGGARAAN SANITASI YANG LAYAK						
SK 4	Meningkatnya kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Persentase peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi --- dihitung pada masing-masing indikator:	Merupakan indikator komposit/gabungan dari indikator sbb: 1. Persentase rumah tangga yang terlayani prasarana dan sarana air limbah domestik layak dan aman 2. Persentase rumah tangga yang sampahnya terkelola (baik melalui penanganan maupun pengurangan) di perkotaan 3. Persentase rumah tangga yang	Indikator Kinerja Kegiatan: Dihitung pada masing-masing indikator : Jumlah KK yang terlayani dibagi jumlah KK nasional dikalikan 100%	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal, STHM, dan BPS

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			yang terlayani infrastruktur drainase lingkungan			
		Persentase peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi --- dihitung pada masing-masing indikator:	Merupakan indikator komposit/gabungan dari indikator sbb: 1. Persentase rumah tangga yang terlayani prasarana dan sarana air limbah domestik layak dan aman 2. Persentase rumah tangga yang sampahnya terkelola (baik melalui penanganan maupun pengurangan) di perkotaan 3. Persentase rumah tangga yang	Indikator Kinerja Kegiatan: Dihitung pada masing-masing indikator : Jumlah KK yang terlayani dibagi jumlah KK nasional dikalikan 100%	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal, STHM, dan BPS

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		terlayani infrastruktur drainase lingkungan			
	1. Persentase rumah tangga yang terlayani prasarana dan sarana air limbah domestik layak dan aman	Indikator terpisah dari kegiatan penanganan air limbah domestik yang terdiri dari: - Indikator 1: Persentase rumah tangga dengan akses layak - Indikator 2: Persentase rumah tangga dengan akses aman	- Indikator 1 : dihitung berdasarkan jumlah KK dengan akses air limbah domestik layak di tahun N-1 ditambah kapasitas infrastruktur pengolahan air limbah domestik setempat (tangki septik) dan terpusat (IPALD Regional, Kota, Permukiman) yang terbangun (KK) di tahun N dibagi dengan total KK di tahun N - Indikator 2 : dihitung berdasarkan jumlah KK dengan akses air limbah domestik aman di tahun N-1 ditambah kapasitas infrastruktur pengolahan air limbah domestik setempat (IPLT) dan terpusat (IPALD Regional, Kota, Permukiman) yang terbangun (KK) di	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal dan BPS

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			tahun N dibagi dengan total KK di tahun N		
	2. Persentase rumah tangga yang sampahnya terkelola (baik melalui penanganan maupun pengurangan) di perkotaan	Indikator terpilih	Dihitung berdasarkan jumlah KK dengan akses sampah terkelola di perkotaan di tahun N-1 ditambah kapasitas infrastruktur pengolahan persampahan (WTE, TPA, TPST, TPS3N) yang terbangun (KK) di tahun N dibagi dengan total KK perkotaan di tahun N	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal dan BPS
	3. Persentase rumah tangga yang terlayani infrastruktur drainase lingkungan	Indikator terpilih	Dihitung berdasarkan jumlah KK yang terlayani infrastruktur drainase lingkungan di tahun N dibagi dengan total target KK yang perlu dilayani selama 5 tahun	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal
KEGIATAN 5: PENYELENGGARAAN PEMBINAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN					
SK 5.1	Meningkatnya kinerja perencanaan, penrograman, dan evaluasi infrastruktur permukiman	Persentase peningkatan kinerja perencanaan, penrograman, dan evaluasi infrastruktur permukiman ---- dihitung dari rerata gabungan indikator;	Merupakan indikator komposit/gabungan dari indikator sbb: 1. Tingkat implementasi perencanaan penyelenggaraan	Indikator Kinerja Kegiatan: Dihitung dari rata-rata jumlah 3 (tiga) indikator yaitu indikator 1, indikator 2 dan indikator 3	Non kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun.

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		infrastruktur permukiman 2. Nilai kinerja anggaran 3. Nilai realisasi penyiapan kegiatan kerjasama dan bantuan luar negeri			
	1. Tingkat implementasi perencanaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman	Tunggal	Indikator 1: Jumlah rencana pembangunan infrastruktur permukiman yang diimplementasikan (tahunan) dibagi jumlah rencana pembangunan infrastruktur permukiman dalam Renstra (tahunan) dikalikan 100%	Non kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun.	Internal
	2. Nilai kinerja anggaran	Tunggal	Indikator 2 : Pengukuran mengacu pada peraturan terkait Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L	Non kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun.	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		3. Nilai realisasi penyajian kegiatan kerjasama dan bantuan luar negeri	Tunggal	Indikator 3 : Jumlah kegiatan yang masuk ke dalam green book dibagi jumlah kegiatan yang ditetapkan dalam blue book dikalikan 100%	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal
SK 5.2	Terlaksananya Dukungan Layanan Kebencanaan Bidang Permukiman (berada di Setditjen Cipta Karya)	Persentase dukungan layanan kebencanaan bidang permukiman --- dihitung dari indikator: Persentase dukungan layanan tanggap bencana bidang permukiman	Tunggal dari 1 output	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah paket/laporan tanggap darurat/kebutuhan mendesak dibagi pada tahun tersebut dengan total target pada 2024 dikalikan 100%	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal
SK 5.3	Meningkatnya kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan infrastruktur permukiman	Persentase peningkatan kualitas pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perumahan dan infrastruktur permukiman --- dihitung dari rerata-gabungan indikator:	Merupakan indikator komposit /gabungan dari indikator sbb: 1. Persentase NSPK bidang permukiman dan perumahan 2. Persentase rekomendasi teknis keandalan bangunan	Indikator Kinerja Kegiatan: Rerata dari nilai indikator 1 indikator 2, indikator 3 dan indikator 4	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Indikator 1, 2, 3 dan 4: Data Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			gedung dan kawasan permukiman 3. Persentase penyediaan data dan sistem informasi yang berkualitas 4. Persentase dukungan pengembangan kompetensi dan kontribusi jabatan fungsional bidang permukiman			
		Persentase NSPK bidang permukiman dan perumahan	Tunggal dari 1 output	Indikator 1 : Jumlah NSPK yang diterbitkan dibandingkan dengan target 2024 dikalikan 100%	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal
		Persentase rekomendasi teknis keandalan bangunan gedung dan kawasan permukiman	Tunggal dari 1 output	Indikator 2 : Jumlah rekomendasi teknis yang dapat terlayani dibanding permintaan rekomendasi teknis yang masuk dikalikan 100%	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		Persentase penyediaan data dan sistem informasi yang berkualitas	Tunggal dari 1 output	Indikator 3 : Jumlah layanan data dan sistem informasi dari: • Pembinaan terhadap pengelolaan infrastruktur teknologi informasi pada Unit Kerja dan Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan • Pelaksanaan interoperabilitas data dan informasi terhadap aplikasi dan sistem informasi Direktorat Jenderal Cipta Karya; dikalikan 100%	Non-Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal
		Persentase dukungan pengembangan kompetensi dan kontribusi jabatan fungsional bidang permukiman	Tunggal dari 1 output	Indikator 4 : Jumlah JFT bidang Cipta Karya yang mendapatkan pengembangan profesi dibandingkan Jumlah total JFT bidang Cipta Karya dikalikan 100%	Kumulatif, peningkatan setiap tahun	Internal
SK 5.4	Meningkatnya kepatuhan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman	Persentase peningkatan kepatuhan intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman --- dihitung dari rerata	Merupakan indikator komposit /gabungan dari indikator sbb: 1. Persentase pembinaan dan pengembangan	Indikator Kinerja Kegiatan:	Kumulatif, penambahan setiap tahun	Indikator 1 dan 2: Data Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		gabungan indikator:	kepatuhan intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman 2. Persentase pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman			
		1. Persentase pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman	Tunggal	Indikator 1 dihitung dari rerata jumlah bahan kebijakan teknis, pembinaan teknis, serta kerangka kerja kepatuhan intern dan manajemen risiko dibagi dengan target 2024 dikalikan 100%	Kumulatif, penambahan setiap tahun	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		2. Persentase pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman	Tunggal	Indikator 2 dihitung dari rerata jumlah bahan pengendalian serta pemantauan kepatuhan intern dan manajemen risiko dibagi dengan target 2024 dikalikan 100%	Kumulatif, penambahan setiap tahun	Internal
SS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Strategis esekretariat Kementerian PUPR)			
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Program esekretariat Kementerian PUPR)			
SK	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan infrastruktur permukiman	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan	Tunggal	Indikator 1 dihitung dari penjumlahan: a. Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas/Jumlah Seluruh Unit Kerja	Non kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun.	Indikator 1, 2, 3 dan 4; Data Internal.

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		Pengelolaan Ketatausahaan		b. Persentase Pembinaan Kearsipan = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan/Jumlah Seluruh Unit Kerja c. Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) = Jumlah Usulan Penghapusan BMN yang telah diselesaikan/ Total Usulan Penghapusan BMN. (Bobot Total: 25%) d. Persentase terselenggaranya Administrasi Korespondensi – Jumlah Koresponden yang Diselesaikan/Jumlah Seluruh Koresponden		
		Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	Tunggal	Indikator 2 dihitung dari jumlah produk hukum yang diterbitkan dibagi dengan jumlah produk hukum yang seharusnya diterbitkan (dalam proleg Kemen PUPR) dikali 100%.	Non kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun.	
		Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan	Tunggal	Indikator 3 dihitung dari survey kepada Pegawai terkait ketepatan perencanaan pegawai, transparansi rekrutmen,	Non kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun.	

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	Pengadministrasian Pegawai		ketepatan layanan administrasi Kepegawaian		
	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Tunggal	Indikator 4 dihitung berdasarkan nilai 12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Kementerian Keuangan.	Non kumulatif dihitung hasilnya setiap tahun.	

4. Direktorat Jenderal Perumahan

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman					
SS: Meningkatkan penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	IKSS (02), merupakan indikator tunggal dalam bentuk persentase (%)	Indikator Kinerja SS Kontribusi kinerja indikator 1 (DJCK) : indikator 2 (DJP & DJPI) = 50% : 50% IKSS (02), dihitung berdasarkan proporsi perbandingan (persentase) penangan perumahan yang dilaksanakan oleh DJP dan DJPI terhadap target nasional (11.000.000 unit rumah untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak menjadi 70%). Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja, sebagai berikut: $+ \left(\left(\frac{Y - W}{X - W} \right) \times 100 \right) \times (X - Y)$ Keterangan: A: Capaian Kinerja (%)		Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			V: Jumlah RLH yang dibangun oleh DJP (unit) W: Jumlah rumah yang mendapat bantuan subsidi perumahan dari DJPI (unit) X: Target persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2024 (70%) Y: Baseline persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2019 (56,1%)		
SP: Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	IKSP (02.a), Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	IKSP (02.a), merupakan indikator tunggal dalam bentuk persentase (%) Menyumbang bobot 12,5% terhadap Indikator Kinerja Sasaran Program Sektor Perumahan dan Permukiman.	Indikator Kinerja SP Kontribusi kinerja indikator 8 (DJCK) : indikator 2 (DJP) : indikator 1 (DJPI) = 50% : 25% : 25% IKSP (02.a) dihitung berdasarkan berdasarkan proporsi perbandingan (persentase) penanganan perumahan yang dilaksanakan oleh DJP terhadap target nasional (11.000.000 unit rumah		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak menjadi 70%. Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja, sebagai berikut: $+ \left(\left(\frac{Y(V)}{X(V)} \right) \cdot 100 \right) \cdot (X - V)$ Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) V: Jumlah RLIH yang dibangun oleh DJP (unit) X: Target persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2024 (70%) Y: Baseline persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2019 (56,1%) IKSP (02.b) dihitung berdasarkan perbandingan (persentase) jumlah rumah umum yang mendapat bantuan PSU pada setiap tahunnya dengan target jumlah rumah umum yang		
		IKSP (02.b), Jumlah rumah umum yang mendapat bantuan PSU	IKSP (02.b), merupakan indikator tunggal dalam bentuk persentase (%) Menyumbang bobot 12,5% terhadap	IKSP (02.b) dihitung berdasarkan perbandingan (persentase) jumlah rumah umum yang mendapat bantuan PSU pada setiap tahunnya dengan target jumlah rumah umum yang		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			Indikator Kinerja Sasaran Program Sektor Perumahan dan Permukiman.	mendapat bantuan PSU hingga tahun 2024 (262.345 unit). Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja, sebagai berikut: $A = \frac{X(X)}{262.345} \cdot 100$ Keterangan: A: Capaian kinerja (%) X: Jumlah rumah umum yang mendapat bantuan PSU (unit)		
SK-01	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Komposit dari indikator: (1) Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Fasilitas Rumah Swadaya bagi MBR (2) Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang	- Indikator 1 merupakan indikator tunggal dalam bentuk jumlah (unit) - Indikator 2 merupakan indikator tunggal dalam bentuk jumlah (unit) - Indikator 3 merupakan indikator tunggal	Indikator 1 dihitung berdasarkan kumulatif jumlah rumah swadaya yang dibangun oleh DJP pada tahun tertentu dengan target penanganan rumah swadaya 2020-2024. Skema bantuan rumah swadaya adalah sebagai berikut: (1) Bantuan perumahan swadaya sejahtera;		Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		layak huni melalui melalui Pembangunan Rumah Khusus (3) Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Pembangunan Rumah Susun	dalam bentuk jumlah (unit)	(2) Bantuan stimulant perumahan swadaya; dan (3) Bantuan perumahan swadaya sejahtera - Indikator 2 dihitung berdasarkan kumulatif jumlah rumah khusus yang dibangun oleh DJP pada tahun tertentu. - Indikator 3 Dihitung berdasarkan kumulatif jumlah rumah susun yang dibangun oleh DJP		
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Strategis kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Program kesekretariatan Kementerian PUPR)			

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		dan tugas teknis lainnya				
SK 02	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	Tingkat efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1: 1. Tingkat Penatausahaan Barang Milik Negara 2. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran 3. Tingkat Penatausahaan Barang Persediaan Bencana 4. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum 5. Tingkat Layanan Advokasi Hukum 6. Tingkat Layanan Komunikasi Publik 7. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan	Dihitung berdasarkan rata-rata indikator sebagai berikut: Output 1: Persentase jumlah usulan Penghapusan BMN yang telah diselesaikan/Total Usulan Penghapusan BMN Output 2: Dihitung berdasarkan nilai 12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Kementerian Keuangan, yaitu: 1. Penyerapan Anggaran (bobot nilai 15%), 2. Data kontrak (bobot nilai 15%), 3. Penyelesaian tagihan (bobot nilai 12%), 4. Konfirmasi output (bobot nilai 10%),		Internal dan eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai 8. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, dan Pengelolaan Ketatausahaan	5. Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan uang persediaan (bobot nilai 8%), 6. Revisi DIPA (bobot nilai 5%), 7. Deviasi Halaman III DIPA (bobot nilai 5%), 8. LPJ bendahara (bobot nilai 5%), 9. Perencanaan kas (bobot nilai 5%), 10. Kesalahan surat perintah membayar (bobot nilai 5%), 11. Retur surat perintah pencairan dana (bobot nilai 5%), 12. Pagu minus (bobot nilai 5%), 13. Dispensasi SPM (bobot nilai 5%). Output 3:		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				Persentase jumlah Balai Perumahan yang mendapat pembinaan/penatanusahaan barang persediaan bencana Output 4: Persentase jumlah produk hukum yang diterbitkan dibagi dengan jumlah produk hukum yang seharusnya diterbitkan (dalam proleg Kementerian PUPR) Output 5: Persentase jumlah layanan advokasi hukum dalam 1 tahun dibagi dengan permintaan advokasi hukum pada tahun tersebut Output 6: Survey Kepada counterpart dan masyarakat kepuasan layanan komunikasi publik Ditjen Perumahan		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			Output 7: Survey Kepada Pegawai terkait, kepuasan pembinaan jabatan fungsional, pelatihan, dan ketepatan layanan administrasi Kepegawaian Output 8: dihitung dari penjumlahan: a. Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas/Jumlah Seluruh Unit Kerja b. Persentase Pembinaan Kearsipan = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan/Jumlah Seluruh Unit Kerja c. Persentase terselenggaranya Administrasi Korespondensi – Jumlah Koresponden yang		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			Diselesaikan/Jumlah Seluruh Koresponden		
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal: Jumlah layanan internal	Jumlah layanan internal		
		Layanan dukungan manajemen satker: Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan	Jumlah layanan umum, rumah tangga, dan perlengkapan		
		Layanan Perkantoran: Jumlah layanan gaji dan tunjangan Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	• Jumlah layanan gaji dan tunjangan • Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran		

5. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
SS Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	1. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan Dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif	IKSS, merupakan nilai komposit dari indikator 1. Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat ketersediaan investasi/pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)	IKSS, dihitung pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) abb: Indikator 1 (30%) Survey Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, berdasarkan dibandingkan dengan target. Indikator 2 (70%) Nilai investasi/pembiayaan KPBK yang dihasilkan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, jalan dan Jembatan,		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				Permukiman dan Perumahan (Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan) dibandingkan dengan target.		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SP 01	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	1. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	IKSP, merupakan nilai komposit dari indikator 1. Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 2. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang siap dikerjasamakan (%)	IKSP2, dihitung pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (30%) 1. Survey Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target. Indikator 2 (70%) 2. Dihitung berdasarkan jumlah paket KPBU yang siap dikerjasamakan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (readisasi)		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				jumlah Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan)		
SK 01	Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem,	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi	Komposit dari indikator-Indikator Sbb: 1. Tingkat implementasi	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:		Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Dit. Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan)	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	kegiatan pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan kepatuhan internal dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%) 3. Tingkat implementasi kegiatan penyelenggaraan SAKIP (%)	Indikator 1 (40%) - Jumlah rekomendasi Kebijakan, Strategi, Program dan pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (20%) - Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) - Jumlah fasilitas kerjasama pembiayaan perumahan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (20%) - Jumlah NSFPK Pembiayaan		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) - Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (20%) Indikator 2 (30%) - Jumlah Laporan Kepatuhan Internal di Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (50%)		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SK O2 Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air: 1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi	Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Profil Risiko KPRBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target (50%) Indikator 3 (30%) Penilaian dari Kementerian PAN dan RB Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air sbb: Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air yang disusun dibandingkan dengan target		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			Paket Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (%)	Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Sumber Daya Air yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target		
		2. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan: 1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan sbb: Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang disusun dibandingkan dengan target Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Infrastruktur Jalan dan		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				Jembatan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target		
		3. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman: 1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman sbb: Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman yang disusun dibandingkan dengan target Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Infrastruktur Permukiman yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		4. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	Komposit dari Indikator-Indikator Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan: 1. Tingkat implementasi kegiatan perencanaan dan penyiapan Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%) 2. Tingkat implementasi kegiatan transaksi Paket Investasi Pembiayaan Perumahan (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Perumahan sbb: Indikator 1 (50%) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penyiapan Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target Indikator 2 (50%) Jumlah Proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target		Internal dan Eksternal
SS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Strategis Kesekretariatan Kementerian PUPR)			

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	(Mendukung Indikator Sasaran Program Kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SK 01	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Setditjen dan BLU PPDPT)	1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (15%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip (%) 2. Pelaksanaan Pelayanan Kerumahaan (%) 3. Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran (%) 4. Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi (%) 5. Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan (%) 6. Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan (%) 7. Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (15%): - Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola TNDE dan Arsip yang disusun dibandingkan dengan target (10%) - Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kerumahaan yang disusun dibandingkan dengan target (10%) - Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%)		Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			Pemeliharaan Kantor (%) 8. Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat (%)	- Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%) - Jumlah Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%) - Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (15%) - Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (10%)		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				Jumlah Layanan Pelaksanaan Operasionalisasi Perkantoran Direktorat yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (10%)		
		2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (15%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum (%) 2. Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama (%) 3. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 2 (15%): - Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Pendampingan Hukum yang disusun dibandingkan dengan target (30%) - Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama yang disusun dibandingkan dengan target (20%) - Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Peraturan		Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			Perundang-undangan yang disusun dibandingkan dengan target (50%)		
	3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (10%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (%) 2. Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi (%) 3. Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 3 (10%): 1. Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (25%) 2. Jumlah Laporan Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Organisasi yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (25%) 3. Jumlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Pegawai yang dikeluarkan dibandingkan dengan target (50%)		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (10%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi (%) 2. Laporan Kinerja yang disusun (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 4 (10%) 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi yang ditetapkan dibandingkan dengan target (50%) 2. Jumlah Laporan Kinerja yang disusun dibandingkan dengan target (50%)		
	5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (15%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun (%) 2. Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan yang disusun (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 5 (15%) 1. Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun dibandingkan dengan target (50%)		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Anggaran dan Perbendaharaan yang disusun dibandingkan dengan target (50%)		
	6. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik (10%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat (%) 2. Pelaksanaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 6 (10%) 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Pengaduan Masyarakat yang disusun dibandingkan dengan target (50%) 2. Jumlah Laporan Pelaksanaan Media Kreatif dan Penyebaran Informasi yang disusun dibandingkan dengan target (50%)		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	7. Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran yang memenuhi kebutuhan tugas teknis PPDP (10%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (%) 2. Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 7 (10%) 1. Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (50%) 2. Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (50%)		
	8. Tingkat pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis PPDP (15%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan (%) 2. Layanan Pelaksanaan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 8 (15%) 1. Jumlah Layanan Pengalokasian Gaji dan Tunjangan yang dilaksanakan		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		3. Layanan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (%)	dibandingkan dengan target (40%) 2. Jumlah Layanan Pelaksanaan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (30%) 3. Jumlah Layanan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang dilaksanakan dibandingkan dengan target (30%)		

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
SS	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	IKSS 2, merupakan indikator tunggal dalam bentuk persentase (%)	Indikator Kinerja SS Kontribusi kinerja indikator 1 (DJCK) : indikator 2 (DJP & DJPI) = 50% : 50% IKSS (02), dihitung berdasarkan proporsi	Internal dan eksternal (Bank dan Developer)

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			perbandingan (persentase) penanganan perumahan yang dilaksanakan oleh DJP dan DJPI terhadap target nasional (11.000.000 unit rumah untuk meningkatkan jumlah rumah tangga yang menghuni rumah layak menjadi 70%). Rumus yang digunakan untuk menghitung kinerja, sebagai berikut: $\left(\left(\frac{VP - W}{I} \right) \cdot 100 \right) \div n$ Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) V: Jumlah RLH yang dibangun oleh DJP (unit) W: Jumlah rumah yang mendapat bantuan subsidi perumahan dari DJPI (unit)		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				X: Target persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2024 (70%) Y: Baseline persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2019 (56,1%)		
SF 01	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	IKSP1, merupakan indikator Tunggal dalam bentuk prosentase (%)	IKSP1, dihitung berdasarkan jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dan fasilitas pembiayaan perumahan dibandingkan dengan target		Internal dan eksternal (Bank dan Developer)
SK 01	Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	1. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Prosentase Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitas Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan Sekunder dan Tapera (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (30%) Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Fasilitas Pembiayaan Perumahan Melalui Sumber Pembiayaan Primer, Sumber Pembiayaan		Internal dan eksternal (Bank, PT SMF dan BP Tapera)

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			2. Prosentase Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan (%) 3. Tingkat implementasi penyusunan kebijakan bantuan Pembiayaan Perumahan (%)	Sekunder dan Tapera dibandingkan dengan target. Indikator 2 (50%) Jumlah Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Pembiayaan Perumahan dibandingkan dengan target. Indikator 3 (20%) Jumlah Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Bantuan Pembiayaan Perumahan yang disusun dibandingkan dengan target.		
		2. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Prosentase Rumah Tangga yang Terfasilitasi kegiatan promosi, kerjasama dan Verifikasi (%)	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1 (50%) Jumlah Fasilitas Penyaluran FLPP yang dilaksanakan melalui		Internal dan Eksternal (Bank)

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			2. Prosentase Lembaga Jasa Keuangan hasil rekonsiliasi yang didukung kegiatan perencanaan, keuangan dan kinerja (%) 3. Tingkat implementasi kegiatan dukungan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan lainnya (%)	promosi, kerjasama dan verifikasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan target. Indikator 2 (25%) Jumlah Lembaga Jasa Keuangan yang direkonsiliasi dibandingkan dengan target. Indikator 3 (25%) Jumlah kegiatan dukungan yang dilaksanakan dibandingkan dengan target.		

6. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SS 5 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Tingkat keselarasan dukungan infrastruktur di kawasan strategis	Diperoleh dari jumlah Kawasan yang disepakati untuk didukung bersama oleh K/L terkait dibandingkan dengan jumlah kawasan - Ket: IKSS = Indikator Kinerja Sasaran Strategis a = Jumlah kawasan yang disepakati untuk didukung bersama oleh K/L terkait b = Jumlah prioritas kawasan yang ditargetkan dalam dokumen perencanaan	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun • Jumlah kawasan yang menjadi target adalah 249 kawasan prioritas	Internal dan survey

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SP Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman	Diperoleh dari jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dibandingkan dengan Jumlah Kawasan	Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman dikatakan tercapai apabila - Ket: IKSP = Indikator Kinerja Sasaran Program a = Jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR b = Jumlah Kawasan	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Internal dan survey
SK 01 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi tata kelola	Persentase peningkatan efektifitas dan efisiensi tata kelola	Merupakan indikator komposit/ gabungan dari	Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari penjumlahan dari	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Data survey dan Data

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
penyelenggaraan pengembangan infrastruktur Wilayah	pengembangan wilayah: 1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan 2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum 3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai 4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran 5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran	indikator-indikator sebagai berikut: 1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan 2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum 3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai 4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran	indikator-indikator sbb: <u>Indikator 1 (15%);</u> dihitung dari penjumlahan: a. Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas/Jumlah Seluruh Unit Kerja b. Persentase Pembinaan Kearsipan = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan/Jumlah Seluruh Unit Kerja c. Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) = Jumlah Usulan Penghapusan BMN yang telah		internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	6. Nilai SAKIP Unit Organisasi	5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran 6. Nilai SAKIP Unit Organisasi	diselesaikan/ Total Usulan Penghapusan BMN. d. Persentase terselenggaranya Administrasi Korespondensi – Jumlah Koresponden yang Diselesaikan/Jumlah Seluruh Koresponden Indikator 2 (15%): Jumlah produk hukum yang diterbitkan dibagi dengan jumlah produk hukum yang seharusnya diterbitkan (dalam proleg Kemen PUPR) dikali 100%. Indikator 3 (15%): Nilai survey kepada Pegawai terkait ketepatan perencanaan pegawai, transparansi		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			rekrutmen, ketepatan layanan administrasi Kepegawaian. Indikator 4 (20%): Dihitung berdasarkan nilai 12 indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (KPA) dari Kementerian Keuangan. Indikator 5 (15%): Mengacu PMK No. 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara/Lembaga Indikator 6 (20%):		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SK 02 Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR	Tingkat kesesuaian kebijakan dan strategi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. capaian Renstra dibandingkan dengan target Renstra Unor (ABCP) (30%); dan 2. persentase program arahan yang disepakati menjadi program <i>baseline</i> (70%)	1. Penilaian SAKIP Unor oleh tim evaluator Itjen Tingkat Pemanfaatan Kebijakan, Strategi Perencanaan dan Pemrograman dikatakan tercapai apabila: <u>Sub Indikator-1</u> = Ket: IKSK1-1 = Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Sub Indikator 1) a = capaian Renstra PUPR b = target Renstra Unor PUPR	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Data survey dan Data Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			<u>Sub Indikator 2 (70%)</u> = Ket: IKSK1-2 = Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Sub Indikator 2) c = jumlah program arahan yang menjadi program <i>baseline</i> d = jumlah program arahan		
	Tingkat kesesuaian pembangunan infrastruktur kawasan melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sumatera dan Kalimantan	Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sumatera dan Kalimantan (Non Komposit)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2 dihitung dari jumlah kawasan yang ditangani perencanaan dan pemrograman infrastrukturnya dibandingkan dengan jumlah kawasan, dikali	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun • Jumlah kawasan yang menjadi target adalah 249 kawasan prioritas • PJM harus teruji dengan melalui serangkaian pembahasan bersama	Data survey dan Data internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			100% = Ket: IKSK2 = Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Wilayah I) e1 =Jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sumatera dan Kalimantan f1 =Jumlah Kawasan Prioritas di Pulau Sumatera dan Kalimantan	para stakeholder terkait dan hasilnya diserahkan kepada Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (standar minimum disiapkan oleh Bidang Kepatuhan Intern) • PJM mencakup program-program yang terpetakan prioritisasinya serta strategi pembiayaannya (standar minimum disiapkan oleh Bidang Kepatuhan Intern)	

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	Tingkat kesesuaian pembangunan infrastruktur kawasan melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara	Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara (Non Komposit)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3 dihitung dari jumlah kawasan yang ditangani perencanaan dan pemrograman infrastrukturnya dibandingkan dengan jumlah kawasan, dikali 100% = Ket: IKSK2 = Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (Wilayah II) e2 =Jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun • Jumlah kawasan yang menjadi target adalah 249 kawasan prioritas • PJM harus teruji dengan melalui serangkaian pembahasan bersama para stakeholder terkait dan hasilnya diserahkan kepada Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (standar minimum disiapkan oleh Bidang Kepatuhan Intern) • PJM mencakup program-program yang terpetakan prioritisasinya serta strategi pembiayaannya (standar minimum disiapkan oleh Bidang	Data survey dan Data internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			PUPR di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara E2 = Jumlah Kawasan Prioritas di Pulau Jawa, Bali, dan Kep. Nusa Tenggara	Kepatuhan Intern)	
	Tingkat kesesuaian pembangunan infrastruktur kawasan melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku	Tingkat kesesuaian penanganan kawasan prioritas melalui perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku (Non Komposit)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4 dihitung dari jumlah kawasan yang ditangani perencanaan dan pemrograman infrastrukturnya dibandingkan dengan jumlah kawasan, dikali 100%. Ket: IKSK2 = Indikator Kinerja Sasaran	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun • Jumlah kawasan yang menjadi target adalah 249 kawasan prioritas • PJM harus teruji dengan melalui serangkaian pembahasan bersama para stakeholder terkait dan hasilnya diserahkan kepada Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (standar minimum disiapkan	Data survey dan Data internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			Kegiatan (Wilayah III) e3 = Jumlah kawasan yang ditangani dengan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku E3 = Jumlah Kawasan Prioritas di Pulau Sulawesi, Papua, dan Kep. Maluku	oleh Bidang Kepatuhan Intern) • PJM mencakup program-program yang terpetakan prioritisasinya serta strategi pembiayaannya (standar minimum disiapkan oleh Bidang Kepatuhan Intern)	

7. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasional					
SS Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional		Indikator Kinerja SS Kontribusi kinerja indikator DJBK: indikator BPSPDM = 50% : 50%. Indikator dihitung dari: jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang tersertifikasi dibagi target jumlah lulusan pelatihan vokasi seluruh K/L per tahun* * jumlah lulusan pelatihan vokasi seluruh K/L per tahun sebanyak 400.000 orang (Sumber data: Lampiran 1 Perpres Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024)		Internal dan Eksternal
SP Meningkatnya SDM vokasional bidang konstruksi	Tingkat SDM vokasional bidang konstruksi	Indikator survei penilaian terhadap	Indikator dihitung dari: jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang tersertifikasi per tahun		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
yang kompeten dan profesional	kompeten dan professional	pencapaian kinerja program (persentase)	dibagi potensi lulusan vokasi per tahun** Indikator Kinerja SP Kontribusi kinerja indikator DJHK: indikator HP81DM = 50% : 50%		
SK1 Peningkatan SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina	Indikator survei penilaian terhadap pencapaian kinerja kegiatan (persentase)	Indikator dihitung dari: target pelatihan vokasional bidang konstruksi per tahun dibandingkan dengan potensi lulusan vokasi per tahun** **potensi lulusan vokasional bidang konstruksi sebanyak 48.000 orang per tahun (Sumber data: Kemendikbud, 2019)		Internal dan Eksternal
Program Dukungan Manajemen					

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SS Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	Komposit dari Sub Indikator sebagai berikut: 1. Tingkat keandalan sumber daya konstruksi 2. ...Sub IK5 dari unsur lainnya	• Sub Indikator 1: dihitung dari penjumlahan dari komponen dengan bobot sbb: 1. Tingkat kualitas sumber daya konstruksi (60%) 2. Tingkat kapasitas sumber daya konstruksi (40%)		Internal dan Eksternal
SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat kualitas sumber daya konstruksi	Indikator: komposit dari Sub Indikator sebagai berikut: 1. Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi 2. Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi 3. Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi	• Indikator dihitung dari penjumlahan dari sub indikator kontributor dengan bobot yang sama rata sbb: 1. Tingkat tertib penyelenggaraan jasa konstruksi komposit dari ISK 1, ISK 2, dan ISK 3. 2. Tingkat dukungan rantai pasok konstruksi dihitung dari ISK 4.		Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			3. Tingkat kinerja kelembagaan jasa konstruksi dihitung dari ISK 3.		
SK 1 Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Tingkat penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi	Indikator survei penilaian terhadap pencapaian kinerja kegiatan	Indikator ini merupakan nilai rata-rata penerapan NSPK penyelenggaraan jasa konstruksi yang dihitung dari: Jumlah total nilai proyek dibandingkan dengan jumlah proyek yang disampling (%).		Internal
SK 2 Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa	Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa	Indikator komposit dari Sub Indikator sbb: 1. Persentase tender/seleksi tepat waktu 2. Persentase sanggah/sanggah banding tidak benar	Indikator dihitung dari penjumlahan dari sub indikator kontributor dengan bobot yang sama rata sbb: • Sub Indikator 1 dihitung dari: Total Paket dikurangi Total Paket Terisambat dibagi Total Paket (%).		Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		3. Persentase pengaduan tidak benar 4. Persentase penetapan pemenang yang ditolak PPK dan terbukti tidak benar 5. Tingkat kematangan kelembagaan UKPBJ 6. Persentase ketersediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di PUPR	• Sub Indikator 2 dihitung dari: Total Sanggah dan Sanggah Banding dikurangi Total Sanggah dan Sanggah Banding Benar dibagi Total Sanggah dan Sanggah Banding (%). • Sub Indikator 3 dihitung dari: Total Pengaduan dikurangi Total Pengaduan Benar dibagi Total Pengaduan (%). • Sub Indikator 4 dihitung dari: Total Penetapan Pemenang yang Ditolak PPK dikurangi Total Penetapan Pemenang yang Ditolak PPK dan Terbukti Benar dibagi Total Penetapan Pemenang yang Ditolak PPK (%). • Sub Indikator 5 dihitung dari: Jumlah Variabel yang Dipenuhi untuk		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			Mencapai Tingkat Kematangan yang Ditetapkan dibagi Total Variabel yang Harus Dipenuhi untuk Mencapai Tingkat Kematangan yang Ditetapkan (%).		
SK 3	Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja konstruksi (SMKK)	Persentase proyek konstruksi tanpa kecelakaan konstruksi	Indikator survei penilaian terhadap pencapaian kinerja kegiatan (persentase)	Indikator dihitung dari: jumlah proyek strategis tanpa kecelakaan konstruksi dibagi jumlah proyek strategis (%).	Internal dan Eksternal
SK 4	Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi	1. Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	Indikator 1: Indikator survei penilaian terhadap pencapaian	• Indikator 1 dihitung dari: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat dibagi	Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	2. Persentase tingkat dukungan pelatihan/uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi	kinerja kegiatan (persentase) Indikator 2: Komposit dari Sub Indikator sbb: 1. Peningkatan kecukupan dan kesesuaian SKKNI bidang konstruksi 2. Peningkatan kecukupan dan kesesuaian materi/modul bidang konstruksi 3. Peningkatan kecukupan asesor kompetensi konstruksi 4. Peningkatan kecukupan instruktur bidang konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi (%). • Indikator 2 dihitung dari penjumlahan dari sub indikator kontributor dengan bobot yang sama rata sbb: 1. Sub Indikator 1 dihitung dari: Jumlah SKKNI Bidang Konstruksi yang Terbarukan dibagi Jumlah Kebutuhan SKKNI Bidang Konstruksi (%). 2. Sub Indikator 2 dihitung dari: Jumlah Modul Bidang Konstruksi yang Terbarukan dibagi Jumlah Kebutuhan Modul Bidang Konstruksi (%). 3. Sub Indikator 3 dihitung dari: Jumlah Asesor Bidang Konstruksi dibagi		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			Jumlah Kebutuhan Asesor Bidang Konstruksi (%). 4. Sub Indikator 4 dihitung dari: Jumlah Instruktur Bidang Konstruksi dibagi Jumlah Kebutuhan Instruksi Bidang Konstruksi (%).		
SK 5	Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan material, peralatan, dan teknologi konstruksi	1. Tingkat kinerja lembaga pemerintah dan masyarakat bidang jasa konstruksi 2. Persentase persan jabatan fungsional Pembina Jasa Konstruksi 3. Persentase ketersediaan data dan informasi supply-demand MPK, badan	Indikator 1: Komposit dari Sub Indikator sbb: 1. Persentase OPD terbentuk dan operasional 2. Persentase Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi • Indikator 1 dihitung dari penjumlahan dari sub indikator kontributor dengan bobot yang sama rata sbb (50%): ○ Sub Indikator 1 dihitung dari: Jumlah OPD terbentuk dan operasional dibagi Jumlah OPD di Tahun Berjalan (%) ○ Sub Indikator 2 dihitung dari: Jumlah Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi dan Asosiasi terkait Rantai Pasok		Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	usaha jasa konstruksi, dan TKDN	3. Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI 4. Persentase kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Indikator 2: Indikator survei penilaian terhadap pencapaian kinerja kegiatan (persentase) Indikator 3: Indikator survei penilaian terhadap pencapaian kinerja kegiatan (persentase)	Konstruksi yang terakreditasi dibagi Jumlah Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi di Tahun Berjalan (%) ○ Sub Indikator 3 dihitung dari Jumlah Penyedia Jasa yang berkinerja baik dibagi Jumlah Penyedia Jasa di tahun berjalan (%) ○ Sub Indikator 4 dihitung dari Persentase asosiasi yang terakreditasi ditambah Persentase BUJK dan TKK terintegrasi ditambah Persentase Penyetaraan BUJK dan TKA ditambah Persentase LSP dan		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			LSBU Terlisensi dibagi 4. (%) • Indikator 2 dihitung dari: Jumlah Jabatan Fungsional yang terlibat dalam kegiatan pembinaan jasa konstruksi dibagi Jumlah Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang terdata di tahun berjalan (%) (25%) • Indikator 3 dihitung dari realisasi data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN dibagi Target data dan informasi supply-demand MPK, badan usaha jasa konstruksi, dan TKDN yang harus tersedia (%) (25%)		
SS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian	(Mendukung Indikator Sasaran Strategis Kesekretariatan Kementerian PUPK)		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	PUPR				
SP Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	(Mendukung Indikator Sasaran Program Kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SK 6 Peningkatan layanan dukungan manajemen eselon I, informasi jasa konstruksi dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Setditjen)	1. Tingkat layanan dukungan manajemen Eselon I dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 2. Tingkat ketersediaan informasi jasa konstruksi	Indikator 1: Indikator survei penilaian terhadap pencapaian kinerja kegiatan (persentase) Indikator 2: Komposit dari Sub Indikator sbb: 1. Persentase ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi 2. Persentase ketersediaan informasi rantai pasok (SDM, MPK,	Indikator 1: dihitung melalui survei persepsi kepada internal organisasi untuk mengetahui tingkat layanan yang melingkupi 3 sub indikator kontributor dengan bobot sama rata sbb: 1. Sub Indikator 1 dihitung dari Tingkat layanan perencanaan, program, dan keuangan. 2. Sub Indikator 2 dihitung dari Tingkat layanan administrasi		Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		teknologi, dan TKDN) jasa konstruksi 3. Persentase ketersediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi 4. Persentase ketersediaan informasi pembinaan jasa konstruksi 5. Tingkat layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi	kepegawaian dan umum. 3. Sub Indikator 3 dihitung dari Tingkat layanan hukum, informasi jasa konstruksi, dan komunikasi publik. Indikator 2: dari penjumlahan dari sub indikator kontributor dengan bobot yang sama rata sbb: 1. Sub Indikator 1 dihitung dari: Realisasi Informasi Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi dibagi Target Informasi Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi yang Harus Tersedia (%). 2. Sub Indikator 2 dihitung dari: Realisasi Informasi Rantai Pasok (SDM,		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			MPK, teknologi, dan TKDN) yang Tersedia dibagi Target Informasi Rantai Pasok (SDM, MPK, teknologi, dan TKDN) yang Harus Tersedia (%). 3. Sub Indikator 3 dihitung dari: Realisasi Informasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dibagi Target Informasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Harus Tersedia (%). 4. Sub Indikator 4 dihitung dari: Realisasi Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi dibagi Target Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi yang Harus Tersedia (%).		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			5. Sub Indikator 5 dihitung dari Survei Persepsi kepada Stakeholder yang Menggunakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (%).		

8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI					
SS Meningkatkan pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional Bidang Konstruksi yang kompeten dan profesional	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja (BPSDM)		Indikator Kinerja SS Kontribusi kinerja indikator DJBK: Indikator BPSDM = 50% : 50%		Internal
SP Meningkatnya SDM Vokasional Bidang PUPR Yang Bersertifikat	Tingkat Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan Vokasi Bidang PUPR	Komposit dari Indikator-Indikator: 1. Persentase nilai mahasiswa (IPK > 3) 2. Persentase Jumlah Lulusan Program Studi Vokasional	Rerata dari seluruh indikator: 1. Persentase nilai mahasiswa (IPK > 3) 2. Persentase Jumlah Lulusan Program Studi Vokasional Indikator Kinerja SP Kontribusi kinerja indikator DJBK: Indikator BPSDM = 50% : 50%	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal BPSDM
SK Meningkatnya mutu kuantitas dan kualitas SDM pendidikan vokasi	Jumlah peserta didik dan kualitas SDM pendidikan vokasi	Komposit dari Indikator-Indikator:	Menghitung total penyelenggaraan pendidikan vokasi:	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
bidang PUPR yang kompeten (Politeknik Pekerjaan Umum)	bidang PUPR yang kompeten	1. Jumlah mahasiswa program studi vokasional 2. Jumlah mahasiswa tersertifikasi kompetensi	1. Jumlah mahasiswa program studi vokasional 2. Jumlah mahasiswa tersertifikasi kompetensi		
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
SS 5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Persentase ASN kompeten melalui pendidikan & pelatihan 2. Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan 3. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai 4. Tingkat kepuasan pengguna layanan (pasca pelatihan)	Masing-masing indikator diberi bobot sbb: 1. Persentase ASN kompeten melalui pendidikan & pelatihan (bobot : 45) 2. Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan (bobot : 15) 3. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai (bobot : 15) 4. Tingkat kepuasan pengguna layanan	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal BPSDM

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				(pasca pelatihan) (bobot : 25) Variabel perhitungan akan dikalikan dengan bobot masing-masing indikator, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai indeks.		
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Persentase ASN kompeten melalui pendidikan & pelatihan 2. Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan 3. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai 4. Tingkat kepuasan pengguna layanan (pasca pelatihan)	Masing-masing indikator diberi bobot sbb: 1. Persentase ASN kompeten melalui pendidikan & pelatihan (bobot : 45) 2. Persentase Pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan (bobot : 15) 3. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai (bobot : 15) 4. Tingkat kepuasan pengguna layanan (pasca pelatihan) (bobot : 25)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal BPSDM

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				4. Tingkat kepuasan pengguna layanan (pasca pelatihan) (bobot : 25) Variabel perhitungan akan dikalikan dengan bobot masing-masing indikator, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai indeks.		
SK-1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Penilaian Kompetensi, Pemetaan Karir, Manajemen Kinerja, dan Kepatuhan Internal (Pusat Pengembangan Talenta)	Jumlah ASN yang Dikembangkan Talentanya	Non Komposit	Jumlah ASN yang: 1. Dilakukan Asesmen; Data assessment berlaku selama 3 tahun, sehingga ada pengulangan untuk ASN yang masih menduduki posisi yg sama 2. Jumlah orang yang dipetakan karirnya; Asumsi bahwa yang menduduki kotak 9	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal BPSDM

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				dalam matriks talenta ada 20% dari jumlah Pegawai 3. Jumlah penilaian kinerja; Seluruh ASN harus dipastikan Menyusun dan dinilai kinerjanya. Jumlah 22.086 merupakan prediksi keluar masuk pegawai 58 sehingga apabila untuk melihat jumlah ASN yang dikembangkan talentanya adalah mengacu pada jumlah ASN yang dipantau kinerjanya		
SK-2	Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur Bidang PUPR	Jumlah ASN Bidang PUPR yang dikembangkan kompetensinya	Non Komposit	Jumlah peserta pendidikan, pelatihan, dan pengembangan	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal BPSDM

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				kompetensi setiap tahun (orang)		
SS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Strategis Kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	(Mendukung Indikator Sasaran Program Kesekretariatan Kementerian PUPR)			
SK-1	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pengembangan SDM Aparatur PUPR (Sekretariat Badan)	1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembentukan Produk Hukum 2. Tingkat Layanan	Merupakan indikator komposit/ gabungan dari indikator-indikator sebagai berikut: 1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan	Indikator Kinerja Kegiatan dihitung dari penjumlahan dari indikator-indikator sbb: Indikator 1 (15%): dihitung dari penjumlahan: a. Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal BPSDM

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai 4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran 5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran 6. Nilai SAKIP Unit Organisasi	2. Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum 3. Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai 4. Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran 5. Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran 6. Nilai SAKIP Unit Organisasi	Dinas/Jumlah Seluruh Unit Kerja b. Persentase Pembinaan Kearsipan = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan/Jumlah Seluruh Unit Kerja c. Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) = Jumlah Usulan Penghapusan BMN yang telah diselesaikan/ Total Usulan Penghapusan BMN. d. Persentase terselegramnya Administrasi Korespondensi = Jumlah Koresponden yang Diselesaikan/Jumlah		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				Seluruh Koresponden Indikator 2 (15%): Jumlah produk hukum yang diterbitkan dibagi dengan jumlah produk hukum yang seharusnya diterbitkan (dalam proleg Kemen PUPR) dikali 100%. Indikator 3 (15%): Nilai survey kepada Pegawai terkait ketepatan perencanaan pegawai, transparansi rekrutmen, ketepatan layanan administrasi Kepegawaian. Indikator 4 (20%): Dihitung berdasarkan nilai 12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			Kementerian Keuangan. Indikator 5 (15%): Mengacu PMK No. 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara/Lembaga Indikator 6 (20%): Penilaian SAKIP Unor oleh tim evaluator Ijen		

9. Inspektorat Jenderal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
88.5 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur		Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Internal dan survey
SP Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP: Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Tingkat kapabilitas Ijen (level Internal Audit Capability Model /IACM); (25%) 2. Tingkat kualitas pengawasan kinerja dan keuangan (50%) 3. Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR (25%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Tingkat kapabilitas Ijen (level Internal Audit Capability Model /IACM); 2. Rerata Tingkat kualitas pengawasan Inspektorat 1-6 (95%) dan Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan (5%) 3. Persentase Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR	(1) Non Kumulatif, dihitung setiap tahun (2) Non Kumulatif, dihitung setiap tahun untuk Tingkat kualitas pengawasan Inspektorat 1-6 dan kumulatif untuk Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan dibandingkan dengan target 5 tahun;	(1) Internal / Eksternal (2) Internal (3) Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				(3) Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	
SK-1.1 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	Persentase Tingkat Kualitas Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	Komposit dari Indikator-indikator sebagai berikut: (1) Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I (25%); (2) Persentase pengawasan di Inspektorat I (25%); (3) Tingkat penanganan pengaduan masyarakat (25%); (4) Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan	(1) Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I; (2) Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT di Inspektorat I (3) Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap pengaduan yang masuk di Inspektorat I; (4) Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (eksternal dan internal)	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Internal Data Internal Data Internal Data Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM /SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			Inspektorat I (15%); (5) Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I (10%); (5.1) Kesesuaian penilaian evaluasi ltjen (internal assessment) dengan hasil evaluasi BPKP (quality Assurance) apabila tidak dilaksanakan diambil nilai tahun sebelumnya (40%); (5.2) Hasil Penilaian Evaluasi/ Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina (30%); (5.3) Persentase penerapan Manajemen Resiko (30%)	Inspektorat I yang ditindaklanjuti; (5) Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I; (5.1) Kesesuaian penilaian evaluasi ltjen (internal assessment) dengan hasil evaluasi BPKP (quality Assurance) apabila tidak dilaksanakan diambil nilai tahun sebelumnya; (5.2) Hasil Penilaian Evaluasi/ Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina; (5.3) Persentase penerapan Manajemen Resiko pada masing-masing Unit Organisasi	*Non kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM /SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SK-1.2	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	Komposit dari Indikator-Indikator sebagai berikut:	(1) Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II;	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Internal
			(1) Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I (25%);	(2) Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT di Inspektorat II	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Internal
			(2) Persentase pengawasan di Inspektorat I (25%);	(3) Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap pengaduan yang masuk di Inspektorat II;	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Internal
			(3) Tingkat penanganan pengaduan masyarakat (25%);	(4) Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (eksternal dan internal) Inspektorat II yang ditindaklanjuti;	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Internal
			(4) Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I (15%);	(5) Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I;	*Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Internal dan Eksternal
			(5) Hasil Penilaian SPIP terhadap	(5.1) Kesesuaian penilaian evaluasi		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM /SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			Unit Eselon I (10%); (5.1) Kesesuaian penilaian evaluasi ltjen (internal assessment) dengan hasil evaluasi BPKP (quality Assurance) apabila tidak dilaksanakan diambil nilai tahun sebelumnya (40%); (5.2) Hasil Penilaian Evaluasi/ Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina (30%); (5.3) Persentase penerapan Manajemen Resiko (30%)	ltjen (internal assessment) dengan hasil evaluasi BPKP (quality Assurance) apabila tidak dilaksanakan diambil nilai tahun sebelumnya; (5.2) Hasil Penilaian Evaluasi/ Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina; (5.3) Persentase penerapan Manajemen Resiko pada masing-masing Unit Organisasi		
SK-1.3	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah	Komposit dari Indikator-Indikator sebagai berikut:	(1) Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III;	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Internal
			(1) Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I (25%);	(2) Persentase tingkat kepatuhan terhadap	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM /SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	Pengawasan Inspektorat III	(2) Persentase pengawasan di Inspektorat I (25%); (3) Tingkat penanganan pengaduan masyarakat (25%); (4) Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I (15%); (5) Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I (10%); (5.1) <i>Kesesuaian penilaian evaluasi ltjen (internal assessment) dengan hasil evaluasi BPKP (quality Assurance) (40%)</i> (5.2) <i>Hasil Penilaian Evaluasi/ Maturitas SPIP Unit</i>	pelaksanaan PKPT di Inspektorat III (3) Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap pengaduan yang masuk di Inspektorat III; (4) Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (eksternal dan internal) Inspektorat III yang ditindaklanjuti; (5) Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I; (5.1) Kesesuaian penilaian evaluasi ltjen (internal assessment) dengan hasil	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Non Kumulatif, dihitung setiap tahun *Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Internal Data Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM /SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		<i>Organisasi yang dibina (30%)</i> (5.3) <i>Persentase penerapan Manajemen Resiko (30%)</i>	evaluasi BPKP (quality Assurance) apabila tidak dilaksanakan diambil nilai tahun sebelumnya) (5.2) Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina (5.3) Persentase penerapan Manajemen Resiko pada masing-masing Unit		
SK-1.4	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	Komposit dari Indikator-indikator sebagai berikut: (1) Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I (25%);	(1) Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV; (2) Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT di Inspektorat IV;	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Data Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM /SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		(2) Persentase pengawasan di Inspektorat I (25%); (3) Tingkat penanganan pengaduan masyarakat (25%); (4) Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I (15%); (5) Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I (10%); (5.1) <i>Kesesuaian penilaian evaluasi ltjen (internal assessment) dengan hasil evaluasi BPKP (quality Assurance) (40%)</i> (5.2) <i>Hasil Penilaian Evaluasi/ Maturitas SPIP Unit</i>	(3) Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap pengaduan yang masuk di Inspektorat IV; (4) Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (eksternal dan internal) Inspektorat IV yang ditindaklanjuti; (5) Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I; (5.1) Kesesuaian penilaian evaluasi ltjen (internal assessment) dengan hasil evaluasi BPKP (quality Assurance) apabila tidak	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Non Kumulatif, dihitung setiap tahun *Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Internal Data Internal Data Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM /SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	
		Organisasi yang dibina (30%) (5.3) Persentase penerapan Manajemen Resiko (30%)	dilaksanakan diambil nilai tahun sebelumnya) (5.2) Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina (5.3) Persentase penerapan Manajemen Resiko pada masing-masing Unit			
SK-1.5	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	Komposit dari Indikator-indikator sebagai berikut: (1) Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V (25%); (2) Persentase pengawasan di Inspektorat V (25%);	(1) Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V;	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Internal
				(2) Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT di Inspektorat V	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Internal
				(3) Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti terhadap	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM /SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		(3) Tingkat penanganan pengaduan masyarakat (25%); (4) Persentase tindak lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V (15%); (5) Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I (10%); (5.1) Kesesuaian penilaian evaluasi ltjen (internal assessment) dengan hasil evaluasi BPKP (quality Assurance) (40%) (5.2) Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina (30%)	pengaduan yang masuk di Inspektorat V; (4) Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (eksternal dan internal) Inspektorat V yang ditindaklanjuti; (5) Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I; (5.1) Kesesuaian penilaian evaluasi ltjen (internal assessment) dengan hasil evaluasi BPKP (quality Assurance) apabila tidak dilaksanakan diambil nilai tahun sebelumnya) (5.2) Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Internal Data Internal dan Eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM /SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			(5.3) Persentase penerapan Manajemen Resiko (30%)	Organisasi yang dibina (5.3) Persentase penerapan Manajemen Resiko pada masing-masing Unit		
SK-1.6	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja Inspektorat VI	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	Komposit dari Indikator-indikator sebagai berikut: (1) Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses Audit Inspektorat VI (25%); (2) Tingkat pelaksanaan Audit Investigatif (25%); (3) Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat VI yang	(1) Skor Hasil Peer Review Internal proses Audit terhadap Inspektorat VI;	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Internal
				(2) Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT di Inspektorat VI;	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Internal
				(3) Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (internal) Inspektorat VI yang ditindaklanjuti;	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	
		(4) ditindaklanjuti (15%); Pengembangan Unit Kerja Menuju WBK yang dilakukan penilaian mandiri untuk memperoleh predikat menuju WBK	(4) Pengembangan Unit Kerja Menuju WBK yang dilakukan penilaian mandiri untuk memperoleh predikat menuju WBK	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Internal	
		(5) Rekomendasi Pengembangan Pengawasan (10%); (6) Survey Penilaian Integritas (15%)	(5) Rekomendasi Pengembangan Pengawasan merupakan komposit dari: 1. Penerapan Teknologi Informasi 2. Prosentase penerapan Manajemen Risiko (6) Survey Penilaian Integritas	*Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Internal	
				Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Eksternal	
SK-1.7	Tersedianya dokumen perencanaan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan	(1) Tersusunnya dokumen perencanaan	(1) Dokumen Rencana Pengawasan Tahunan yang disusun;	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM /SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
	dan regulasi pengawasan	regulasi pengawasan	(2) Jumlah regulasi pengawasan (Peraturan Menteri dan Peraturan Lainnya) yang disusun	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Data Internal
SS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Strategis Kesekretariatan Kementerian PUPR)		
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	(Mendukung Indikator Sasaran Program Kesekretariatan Kementerian PUPR)		
SK-2	Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	(1) Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan dihitung dari penjumlahan: (1) Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas/Jumlah Seluruh Unit Kerja	Rata-Rata pencapaian persen setiap tahun	Data survey dan Data Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM /SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		Ketatausahaan; (10%)	(2) Persentase Pembinaan Kearsipan = Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan/Jumlah Seluruh Unit Kerja (3) Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) = Jumlah Usulan Penghapusan BMN yang telah diselesaikan/ Total Usulan Penghapusan BMN. (4) Persentase terselenggaranya Administrasi Korespondensi – Jumlah Koresponden yang Diselesaikan/Jumlah Seluruh Koresponden		
		(2) Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan	Rerata: (2.1) Tingkat kualitas SDM Inspektorat	Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai; (15%)	Jenderal (persentase pemenuhan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan); (2.2) Nilai survey kepada Pegawai terkait ketepatan perencanaan pegawai, dan ketepatan layanan administrasi Kepegawaian.	Non Kumulatif	Eksternal
		(3) Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran;(20%)	Berdasarkan Aplikasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Eksternal
		(4) Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)	Berdasarkan Aplikasi SMART IJA;	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Eksternal
		(5) Nilai SAKIP Itjen Kementerian PUPR (15%)	Nilai evaluasi atas implementasi SAKIP Itjen	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal
		(6) Nilai SPIP Itjen Kementerian PUPR (20%)	Nilai evaluasi/maturitas SPIP Itjen Kementerian PUPR	Non Kumulatif, dihitung setiap tahun	Internal / Eksternal

10. Sekretariat Jenderal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
SS Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR Dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR (%)	Tingkat Kualitas Tata Kelola	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: - Indikator 1: Tingkat kepuasan layanan administrasi Kementerian PUPR (45%) - Indikator 2: Sistem informasi manajemen yang terintegrasi (40%) - Indikator 3: Tingkat Kesehatan organisasi (bobot total 15%) terdiri atas: - Indikator 3a: Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR (5%) - Indikator 3b: Tingkat Kualitas Tata Kelola Keuangan (5%) - Indikator 3c: Nilai Evaluasi SAKIP Kementerian PUPR (5%)	Take Last	Internal dan Eksternal
SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR (%)	1. Tingkat layanan pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN dan Umum 2. Tingkat Layanan Pengelolaan	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1: dari indikator SK-1 (25%) Indikator 2: dari indikator SK-2 (12,5%)		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		Kelengkapan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai 3. Tingkat layanan pembentukan produk hukum dan advokasi hukum 4. Tingkat kualitas-fasilitasi dalam perencanaan, pembitaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan infrastruktur daerah 5. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	Indikator 3: dari indikator SK-3 (12,5%) Indikator 4: dari indikator SK-4 (12,5%) Indikator 5: dari indikator SK-5 (12,5%) Indikator 6: dari indikator SK-6 (12,5%) Indikator 7: dari indikator SK-7 (12,5%)		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			6. Tingkat layanan digital 7. Tingkat layanan kajian dan pemantauan kebijakan			
SK-I	Meningkatnya layanan pengelolaan, perencanaan, keuangan, BMN, dan Umum	Tingkat layanan pengelolaan perencanaan, keuangan, BMN dan Umum. (%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Setjen. (%) 2. Tingkat kualitas pemantauan dan evaluasi yang lengkap, akurat dan terkini (%) 3. Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKAKL (%) 4. Tingkat layanan kerja sama luar	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: • Indikator 1: Penilaian SAKIP Setjen oleh tim evaluator Ijen (20%) • Indikator 2: Data pelaporan pemantauan dan evaluasi program yang lengkap, akurat, dan terkini (20%) • Indikator 3: Mengacu PMK No. 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara/Lembaga. (30%) • Indikator 4:	non kumulatif, dihitung peningkatan setiap tahun	Data internal dan eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			negeri yang efektif (%)	Jumlah layanan kerja sama luar negeri yang berjalan dibagi dengan layanan kerja sama luar negeri yang direncanakan. (30%)		
			Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Tingkat Kualitas Layanan Perbendaharaan dan PNEP. (%) 2. Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian. (%) 3. Tingkat Kualitas Laporan Keuangan Kementerian. (%) 4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI. (%) 5. Tingkat Kualitas Laporan	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: • Indikator 1 (20%): 1. Persentase keberhasilan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan (50%) 2. Jumlah laporan penyusunan Target dan Pagu PNEP yg tepat waktu (30%) 3. Penilaian Kinerja BLU berdasarkan Perdirjen PB Nomor 33 Tahun 2014 (20%). • Indikator 2: Dihitung Berdasarkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari Kementerian Keuangan (30%) • Indikator 3: Dihitung berdasarkan (25%)	non kumulatif, dihitung peningkatan setiap tahun	Data internal dan eksternal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			Penyelenggaraan SPIP	1. Kesesuaian dengan SAP berdasarkan hasil pemantauan E-Rekon LK Unaudited (40%) 2. Kecukupan pengungkapan dalam LK berdasarkan hasil telaah LK (40%) 3. Efektifitas SPI - Nilai PIPK Kementerian (20%) • Indikator 4: Dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI (15%) • Indikator 5: Dihitung berdasarkan kriteria (10%): - Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unor yang Tepat Waktu (40%) - Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP yang Lengkap (40%) - Nilai Maturitas SPIP Kementerian (20%)		
			Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:	non kumulatif, dihitung	data internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		1. Tingkat Efektifitas Pengelolaan BMN 2. Tingkat Efektifitas Pemanfaatan dan Penertiban BMN	- Indikator 1: dihitung dari penjumlahan: a. Penatausahaan Inventarisasi yaitu Jumlah BMN yang sudah diinventarisasi/total jumlah aset yang harus diinventarisasi. b. Penggunaan i. $PSP = \frac{\text{Jumlah BMN yang sudah di PSP}}{\text{total jumlah aset yang harus di PSP}}$ ii. $\text{Alih Status} = \frac{\text{Jumlah BMN yang sudah di alih status}}{\text{total jumlah aset yang harus di alih status}}$ c. Pemindahtanganan i. $\text{Hilbah} = \frac{\text{Jumlah BMN yg di proses}}{\text{total jumlah usulan}}$ ii. $\text{Penjualan} = \frac{\text{Jumlah BMN yang disetujui atau ditolak untuk dijual}}{\text{total jumlah usulan yang telah diproses ke pengelola barang dan atau mendapat persetujuan penjualan pengguna barang.}}$ iii. $\text{Tukar menukar} = \frac{\text{Jumlah BMN yang dilakukan tukar menukar/}}$	peningkatan setiap tahun	

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			(dibagi) total jumlah usulan yang telah diproses ke Menteri / Sekjen selaku pengguna barang d. Penghapusan= Jumlah BMN yang di proses / total jumlah usulan. (Bobot Total: 50%) - Indikator 2: dihitung dari penjumlahan: a. Pemanfaatan BMN yaitu Jumlah usulan Pemanfaatan BMN (KSP/ KPB/ KSP/ BSGBS/ Sewa / Pinjam Pakai) yang telah disetujui dibagi dengan yang telah disampaikanke pengelola barang dan / atau mendapat persetujuan dari pengguna barang. b. Penertiban BMN yaitu Presentase Penganganan pengamanan dan penertiban BMN yang direncanakan. (Bobot Total: 50%)		
		Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: Indikator 1: dihitung dari penjumlahan:	non kumulatif, dihitung peningkatan setiap tahun	data internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
		1. Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, dan Penatausahaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Ketatausahaan 2. Tingkat Kualitas Pengelolaan urusan kesehatan, fasilitasi penyelenggaraan urusan perkantoran, dan angkutan pegawai. 3. Tingkat Kualitas pemeliharaan dan pengelolaan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan, serta sarana dan prasarana lingkungan 4. Tingkat Kualitas pembinaan	a. $\text{Persentase Pembinaan Tata Naskah Dinas} = \frac{\text{Jumlah Unit Kerja yang Terbina Tata Naskah Dinas}}{\text{Jumlah Seluruh Unit Kerja}}$ b. $\text{Persentase Pembinaan Kearsipan} = \frac{\text{Jumlah Unit Kerja yang Terbina Kearsipan}}{\text{Jumlah Seluruh Unit Kerja}}$ c. $\text{Persentase Penyelesaian Penghapusan Barang Milik Negara (BMN)} = \frac{\text{Jumlah Usulan Penghapusan BMN yang telah diselesaikan}}{\text{Total Usulan Penghapusan BMN.}}$ d. $\text{Persentase terselesenggaranya Administrasi Korespondensi} = \frac{\text{Jumlah Koresponden yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Seluruh Koresponden}}$ (Bobot Total: 25%) - Indikator 2: dihitung dari penjumlahan: a. $\text{Persentase Kepuasan Pelayanan Kesehatan} = \frac{\text{Jumlah Seluruh Pegawai yang Terpenuhi Pelayanan Kesehatan}}{\text{Jumlah Seluruh}}$		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			keamanan dan ketertiban lingkungan serta protokoler pimpinan Kementerian	Pegawai yang Mendaftar Pelayanan Kesehatan b. Persentase Kegiatan Acara Kementerian yang Terlayani = Jumlah Acara Kementerian yang Terlayani/ Jumlah Seluruh Acara Kementerian. (Bobot Total: 25%) • Indikator 3: dihitung dari penjumlahan: a. Persentase Renovasi dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pusat, Rumah Jabatan (Irtjen dan Kabalitheng) = Jumlah Kegiatan Realisasi M ³ Renovasi dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pusat dan Rumah Jabatan / Target M ³ Renovasi dan Rehabilitasi Gedung Kantor Pusat dan Rumah Jabatan b. Persentase Terpeliharanya Chiller, STP, Mechanical Electrical and Plumbing, dan Jaringan Kantor = Jumlah Realisasi Pemeliharaan Chiller, STP, Mechanical Electrical and Plumbing, dan Jaringan		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				Kantor/ Jumlah Pemeliharaan Chiller, STP, Mechanical Electrical and Plumbing, dan Jaringan Kantor. c. Persentase Terpeliharanya Taman, Halaman, dan Sarana Prasarana Bangunan Gedung Kantor = Jumlah Realisasi Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Sarana Prasarana Bangunan Gedung Kantor/ Jumlah Pemeliharaan Taman, Halaman, dan Sarana Prasarana Bangunan Gedung Kantor. (Bobot Total: 25%) • Indikator 4 dihitung dari: a. Persentase pelayanan pengaduan ketidakamanan di lingkungan Kementerian PUPR = jumlah pengaduan ketidakamanan di lingkungan Kementerian PUPR yang Tertangani/ jumlah pengaduan ketidakamanan di lingkungan Kementerian PUPR		

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				b. Persentase Terselenggaranya Pengaturan Acara dan Kegiatan Pimpinan dengan Baik dan Lancar Sesuai Aturan = Jumlah Acara Harian yang Dihadiri/Jumlah Seluruh Acara Harian. (Bobot Total: 25%)		
SK-2	Meningkatnya pengelolaan dan pengadministrasian pegawai Kementerian PUPR	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	Komposit dari Indikator-indikator sebagai berikut: 1. Kualitas Layanan Manajemen SDM 2. Tingkat Kesesuaian Kelembagaan	Indikator 1: a. Survey Kepada Pegawai terkait ketepatan perencanaan pegawai, transparansi rekrutmen, ketepatan layanan administrasi Kepegawaian (25%) b. Survey kepada pegawai di lingkungan Kementerian PUPR terkait ketepatan Kualitas manajemen kepegawaian (25%) c. Survey kepada Pejabat Fungsional Bidang PUPR terkait tingkat Kualitas pengelolaan Jabatan Fungsional (25%) Indikator 2:	non kumulatif, dihitung peningkatan setiap tahun	Data Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				a. Survey kepada pegawai di lingkungan PUPR untuk menilai efektivitas organisasi dan efisiensi pelaksanaan tugas fungsi (25%)		
SK-3	Meningkatnya Fasilitas Produk Hukum dan Advokasi Hukum yang progresif	Tingkat layanan pembentukan produk hukum dan advokasi hukum. (%)	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum. (%) 2. Tingkat efektivitas penyebarluasan produk hukum. (%) 3. Tingkat efektivitas advokasi hukum. (%) 4. Tingkat Kepatuhan Internal di Lingkungan Setjen 5. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian 6. Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Materi	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: ▪ Indikator 1: jumlah produk hukum yang diterbitkan dibagi dengan jumlah produk hukum yang seharusnya diterbitkan (dalam proleg Kemen PUPR) dikali 100% (30%) ▪ Indikator 2: hasil survei persepsi user terhadap kemudahan akses website JDih Kemen PUPR. (20%) ▪ Indikator 3: jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%. (30%) ▪ Indikator 4: Hasil Survei persepsi user terhadap kepatuhan internal di Lingkungan Setjen (10%) ▪ Indikator 5: jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100 % (5%)	non kumulatif, dihitung peningkatan setiap tahun	Data Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
				▪ Indikator 6: jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100 % (5%)		
SK-4	Meningkatnya kualitas fasilitasi dalam perencanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan infrastruktur daerah	Tingkat kualitas fasilitasi dalam perencanaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan infrastruktur daerah	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Tingkat Kualitas Perencanaan 2. Tingkat Kualitas Pembinaan 3. Tingkat Kualitas Pemantauan dan Evaluasi 4. Tingkat capaian SPM	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: ▪ Indikator 1: Jumlah Usulan Pemda yang Masuk dibagi Jumlah Usulan Pemda Memenuhi Kriteria Penilaian. (30%) ▪ Indikator 2: Jumlah Pemda yang memiliki pemahaman yang baik dibagi jumlah pemda keseluruhan. (30%) ▪ Indikator 3: capaian realisasi output/outcome, serta capaian dampak/manfaat kegiatan yang didanai DAK. (30%) ▪ Indikator 4: Jumlah Pemda yang telah menyelenggarakan SPM dibagi Jumlah Pemda keseluruhan. (10%)	non kumulatif, dihitung peningkatan setiap tahun	Data Internal
SK-5	Meningkatnya penyelenggaraan komunikasi publik	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb:	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb:	non kumulatif, dihitung	Data Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	
yang modern, terpadu dan berorientasi publik	yang modern, terpadu dan berorientasi publik	1.Persepsi/sentimen positif artikel/siaran di media 2.Tingkat kesuksesan penyelenggaraan publikasi 3.Tingkat kepuasan pengguna bahan informasi pimpinan 4.Tingkat kepuasan pemohon informasi publik	• Indikator 1: Persentase persepsi/ sentimen positif artikel/siaran dari volume pemberitaan Kementerian PUPR di media (35%) • Indikator 2: Tingkat kehadiran peserta, Stakeholder feedback dan/atau persepsi/ sentimen positif. (35%) • Indikator 3: Persepsi/ sentimen positif stakeholder Stakeholder feedback (15%) • Indikator 4: Persepsi/ sentimen positif stakeholder dan/atau Stakeholder feedback. (15%)	peningkatan setiap tahun	dan eksternal	
SK-6	Digital Melayani	Tingkat layanan digital	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1.Menjadi Smart Office. 2.Layanan Handal/Prima (kemudahan dalam pengajuan permohonan layanan, proses cepat, dan layanan	Pejumlahan dari indikator kontributor dibagi pendanaan tahun yang bersangkutan (%) sbb: ▪ Indikator 1: a. Otomatisasi dan Digitalisasi Kegiatan Perkantoran b. Kemudahan dan Kenyamanan Bekerja ▪ Indikator 2: a. Layanan yang Akurat, Cepat, Terkini, Mudah Diakses, Terin-	Kumulatif	Data Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			yang diberikan sesuai permohonan) 3.Manajemen Perubahan /Tata Kelola	tegrasi, dan Berbagi Pakai b. Layanan yang Terukur dan Terpantau (Akuntabilitas Kinerja) c. Penyediaan Teknologi Terkini dan Inovasi d. Penanggulangan dan Tanggap bencana serta analisis manajemen risiko bencana terintegrasi ▪ Indikator 3: Peningkatan SDM		
SK-7	Meningkatnya layanan kajian dan pemantauan kebijakan	Tingkat layanan kajian dan pemantauan kebijakan	Komposit dari Indikator-Indikator Sbb: 1. Tingkat kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Menteri secara profesional dan akuntabel 2. Tingkat pelaksanaan telaahan dan kajian untuk mendukung kebijakan Menteri	Pejumlahan dari indikator kontributor dengan pembobotan (%) sbb: ▪ Indikator 1: Ketepatan waktu dan substansi dalam pelaksanaan kebijakan Menteri terhadap target waktu dan substansi yang diharapkan (Bobot: 25%) ▪ Indikator 2: Jumlah telaahan dan kajian yang dihasilkan terhadap Jumlah telaahan dan kajian yang direncanakan (Bobot: 25%) ▪ Indikator 3: Jumlah agenda prioritas Menteri yang dilaksanakan terhadap agenda	non kumulatif, dihitung peningkatan setiap tahun	Data Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
			3. Tingkat efektivitas penyusunan agenda prioritas Menteri. 4. Tingkat kepuasan dukungan pelaksanaan kebijakan Menteri (substentif program dan kegiatan).	prioritas Menteri yang direkomendasikan (Bobot: 25%) ▪ Indikator 4: Survey terhadap persepsi stakeholder untuk menilai kepuasan dukungan pelaksanaan kebijakan Menteri (substentif program dan kegiatan). (Bobot: 25%)		
SK-8	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal	Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Jenderal	Tingkat layanan kepegawaian, keuangan, BMN dan Umum Unit Kerja	Jumlah laporan terkait kepegawaian, keuangan, BMN dan Umum yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun	Non kumulatif	

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO